



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

Rancangan Akhir
**RENCANA PEMBANGUAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2021-2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 dapat kami selesaikan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 ini disusun sebagai kelanjutan dari dokumen teknokratik yang telah disusun sebelumnya. Di dalam RPJMD ini, telah mengkolaborasikan pendekatan politik, yaitu memasukkan komponen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD ini mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, dan KLHS.

Secara umum, Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 ini disusun dalam 9 (Sembilan) bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III membahas tentang Gambaran Keuangan Daerah, Bab IV membahas Permasalahan dan Isu Strategis Daerah dan Bab V membahas Visi, misi, tujuan dan sasaran, Bab VI membahas Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah, Bab VII membahas Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah, Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Bab IX Penutup.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pijakan dalam tahapan selanjutnya dari proses penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025. Tak lupa kami mohon diberikan kritik dan saran yang membangun dan senantiasa kami terima dengan senang hati demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Maba, 2021
Kepala BP4D Kab. Halmahera Timur

Abdul Halim Djen Kipu, Sp. M.Si
Pembina IV/a
NIP. 197707130 200312 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	1-4
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	1-5
1.5. Sistematika Penulisan.....	1-6

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis Dan Demografi	2-1
2.1.1. Aspek Geografis	2-1
2.1.2. Aspek Demografi	2-37
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-41
2.2.1. Pertumbuhan Pdrb	2-41
2.2.2. Laju Inflasi	2-44
2.2.3. Pdrb Perkapita.....	2-45
2.2.4. Indeks Gini.....	2-46
2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	2-47
2.2.6. Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)	2-47
2.2.7. Tingkat Kemiskinan	2-48
2.2.8. Tingkat Pengangguran	2-51
2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2-55
2.2.10. Indeks Pembangunan Gender	2-59
2.3. Aspek Pelayanan Umum	2-60
2.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2-60
2.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	2-95
2.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan	2-114
2.3.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2-121
2.3.5. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2-122
2.3.6. Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2-124
2.4. Aspek Daya Saing	2-124
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-124

2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	2-126
2.4.3.	Fokus Iklim Investasi	2-131
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	2-132
2.5.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021.....	2-134

BAB 3 GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	3-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan Apbd	3-1
3.1.2.	Neraca Daerah	3-11
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	3-16
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	3-17
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	3-18
3.3.	Kerangka Pendanaan	3-20
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan Dan Belanja	3-20
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	3-23
3.4.	Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020-2025.....	3-24

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1.	Permasalahan Pembangunan	4-1
4.1.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	4-1
4.1.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	4-5
4.1.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	4-9
4.1.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4-12
4.1.5.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	4-12
4.1.6.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	4-14
4.2.	Isu – Isu Strategis.....	4-14
4.2.1.	Isu Strategis Internasional	4-14
4.2.2.	Isu Strategis Nasional.....	4-17
4.2.3.	Isu Strategis Provinsi Maluku Utara	4-21
4.2.4.	Isu Strategis Kabupaten Halmahera Timur	4-26

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1.	Visi	5-1
5.2.	Misi Daerah	5-2

5.3.	Tujuan Dan Sasaran	5-4
5.4.	Konsistensi Hubungan VISI, Misi, Tujuan dan Sasaran	5-22

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.	Strategi Pembangunan 2021 – 2025	6-1
6.1.1.	Strategi Umum	6-1
6.1.2.	Strategi Berdasarkan Tujuan Dan Sasaran	6-4
6.2.	Arah Kebijakan	6-10
6.2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan	6-10
6.2.2.	Arah Kebijakan Kewilayahaan	6-11
6.2.3.	Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Prioritas Pembangunan Ekonomi	6-14
6.3.	Program Pembangunan Daerah 2021-2025	6-30

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1.	Kerangka Pendanaan	7-1
7.2.	Program Perangkat Daerah	7-3

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8-1
---	---	------------

BAB 9 PENUTUP

9.1.	PEDOMAN TRANSISI	9-1
9.2.	KAIDAH PELAKSANAAN	9-1
9.3.	PEDOMAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	9-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Menurut Kecamatan	2-1
Tabel 2.2.	Jumlah Desa di Kabupaten Halmahera Timur	2-2
Tabel 2.3.	Jumlah dan Luas Pulau menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur	2-3
Tabel 2.4.	Jumlah Desa Pesisir di Kabupaten Halmahera Timur	2-6
Tabel 2.5.	Luas Wilayah berdasarkan Ketinggian di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020	2-6
Tabel 2.6.	Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lahan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020	2-8
Tabel 2.7.	Jenis Batuan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020	2-10
Tabel 2.8.	Jenis Tanah Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020	2-11
Tabel 2.9.	Potensi Sumberdaya Mineral, Mineral Industri, Batu bara dan Minyak Bumi di Kabupaten Halmahera Timur	2-13
Tabel 2.10.	DAS Di Kabupaten Halmahera Timur	2-13
Tabel 2.11.	DAS Prioritas Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020	2-14
Tabel 2.12.	Mata Air Potensial Utama Di Kabupaten Halmahera Timur	2-15
Tabel 2.13.	Mata Air Potensial Di Kabupaten Halmahera Timur	2-15
Tabel 2.14.	Nama – Nama Sungai di Kabupaten Halmahera Timur	2-16
Tabel 2.15.	Jumlah Suhu dan Kelembaban Udara di Kabupaten Halmahera Timur menurut Bulan, Tahun 2020	2-17
Tabel 2.16.	Jumlah Suhu dan Kelembaban Udara di Kabupaten Halmahera Timur menurut Bulan, Tahun 2020	2-17
Tabel 2.17.	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Halmahera Timur menurut Bulan, Tahun 2020	2-18
Tabel 2.18.	Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2020	2-18
Tabel 2.19.	Luas Kawasan Lindung Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur	2-19
Tabel 2.20.	Luas Kawasan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur	2-20
Tabel 2.21.	Potensi Bahaya di Kabupaten Halmahera Timur	2-30
Tabel 2.22.	Luas Wilayah Bahaya Banjir dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur	2-31

Tabel 2.23.	Luas Wilayah Bahaya Banjir Bandang dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	2-32
Tabel 2.24.	Luas Wilayah Bahaya Cuaca Ekstrem dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	2-32
Tabel 2.25.	Luas Wilayah Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Serta Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	2-33
Tabel 2.26.	Luas Wilayah Bahaya Gempa Bumi dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	2-34
Tabel 2.27.	Luas Wilayah Bahaya Kekeringan dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	2-34
Tabel 2.28.	Luas Wilayah Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	2-35
Tabel 2.29.	Luas Wilayah Bahaya Tanah Longsor dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	2-36
Tabel 2.30.	Luas Wilayah Bahaya Tanah Longsor dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.....	2-36
Tabel 2.31.	Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Timur Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020.....	2-37
Tabel 2.32.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-38
Tabel 2.33.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.....	2-39
Tabel 2.34.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.....	2-39
Tabel 2.35.	Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.....	2-41
Tabel 2.36.	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur (Jutaan Rupiah).....	2-41
Tabel 2.37.	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2019.....	2-42

Tabel 2.38.	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Halmahera Timur (miliar rupiah), 2016–2019	2-43
Tabel 2.39.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Timur ADHK Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)	2-43
Tabel 2.40.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional, Tahun 2016–2020	2-44
Tabel 2.41.	Inflasi Kota Ternate, Tahun 2016-2020	2-44
Tabel 2.42.	Laju Inflasi Kota Ternate Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	2-45
Tabel 2.43.	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 – 2019 (juta Rupiah)	2-45
Tabel 2.44.	Indeks Gini Halmahera Timur dan Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-46
Tabel 2.45.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019	2-47
Tabel 2.46.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-49
Tabel 2.47.	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020.....	2-49
Tabel 2.48.	Indeks Kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 - 2020.....	2-50
Tabel 2.49.	Indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020	2-51
Tabel 2.50.	Perkembangan Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020.....	2-52
Tabel 2.51.	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020	2-54
Tabel 2.52.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020	2-54
Tabel 2.53.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2020	2-56
Tabel 2.54.	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-61
Tabel 2.55.	Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/Sederajat di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-62
Tabel 2.56.	Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-62

Tabel 2.57.	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-63
Tabel 2.58.	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-64
Tabel 2.59.	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-64
Tabel 2.60.	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-65
Tabel 2.61.	Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/Sederajat di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-66
Tabel 2.62.	Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-66
Tabel 2.63.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-68
Tabel 2.64.	Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-68
Tabel 2.65.	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-69
Tabel 2.66.	Proporsi Murid Kelas yang berhasil menamatkan Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-69
Tabel 2.67.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-70
Tabel 2.68.	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara).....	2-71
Tabel 2.69.	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Halmahera Timur, tahun 2016-2020.....	2-71
Tabel 2.70.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2016-2020	2-79
Tabel 2.71.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2016-2020	2-79
Tabel 2.72.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2016-2020	2-80
Tabel 2.73.	Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2016-2020	2-80
Tabel 2.74.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan berkompetensi kebidanan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-81

Tabel 2.75.	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-81
Tabel 2.76.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-82
Tabel 2.77.	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-82
Tabel 2.78.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-82
Tabel 2.79.	Cakupan Neonatus dgn Komplikasi yang ditangani Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-83
Tabel 2.80.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-83
Tabel 2.81.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-84
Tabel 2.82.	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-84
Tabel 2.83.	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-85
Tabel 2.84.	Kondisi Penyakit Menular Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-85
Tabel 2.85.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan jalan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-86
Tabel 2.86.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-87
Tabel 2.87.	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-88
Tabel 2.88.	Kinerja Penataan Ruang Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-90
Tabel 2.89.	Kinerja Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-93
Tabel 2.90.	Desa/Kelurahan Menurut Upaya Mitigasi/Antisipasi Bencana Alam Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-94
Tabel 2.91.	Kinerja Pembangunan Bidang Sosial di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-94
Tabel 2.92.	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun 2016-2020 di Kabupaten Halmahera Timur.....	2-95

Tabel 2.93.	Keselamatan dan perlindungan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-96
Tabel 2.94.	Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-97
Tabel 2.95.	Rasio Kelulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-97
Tabel 2.96.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-98
Tabel 2.97.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-99
Tabel 2.98.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-100
Tabel 2.99.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-103
Tabel 2.100.	Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-103
Tabel 2.101.	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-104
Tabel 2.102.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-104
Tabel 2.103.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-105
Tabel 2.104.	Persentase Sampah yang Tertangani di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-105
Tabel 2.105.	Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-106
Tabel 2.106.	Representasi Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-106
Tabel 2.107.	Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-107
Tabel 2.108.	Kinerja Bidang Urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-108
Tabel 2.109.	Capaian pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-109
Tabel 2.110.	Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-110

Tabel 2.111. Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-112
Tabel 2.112. Kinerja Pembangunan Statistik dan Persandian di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-112
Tabel 2.113. Kinerja Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-113
Tabel 2.114. Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-114
Tabel 2.115. Kinerja Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020.....	2-115
Tabel 2.116. Persentase Jumlah wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020.....	2-115
Tabel 2.117. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020.....	2-116
Tabel 2.118. Perkembangan Produksi Sub-Sektor Pertanian Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020.....	2-117
Tabel 2.119. Kinerja Pembangunan Energi di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020.....	2-117
Tabel 2.120. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (Juta rupiah).....	2-118
Tabel 2.121. Ekspor Bersih Perdagangan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-119
Tabel 2.122. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-119
Tabel 2.123. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB(Juta rupiah).....	2-120
Tabel 2.124. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.....	2-120
Tabel 2.125. Kinerja Pembangunan Sektor Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.....	2-121
Tabel 2.126. Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-121
Tabel 2.127. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-122
Tabel 2.128. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-123
Tabel 2.129. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-123

Tabel 2.130. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-123
Tabel 2.131. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-124
Tabel 2.132. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-125
Tabel 2.133. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 – 2020.	2-125
Tabel 2.134. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Menurut Kategori di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-127
Tabel 2.135. Perkembangan Jumlah Fasilitas Akomodasi dan Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-127
Tabel 2.136. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Maba Tahun 2020.....	2-129
Tabel 2.137. Layanan SPAM Perkotaan, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.....	2-130
Tabel 2.138. Perkembangan Indeks Demokrasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015– 2019	2-132
Tabel 2.139. Rasio Kelulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-133
Tabel 2.140. Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-133
Tabel 2.141. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021	2-135
Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Halmahera Timur Tahun 2016-2021	3-2
Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-4
Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	3-7
Tabel 3.4. Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-12
Tabel 3.5. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-15
Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-17

Tabel 3.7.	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-18
Tabel 3.8.	Analisis Sumber Penutup Defisit Rill Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....	3-19
Tabel 3.9.	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....	3-19
Tabel 3.10.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-20
Tabel 3.11.	Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-20
Tabel 3.12.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025.....	2-22
Tabel 3.13.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025.....	3-23
Tabel 3.14.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025	3-24
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 1	5-6
Tabel 5.2.	Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 2	5-9
Tabel 5.3.	Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 3	5-13
Tabel 5.4.	Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 4	5-16
Tabel 5.5.	Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 5	5-21
Tabel 5.6.	Matriks Keterkaitan Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	5-22
Tabel 6. 1	Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Tujuan dan Sasaran.....	6-4
Tabel 6. 2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.....	6-8
Tabel 6. 3	Integrasi 22 Program Prioritas ke dalam Program Organisasi Perangkat Daerah	6-25
Tabel 6. 4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Halmahera Timur.....	6-28
Tabel 7. 1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025.....	7-2
Tabel 7. 2	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025.....	7-4

Tabel 8. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Halmahera Timur.....	8-1
Tabel 8. 2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur.....	8-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Timur.....	2-4
Gambar 2.2.	Peta Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	2-5
Gambar 2.3.	Peta Topografi Kabupaten Halmahera Timur.....	2-7
Gambar 2.4.	Peta Kelereng Kabupaten Halmahera Timur.....	2-8
Gambar 2.5.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur	2-10
Gambar 2.6.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur	2-12
Gambar 2.7.	Peta DAS Kabupaten Halmahera Timur.....	2-15
Gambar 2.8.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Halmahera Timur.....	2-19
Gambar 2.9.	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Halmahera Timur	2-22
Gambar 2.10.	Peta Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara.....	2-23
Gambar 2.11.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Halmahera Timur menurut Kecamatan Tahun 2016-2020.....	2-38
Gambar 2.12.	Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.....	2-40
Gambar 2.13.	Perbandingan Laju Inflasi Tahunan Regional Kota Ternate dan Nasional Tahun 2016-2020.....	2-45
Gambar 2.14.	Indeks Gini Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020.....	2-46
Gambar 2.15.	Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2020	2-48
Gambar 2.16.	Persentase Penduduk Miskin Halmahera Timur dan Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-49
Gambar 2.17.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dan Maluku Utara Indonesia Tahun 2016- 2020.....	2-50
Gambar 2.18.	Perkembangan Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dan Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-51
Gambar 2.19.	Persentase Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020	2-52
Gambar 2.20.	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020	2-53
Gambar 2.21.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2010-2020.....	2-55
Gambar 2.22.	Laju Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahu 2010-2020	2-56
Gambar 2.23.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahu 2010-2020.....	2-57

Gambar 2.24.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahu 2010-2020.....	2-58
Gambar 2.25.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahu 2010-2020.....	2-58
Gambar 2.26.	Standar Layak Hidup Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahu 2010-2020.....	2-59
Gambar 2.27.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahu 2010-2020.....	2-60
Gambar 2.28.	Angka Pendidikan yang ditamatkan Pada Jenjang Pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2016-2020	2-63
Gambar 2.29.	Angka Putus Sekolah Menurut jenjang Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-65
Gambar 2.30.	Angka melajut SD Ke SMP dan SMP Ke SMA Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-67
Gambar 2.31.	Sekolah Pendidikan SD/Mi dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-67
Gambar 2.32.	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-72
Gambar 2.33.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-73
Gambar 2.34.	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-73
Gambar 2.35.	Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-74
Gambar 2.36.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-75
Gambar 2.37.	Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.....	2-76
Gambar 2.38.	Prevalensi Balita Wastingg Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.....	2-77
Gambar 2.39.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-77
Gambar 2.40.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-78
Gambar 2.41.	Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-89
Gambar 2.42.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-89
Gambar 2.43.	Rasio Rumah layak Huni Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-91

Gambar 2.44.	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-92
Gambar 2.45.	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020	2-92
Gambar 2.46.	Proporsi Rumah Tangga Kumuh di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020.....	2-93
Gambar 2.47.	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-99
Gambar 2.48.	Rasio Ketersediaan Padi Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-101
Gambar 2.49.	Tingkat Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-102
Gambar 2.50.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	2-110
Gambar 2.51.	Penanaman Modal Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-111
Gambar 2.52.	Persentase Jumlah wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020	2-115
Gambar 2.53.	Produktifitas Total Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-116
Gambar 2.54.	Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Logistik Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	2-128
Gambar 3.1.	Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-5
Gambar 3.2.	Rata-rata Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	3-5
Gambar 3.3.	Rata-rata Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	3-6
Gambar 3.4.	Rata-rata Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	3-6
Gambar 3.5.	Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	3-8
Gambar 3.6.	Rata-rata Proporsi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	3-9
Gambar 3.7.	Rata-rata Proporsi Belanja Langsung Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-9
Gambar 3.8.	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-10
Gambar 3.9.	Pertumbuhan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	3-14
Gambar 3.10.	Pertumbuhan Kewajiban Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-14

Gambar 3.11.	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020	3-15
Gambar 3.12.	Perkembangan Proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.....	3-18
Gambar 4.1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	4-16
Gambar 5.1.	Diagram Alir Interelasi Dokumen PRJMD Halmahera, Provinsi Maluku Utara Dan RPJMN	5-3
Gambar 5.2.	Keterkaitan Visi Misi Kabupaten Halmahera Timur	5-23
Gambar 6. 1	Pointer Pidato Presiden RI	6-7
Gambar 6. 2	Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Maba	6-13
Gambar 6. 3	Model Pengembangan Kawasan Pedesaan Sondo-Sondo.....	6-14
Gambar 6. 4	Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Sondo-Sondo sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu	6-14
Gambar 6. 5	Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake	6-15
Gambar 6. 6	Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba Selatan.....	6-16
Gambar 6. 7	Skema Keterpaduan Sektor Pariwisata.....	6-17
Gambar 6. 8	Skema Keterpaduan Sektor Perikanan	6-18
Gambar 6. 9	Model Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara	6-19
Gambar 6. 10	Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo dan Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kecamatan Maba Utara.....	6-19
Gambar 6. 11	Model Christaller K=7 (Prinsip Administrasi)	6-20
Gambar 6. 12	Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Fayaul Bukutio sebagai Kawasan Perkotaan Baru.....	6-21
Gambar 6. 13	Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Sekitar Bandara Buli sebagai Kawasan Perkotaan baru	6-22
Gambar 6. 14	Peta Deliniasi Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Maba	6-23
Gambar 6. 15	Model Pengembangan Kawasan Perkotaan Wayamli.....	6-24
Gambar 6. 16	Peta Deliniasi Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Wayamli	6-24
Gambar 6. 17	Model Pengembangan Kawasan Perkotaan Lolobata.....	6-25
Gambar 6. 18	Peta Deliniasi Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Lolobata	6-25
Gambar 6. 19	Peta Deliniasi Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Buli	6-26



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHEARA TIMUR

RPJMD

RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHEARA TIMUR

2021
2025

BAB 1
PENDAHULUAN



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHEARA TIMUR

RPJMD

RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHEARA TIMUR

2021
2025

BAB 2

GAMBARAN UMUM
KONDISI UMUM DAERAH



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHEARA TIMUR**

**RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHEARA TIMUR**

RPJMD

**2021
2025**

BAB 3

**GAMBARAN UMUM
KEUANGAN DAERAH**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHEIRA TIMUR**

RPJMD

**RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHEIRA TIMUR**

**2021
2025**

BAB 4

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**2021
2025**

BAB 5

VISI MISI
TUJUAN DAN SASARAN



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**2021
2025**

BAB 6

STRATEGI

**ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**2021
2025**

BAB 7

**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**2021
2025**

BAB 8

**KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

RPJMD

RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

2021
2025

BAB 9
PENUTUP

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, daerah seyogyanya mampu untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi pembangunan yang ada, terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi, guna mewujudkan sebuah tatanan masyarakat sejahtera dengan tidak menghilangkan atau berbasis nilai kekhasan setiap daerah. Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, arahan RPJPD menjadi sangat krusial guna menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan pendekatan perencanaan pembangunan teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas (*top down dan bottom up*). Saat ini Kabupaten Halmahera Timur akan memasuki periode ke-4 RPJPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2005-2025. Dimana dari sisi durasi perencanaannya, periode ke-4 ini merupakan periode terakhir yang tentunya berkaitan erat antara periodisasi sebelumnya. Karena untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, cara pandang terhadap periodisasi tersebut perlu dilihat secara utuh dan merupakan satu kesatuan rangkaian dan tahapan pembangunan yang tidak bisa saling dipisahkan.

Bertolak dari hal tersebut, prioritas pembangunan pada periode ke-4 masih difokuskan pada peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia berkualitas berbasis teknologi dan informasi, peningkatan pembangunan ekonomi diarahkan pada pemantapan struktur ekonomi yang mapan, untuk menggerakkan sektor riil, pengelolaan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan memanfaatkan sektor-sektor unggulan sebagai *leading sector*, yang mempunyai daya saing yang kompetitif, pemantapan pembangunan bidang sosial

budaya, politik dan keamanan. Hal ini bersifat penting untuk dijadikan dasar, agar supaya dalam perumusan langkah-langkah strategis hingga perumusan instrumen dalam bentuk program aksi nantinya, selalu relevan dengan Prioritas Pembangunan pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Karena dalam konteks perencanaan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP merupakan dokumen rujukan yang harus dipedomani.

Selain RPJPD, RPJMD juga memiliki hubungan erat dengan KLHS sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan.

KLHS RPJMD, sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD, dimana didalamnya substansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa lingkungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan sumbangan hasil KLHS RPJMD dapat mendukung percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perpres 59/2017. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB.

Pelaksanaan pembangunan dalam Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 secara umum telah menunjukkan capaian hasil yang cukup baik diberbagai bidang. Capaian tersebut menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja pembangunan dalam periode RPJMD selanjutnya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021–2025 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Drs. Hi. Ubaid Yakub, MPA dan Anjas Taher, SE., M.Si yang dilantik tanggal 26 Februari 2021.

Arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021–2025 senantiasa berpedoman pada Arah kebijakan pembangunan RPJPD 2005–2025. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan visi **“Halmahera Timur Maju dan Sejahtera”**, yang akan senantiasa menjiwai RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021–2025. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021–2025 juga merupakan rujukan bagi seluruh pemangku peran dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga para pelaku bisnis atau sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan, yang bersendikan pada kesetaraan, kolaborasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021–2025 ini berdasarkan peraturan perundang–undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 75 tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

- Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 - 2029
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025

22. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

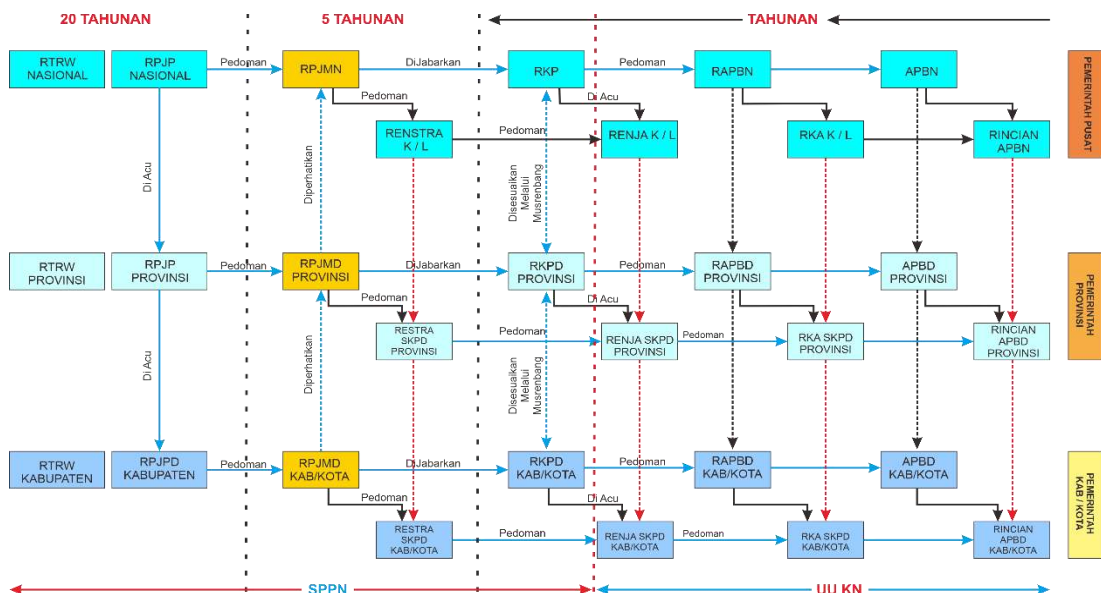
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJM Nasional.

Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara dan Rencana Kerja Pemerintah serta sebagai pedoman Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dari perspektif tersebut RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 – 2025 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2013- 2033, RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2010- 2029,
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
3. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan Kabupaten/Kota, sektor swasta, lembaga-lembaga internasional dan partisipasi masyarakat secara luas.

Alur hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021–2024 dengan dokumen perencanaan sebagaimana ilustrasi pada Gambar berikut.



Gambar 1. 1 Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur dengan memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

RPJMD Kabupaten Halmahera Timur juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini sekaligus juga digunakan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Bupati pada akhir masa jabatan.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan visi, misi, Bupati/Wakil Bupati Halmahera Timur ke dalam tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disertai dengan program prioritas.
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama masa kepemimpinan Bupati/ Wakil Bupati.
3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran dan pengawasan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah yang meliputi uraian kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, neraca daerah, proyeksi keuangan daerah, serta kerangka pendanaan program-program RPJMD.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat pernyataan dan penjelasan visi dan misi pembangunan daerah, janji kerja, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang strategi-strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta program-program pembangunan daerah. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menggambarkan serta menjelaskan hubungan antara strategi dengan arah kebijakan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana program disajikan dalam rencana program dan kegiatan yang berpedoman rencana program dan kegiatan yang berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan tahun 2021 hingga tahun 2024.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT

Daerah Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program pembangunan daerah yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Rencana program disajikan yaitu rencana program dan kegiatan yang berpedoman pada rencana program dan kegiatan yang berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan tahun 2021 hingga tahun 2024.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IX PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025.



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

RPJMD

RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

2021
2025

BAB 2

GAMBARAN UMUM
KONDISI UMUM DAERAH

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI UMUM DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

2.1.1. ASPEK GEOGRAFIS

A. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur sebesar 14.202,02 km², luas lautan mencapai 7.695,82 Km² (54% dari total wilayah) dan luas daratan adalah **6.506,19** km². (46% dari total wilayahnya). Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebagai kabupaten dengan luas daratan terluas kedua di Provinsi Maluku Utara, atau 20,53% dari total luas daratan Provinsi Maluku Utara. Sebagaimana pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029, terdapat perubahan luas wilayah darat dari penetapan sebelumnya, sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2018 tentang Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 tentang Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kota Tidore Kepulauan. Selain kedua Permendagri di atas, perubahan luas wilayah darat terjadi sesuai dengan hasil Tim Tampil Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2018.

Kabupaten Halmahera Timur secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Teluk Kao
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Halmahera dan Samudera Pasifik
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan.

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Kecamatan sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Persentase
1	Kota Maba	952,91	14,62%
2	Maba	434,89	6,67%
3	Maba Selatan	503,77	7,73%
4	Maba Tengah	651,92	10,01%
5	Maba Utara	1.118,73	17,17%
6	Wasile	253,39	3,89%
7	Wasile Selatan	1.078,41	16,55%
8	Wasile Timur	431,05	6,62%

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Persentase
9	Wasile Tengah	490,16	7,52%
10	Wasile Utara	600,51	9,22%
Luas Wilayah Darat		6.515,74	45,85%
Luas Wilayah Laut		7.695,82	54,15%
Total		14.211,56	100,00%

Sumber: ¹RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2010-2029, ²Halmahera Timur Dalam Angka, BPS Tahun 2020, ³RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021, ⁴Tim Tapal Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018

Kabupaten Halmahera Timur Terdiri dari 10 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 102, yang dirinci seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Jumlah Desa di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa
1	Kota Maba	6	Maba Sangaji (ibukota kecamatan), Soa Gimalaha, Wailukum, Soa Sangaji, SoaLaipoh, Tewil
2	Maba	10	Buli (ibukota kecamatan), Buli Asal, Buli Karya, Wayafly, Sailal, Geltoli, Pekaulang, Teluk Buli
3	Maba Selatan	9	Bicoli (ibukota kecamatan), Waci, Peteley, Loleolamo, Gotowasi, Kasuba, Momole, Sil, Sowoli
4	Maba Tengah	12	Wayamli (ibukota kecamatan), Beringin Lamo, Miaf, Bangul, Marasipno, Dorolamo, Maratana, Bebsili, Yawanli, Gaifoli, Babasaram
5	Maba Utara	10	Dorosagu (ibukota kecamatan), Sosolat, Patlean, Lolasita, Wasileo, Pumlanga, Jara-jara, Doromoi, Lili
6	Wasile	7	Subaim (ibukota kecamatan), Cemara Jaya, Bumi Restu, Batu Raja, Makar Sari, Gulapapo, Waisuba,
7	Wasile Selatan	24	Nusa Jaya (ibukota kecamatan), Nanas, Bukutio, Fayaul, Wasile, Saramaake, Tanure, Loleba, Yawal, Saolat, Jiko Moi, Waijoi, Minamin, Ekor, Ekorino, Ino Jaya, Binagara, Ake Jawi, Tabanalou, Tomares, Pintatu, Talaga Jaya, Sondo-Sondo, Nusa Ambu
8	Wasile Timur	8	Dodaga (ibukota kecamatan), Dakaino, Ake Daga, Toboino, Tutuling Jaya, Woka Jaya, Rawamangun, Sidomulyo
9	Wasile Tengah	8	Lolobata (ibukota kecamatan), Hate Tabako, Pua, Foly, Nyaolako, Bokimaake, Silalayang, kakaraino
10	Wasile Utara	8	Labi-Labi (ibukota kecamatan) Iga, Tatam, Majiko Tongone, Marimoi, Bololo, Helitetor, Dowongi Jaya
Total		102	

Sumber: ¹RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2010-2029, ²Halmahera Timur Dalam Angka, BPS Tahun 2020, ³RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021, ⁴Tim Tapal Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018

B. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

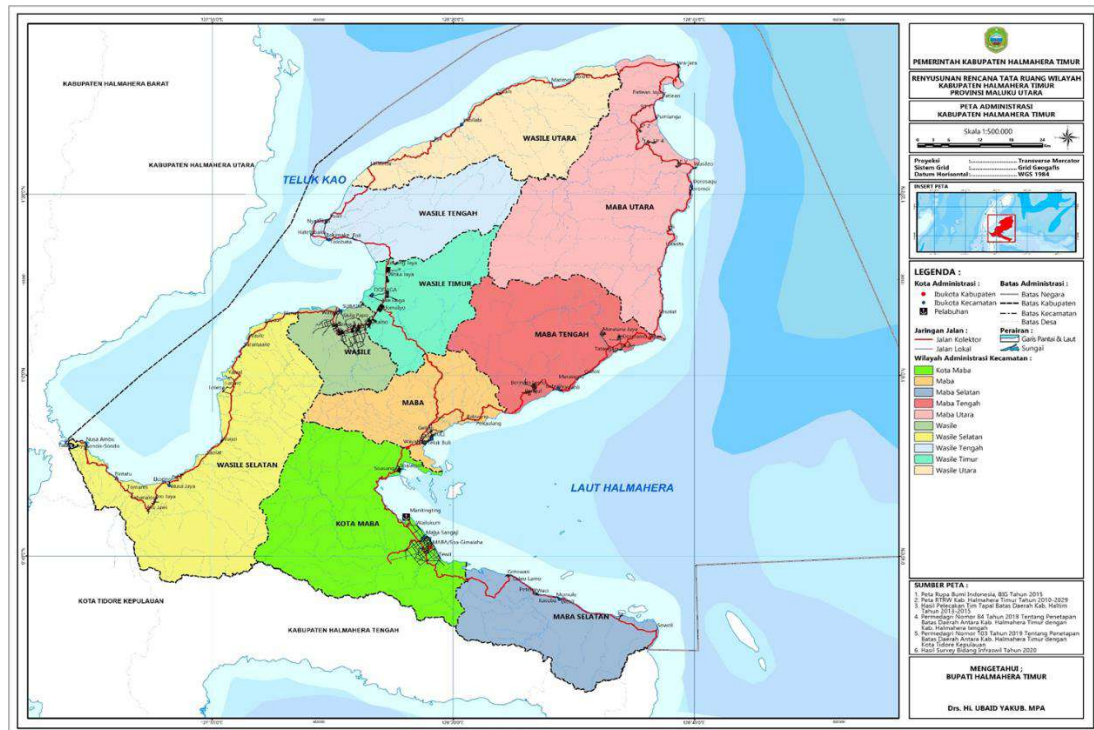
1. POSISI ASTRONOMIS

Kabupaten Halmahera Timur terletak di bagian Timur wilayah Provinsi Maluku Utara dengan letak geografis antara 0°40'-1°4' LU dan 126°45'-129°30' BT. Menempati salah satu bagian dari pulau terbesar di Maluku Utara yaitu Pulau Halmahera. Kabupaten Halmahera Timur beribukota di Kota Maba, berkarakter kepulauan dengan garis pantai sepanjang 499,46 Km, juga memiliki 41 pulau besar dan kecil. sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 3 Jumlah dan Luas Pulau menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Nama Pulau	Luas (Km ²)
1	Maba Selatan	Cef	76.6
		England	404.3
		Lelewi	10.7
		Mia	8.4
		Plum	-
		Plan	17.8
		Sai	0.9
		Seal	45.6
		Sloton	-
		Woor	167.5
		Oto	116.7
		Para-para	1.7
2	Maba Kota	Mobon	22.5
		To	1.2
		Mabuli	108.2
		Misluwi Kecil	5.9
		Misluwi Besar	11.2
		Fimlowos	236.8
		Gifao	0.9
		Mow	10.8
		Pakal	693,00
		Baiboko	-
		Bangul Kecil	-
		Bangul Besar	-
		Bonnyos	-
		Belimsili Kecil	1.5
		Belimsili Besar	47.3
3	Maba	Gee	-
		so	-
		Batuso	-
4	Wasile Utara	Ake Salaka	0.7
		Lambie	-
		Tamo-tamo	-
		Burung	20.6
		Lambu	-
5	Wasile Selatan	Kuso	-
		Roni	35.9
		Tanjo Pende	-
		Timlonga	-
		Bayoni	-
		Bokimibok	-
Jumlah		41	693,00

Sumber : ¹RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2010-2029, ²Halmahera Timur Dalam Angka, BPS Tahun 2020, ³RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Timur

Sumber : Laporan Pendahuluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera, 2021-2024

2. POSISI GEOSTRATEGIK

Dalam peta geostrategis, Kabupaten Halmahera Timur terletak pada posisi perbatasan negara Indonesia dengan perairan internasional, yakni terhadap Laut Pasifik (Negara Palau) dan pada perairan yang relatif tidak jauh dengan perairan negara Filipina. Pada posisi yang merupakan perbatasan laut yang demikian maka sistem pertahanan dan keamanan di wilayah ini harus mendapat perhatian serius karena menjadi gerbang perbatasan internasional. Berbagai risiko penyusupan atau *infiltrasi*, *illegal fishing*, bajak laut dan sebagainya mengancam Kabupaten Halmahera Timur karena posisinya yang berhadapan langsung dengan laut bebas Internasional.

Di bagian sisi Timur wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dilalui ALKI III (Alur Laut Kepulauan Indonesia III), yang merupakan jalur lintasan utama pelayaran Internasional dari Pasifik melewati Indonesia. Dengan adanya ALKI III ini, maka wilayah Halmahera Timur khususnya di kawasan perairannya menjadi suatu kawasan lintasan Internasional yang memerlukan perhatian ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan nasional.



Gambar 2. 2 Peta Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

3. KONDISI KAWASAN

▪ Kawasan Pedalaman

Salah satu problem pembangunan Kabupaten Halmahera Timur adalah masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan. Kawasan Pedalaman merupakan daerah yang secara geografis letaknya jauh dari pesisir pantai. Kondisi geografis yang demikian membuat kawasan pedalaman sangat tertinggal dari kawasan pesisir. Orientasi pembangunan yang masih mengutamakan wilayah pesisir sebagai titik sentuh kebijakan menjadikan disparitas antar kawasan pesisir dan pedalaman semakin besar. Penyebaran kawasan pedalaman di Kabupaten Halmahera Timur terdapat di beberapa Kecamatan. daerah pedalaman berada di Kecamatan Wasile Utara dan kecamatan Maba Utara. Pemerintah daerah perlu memfokuskan pembangunan dan pengembangan kawasan agar keterkaitan antar daerah bisa diwujudkan sebagai kawasan ekonomi yang maju dan adil.

▪ Kawasan Terpencil

Kawasan terpencil secara geografis merupakan kawasan yang terletak jauh dari kota dan kurang berhubungan dengan dunia luar. Untuk dapat digolongkan sebagai daerah terpencil, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu:

- Daerah itu sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, dan
- Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi tidak tersedia, atau walaupun tersedia tetapi dalam keadaan yang sangat terbatas, sehingga untuk menjalankan usahanya para penanam modal harus menyediakan sendiri prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dimaksud.

Prasarana ekonomi dimaksud adalah pelabuhan, jalan dari pelabuhan menuju lokasi (*access road*), jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik, dan prasarana lain di bidang ekonomi yang diperlukan untuk memungkinkan berjalannya suatu perusahaan. Jika berdasarkan kriteria daerah tertinggal di

Halmahera Timur yang terdiri dari 10 Kecamatan terdapat 2 Kecamatan yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Dengan demikian kawasan terpencil di Kabupaten Halmahera Timur berada pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Maba Utara dan Kecamatan Wasile Utara.

▪ Pesisir

Dari total desa sebanyak 102 sebanyak 76,47 persen atau 78 merupakan desa pesisir, dan sisanya 23,53 persen merupakan daerah pedalaman/ pegunungan/ terpencil yang tersebar di hampir semua Kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 4 Jumlah Desa Pesisir di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Pesisir
1	Kota Maba	6	6
2	Maba	10	9
3	Maba Selatan	9	9
4	Maba Tengah	12	7
5	Maba Utara	10	10
6	Wasile	7	2
7	Wasile Selatan	24	15
8	Wasile Timur	8	6
9	Wasile Tengah	8	6
10	Wasile Utara	8	8
Total		102	78

Sumber : ¹RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2010-2029, ²Halmahera Timur Dalam Angka, BPS Tahun 2020, ³RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021

C. TOPOGRAFI WILAYAH

1. KETINGGIAN LAHAN

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Halmahera Timur cukup beragam, mulai wilayah yang relatif datar, landai, bergelombang, curam hingga sangat curam dalam rentang ketinggian antara 0->1.000 meter di atas permukaan air laut (dpl). Untuk rentang ketinggian antara 0-300 meter dpl tersebar diseluruh kecamatan, kemudian rentang ketinggian antara 300-1.000 berada pada sembilan Kecamatan. Untuk Kecamatan Maba Selatan wilayahnya hanya berada pada ketinggian 0-300 meter dpl. Sedangkan Kecamatan Kota Maba, Maba Selatan, Wasile Timur dan Wasile Utara merupakan wilayah yang tidak berada pada ketinggian > 1.000 meter dpl.

Selanjutnya Wilayah yang paling luas yakni wilayah yang berada pada ketinggian 0-100 meter dpl dengan luasan mencapai 489.834,52 hektar atau 75,46% dan terluas pada Kecamatan Wasile Selatan mencapai 81.083,92 Hektar. Sedangkan bagian wilayah yang paling kecil berada pada ketinggian >1.000 meter dpl dengan luasan mencapai 3.894,40 hektar atau sekitar 0,60% dan luasan tersebut berada pada Kecamatan Maba Tengah mencapai 0,67 Hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Luas Wilayah berdasarkan Ketinggian di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)						> 1.000 m
		0 - 100 m	100 - 200 m	200 - 300 m	300 - 400 m	400 - 500 m	500 - 1.000 m	
1	Kota Maba	78.986,92	5.943,71	4.354,91	2.952,45	1.555,15	334,17	-
2	Maba	26.387,10	4.307,00	3.802,73	3.116,71	2.735,69	2.022,62	937,51
3	Maba Selatan	48.988,34	392,45	46,27	-	-	-	-
4	Maba Tengah	51.701,21	5.864,01	4.336,31	1.983,67	969,14	327,90	0,67

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)						
		0 - 100 m	100 – 200 m	200 – 300 m	300 – 400 m	400 – 500 m	500 – 1.000 m	> 1.000 m
5	Maba Utara	77.365,42	13.381,54	10.882,08	6.442,02	3.279,66	499,85	0,16
6	Wasile	17.290,23	2.277,59	2.298,27	1.447,99	952,88	575,72	489,99
7	Wasile Selatan	81.083,92	7.955,15	5.431,07	4.180,53	3.159,23	3.560,34	2.358,72
8	Wasile Timur	28.566,32	4.922,64	5.132,96	3.400,23	919,92	159,56	-
9	Wasile Tengah	31.175,09	4.865,48	4.901,82	3.505,10	2.544,50	1.910,62	107,35
10	Wasile Utara	48.289,97	3.767,86	3.343,82	2.500,47	1.612,06	518,64	-
Jumlah		489.834,52	53.677,43	44.530,24	29.529,17	17.728,23	9.909,42	3.894,40
Persentase		75,46%	8,27%	6,86%	4,55%	2,73%	1,53%	0,60%

Sumber : Laporan Pendahuluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,



Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Halmahera Timur

Sumber : Laporan Pendahuluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera, 2021-2041

2. KEMIRINGAN LAHAN

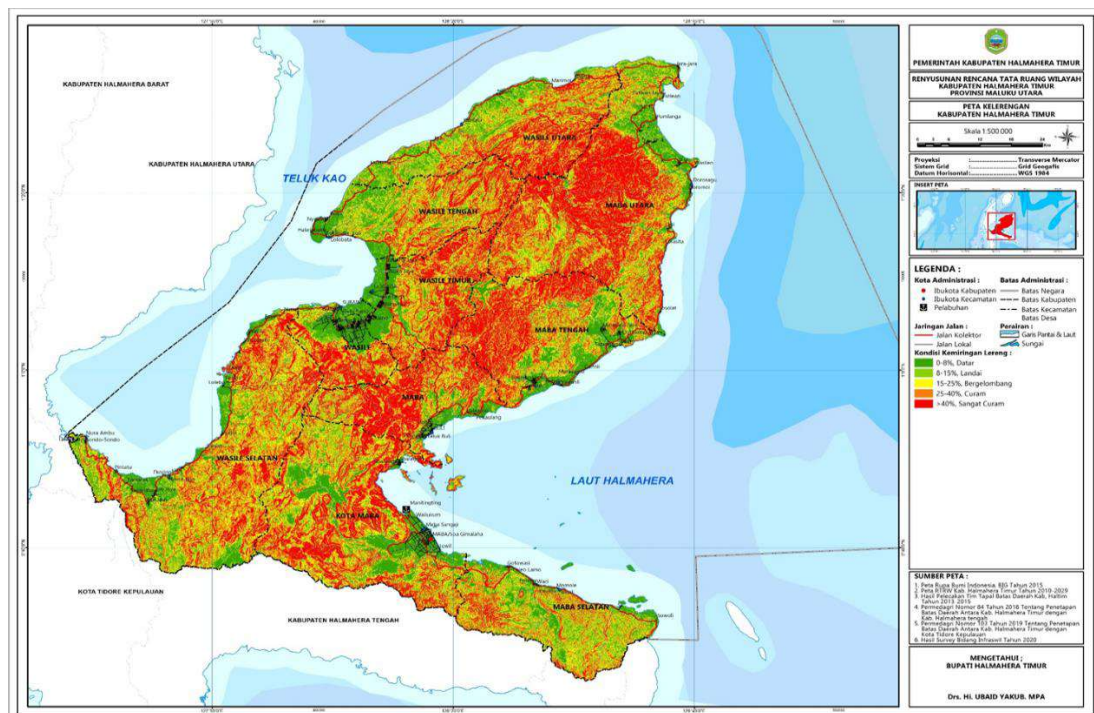
Wilayah Kabupaten Halmahera Timur didominasi oleh kemiringan curam dan sangat curam yakni 25-40% dengan luasan mencapai 159.059,95 Hektar (24,57%) dan > 40% seluas 154.025,51 Hektar (23,79%) yang cenderung lebih cocok diperuntukkan sebagai kawasan lindung seperti hutan. Selanjutnya untuk kemiringan bergelombang yakni 15-25% dengan luasan mencapai 130.159,54 Hektar (20,11%) yang kecenderungannya cocok untuk peruntukan perkebunan, permukiman terbatas, dan kawasan hutan produksi. Sementara sisanya merupakan wilayah dengan kelerengan dibawah 15% yang lebih cocok untuk pengembangan area terbangun, seperti permukiman, budidaya persawahan atau perkebunan. Tingginya persentase luas tanah yang termasuk dalam klasifikasi curam di Kabupaten Halmahera Timur menyebabkan persentase wilayah yang dapat digunakan sebagai lahan produktif terutama untuk pertanian menjadi relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur itu sendiri. Lebih jelasnya mengenai kondisi kelerengan lahan di Kabupaten Halmahera Timur, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lahan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)				
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%
1	Kota Maba	17.351,09	12.808,36	19.192,40	22.761,63	21.744,10
2	Maba	5.222,76	4.305,05	6.966,46	11.216,56	15.521,56
3	Maba Selatan	10.527,21	10.740,46	12.715,46	10.664,31	4.489,25
4	Maba Tengah	12.091,97	7.919,21	11.053,81	15.994,96	18.024,61
5	Maba Utara	13.547,71	13.947,48	19.545,27	26.885,23	37.682,53
6	Wasile	8.103,07	2.771,17	3.685,96	4.933,53	5.792,26
7	Wasile Selatan	15.389,41	16.927,29	26.982,21	30.417,60	17.573,65
8	Wasile Timur	9.129,75	4.255,27	7.328,29	11.182,48	11.179,18
9	Wasile Tengah	9.863,47	8.659,09	10.385,64	11.217,23	8.801,10
10	Wasile Utara	9.456,93	11.097,30	12.304,04	13.786,41	13.217,26
Jumlah		110.683,37	93.430,69	130.159,54	159.059,95	154.025,51
Persentase		17,10%	14,43%	20,11%	24,57%	23,79%

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, wilayah kecamatan dengan kondisi kemiringan datar dan landai yaitu antara 0-15% terluas terdapat pada Kecamatan Wasile Selatan dengan luasan mencapai 32.316,70 Hektar (15,83%), Kemudian Kecamatan Kota Maba dengan luasan mencapai 30.159,45 Hektar (14,78%). Sedangkan wilayah kecamatan dengan luasan terkecil yakni Kecamatan Maba mencapai 9.527,81 Hektar (4,67%) dan Kecamatan Wasile mencapai 10.874,24 hektar (5,33%). Selanjutnya untuk wilayah kecamatan dengan kondisi kelerengn bergelombang yaitu antara 15-25%, terluas terdapat pada Kecamatan Wasile Selatan dengan luasan mencapai 26.982,21 Hektar (20,73) dan luas wilayah terkecil terdapat pada Kecamatan Wasile 3.685,96 (2,83%). Sedangkan kondisi kemiringan curam dan sangat curam yakni 25->40% dengan luas wilayah terluas terdapat pada Kecamatan Maba Utara seluas 64.567,76 Hektar (20,62%), Kemudian Kecamatan Wasile Selatan seluas 47.991,25 (15,33%). Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Wasile seluas 10.725,79 Hektar (3,43%).



Gambar 2. 4 Peta Kelerengn Kabupaten Halmahera Timur

Sumber : Laporan Pendahuluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera, 2021-2041

D. GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. STRUKTUR DAN KARAKTERISTIK

Kabupaten Halmahera Timur berada pada Mendala Fisiografi Halmahera Timur, yang bagian terbesarnya berupa pegunungan berlereng curam dengan torehan sungai yang dalam dan sebagian bermorfologi karst. Morfologi pegunungan berlereng curam cerminan batuan ultra basa, batuan sedimen dan batuan gunung api Oligo-Miosen dan yang lebih tua. Morfologi karst terdapat pada daerah batuan gamping, baik yang berumur Paleosen-Eosen, Oligo-Miosen maupun Miosen-Paleosen. Batuan sedimen Miosen-Pliosen membentuk morfologi dengan perbukitan yang relatif lebih rendah dan lerengnya lebih landai dari pada batuan yang lebih tua.

Mendala Halmahera Timur berupa jalur tektonik yang kuat, berbatuan sedimen Neogen, perlipatan kuat dan persesaran terdapat pada jalur ini. Mendala geologi Halmahera Timur terutama dibentuk oleh satuan batuan ultra basa yang sebarannya cukup luas dan batuan sedimen berumur Kapur (Kd) serta berumur Paleosen-Eosen (Tped, Tpec, dan Tpel) diendapkan tak selaras di atas batuan ultra basa. Kabupaten Halmahera Timur disusun oleh batuan sebagai berikut :

1) Batuan Sedimen

- Formasi Dodaga (Kd): perselingan batulanau serpih, batupasir, napal dan batugamping.
- Formasi Dorosagu (Tped): perselingan antara batupasir, batulanau, batulempung, serpih, konglomerat, dan batugamping, sangat kompak, berlapisan sangat baik.
- Formasi Tutuli (Tomt): batugamping, bersisipan napal dan batupasir.
- Formasi Weda (Tmpw): batupasir berselingan dengan batulempung, batulanau, napal, batugamping dan konglomerat.
- Formasi Tingteng (Tmpt) : batugamping dengan sisipan batupasir gampingan dan napal.
- Batugamping Terumbu (QI) : batugamping terumbu berwarna putih keabuan, setempat mengandung cangkang moluska, sisipan napal dan batugamping pasiran, terbentuk di lingkungan neritik dan litoral.
- Satuan Konglomerat (Tpec); tersusun oleh batuan Konglomerat sisipan batupasir, Batulempung dan batubara.
- Konglomerat (Tmpc) ; berkomponen batuan Ultrabasa, Basal, Rijang, Diorit dan Batusabak.

2) Endapan Permukaan

- Aluvium (Qa/t) : kerikil, pasir, lumpur dan bongkah andesit dan basal, yang di lengan timur laut mengandung komponen batuan ultrabasa, diendapkan dalam lingkungan sungai, delta dan rawa; yang di sebelah selatan Tanjung Gurua terdapat endapan undak yang diduga dari kipas aluvium.

3) Batuan Gunungapi

- Formasi Bacan (Tomb): breksi dan lava. Breksi berkomponen andesit dan basal, setempat juga batugamping.
- Formasi Kayasa (Qpk): batuan gunungapi terdiri dari lava dan breksi.

4) Batuan Beku

- Komplek Batuan Ultrabasa (Ub): batuan ultrabasa, gabro, basal dan diabas.
- Gabro (Gb): kelabu muda, berkristal kasar, pejal sebagian terbreksikan.

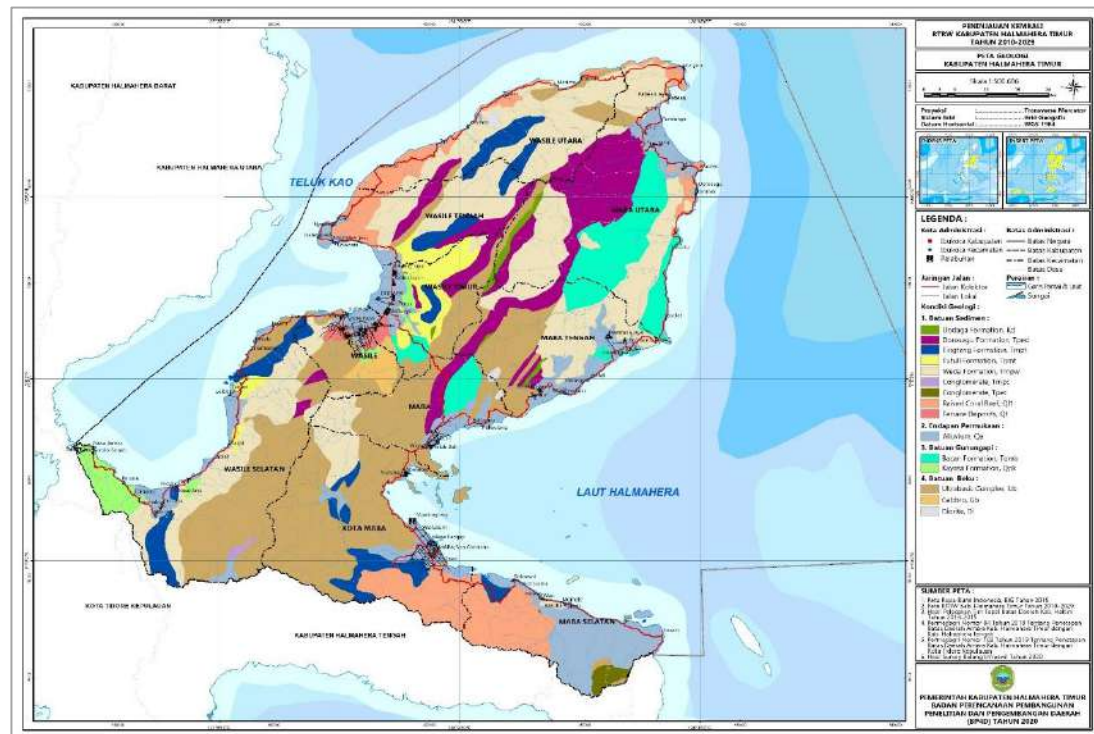
- Diorit (Di) : diorit putih keabuan, porfiritik, fenokris amfibol terletak di dalam masadasar mikrolit plagioklas. Mikrodiortit kelabu muda mengandung sedikit mineral amfibol.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis batuan di Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Jenis Batuan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

No	Jenis Batuan	Simbol	Luas (Ha)	Persentase
1	Dodaga Formation	Kd	3.455,10	0,53%
2	Dorosagu Formation	Tped	56.399,90	8,68%
3	Tingteng Formation	Tmpt	34.902,38	5,37%
4	Tutuli Formation	Tomt	17.963,65	2,76%
5	Weda Formation	Tmpw	158.704,32	24,42%
6	Raised Coral Reef	QI1	56.146,56	8,64%
7	Conglomerate	Tpec	2.655,46	0,41%
8	Conglomerate	Tmpc	830,45	0,13%
9	Terrace Deposits	Qt	3544,48	0,55%
10	Alluvium	Qa	81.322,42	12,51%
11	Bacan Formation	Tomb	40.698,52	6,26%
12	Kayasa Formation	Qpk	11.036,88	1,70%
13	Ultrabasic Complex	Ub	176.673,09	27,18%
14	Gabbro	Gb	5.610,99	0,86%
15	Diorite	Di	1.556,61	0,24%
Jumlah			649.944,20	100,00%

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,



Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur

Sumber : Laporan Pendahuluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera, 2021-2041

Sedangkan, berdasarkan Peta Tanah Tinjau Pulau Halmahera berskala 1:250.000 dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan, Kementerian Pertanian, tahun 2016, terdapat 9 (sembilan) jenis tanah di Kabupaten Halmahera Timur dengan rincian sebagai berikut:

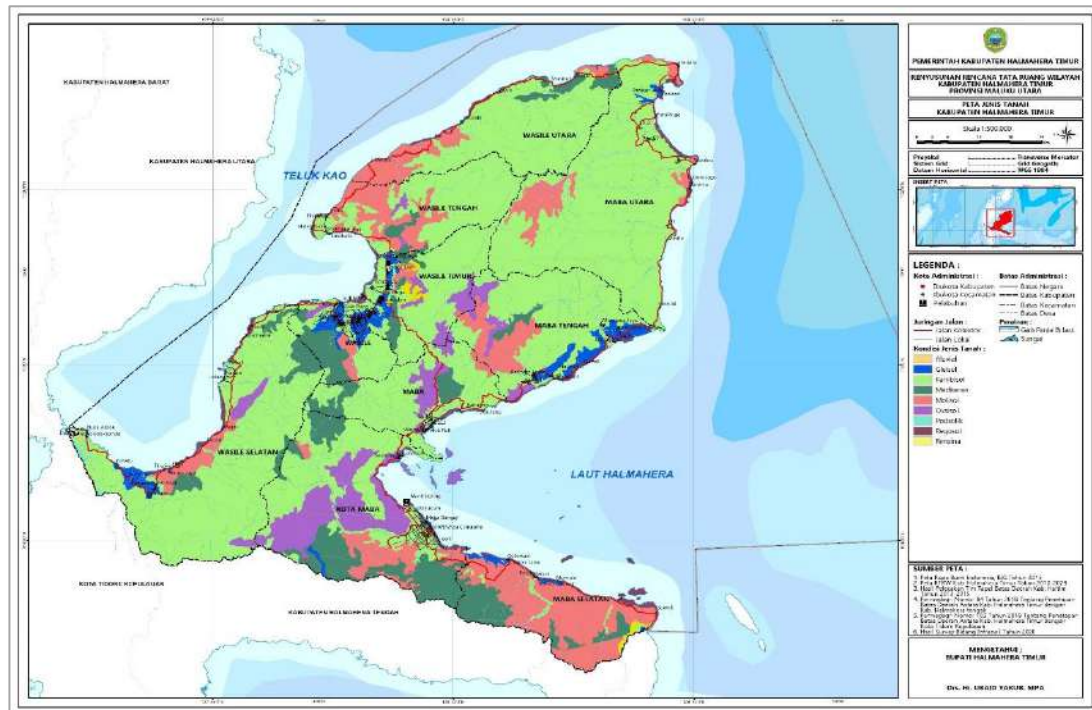
- 1) Aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasanya terbawa aliran sungai. Biasanya tanah ini ditemukan dibagian hilir atau daerah rendah, untuk warna tanah ini coklat hingga kelabu. Untuk jenis tanah ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Wasile Selatan.
- 2) Gleisol Tanah mempunyai ciri hidromorfik sampai kedalaman 50 cm dari permukaan; mempunyai horison A okrik, umbrik, histik dan B kambik, sulfurik, kalsik atau gipsik.. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kota Maba, Maba Selatan, Maba Tengah Maba Utara, Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur dan Kecamatan Masile Tengah.
- 3) Kambisol merupakan tanah yang mempunyai horison B kambik dan horison A umbrik atau molik, tidak terdapat gejala hidromorfik. Untuk jenis tanah ini terdapat di seluruh Kecamatan.
- 4) Mediteran merupakan tanah yang mempunyai horison argilik dengan kejenuhan basa > 50% dan tidak mempunyai horison albik. Jenis tanah ini terdapat di seluruh Kecamatan.
- 5) Molisol merupakan tanah memiliki horison penciri A molik, B kambik dan KB > 50% di seluruh penampang. Jenis tanah ini terdapat di seluruh Kecamatan.
- 6) Oksisol merupakan tanah mempunyai horison B oksik, atau kandik (KTK liat <16 cmol(+)/kg). Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kota Maba, Maba, Maba Tengah, Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur dan Wasile Tengah.
- 7) Podsolik merupakan tanah mempunyai horison B argilik, atau kandik, KB < 50% pada beberapa bagian horison B di dalam kedalaman 125 cm dari permukaan dan tidak mempunyai horison albik yang berbatasan langsung dengan horison argilik atau fragipan. Jenis tanah ini hanya terdapat di Kecamatan Wasile Selatan.
- 8) Regosol merupakan tanah bertekstur kasar (pasir, pasir berlempung), mempunyai horison A okrik, umbrik atau histik, ketebalan > 25 cm. Jenis tanah ini terdapat di seluruh Kecamatan.
- 9) Renzina merupakan tanah dangkal mempunyai A molik, ketebalan 18-25 cm dan di bawahnya langsung batukapur. Jenis tanah ini hanya terdapat di Kecamatan Maba Selatan dan Kecamatan Wasile Timur.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah di Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 8 Jenis Tanah Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1	Aluvial	183,11	0,03%
2	Gleisol	18.025,96	2,78%
3	Kambisol	412.880,89	63,67%
4	Mediteran	62.343,58	9,61%
5	Molisol	95.377,92	14,71%
6	Oksisol	42.893,20	6,61%
7	Podsolik	708,93	0,11%
8	Regosol	13.785,31	2,13%
9	Renzina	2.243,24	0,35%
Jumlah		648.442,14	100,00%

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,



Gambar 2. 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur

Sumber : Laporan Pendahuluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera, 2021-2021

2. POTENSI

Dalam sektor pertambangan didukung oleh ketersediaan potensi tambang, utamanya eksploitasi Emas dan Nikel serta 18 belas jenis bahan galian yang termasuk golongan A, B dan C yang belum diolah. Provinsi Maluku Utara juga disebut sebagai laboratorium alam geologi dikarenakan kedudukannya berada pada tumbukan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Australia yang bergerak ke arah selatan, lempeng Eurasia yang bergerak dari arah barat dan Lempeng Pasifik dari arah barat. Beberapa sumber daya mineral atau bahan galian tambang yang ditemukan tersebar hampir di seluruh daerah Maluku Utara, seperti; Tembaga, Uranium, Emas, Nikel, Batu Bara, Aluminium/Bauksit, Magnesit, Pasir Besi, Titanium, Mangan, Asbes, Kaolin, Diatomit, Batu Permata, Kromit, Pasir Kuarsa, Batu Gamping, Batu Apung, Granit, Talk, Migas, Potensi Panas Bumi, dan Sumber Daya Air.

Dari berbagai potensi yang ada, sumber daya mineral tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur seperti Nikel, Pasir Besi, Batu Gampin, Talk, Magnesit, Batu Bara dan Minyak Bumi. Lokasi/kawasan pertambangan, terdapat cukup banyak dan tersebar di Halmahera Timur dengan produksi terbanyak Nikel. Namun yang terpenting bahwa pengembangan lokasi pertambangan tidak merubah fungsi hutan lindung atau kawasan lindung. Pengembangan secara lebih luas mengenai pertambangan tetap mengacu pada peraturan perundangan mengenai kegiatan pertambangan secara nasional. Pemanfaatan lahan untuk pertambangan adalah pada tatanan kawasan budidaya yang non produktif di bagian permukaan tanah, sehingga memberikan manfaat lain pada kondisi tanah yang sebelumnya dianggap non produktif. Bahan galian tambang tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, apabila dimanfaatkan secara optimal akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pengembangan infrastruktur, peningkatan pendapatan asli daerah, serta mampu merangsang percepatan pembangunan daerah. Potensi sumberdaya mineral diperlihatkan dalam beberapa Tabel berikut.

Tabel 2.9 Potensi Sumberdaya Mineral, Mineral Industri, Batu bara dan Minyak Bumi di Kabupaten Halmahera Timur

No	Jenis	Lokasi	Keterangan
I Potensi Sumberdaya Mineral			
1	Nikel	Buli, Maba	Luas 39,040 Ha Pemboran Eksplorasi Sementara Cadangan 42.763.460 Ton
2	Pasir Besi	Wayamli, Maba	Indikasi
		Tanjung Buli, Maba	Indikasi
II Potensi Mineral Industri			
1	Batu Gamping	Wasilei, Kec. Wasilei	Kompak,putih,umur pra tersier
2	Talk	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	Pada batuan ultrabasa
3	Magnesit	Fayaul, Kec. Wasilei Selatan	
III Potensi Batu Bara dan Minyak Bumi			
1	Batu Bara	Bicoli - Maba Selatan	Indikasi
2	Minyak Bumi	Cekungan Halmahera Timur	Dibor

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

E. HIDROLOGI

Sumber air di Kabupaten Halmahera Timur berupa air permukaan (sungai) yang tersebar pada hampir seluruh bagian wilayahnya, embung dan air tanah (mata air). Sungai di Halmahera Timur sejauh ini sebagian besar pemanfaatannya untuk kebutuhan pengairan pada lahan pertanian, karena telah di bangun beberapa bendungan, sedangkan mata air sebagai sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Adapun kondisi hidrologi di Kabupaten Halmahera Timur akan dibahas lebih rinci.

1. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Sungai yang terdapat di Kabupaten Halmahera Timur masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan dengan wilayah administrasi yang berada dalam WS Halmahera Selatan meliputi 3 (tiga) kabupaten dan 2 (dua) kota yaitu: (1) Kabupaten Halmahera Selatan, (2) Kabupaten Halmahera Timur, (3) Kabupaten Halmahera Tengah, (4) Kota Tidore Kepulauan, (5) Kota Ternate (Pulau Moti). Kabupaten Halmahera Timur merupakan Kabupaten yang mendominasi WS Halmahera Selatan dengan persentase sebesar (41,88%) dari total luas wilayah sungai. Jumlah DAS yang melintasi wilayah Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 50 DAS, dengan luasan sebesar 651.500,83 Hektar. DAS Kabupaten Halmahera Timur merupakan DAS terluas dari 5 kabupaten/kota pada Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan sebesar 40,81% dari total keseluruhan luas DAS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10 DAS Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase	No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase
1	DAS Air Gelagela	33.613,72	5,16%	26	DAS Pakaulan	8.001,16	1,23%
2	DAS Air Tutuli	39.526,61	6,07%	27	DAS Paruama	18.329,94	2,81%
3	DAS Bukumatiti	3.264,08	0,50%	28	DAS Pintatu	3.385,80	0,52%
4	DAS Bulisarani	3.755,69	0,58%	29	DAS Sadea	1.339,71	0,21%
5	DAS Bicoli	8.658,43	1,33%	30	DAS Sangaji	87.588,89	13,44%
6	DAS Bobaneigo	2.841,38	0,44%	31	DAS Saolat	8.919,15	1,37%
7	DAS Dole	0,07	0,00%	32	DAS Selaka	9.506,90	1,46%
8	DAS Ekor	4.248,35	0,65%	33	DAS Sool	8.660,77	1,33%
9	DAS Gagaeli	20.409,50	3,13%	34	DAS Sil	10.757,88	1,65%

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase	No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase
10	DAS Gau	7.828,29	1,20%	35	DAS Soalaipoh	4.821,15	0,74%
11	DAS Gotowasi	5.168,68	0,79%	36	DAS Tatam	7.834,29	1,20%
12	DAS Gowonli	1.068,13	0,16%	37	DAS Teue	19,00	0,00%
13	DAS Ifis	14.135,43	2,17%	38	DAS Titilegan	8.421,18	1,29%
14	DAS Iga	4.254,72	0,65%	39	DAS Tolawi	19.253,22	2,96%
15	DAS Inggelang	521,21	0,08%	40	DAS Waleh	309,02	0,05%
16	DAS Keloggiso	13.315,83	2,04%	41	DAS Waisango	8.727,99	1,34%
17	DAS Kobe	26.381,35	4,05%	42	DAS Waci	24.881,99	3,82%
18	DAS Kolamo	880,79	0,14%	43	DAS Woya	7.896,45	1,21%
19	DAS Labi-Labi	6.021,07	0,92%	44	DAS Walal	15.003,64	2,30%
20	DAS Ake Lamo Haltim	86.715,84	13,31%	45	DAS Watan	2.834,57	0,44%
21	DAS Lili	14.125,40	2,17%	46	DAS Wayamli	4.497,89	0,69%
22	DAS Lolobata	9.794,20	1,50%	47	DAS Wetmetaos	1.288,40	0,20%
23	DAS Mabulan	13.356,17	2,05%	48	DAS Wor	208,09	0,03%
24	DAS Niniwi	9.885,04	1,52%	49	DAS Wotu	119,39	0,02%
25	Onat	55.348,48	8,50%	50	Yawanli	3.775,90	0,58%
Total		651.500,83	100,00%				

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,

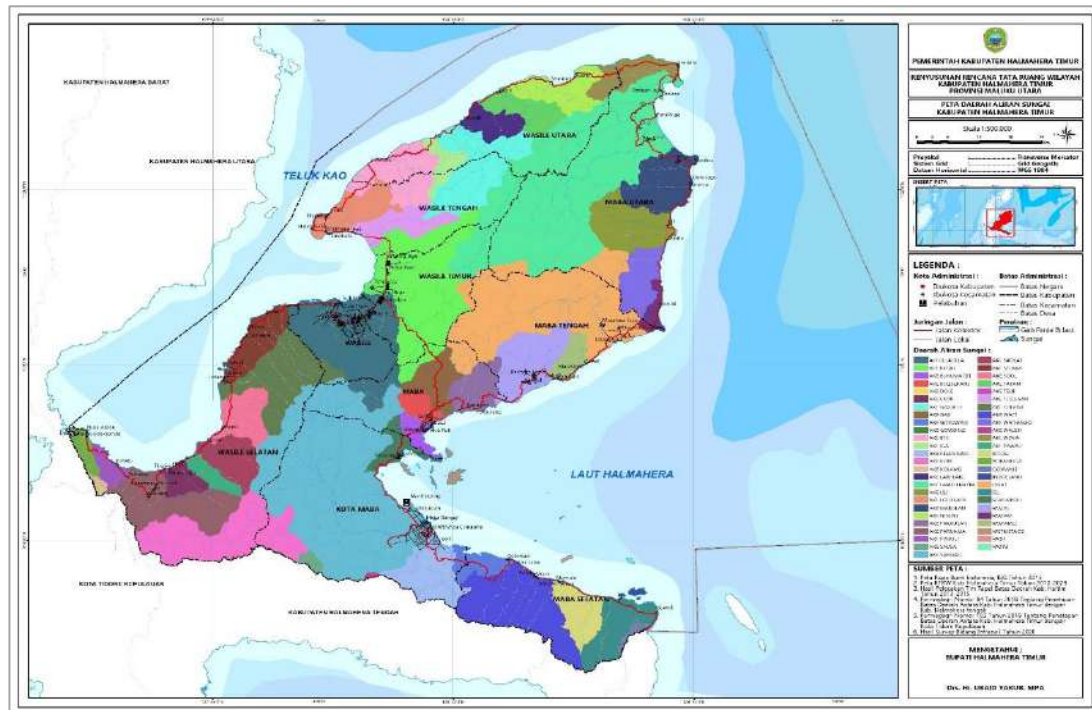
Kabupaten Halmahera Timur juga terdapat 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas antara lain Kompleks DAS Subaim sampai DAS Tutuling, DAS Onat, DAS Ake Sangaji, DAS Waci dan DAS Akelamo yang mencakup areal seluas 314.915,37 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 DAS Prioritas Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase
1	Kompleks DAS Subaim sampai DAS Tutuli	60.380,17	19,17%
2	DAS Ake Onat	55.348,48	17,58%
3	DAS Ake Sangaji	87.588,89	27,81%
4	DAS Ake Waci	24.881,99	7,90%
5	DAS Ake Lamo Haltim	86.715,84	27,54%
Total		314.915,37	100,00%

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Halmahera Timur berikut cabang-cabang dan anak-anak cabangnya memiliki tingkat kerapatan yang tinggi dan secara merata melingkupi seluruh wilayah provinsi. Dengan demikian potensi aliran air yang dihasilkan seharusnya dapat memberikan manfaat yang merata pula terhadap wilayah Kabupaten Halmahera Timur secara keseluruhan. Akan tetapi kondisi topografi dengan kemiringan permukaan lahan yang terjal dan kerusakan lingkungan membuat air hujan tidak bertahan, menimbulkan fluktuasi debit aliran yang tidak menguntungkan. Pada musim penghujan aliran air sungai-sungai berlimpah namun hanya berlangsung dalam waktu relatif pendek sehingga daya gunanya kecil, namun di sisi lain dapat menimbulkan bahaya banjir terutama di daerah-daerah hilir. Pada musim kemarau aliran sungai-sungai sangat kecil, bahkan kering. Oleh karena itu penggunaan air perlu diatur sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dan menghindari terjadinya masalah baik sosial, ekonomi maupun lingkungan.



Gambar 2. 7 Peta DAS Kabupaten Halmahera Timur

Sumber : Laporan Pendahuluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera, 2021-2041

2. SUNGAI, MATA AIR EMBUNG

Potensi sumber daya air di Halmahera Timur terdiri atas Mata Air, Sungai, Embung, menurut Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Kementerian ESDM, 2018, menjelaskan bahwa air tanah di Kabupaten Halmahera Timur memiliki produktivitas dari kecil sampai tinggi dengan keterusan rendah sampai tinggi. Dengan kapasitas sejumlah potensi sumber air tanah dengan akuifer berskala kecil sampai tinggi. Selain itu juga terdapat berbagai mata air dengan debit yang bervariasi antara 0.1 sampai dengan 500 liter per detik. Selain empat mata air utama diatas, terdapat pula 21 mata air yang dijadikan sumber air minum yang telah dibangun sistem jaringan perpipaan berupa SPAM IKK dan SPAM Pedesaan.

Tabel 2.12 Mata Air Potensial Utama Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Nama Mata Air	Debit (liter/detik)	Kecamatan
	Ake Sangkole	20	Kecamatan Wasile
	Air Lelewi	0,1	Kecamatan Wasile
	Lolobata	100	Kecamatan Wasile Tengah
	Lolosmani	200	Kecamatan Kota Maba

Sumber : Laporan Pendahuluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,

Tabel 2.13 Mata Air Potensial Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Nama Mata Air	Debit (liter/detik)	Elavasi (mdpl)	Kecamatan
1	Sil	40	95	Maba Selatan
2	Bicoli	10	27	Maba Selatan
3	Labi-Labi	10	15	Wasile Utara
4	Sailapoh	< 0,5	25	Kota Maba
5	Sailapoh II	5	52	Kota Maba
6	Bukutio	2	86	Wasile Selatan
7	Fayaul	3	206	Wasile Selatan
8	Tanure Loleba	2	29	Wasile Selatan

No	Nama Mata Air	Debit (liter/detik)	Elavasi (mdpl)	Kecamatan
9	Babasaram	1	32	Maba Tengah
10	Jara jara	< 1	47	Maba Utara
11	Lili	1	36	Maba Utara
12	Gaifoli Marasipno	5	22	Maba Tengah
13	Miaf	1,5	31	Maba Tengah
14	Maratana Jaya	0,5	40	Maba Tengah
15	Telaga Jaya	2	161	Wasile Selatan
16	Pintatu	5	209	Waile Selatan
17	Tomares	2	450	Waile Selatan
18	Tabanalou	300	75	Waile Selatan
19	Ake Jawi	10	60	Waile Selatan
20	Waijoi	40	769	Waile Selatan
21	Yawal	10	35	Waile Selatan

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,

Selain mata air, sumber air lainnya adalah sungai yang tersebar di wilayah Halmahera Timur, yaitu sebanyak 15 sungai yang sebagian besar bermata air di daerah pegunungan, sedangkan lainnya dari mata air di lereng-lereng yang letaknya lebih rendah. Selain air hujan, sungai tersebut juga menampung aliran air dari telaga/embung/sumber-sumber yang banyak terdapat di daerah hulunya. Sungai Ake Sangai merupakan sungai terpanjang yaitu, 60 km yang merupakan aliran sungai Laiwui. Tabel berikut menyajikan nama-nama sungai di Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 2.14 Nama – Nama Sungai di Kabupaten Halmahera Timur

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Aliran Sungai
1	Ake Pariama	17	Wasile
2	Ake Soalat	15	Wasile
3	Ake Subaim	12	Wasile
4	Ake Mancalele	8	Wasile
5	Ake Opyang	22	Wasile
6	Ake Tulling	22	Wasile
7	Ake Lolobata	12	Wasile
8	Ake Gagaeli	18	Wasile
9	Ake Pamalanga	42	Maba
10	Ake Onat	45	Maba
11	Ake Gau	10	Maba
12	Ake Sangaji	60	Maba
13	Ake Terwele	23	Maba
14	Ake Waci	28	Maba
15	Ake annas	25	Maba

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,

Sumber air lainnya yang juga berperan penting dalam mendukung pembangunan adalah keberadaan sejumlah embung. 'Sumber air' ini terletak di lima sungai besar, yang masing-masing berada pada wilayah Kecamatan Maba, Maba Tengah, Kota Maba, dan Wasile Tengah. Selain berfungsi untuk menampung air dan mencegah banjir, embung-embung ini juga dapat difungsikan sebagai sumber air alternatif untuk irigasi pertanian. Saat ini, embung-embung yang ada diperkirakan mampu menampung air hingga total mencapai 360.000 m³. Untuk lebih jelasnya mengenai embung yang ada di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- Embung dari sungai Ake Akelamo (volume ± 100.000 m³).
- Embung dari sungai Ake Noe (volume ± 30.000 m³).

- c) Embung dari sungai Air Onat (volume $\pm 80.000 \text{ m}^3$).
- d) Embung dari sungai Air Sangaji (volume $\pm 100.000 \text{ m}^3$).
- e) Embung dari sungai Ake Waci (volume $\pm 60.000 \text{ m}^3$).
- f) Embung dari sungai Air Dodaga (volume $\pm 50.000 \text{ m}^3$).

F. KLIMATOLOGI

Kondisi geografis Kabupaten Halmahera Timur dapat dikategorikan beriklim tropis dan kondisi alam Kabupaten Halmahera Timur dipengaruhi oleh 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan kondisi suhu udara, kelembaban udara yang diuraikan dapat tabel berikut.

**Tabel 2.15 Jumlah Suhu dan Kelembaban Udara
di Kabupaten Halmahera Timur menurut Bulan, Tahun 2020**

No	Bulan	Suhu Udara (OC)			Kelembaban Udara (%)		
		Max	Min	Rata-Rata	Max	Min	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	31	25	27	94	72	85
2	Februari	31	25	27	92	74	84
3	Maret	31	25	27	94	70	86
4	April	31	25	27	94	69	85
5	Mei	31	25	27	95	73	86
6	Juni	31	24	27	95	73	86
7	Juli	31	25	27	94	71	85
8	Agustus	31	25	27	94	69	84
9	September	30	24	27	94	73	86
10	Oktober	31	25	27	92	69	83
11	November	31	25	27	95	76	87
12	Desember	31	25	27	102	73	90
Jumlah		371	298	324	1135	865	1027
Rata-Rata		31	25	27	95	72	86

Sumber : Halmahera Timur Dalam Angka, BPS Tahun 2020

Dari tabel diatas, suhu udara per tahun maksimalnya mencapai 31°C dan minimalnya 25°C dengan rata-rata per tahun suhu udara mencapai 27°C dengan kelembaban udara per tahun maksimal mencapai 95% dan minimal mencapai 72% dengan rata-rata 86% pertahunnya. Untuk tekanan udara, kecepatan angin dan penyinaran matahari dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.16 Jumlah Suhu dan Kelembaban Udara
di Kabupaten Halmahera Timur menurut Bulan, Tahun 2020**

No	Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecapatan Angin (Knot)	Penyinaran Matahari (%)
1	2	3	4	5
1	Januari	1.011,0	4	45
2	Februari	1.011,9	6	53
3	Maret	1.012,1	4	57
4	April	1.012,4	4	55
5	Mei	1.011,8	3	50
6	Juni	1.012,4	3	55
7	Juli	1.012,4	3	52
8	Agustus	1.012,0	3	46
9	September	1.012,6	3	46
10	Oktober	1.011,2	3	66
11	November	1.009,9	3	59
12	Desember	1.010,6	4	51

No	Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecapatan Angin (Knot)	Penyinaran Matahari (%)
1	2	3	4	5
	Jumlah	12.140,3	43	635
	Rata-Rata	1.011,7	4	53

Sumber : Halmahera Timur Dalam Angka, BPS Tahun 2020

Dari tabel diatas, terlihat rata-rata tekanan udara di Kabupaten Halmahera Timur per tahun mencapai 1.011,1 mb, kecepatan angin rata-rata mencapai 4 knot dan tingkat penyinaran matahari rata-rata mencapai 53% per tahun. Tabel berikut memberikan gambaran curah hujan dan hari hujan di tahun 2020.

Tabel 2.17 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Halmahera Timur menurut Bulan, Tahun 2020

No	Bulan	Curah Hujan (Mm)	Hari Hujan
1	2	3	4
1	Januari	367	26
2	Februari	149	18
3	Maret	255	25
4	April	275	20
5	Mei	354	23
6	Juni	327	25
7	Juli	238	23
8	Agustus	140	22
9	September	142	20
10	Oktober	121	14
11	November	161	24
12	Desember	202	24
	Jumlah	2731	264
	Rata-Rata	228	22

Sumber : Halmahera Timur Dalam Angka, BPS Tahun 2020

Dari tabel diatas, total curah hujan rata-rata mencapai 228 mm pertahun dengan rata-rata hari hujan 22 hari. Curah hujan tertinggi di bulan Januari mencapai 367 mm dengan jumlah hari hujan 26 hari, kemudian pada bulan mei mencapai 354 mm dengan jumlah hari hujan 23 hari, sedangkan curah hujan terendah pada bulan oktober 121 mm dengan jumlah hari hujan 14 hari.

G. PENGGUNAAN LAHAN

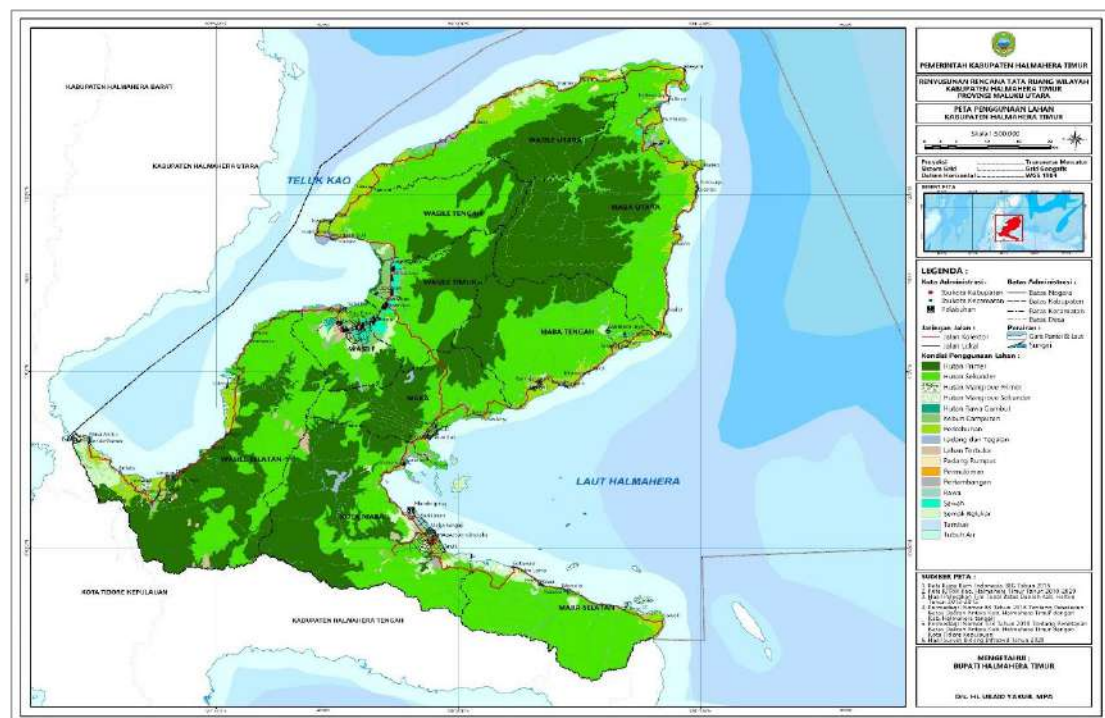
Kabupaten Halmahera didominasi oleh peruntukan hutan yang terdiri dari hutan primer seluas 252.344,61 Hektar dan hutan sekunder seluas 309.341,32 Hektar atau 47,64% dari total luas wilayah kabupaten. Kemudian peruntukan yang luasnya dibawah > 10% dari total luas wilayah yakni perkebunan seluas 36.113,15 Hektar atau 5,56% dan semak belukar seluas 18.187,58 hektar. Sisa merupakan peruntukan yang luasnya > 1% dari luas wilayah kabupaten. Selanjutnya untuk lahan pertanian di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2020 yang terdiri dari sawah seluas 18.187,58 Hektar atau 0,72%, ladang dan tegalan seluas 4.578,94 hektar atau 0,71%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2020

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Primer	252.344,61	38,86%
2	Hutan Sekunder	309.341,32	47,64%

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
3	Hutan Mangrove Primer	2.594,46	0,40%
4	Hutan Mangrove Sekunder	2.374,07	0,37%
5	Hutan Rawa Gambut	109,89	0,02%
6	Kebun Campuran	6.326,96	0,97%
7	Perkebunan	36.113,15	5,56%
8	Ladang dan Tegalan	4.578,94	0,71%
9	Lahan Terbuka	4.967,48	0,76%
10	Padang Rumput	1.031,12	0,16%
11	Permukiman	2.557,72	0,39%
12	Pertambangan	1.786,87	0,28%
13	Rawa	871,09	0,13%
14	Sawah	4.652,05	0,72%
15	Semak belukar	18.187,58	2,80%
16	Tambak	11,25	0,002%
17	Tubuh Air	3.652,03	0,56%
Total		649.353,31	100,33%

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,



Gambar 2. 8 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Halmahera Timur

Sumber : Laporan Pendahuluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera, 2021-2041

1. KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung menjadi potensi bagi lokasi penyediaan sumber air serta sebagai perlindungan terhadap kawasan bawahnya. Luas kawasan lindung di Kabupaten Halmahera Timur ditunjukkan sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.19 Luas Kawasan Lindung Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	HL		HSA	
		2012	2020	2012	2020
1	Kota Maba	29.525,00	23.147,32	-	-
2	Maba	7.860,00	11.431,26	1.040,00	1.093,57

No	Kecamatan	HL		HSA	
		2012	2020	2012	2020
3	Maba Selatan	1.651,00	2.006,83	-	-
4	Maba Tengah	4.814,00	5.025,95	18.349,00	14.756,20
5	Maba Utara	529,00	537,24	17.371,00	38.834,44
6	Wasile	7.592,00	4.590,42	2.005,00	-
7	Wasile Selatan	24.488,00	26.702,38	6.818,00	8.791,63
8	Wasile Timur	13.737,00	10.844,21	22.894,00	13.149,16
9	Wasile Tengah	4.715,00	8.352,46	7.635,00	9.334,67
10	Wasile Utara	2.301,00	2.380,33	6.120,00	8.246,18
Total		97.212,00	95.018,40	82.232,00	94.205,85

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (yang dalam hal ini terdiri dari hutan lindung), tersebar di hampir seluruh Kecamatan dengan luasan ± 95.018,40 Ha. Adapun kawasan suaka alam yang terdiri atas beberapa jenis, baik di daratan maupun di wilayah perairan laut yaitu Taman Nasional Aketajawe-Lolobata dengan luasan ± 94.205,85 Ha.

2. KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Luas kawasan budidaya menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2012-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Luas Kawasan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Hutan Produksi (Ha)					
		Tetap		Terbatas		Dapat Di Konversi	
		2012	2020	2012	2020	2012	2020
1	Kota Maba	9.597,00	9.490,50	35.177,00	39.299,28	18.131,00	14.385,19
2	Maba	639,00	639,40	18.513,00	20.781,55	3.693,00	2.832,32
3	Maba Selatan	13.044,00	12.265,13	9.374,00	15.213,42	11.035,00	13.348,30
4	Maba Tengah	16.038,00	15.922,36	14.827,00	15.089,72	5.889,00	6.161,88
5	Maba Utara	12.384,00	12.457,35	27.199,00	28.543,24	20.443,00	21.054,24
6	Wasile	651,00	-	1.755,00	11.928,44	902,00	916,85
7	Wasile Selatan	3.558,00	3.207,00	45.211,00	30.026,23	3.718,00	4.520,43
8	Wasile Timur	2.980,00	1.656,15	9.871,00	8.190,78	577,00	334,78
9	Wasile Tengah	12.867,00	13.051,66	10.547,00	13.732,15	-	242,57
10	Wasile Utara	6.322,00	8.191,13	16.676,00	18.568,73	7.470,00	7.022,50
Total		78.080,00	76.880,68	189.150,00	201.373,54	71.858,00	70.819,06

Sumber : Laporan Pendaluan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021-2041,

H. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

1. KAWASAN STRATEGIS

a) Kawasan Strategis Kabupaten

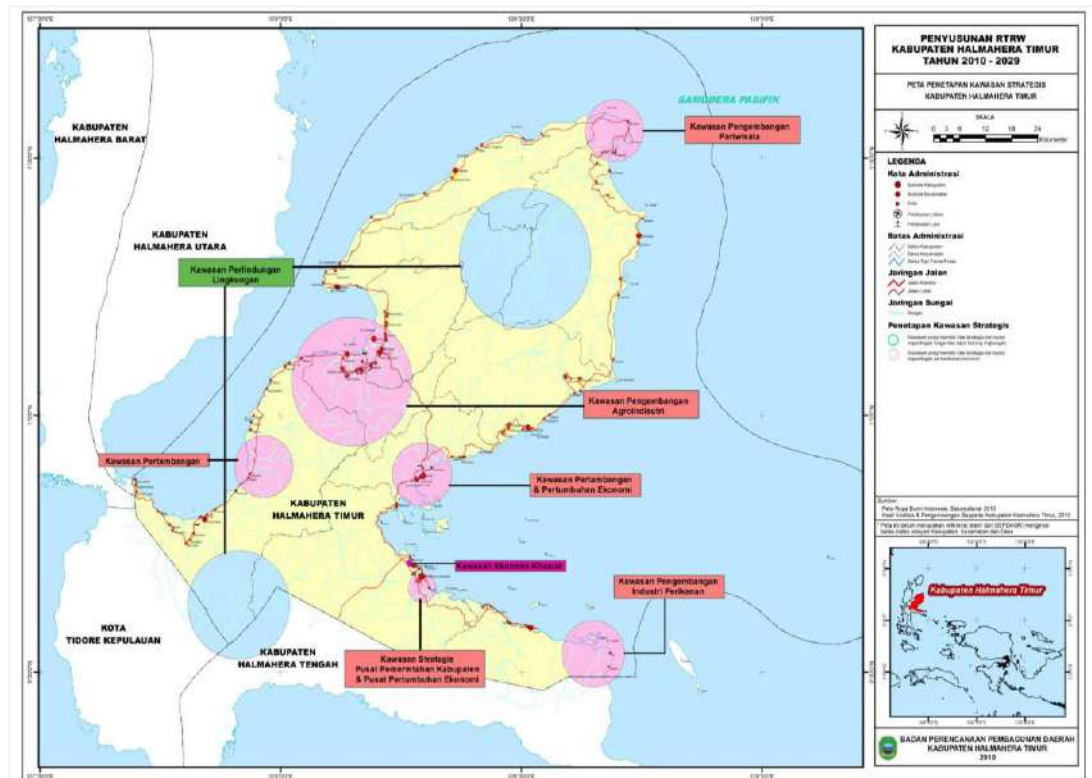
kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,

antara lain adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia. Nilai strategis kawasan tingkat kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Kawasan strategis Kabupaten Halmahera Timur dalam mewujudkan pola ruang terdiri atas :

- 1) kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
 - a) Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Desa Wailukum Kec. Kota Maba;
 - b) Kawasan Simpul Ekonomi Kabupaten yang terdapat di Kota Maba Kecamatan Kota Maba, Buli Kecamatan Maba, Subaim Kecamatan Wasile, dan Nusa Jaya Kecamatan Wasile selatan;
 - c) Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri atas :
 - (1) Kawasan tanaman pangan terdapat di Kawasan transmigrasi Patlean Kecamatan
 - (2) Kawasan tanaman holtikultura dan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Maba Selatan;
 - (3) Kawasan sawah tadah hujan terdapat di Kawasan transmigrasi Maba kecamatan Kota Maba.
 - d) Kawasan Pengembangan Perikanan, terdiri atas :
 - (1) Kawasan Perikanan tangkap dan budidaya laut terdapat di Kecamatan Maba Selatan
 - (2) Kawasan perikanan tangkap dan sumberdaya kelautan dengan komoditas seperti cumi dan ubur-ubur yang terdapat di Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan
 - e) Kawasan pembangunan industri nikel yang terdapat di Kecamatan Kota Maba, Maba dan Wasile Selatan
 - f) Kawasan Pengembangan Pariwisata terdiri atas :
 - (1) Kawasan wisata bahari, terdapat di Jara-jara
 - (2) Kawasan wisata bahari dan konservasi laut terdapat di Teluk Buli
- 2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan seni dan suku asli Halmahera Timur
- 3) Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdapat di Taman Nasional Lolobata dan Aketajawe.

Peta kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



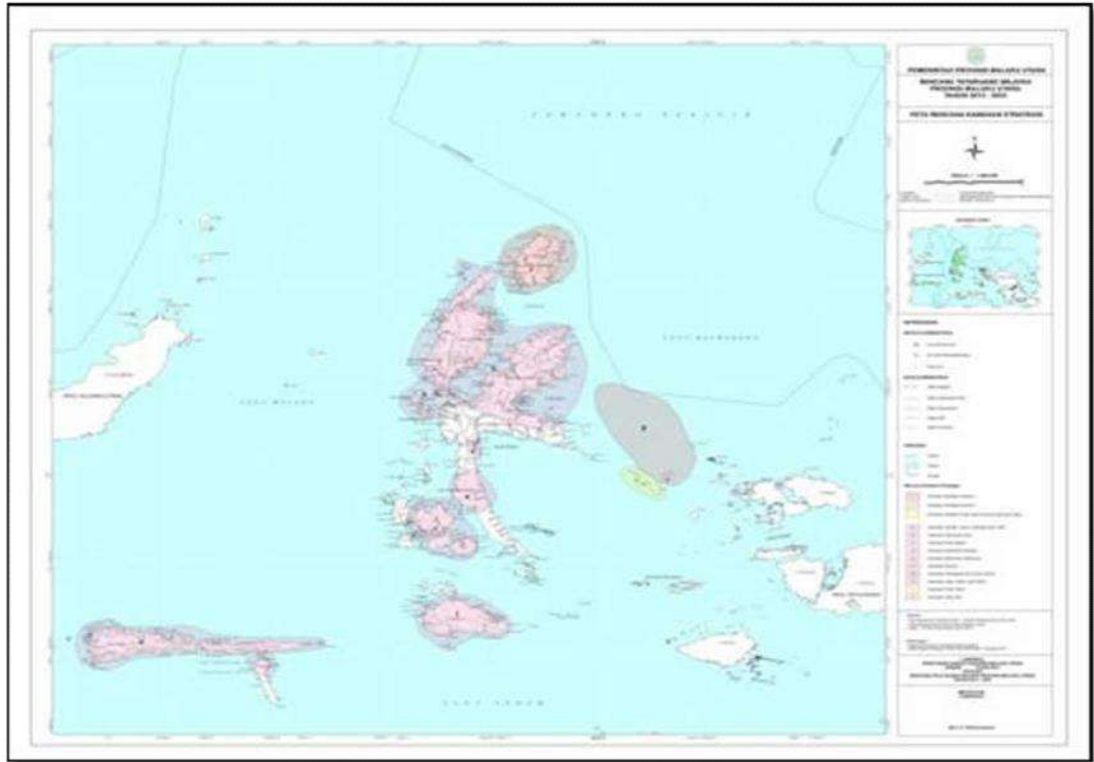
Gambar 2. 9 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Halmahera Timur

Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029

b) Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara

Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Provinsi Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan juga dibagi atas beberapa kawasan pengembangan sebagai kawasan strategis. Kabupaten Halmahera Timur dalam Kawasan strategis Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam RTRW Provinsi Maluku Utara 2013 – 2033, Terdiri dari:

- 1) Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Pulau Jiuw diarahkan pada pengembangan Pariwisata dan Hankam.
- 2) Kawasan Strategis Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera Timur diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi.



Gambar 2. 10 Peta Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara

Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

c) Kawasan Strategis Nasional

Kawasan strategis Nasional merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kabupaten Halmahera Timur dalam lingkup Kawasan Strategis Nasional termasuk dalam Kawasan Strategis Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat.

Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dengan Negara Palau, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Cakupan wilayah di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara meliputi; 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan. Nilai Strategis Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat antara lain :

- 1) Posisi strategis perbatasan Negara Maluku-Papua Barat dengan Republik Palau yang merupakan destinasi internasional wisata bahari;
- 2) Belum adanya pusat pelayanan kawasan perbatasan negara di Maluku Utara-Papua Barat; a) Dekat dengan Filipina yang merupakan Pusat perikanan; b) Terletak di bibir Pasifik (Ekonomi Dunia masa depan)
- 3) Belum dilakukan perundingan tentang garis batas laut, ZEE, Landas Kontinen, dan Zona tambahan dengan Republik Palau;

- 4) Maraknya illegal fishing karena kurangnya fasilitas pertahanan dan keamanan
- 5) Potensi perikanan tangkap yang besar, namun baru dimanfaatkan 20% saja;

Selain nilai strategis, Ada satu tantangan dalam perbatasan antar Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat yaitu Potensi Konflik Kepemilikan Pulau Sain (Pulau Sayang). Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara di Maluku Utara – Papua Barat dan Perbatasan Laut yang berbatasan dengan Negara Republik Palau, 4 (empat) pulau kecil terluar:

- 1) Pulau Jiew (Maluku Utara)
- 2) Pulau Budd
- 3) Pulau Fani
- 4) Pulau Miossu

Konektifitas Penyeberangan Antar Pulau pada perbatasan antar Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat terdiri dari :

- 1) Sabuk Utara Penyeberangan Indonesia pada jalur Daruba – Biak;
- 2) Sabuk Tengah Penyeberangan Indonesia pada jalur Halmahera Timur - Patani – P. Gebe – Raja Ampat - Sorong
- 3) Potensi Jalur Baru penyeberangan (ferry) antar provinsi:
- 4) Kepulauan Widi – Raja Ampat;
- 5) Sum (Obi Timur) – Raja Ampat

Tujuan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara RI – Palau meliputi:

- 1) Kawasan fungsi pertahanan & keamanan wilayah laut yang efektif untuk menjamin keutuhan kedaulatan & ketertiban wilayah Negara;
- 2) Kawasan budi daya berbasis perikanan, pertambangan dan pariwisata untuk kemandirian pangan, ekonomi antar wilayah, dan perdagangan antar negara, yang berkelanjutan;
- 3) Kawasan lindung perairan dengan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati dan sempadan pantai pulau-pulau kecil terluar;
- 4) Sistem pusat pelayanan kawasan perbatasan negara yang efektif sebagai pusat ekonomi; pintu gerbang negara; dan pusat pertahanan dan keamanan;
- 5) Akses prasarana antar pusat pelayanan dan pulau-pulau kecil terluar, ketersediaan sarana dasar yang memadai, serta keterkaitan selektif dengan eksternal;
- 6) Kerjasama perlindungan dan pengembangan wilayah dengan Negara Palau dan Filipina.

2. KAWASAN TERPADU

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur saat ini, merencanakan mengembangkan 11 (sebelas) Kawasan Terpadu Baru untuk mendukung kegiatan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kawasan Perkotaan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang. Adapun kawasan terpadu baru antara lain sebagai berikut.

- 1) Adanya Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur merupakan wilayah di Provinsi Maluku Utara dengan luasan lahan pertanian tanaman pangan terluas. Upaya pengembangan sektor pertanian ini memberikan tampak terhadap pertumbuhan PDRB. Sumbangsi sektor pertanian terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur selalu berupaya untuk meningkatkan lahan produktif untuk peningkatan jumlah produksi pertanian. Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah daerah yaitu adanya rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Baru di Wilayah Kecamatan Kota Maba.
- 2) Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Sondo-Sondo Sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu
Pengembangkan beberapa Kawasan Terpadu Baru untuk mendukung kegiatan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kawasan Perkotaan. Salah satu rencana pengembangan Kawasan tersebut yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Sondo-Sondo sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu sebagai upaya pengembangan sektor pertanian sub sektor perkebunan dengan komoditi cengkeh, pala dan kakao.
- 3) Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake di Kecamatan Wasile Selatan
Rencana pengembangan Kawasan terpadu lainnya yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur pada sektor perikanan yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake di Kecamatan Wasile Selatan dengan luasan 2.436,60 Hektar. Kawasan tersebut hingga saat ini merupakan Kawasan perikanan tangkap yang sudah berkembang dengan kata lain salah satu Kawasan Perikanan Tangkap yang memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Halmahera Timur. Produksi perikanan yang unggul pada Kawasan ini yaitu ikan pelagis kecil, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur berupaya untuk mengembangkan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake di Kecamatan Wasile Selatan yang kedepannya berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
- 4) Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba Selatan
Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba Selatan. Potensi perikanan tangkap pada Kawasan ini antara lain jenis ikan demersal sehingga fokus pengembangan diarahkan pada potensi yang dimiliki. Jumlah produksi perikanan tangkap pada kawasan ini setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDBR Kabupaten Halmahera Timur. Selain kondisi tersebut, kawasan ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena kawasan ini berada pada Wilayah Perbatasan Kabupaten (Perbatasan antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah). Dengan adanya pengembangan kawasan ini, diharapkan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi

Kabupaten Halmahera Timur, karena berpontesi memperluas areal pemasaran produksi perikanan sampai ke Kabupaten Halmahera Tengah.

5) Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara

Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo yang dipadukan dengan Pengembangan Kawasan Pariwisata Jara-Jara. Keterpaduan dengan Kawasan pariwisata Jara-jara yang diarahkan dengan konsep pengembangan wisata bahari sebagai komplementer dari Kawasan perikanan terpadu. Konsep pengembangan Kawasan yang memadukan dua sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Timur dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi, karena memiliki keterpaduan fungsi yang dapat menunjang satu sama lain. Nilai strategis lainnya yaitu pengembangan Kawasan Perikanan terpadu Dabo dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara ini dapat dipadukan dengan pengembangan sektor perikanan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dan Pengembangan Sektor Perikanan dan sektor pariwisata Kabupaten Pulau Morotai (Segitiga Emas di Provinsi Maluku Utara).

6) Rencana Pengembangan Kawasan Fayaul-Bukutio Sebagai Kawasan Perkotaan Baru

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur terkait pengembangan wilayah berbasis Kawasan untuk pengembangan kawasan perkotaan salah satunya yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Fayaul-Bukutio sebagai kawasan perkotaan baru. Rencana pengembangan Kawasan ini untuk mendukung adanya rencana pembentukan kecamatan baru di Kecamatan Wasile Selatan yaitu Kecamatan Wasile Barat Daya dengan rencana Ibukota di Kawasan Fayaul – Bukutio.

7) Rencana Pengembangan Kawasan Sekitar Bandara Buli Sebagai Kawasan Perkotaan Baru

Kawasan disekitar Bandara Buli memiliki sisi strategis karena disamping lokasi yang berada di sekitar bandara, kawasan ini juga dilalui oleh jaringan kolektor yang menghubungkan antara Kawasan Perkotaan Buli-Lapter dan Kawasan Perkotaan Wayamli. Selain itu, kawasan ini merupakan kawasan cepat tumbuh yang ditandai dengan mulai bermunculannya kawasan permukiman baru dan kegiatan ekonomi mikro yang tidak terencana dan tidak tertata. Terhadap kondisi tersebut, bila fenomena ini tidak direspon maka dalam beberapa tahun kedepan akan menjadi kawasan yang berpotensi kumuh.

Kondisi tersebut merupakan fenomena *Urban Sprawl* (perembetan linier) yang tidak bisa ditekan perkembangannya, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengontrol perembetan tersebut. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mulai merespon fenomena tersebut dengan strategi penanganan berupa Rencana Pengembangan Kawasan Sekitar Bandara Buli sebagai Kawasan Perkotaan Baru.

8) Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Maba

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Maba (Perluasan Ibukota Kabupaten Halmahera Timur). Perluasan ibukota Kabupaten Halmahera Timur ini bertujuan untuk penambahan aktifitas perkotaan dalam

menunjang fungsi utama Kawasan Perkotaan Maba yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Permukiman, Pusat Perdagangan dan Jasa dan Pusat Pendidikan. Selain untuk menunjang fungsi utama tersebut, adanya rencana pengembangan kawasan permukiman baru dan Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan tinggi. Selain itu, tujuan utama perluasan areal Kawasan Perkotaan ini yaitu sebagai upaya antisipatif untuk mengontrol laju pembangunan dengan membentuk struktur jaringan jalan utama sebagai pondasi awal. Sehingga perkembangan kota kedepannya dapat dikendalikan sejak dini dan tidak terjadi *Urban Sprawl*.

9) Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Wayamli

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Wayamli dengan tujuan perluasan dan penataan Kota. Kawasan Perkotaan Wayamli pada saat penyusunan RTRW Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029 hanya ditetapkan di Desa Wayamli dan Desa Yawanli. Sedangkan Rencana pengembangan Perkotaan Wayamli kedepannya direncanakan dari Desa Wayamli, Desa Yawali, Desa Bebsili, Desa Beringin Lamo, Desa Babasaram dan Desa Bangul dengan fungsi utama yang akan difokuskan selain fungsi yang telah ada, direncanakan sebagai Sentra Produksi Pertanian dan Perkebunan, dengan tujuan untuk mendukung Program Nasional (Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Pedesaan Mandiri).

10) Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Lolobata

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Lolobata yaitu perluasan dan penataan kota serta pengembangan sentra produksi dan sentra pemasaran hasil perkebunan. Selain fungsi yang telah diembani, Kawasan Perkotaan Lolobata kedepannya diarahkan sebagai kawasan pendukung dengan fungsi memperpendek layanan perdagangan dan jasa untuk wilayah Kecamatan Wasile Utara. Mengingat kondisi saat ini, pusat pelayanan dari Kecamatan Wasile, Wasile Timur, Wasile Tengah dan Wasile Utara masih terpusat di Kawasan Perkotaan Cemara Jaya.

11) Adanya Penetapan Kawasan Smelter di Buli

Dengan adanya Penetapan Kawasan Smelter Buli yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur perlu melakukan pengembangan perkotaan buli dengan meningkatkan fungsi pelayanan kawasan. Fungsi pelayanan yang ditingkatkan antara lain sebagai Kawasan Industri, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pusat Permukiman, Pusat Pendidikan dan Kawasan Perkantoran. Selain itu, Pemerintah Daerah terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung untuk menunjang segala kebutuhan operasional Kawasan Smelter Buli nantinya.

3. WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan

berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti permukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir. Berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Maluku Utara 2018-2038, potensi pengembangan wilayah melalui Kawasan Pemanfaatan Umum yang merupakan kawasan yang dipergunakan antara lain untuk kepentingan ekonomi khususnya pengembangan sektor perikanan dan pariwisata, untuk Kabupaten Halmahera Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

A) Zona Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Zona perikanan tangkap adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan. Zona perikanan tangkap di perairan Maluku Utara dibagi menjadi 3 (tiga) sub zona yaitu:

- ❖ Sub Zona Perikanan Pelagis Di perairan Halmahera Timur
Pelagis adalah ikan yang hidup dipermukaan sampai kolom perairan laut. Arah pemanfaatan sub zona perikanan pelagis meliputi: Perairan Maba-Teluk Buli, Perairan Patani-Laut Halmahera, Perairan Teluk Buli-Laut Halmahera, Perairan Halmahera Timur-Laut Halmahera, Perairan Teluk Kao-Teluk Wasile, Perairan Teluk Kao-Halmahera Timur-Laut Halmahera.
- ❖ Sub Zona Perikanan Demersal Di perairan Halmahera Timur
Demersal adalah ikan yang hidup dan makan di dasar laut. Arah pemanfaatan sub zona perikanan demersal meliputi: Perairan Pulau Seal-Maba Selatan, Perairan Pulau Cef- Maba Selatan, Perairan Pulau Ingelan-Maba Selatan, Perairan Gotowasi- Teluk Wailo-Maba Selatan, Perairan Teluk Buli, Perairan Pulau Pakal- Maba, Perairan Lolasisa-Maba Utara, Perairan Tanjung Lili-Teluk Lolasisa- Maba Utara, Perairan Dorosagu-Maba Utara, Perairan Subaim-Tanjung Guruo-Wasile, Perairan Teluk Wasile, Perairan Hatetabako-Kakaraeno- Wasile Tengah, Perairan Tanjung Gorango-Teluk Dobo-Maba Utara.
- ❖ Sub Zona Perikanan Pelagis dan Demersal Di perairan Halmahera Timur
Perairan Maba-Buli- Teluk Buli-Halmahera Timur, Perairan Teluk Buli, Perairan Wayamli- Bebsil-Tanjung Bus-Bus-Maba Tengah, Perairan Miaf-Sosolat-Dorosagu- Wasileo-Maba Utara, Perairan Patlean-Teluk Dono-Jara-jara-Maba Utara, Perairan Labi-labi-Tatam-Marimoi-Bololo-Tanjung Nakau-Wasile Utara, Perairan Hilaitetor-Teluk Ifis-

Tanjung Tutuo-Wasile Utara, Perairan Tanjung Guruo-Teluk Wasile-Tanjung Hatetabako-Tanjung Nyaolako-Puo- Halmahera Timur, Perairan Loleba-Saramaake-Wasile-Pulau Roni-Wasile Selatan.

B) Zona Perikanan Budidaya

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sub zona perikanan budidaya meliputi sub zona budidaya laut. Pengembangan sub zona budidaya laut meliputi budidaya laut ikan dan non ikan yang bernilai ekonomis penting. Arahannya pengembangan budidaya laut ikan dan non ikan tersebut meliputi: perairan Pulau Inglan-Maba Selatan, perairan Pulau Cef-Maba Selatan, perairan Pulau Wor-Teluk Buli-Maba Selatan, perairan Gotowasi-Maba Selatan.

C) Zona Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Zona pariwisata adalah kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan ekosistemnya yang mempunyai daya tarik untuk berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Zona pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara dibagi dalam sub zona:

- ❖ Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Arahannya pengembangan sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Halmahera Timur meliputi : kawasan Tewil dan kawasan Wailukum;
- ❖ Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut
Kegiatan pariwisata ini terutama bertumpu pada kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya baik di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil seperti menyelam (*diving*) dan *snorkeling*. Arahannya pengembangan sub zona wisata alam bawah laut menyelam (*diving*) di Kabupaten Halmahera Timur meliputi: Pulau Oto, Pulau To, Tanjung Nakau, Pulau Lewi, Pulau Plum, Pulau Sloton, Teluk Buli, di Kabupaten Halmahera Timur.
Arahannya pengembangan sub zona wisata alam bawah laut (*snorkeling*) di Kabupaten Halmahera Timur meliputi: Pulau Foli, pantai Dodaga, Tanjung Patlean, Tanjung Sipub, Tanjung Gyekloldemdi, Pulau Woi, di Kabupaten Halmahera Timur.
- ❖ Sub Zona Wisata Olahraga Air
Sub zona wisata olahraga air yang dimaksud adalah jet ski, dan mancing. Arahannya pengembangan sub zona wisata olahraga air di Kabupaten Halmahera Timur meliputi: Tanjung Gorango, Tanjung Lieli, Teluk Wayaubo, Tanjung Dorosagu, Tanjung Wayamli, Pulau Sloton, Teluk Buli.

4. WILAYAH RAWAN BENCANA

Potensi bencana Kabupaten Halmahera Timur diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana yang menurut pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Timur. Dari pencatatan tersebut, bencana berpotensi terjadi di Kabupaten Halmahera Timur adalah banjir, banjir bandang, longsor, gelombang ekstrim dan abrasi dan cuaca ekstrim. Namun, tidak menutup kemungkinan bencana lain dapat terjadi di Kabupaten mengingat faktor-faktor kondisi daerah yang berkaitan dengan bencana yang diketahui berdasarkan pengkajian risiko bencana.

Secara keseluruhan, identifikasi potensi bencana tersebut diperoleh dari pengkajian risiko bencana dan kesepakatan di daerah. Bencana yang berpotensi di Kabupaten Halmahera Timur dari hasil kajian risiko bencana dan kesepakatan daerah di dapat 9 bencana yaitu: banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan tsunami. Bencana-bencana tersebut dikategorikan berpotensi disebabkan kondisi daerah dan faktor penyebab bencana (faktor alam, non alam, maupun ulah manusia). Penetapan potensi bencana tersebut berdasarkan metodologi pengkajian dan kesepakatan daerah Kabupaten Halmahera Timur. Sembilan potensi bencana di Kabupaten Halmahera Timur tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kabupaten Halmahera Timur untuk tahun 2018 sampai tahun 2022. Untuk kajian bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.21 Potensi Bahaya di Kabupaten Halmahera Timur

No	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Banjir	78.620	TINGGI
2	Banjir Bandang	20.484	TINGGI
3	Cuaca Ekstrim	159.687	TINGGI
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	8.864	TINGGI
5	Gempabumi	645.801	TINGGI
6	Kekeringan	645.801	TINGGI
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	542.007	TINGGI
8	Tanah Longsor	456.113	TINGGI
9	Tsunami	1.974	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

A) Kawasan Bujur

Banjir didefinisikan sebagai peristiwa terjadinya genangan pada suatu daerah yang biasanya kering (bukan daerah rawa) atau meluapnya limpasan air permukaan (*runoff*) yang volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sungainya. Secara keseluruhan bencana banjir memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total luas bahaya 41.992 Ha yang berada pada kelas tinggi. Kelas bahaya tinggi pada Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana.

Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Halmahera berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap

Kecamatan Terdampak, Hal Tersebut Dilihat Berdasarkan Banyaknya Jumlah Penduduk beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana banjir per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 65.489 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Luas Wilayah Bahaya Banjir dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	12.505	Tinggi	10.066	Tinggi
2	Maba	4.102	Tinggi	8.519	Tinggi
3	Maba Selatan	7.446	Tinggi	5.596	Tinggi
4	Maba Tengah	9.792	Tinggi	5.499	Tinggi
5	Maba Utara	9.787	Tinggi	6.641	Tinggi
6	Wasile	9.542	Tinggi	7.583	sedang
7	Wasile Selatan	11.889	Tinggi	8.424	Tinggi
8	Wasile Tengah	3.147	Tinggi	3.058	Tinggi
9	Wasile Timur	7.373	Tinggi	9.812	Sedang
10	Wasile Utara	3.037	Tinggi	291	Tinggi
KABUPATEN		41.992	Tinggi	65.489	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

B) Kawasan Banjir Bandang

Banjir Bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar (seperti kayu dan sebagainya). Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar.

Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana Banjir Bandang per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur dari 10 (sepuluh) kecamatan 8 (delapan) kecamatan yang berpotensi, 3 (tiga) berada pada kelas sedang yaitu Kec. Maba tengah, Kec. Wasile dan Kec. Wasile Timur dan 5 (lima) kecamatan berada pada kelas tinggi yaitu Kec. Kota Maba, Kec. Maba, Kec. Maba Utara, Kec. Wasile Selatan dan Kec. Wasile Utara. Sedangkan untuk potensi penduduk terpapar bencana banjir bandang pada Kabupaten Halmahera Timur memiliki kelas tinggi, kelas ini diperoleh dari kelas maksimal per kecamatan. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana Banjir Bandang per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 5.359 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Luas Wilayah Bahaya Banjir Bandang dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	3.050	Tinggi	636	Tinggi
2	Maba	1.606	Tinggi	732	Tinggi
3	Maba Selatan	50	Tinggi	-	-
4	Maba Tengah	1.802	Tinggi	110	Sedang
5	Maba Utara	3.738	Tinggi	441	Tinggi
6	Wasile	2.915	Tinggi	1.865	Sedang
7	Wasile Selatan	3.872	Tinggi	747	Tinggi
8	Wasile Tengah	569	Tinggi	-	-
9	Wasile Timur	1.031	Tinggi	424	Sedang
10	Wasile Utara	1.850	Tinggi	404	Tinggi
KABUPATEN		13.611	Tinggi	5.359	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

C) Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrem. Misalnya perubahan ekstrem suhu udara atau perubahan ekstrem curah hujan. Secara keseluruhan bencana cuaca ekstrem memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 159.686 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.

Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrem per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrem per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 78.026 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Luas Wilayah Bahaya Cuaca Ekstrem dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	21.909	Sedang	11.098	Sedang
2	Maba	6.620	Tinggi	8.964	Tinggi
3	Maba Selatan	21.923	Tinggi	6.803	Tinggi
4	Maba Tengah	14.427	Tinggi	6.377	Tinggi
5	Maba Utara	19.324	Tinggi	7.520	Tinggi
6	Wasile	10.743	Tinggi	7.791	Tinggi
7	Wasile Selatan	22.812	Tinggi	11.288	Tinggi
8	Wasile Tengah	13.354	Tinggi	5.658	Tinggi
9	Wasile Timur	10.528	Tinggi	9.974	Tinggi
10	Wasile Utara	18.041	Tinggi	2.551	Tinggi
KABUPATEN		159.686	Tinggi	78.024	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

D) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana>). Secara keseluruhan bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 8.864 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.

Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar terdampak 9 (sembilan) kecamatan, hanya 1 (satu) kecamatan yang tidak terdampak potensi penduduk terpapar yaitu Kecamatan Wasile Timur hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 19.431 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25 Luas Wilayah Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Serta Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	847	Tinggi	2.010	Tinggi
2	Maba	861	Tinggi	1.614	Tinggi
3	Maba Selatan	599	Tinggi	-	-
4	Maba Tengah	590	Tinggi	1.735	Tinggi
5	Maba Utara	1.580	Tinggi	1.794	Tinggi
6	Wasile	284	Tinggi	2.728	Sedang
7	Wasile Selatan	1.707	Tinggi	227	Tinggi
8	Wasile Tengah	610	Tinggi	4.263	Tinggi
9	Wasile Timur	306	Sedang	2.472	Tinggi
10	Wasile Utara	1.481	Sedang	2.589	Tinggi
KABUPATEN		8.864	Tinggi	19.432	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

E) Gempabumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan. Secara keseluruhan bencana gempabumi memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur adalah 645.801 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.

Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana gempabumi per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah penduduk beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana gempabumi per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 86.260 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26 Luas Wilayah Bahaya Gempa Bumi dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	82.455	Tinggi	11.863	Tinggi
2	Maba	40.631	Tinggi	10.131	Tinggi
3	Maba Selatan	47.626	Tinggi	7.444	Tinggi
4	Maba Tengah	52.724	Tinggi	6.498	Tinggi
5	Maba Utara	89.915	Tinggi	8.174	Tinggi
6	Wasile	48.124	Tinggi	7.864	Sedang
7	Wasile Selatan	134.393	Tinggi	12.827	Tinggi
8	Wasile Tengah	47.630	Tinggi	6.087	Tinggi
9	Wasile Timur	32.328	Tinggi	9.977	Sedang
10	Wasile Utara	69.975	Tinggi	5.395	Tinggi
KABUPATEN		645.801	Tinggi	86.260	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

F) Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan. Secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 645.801 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.

Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana kekeringan per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana kekeringan per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 86.260 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Luas Wilayah Bahaya Kekeringan dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	82.455	Tinggi	11.863	Tinggi
2	Maba	40.631	Tinggi	10.131	Tinggi
3	Maba Selatan	47.626	Tinggi	7.444	Tinggi

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
4	Maba Tengah	52.724	Tinggi	6.498	Tinggi
5	Maba Utara	89.914	Tinggi	8.174	Tinggi
6	Wasile	48.124	Tinggi	7.864	Sedang
7	Wasile Selatan	134.393	Tinggi	12.827	Tinggi
8	Wasile Tengah	47.629	Tinggi	6.087	Tinggi
9	Wasile Timur	32.327	Tinggi	9.977	Sedang
10	Wasile Utara	69.974	Tinggi	5.395	Tinggi
KABUPATEN		645.801	Tinggi	86.260	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

G) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 542.006 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Pada bahaya Kebakaran hutan dan lahan tidak terdapat potensi penduduk terpapar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28 Luas Wilayah Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	73.711	Sedang	-	-
2	Maba	32.520	Sedang	-	-
3	Maba Selatan	42.069	Sedang	-	-
4	Maba Tengah	46.543	Tinggi	-	-
5	Maba Utara	75.646	Sedang	-	-
6	Wasile	37.696	Tinggi	-	-
7	Wasile Selatan	112.507	Tinggi	-	-
8	Wasile Tengah	39.273	Tinggi	-	-
9	Wasile Timur	23.128	Tinggi	-	-
10	Wasile Utara	58.913	Tinggi	-	-
KABUPATEN		542.006	Tinggi	-	-

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

H) Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Secara keseluruhan bencana tanah longsor memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 456.113 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.

Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda untuk

setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 6.182 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Luas Wilayah Bahaya Tanah Longsor dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	56.040	Sedang	528	Tinggi
2	Maba	32.892	Tinggi	1.054	Sedang
3	Maba Selatan	25.682	Sedang	1.022	Tinggi
4	Maba Tengah	38.530	Sedang	233	Tinggi
5	Maba Utara	68.885	Tinggi	668	Sedang
6	Wasile	34.120	Sedang	18	Sedang
7	Wasile Selatan	99.645	Sedang	970	Tinggi
8	Wasile Tengah	31.820	Sedang	93	Tinggi
9	Wasile Timur	18.877	Sedang	3	Sedang
10	Wasile Utara	49.622	Sedang	1.593	Tinggi
KABUPATEN		456.113	Tinggi	6182	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

I) Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Secara keseluruhan bencana Tsunami memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 1.974 Ha yang berada pada kelas tinggi.

Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana tsunami per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana tsunami per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 7.297 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30 Luas Wilayah Bahaya Tanah Longsor dan Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
1	Kota Maba	233	Tinggi	988	Tinggi
2	Maba	163	Tinggi	420	Tinggi
3	Maba Selatan	216	Tinggi	893	Tinggi
4	Maba Tengah	103	Tinggi	443	Tinggi
5	Maba Utara	559	Tinggi	2.311	Tinggi
6	Wasile	35	Tinggi	38	Sedang
7	Wasile Selatan	320	Tinggi	1.435	Tinggi
8	Wasile Tengah	78	Tinggi	295	Tinggi
9	Wasile Timur	42	Tinggi	-	-

No	Kecamatan	Bahaya		Potensi Penduduk Terpapar	
		Luas (Ha)	Kelas	Jiwa	Kelas
10	Wasile Utara	226	Tinggi	472	Tinggi
	KABUPATEN	1.974	Tinggi	7295	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2018-2022

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

A. JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK

kondisi demografis Halmahera Timur juga memegang peranan yang krusial untuk dapat merancang agenda pembangunan selama lima tahun ke depan. Tiga aspek yang akan dibahas dalam lingkup demografi ini meliputi jumlah penduduk, struktur penduduk, dan distribusi penduduk. Penduduk Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bulan Desember Tahun 2020 sebanyak 95.752 jiwa. Lima tahun sebelumnya 2016 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebanyak 90.303 jiwa, meningkat di tahun 2017 menjadi 93.848 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terus terjadi setiap tahunnya hingga tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebanyak 95.560 jiwa. Bila dilihat perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan, Kecamatan Wasile Selatan merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 13.655 jiwa, dimana lima tahun sebelumnya tercatat sebanyak 12.868 jiwa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 31 Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Timur Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Maba	10.914	11.290	11.165	10.973	10.918
2	Maba	13.041	13.000	13.037	12.869	12.964
3	Maba Selatan	8.251	8.200	8.331	8.393	8.366
4	Maba Tengah	6.521	6.633	6.704	6.717	6.777
5	Maba Utara	8.700	9.672	9.637	9.778	9.714
6	Wasile	9.251	10.018	10.284	10.467	10.559
7	Wasile Selatan	12.868	13.335	13.463	13.626	13.655
8	Wasile Timur	11.171	11.419	11.524	11.663	11.686
9	Wasile Tengah	5.345	5.562	5.839	5.971	6.005
10	Wasile Utara	4.241	4.719	4.953	5.103	5.108
	Jumlah	90.303	93.848	94.937	95.560	95.752

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur Tahun 2020

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan luas wilayah, maka tingkat kepadatan penduduk di tahun 2016 mencapai 13,91 jiwa/km² dan di tahun 2020 mencapai 14,70 jiwa/km². Terdapat 4 (empat) kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dari kepadatan penduduk Kabupaten Halmahera Timur di tahun 2020 yaitu Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Selatan, Kecamatan Wasile dan Kecamatan Wasile Timur. Dengan demikian, maka distribusi penduduk di Kabupaten Halmahera Timur tidak merata, penyebaran yang paling merosot terdapat di Kecamatan Wasile. Untuk lebih jelasnya mengenai Kepadatan dan penyebaran penduduk dapat dilihat sebagaimana pada Tabel berikut.

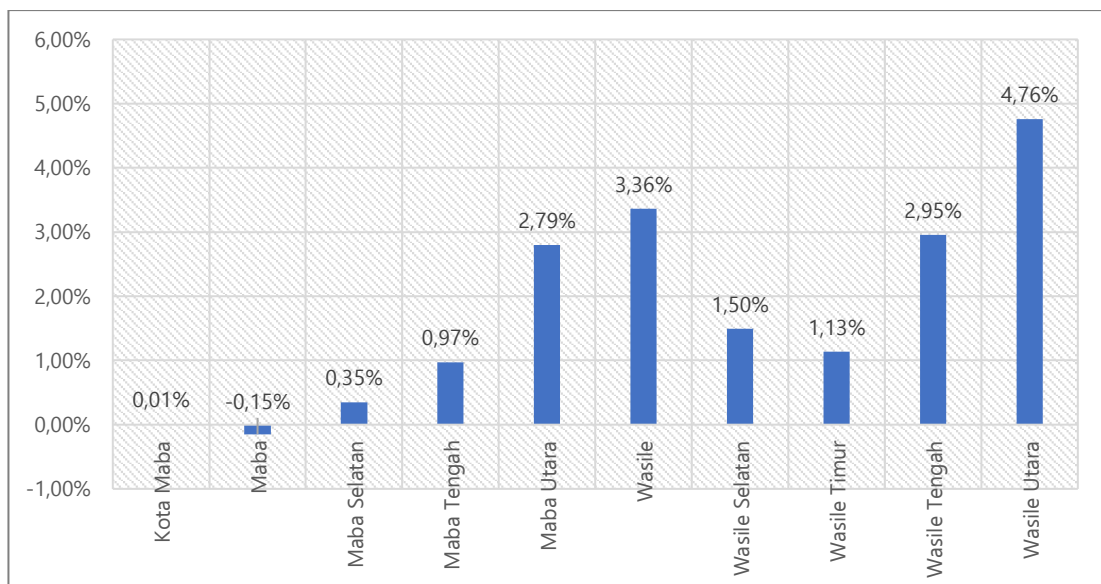
Tabel 2. 32 Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
		2016	2020		2016	2020
1	Kota Maba	11.263	10.918	952,91	11,82	11,46
2	Maba	13.041	12.964	434,89	29,99	29,81
3	Maba Selatan	8.251	8.366	503,77	16,38	16,61
4	Maba Tengah	6.521	6.777	651,92	10,00	10,40
5	Maba Utara	8.700	9.714	1.118,73	7,78	8,68
6	Wasile	9.251	10.559	253,39	36,51	41,67
7	Wasile Selatan	12.868	13.655	1.078,41	11,93	12,66
8	Wasile Timur	11.171	11.686	431,05	25,92	27,11
9	Wasile Tengah	5.345	6.005	490,16	10,90	12,25
10	Wasile Utara	4.241	5.108	600,51	7,06	8,51
Jumlah		90.652	95.752	6.515,74	13,91	14,70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur Tahun 2020

B. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Timur setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang perlu mendapatkan perhatian. Pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (fertilitas), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian (mortalitas) yang terjadi pada semua golongan umur, serta perpindahan penduduk (mobilitas) juga akan memengaruhi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah. Dalam kurun waktu 2016-2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Timur sebesar 1,77%, Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu kecamatan Wasile Utara dengan angka pertumbuhan sebesar 4,76% dan terendah di Kecamatan Maba sebesar -0,15%. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Halmahera Timur menurut Kecamatan Tahun 2016-2020

Sumber : diolah dari data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, 2020

C. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non produktif, pertambahan penduduk, dan angka ketergantungan. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Halmahera Timur menunjukan bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin (*Sex ratio*) di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun pada tahun 2016 sebesar 108,12 dan di tahun 2020 sebesar 107,33, atau mengalami penurunan, artinya, bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat ± 108 penduduk laki-laki di tahun 2018 dan 100 penduduk perempuan terdapat ± 107 . Rasio ini mengisyaratkan tidak terjadi perubahan komposisi *sex ratio* laki-laki terhadap perempuan secara signifikan sejak tahun 2016 hingga 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 33 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio L/P
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kota Maba	5.656	5.262	10.918	107,49
2	Maba	6.796	6.168	12.964	110,18
3	Maba Selatan	4.272	4.094	8.366	104,35
4	Maba Tengah	3.495	3.282	6.777	106,49
5	Maba Utara	5.113	4.601	9.714	111,13
6	Wasile	5.446	5.113	10.559	106,51
7	Wasile Selatan	7.086	6.569	13.655	107,87
8	Wasile Timur	6.003	5.683	11.686	105,63
9	Wasile Tengah	3.033	2.972	6.005	102,05
10	Wasile Utara	2.669	2.439	5.108	109,43
Jumlah		49.569	46.183	95.752	107,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur Tahun 2020

D. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN

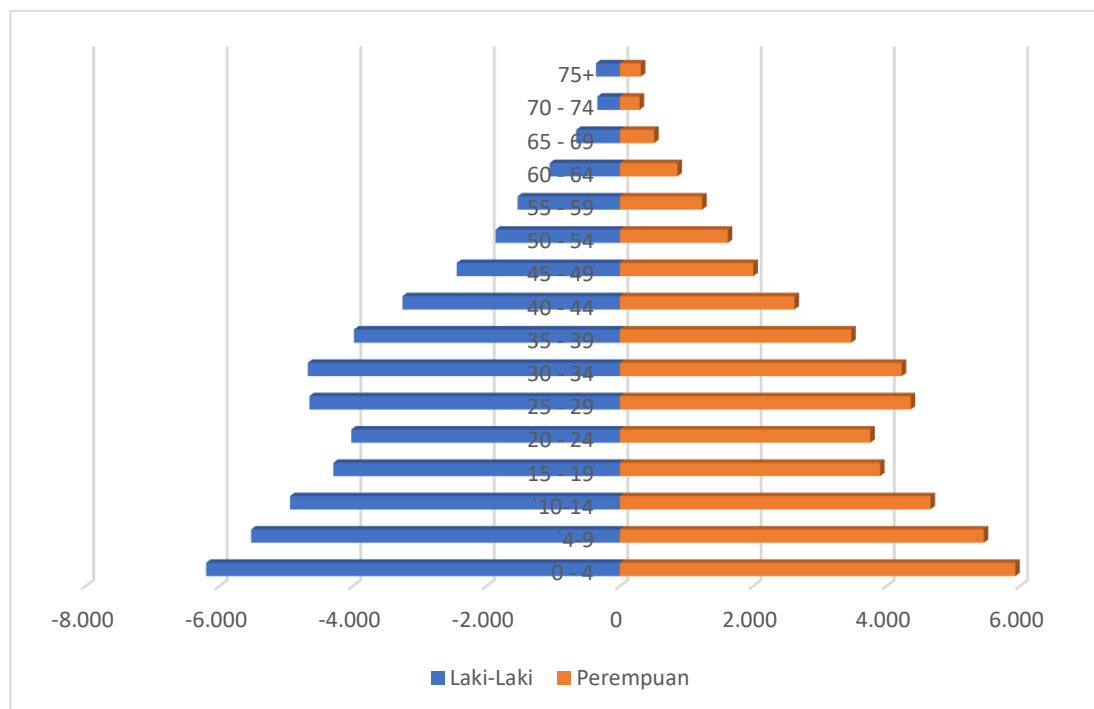
Berdasarkan data statistik Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, proporsi terbesar penduduk di Halmahera Timur masih didominasi oleh kelompok umur 0–4 tahun sebanyak 12.129 jiwa dan proporsi ini cenderung semakin menurun pada kelompok yang lebih tua. Dari komposisi tersebut, penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Komposisi ini memiliki kecenderungan yang sama di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 34 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 - 4	6.195	5.934	12.129
2	4-9	5.521	5.460	10.981
3	10-14	4.939	4.661	9.600
4	15 - 19	4.291	3.904	8.195
5	20 - 24	4.021	3.757	7.778

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
6	25 - 29	4.648	4.364	9.012
7	30 - 34	4.673	4.229	8.902
8	35 - 39	3.981	3.471	7.452
9	40 - 44	3.254	2.620	5.874
10	45 - 49	2.444	2.003	4.447
11	50 - 54	1.859	1.619	3.478
12	55 - 59	1.531	1.235	2.766
13	60 - 64	1.053	865	1.918
14	65 - 69	655	516	1.171
15	70 - 74	336	296	632
16	75+	356	314	670
Jumlah		49.569	46.183	95.752

Sumber : diolah dari data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur Tahun 2020



Gambar 2. 12 Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

diolah dari data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur Tahun 2020

E. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT AGAMA

Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2020 didominasi oleh penduduk beragama Islam sebanyak 62.954 jiwa atau 65,75 persen, kemudian Kristen Protestan sebanyak 32.393 jiwa atau 33,83%, Kristen Katolik sebanyak 373 jiwa atau 0,39%. Untuk penduduk yang beragama Hindu sebanyak 28 jiwa atau 0,03% dan Budha sebanyak 4 jiwa. Sementara itu, hampir sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur memiliki penduduknya yang lebih dari setengah beragama Islam, kecuali Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Wasile Tengah dan Kecamatan Wasile Selatan sebagian besar beragama kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 35 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Agama				
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Kota Maba	9.838	1.064	16	-	-
2	Maba	6.314	6.477	165	8	-
3	Maba Selatan	8.364	2	-	-	-
4	Maba Tengah	4.834	1.936	7	-	-
5	Maba Utara	4.825	4.773	102	13	1
6	Wasile	9.743	814	2	-	-
7	Wasile Selatan	5.947	7.651	52	5	-
8	Wasile Timur	10.072	1.586	23	2	3
9	Wasile Tengah	2.143	3.856	6	-	-
10	Wasile Utara	874	4.234	-	-	-
Jumlah		62.954	32.393	373	28	4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur Tahun 2020

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan paling mendasar dari pembangunan. Sebagaimana rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 54 tahun 2010, aspek ini mencakup tiga fokus Utama : (1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) kesejahteraan masyarakat, serta (3) seni budaya dan olahraga yang secara detail akan disajikan dalam sub-sub bahasan berikut ini.

2.2.1. PERTUMBUHAN PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku atau pun harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga periode saat ini, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah atas barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berdasarkan harga Berlaku, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Di akhir 2016 PDRB ADHB Kab. Halmahera Timur sebesar Rp 2,512 triliun, ditahun 2017 meningkat menjadi 2,751 triliun, meningkat Rp 3,206 triliun pada tahun 2018, meningkat Rp 3,497 triliun, pada tahun 2019 dan pada akhir tahun 2020 meningkat menjadi 3,566 triliun, tabel berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Timur menurut lapangan usaha tahun 2016-2020.

Tabel 2. 36 Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	571,656.16	608,597.59	661,036.65	695,331.75	729,758.61
2	Pertambangan dan Penggalan	630,026.29	697,259.64	954,685.20	1,090,300.96	1,113,127.43
3	Industri Pengolahan	147,302.61	148,666.63	148,456.24	147,392.49	129,097.82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	917.10	1,139.91	1,206.92	1,330.53	1,415.32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	120.03	123.28	130.61	135.68	137.59
6	Konstruksi	226,708.44	261,147.88	315,630.36	341,351.36	325,211.93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	324,782.51	374,730.22	423,066.56	456,648.23	460,059.87

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Transportasi dan Pergudangan	50,391.64	55,772.79	61,110.87	66,129.85	59,657.28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,287.87	5,940.68	6,642.41	7,038.99	6,650.92
10	Informasi dan Komunikasi	62,955.21	65,995.66	70,019.40	72,862.74	74,672.43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	31,307.53	35,104.71	38,307.95	42,163.33	43,922.68
12	Real Estate	1,846.16	1,987.91	2,161.73	2,228.22	2,319.73
13	Jasa Perusahaan	8,053.79	8,795.02	9,729.04	10,364.23	10,541.65
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	362,422.63	390,624.09	410,893.32	454,275.70	495,921.96
15	Jasa Pendidikan	56,918.98	61,223.18	64,970.31	67,731.79	69,074.90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,910.57	25,985.15	28,899.50	31,923.30	34,323.30
17	Jasa lainnya	7,996.74	8,505.60	9,165.60	9,893.90	10,134.01
PDRB		2,512,604.25	2,751,599.94	3,206,112.66	3,497,103.04	3,566,027.43

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun-tahun tersebut meningkat karena kontribusi tertinggi masih pada sektor lapangan usaha primer. Kontribusi tertinggi dikuasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 31,74 persen pada tahun 2019. Di ikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 22,75 persen pada tahun 2016. Dengan demikian maka ekonomi Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2019 hanya bertumpu pada dua sektor lapangan usaha primer. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Timur menurut lapangan usaha tahun 2016-2019 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 37 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2019

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (persen)			
		2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,75	22,12	20,46	19,73
2	Pertambangan dan Penggalian	25,07	25,34	29,53	31,74
3	Industri Pengolahan	5,86	5,40	4,69	4,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	9,02	9,49	9,87	9,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	13,62	13,13	13,05
8	Transportasi dan Pergudangan	2,01	2,03	1,91	1,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,21	0,22	0,21	0,20
10	Informasi dan Komunikasi	2,51	2,40	2,18	2,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,25	1,28	1,19	1,20
12	Real Estate	0,07	0,07	0,07	0,06
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,30	0,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,42	14,40	13,20	13,04
15	Jasa Pendidikan	2,27	2,23	2,03	1,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,94	0,90	0,91
17	Jasa lainnya	0,32	0,31	0,29	0,28
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

PDRB atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran, sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Halmahera Timur terus mengalami peningkatan. Struktur Perekonomian Kabupaten Halmahera Timur didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto tertinggi di tahun 2019 mencapai Rp. 1.977 trilyun rupiah, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 38 Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Halmahera Timur (miliar rupiah), 2016–2019

NO	Jenis Pengeluaran	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)			
		2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah	1.113,93	1.286,11	1.356,54	1.555,20
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	48,97	53,97	66,40	85,22
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	748,31	813,03	886,86	968,04
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.098,66	1.322,26	1.814,88	1.977,35
5	Perubahan Inventori	(6,07)	(43,750)	14,40	(35,42)
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(491,19)	(715,22)	(932,79)	(1.050,32)
PDRB		2.512,60	2.765,90	3.206,28	3.500,07

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

Berdasarkan harga Konstan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Di akhir 2016 PDRB ADHB Kab. Halmahera Timur Rp 1,883 triliun, tahun 2017 meningkat menjadi 2,018 triliun, meningkat Rp 2,179 triliun pada tahun 2018, meningkat Rp 2,299 triliun pada tahun 2019, dan pada akhir tahun 2020 meningkat menjadi 2,313 triliun. Tabel berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Timur menurut lapangan usaha tahun 2016-2020.

Tabel 2. 39 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Timur ADHB Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	379,617.37	395,524.30	421,640.34	435,680.49	455,835.69
2	Pertambangan dan Penggalian	546,928.09	584,653.61	639,416.07	691,660.87	679,447.31
3	Industri Pengolahan	113,118.74	113,141.52	111,818.94	109,430.76	96,153.78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	802.13	867.83	904.90	993.04	1,047.09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	93.06	95.15	100.50	104.34	105.41
6	Konstruksi	164,079.73	185,100.15	213,129.00	222,692.00	212,691.67
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	243,542.56	276,081.82	309,545.14	324,620.53	324,759.07
8	Transportasi dan Pergudangan	34,488.39	37,822.19	40,638.50	42,977.41	38,366.44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,926.53	4,378.01	4,872.35	5,143.46	4,850.33
10	Informasi dan Komunikasi	51,876.08	53,460.97	56,706.13	59,242.28	62,151.83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	22,411.23	24,215.69	25,461.38	27,453.12	29,499.56
12	Real Estate	1,402.48	1,465.75	1,592.99	1,631.43	1,690.03
13	Jasa Perusahaan	6,106.70	6,487.45	6,910.43	7,201.32	7,194.05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	250,584.66	266,858.73	274,940.31	295,875.41	322,057.88
15	Jasa Pendidikan	40,540.59	43,175.72	45,172.06	46,987.16	47,399.63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,633.16	18,641.21	20,117.47	21,299.17	22,699.99
17	Jasa lainnya	6,001.21	6,261.17	6,665.46	6,999.02	7,130.82
PDRB		1,883,152.71	2,018,231.26	2,179,631.97	2,299,991.83	2,313,080.57

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

Nilai tambah barang dan jasa yang digambarkan menggunakan harga PDRB atas dasar harga konstan, Kabupaten Halmahera Timur mencapai pertumbuhan ekonomi tertingginya selama kurun tahun 2016-2019, yaitu sebesar 8,00 persen. Pertumbuhan di atas 7 persen ini terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Namun pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 5,52 persen. Hal ini merupakan dari dampak penurunan tertinggi pada empat sektor lapangan usaha yakni sektor Konstruksi sebesar 10,65 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,25 persen, Real Estate sebesar 6,27 persen, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,73 persen. Bila dijumlahkan keseluruhan dari ke empat sektor tersebut mencapai nilai 29,9 persen. Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur sepanjang tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
	Kab. Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara	Nasional
2016	5,50%	5,77%	5,03%
2017	7,36%	7,67%	5,07%
2018	8,68%	7,92%	5,17%
2019	5,52%	6,13%	5,02%
2020	0,57%	4,92%	2,07%

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

2.2.2. LAJU INFLASI

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Untuk menghitung inflasi kabupaten Halmahera timur berpatokan pada perkembangan inflasi Kota Ternate.

Tabel 2. 41 Inflasi Kota Ternate, Tahun 2016-2020

Tahun	Inflasi
2016	1,91
2017	1,29
2018	4,12
2019	2,02
2020	1,66

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

Kota Ternate pada tahun 2016 mengalami inflasi sebesar 1,91%, pada tahun 2017 turun menjadi 1,29%, akan tetapi inflasi terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu 4,12%, penyumbang inflasi ini terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,23%, pada tahun 2019 turun ke 2,02% dan di akhir tahun 2020 Kota Ternate mengalami inflasi 1,66%, Perkembangan inflasi menurut pengeluaran sepanjang priode 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

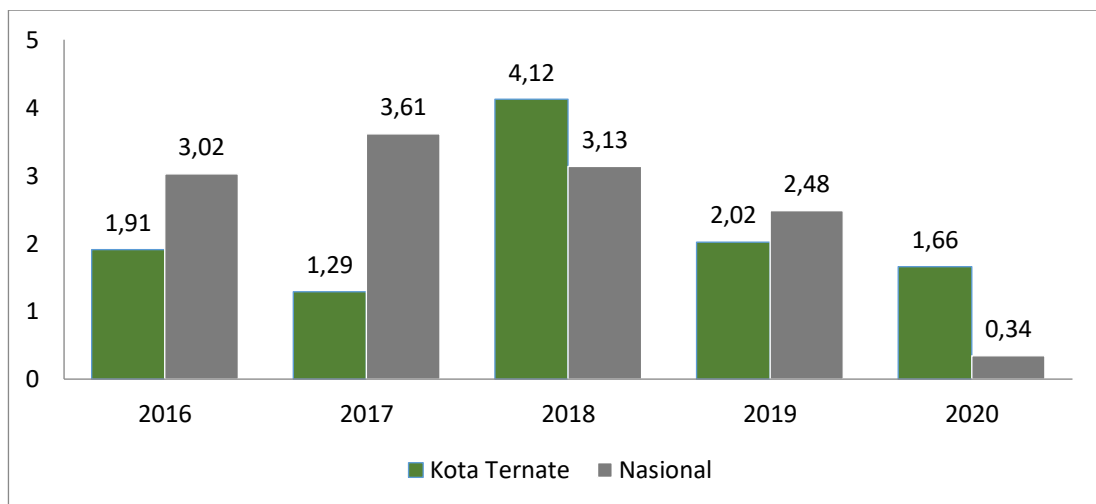
Tabel 2. 42 Laju Inflasi Kota Ternate Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

Inflasi Regional Menurut Kelompok Pengeluaran					
Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Bahan Makanan	-4.3	-1.6	2.19	3.97	1.42
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8.33	8.06	6.41	3.43	0
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	3.43	2.32	2.87	1.64	-0.1
Sandang	3.6	0.84	4.32	2.2	0.03
Kesehatan	3.95	2.02	5.47	1.9	-0.2
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	3.77	1.43	6.01	0.53	0
Transpor, Komunikasi dan Jasa keuangan	0.05	0.79	6.57	-0.7	3.06

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

2.2.3. PDRB PERKAPITA

Pada tahun 2020 inflasi Kota Ternate sebesar 1,66% berada pada peringkat ke-58 tertinggi dari 82 kota IHK dan berada di atas inflasi nasional yang sebesar 0,34%. Grafik berikut menyajikan perbandingan laju inflasi regional Maluku Utara dengan laju inflasi nasional sepanjang periode tahun 2016-2020.

**Gambar 2. 13 Perbandingan Laju Inflasi Tahunan Regional Kota Ternate dan Nasional Tahun 2016-2020**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2. 43 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 – 2019 (juta Rupiah)

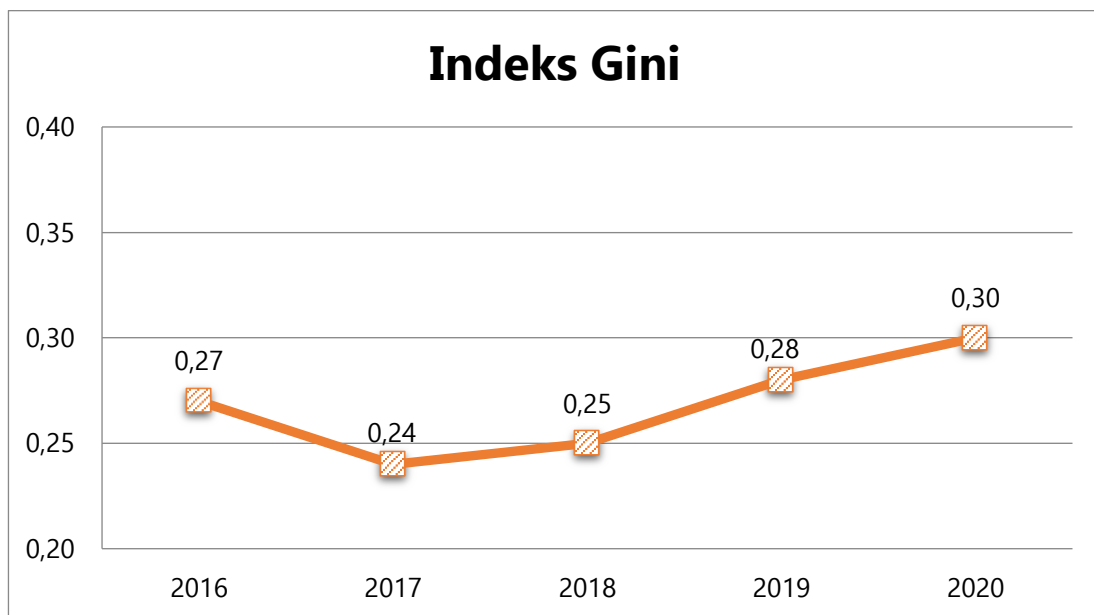
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020**
1	2	3	4	5	6
PDRB ADHB	2,512,604.25	2,751,599.94	3,206,112.66	3,497,103.04	3,566,027.43
PDRB ADHK	1,883,152.71	2,018,231.26	2,179,631.97	2,299,991.83	2,313,080.57

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 2,512 miliar rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2020 mencapai Rp. 3,566 miliar rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sementara itu, PDRB per kapita ADHK tahun 2016 mencapai Rp. 1,883 miliar rupiah dan akhir tahun 2020 mencapai Rp. 2,313 miliar rupiah.

2.2.4. INDEKS GINI

Indeks gini merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Suatu metode dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu indeks gini.



Gambar 2. 14 Indeks Gini Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

Data series indeks gini dari tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Timur sempat mengalami penurunan, dari 0.27 pada tahun 2016 menjadi 0.24 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 indeks gini berhasil ditekan kembali menaik, tertinggi 0.30 di tahun 2020.

Tabel 2. 44 Indeks Gini Halmahera Timur dan Maluku Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Indeks Gini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Timur	0.27	0.24	0.25	0.28	0.30
Maluku Utara	0.29	0.33	0.33	0.34	0.29

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

Bila dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, indeks gini Halmahera Timur memiliki angka lebih Kecil. Indeks gini Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2016 sebesar 0,29 Sedangkan Kabupaten Halmahera Timur sebesar 0.27. Namun di akhir

tahun 2020 indeks gini Kabupaten Halmahera Timur lebih besar 0.30 sedangkan Provinsi sebesar 0.29.

2.2.5. PEMERATAAN PENDAPATAN VERSI BANK DUNIA

Selain Indeks Gini, untuk melihat distribusi pendapatan atau ketimpangan dapat menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Kondisi ketimpangan di semua kabupaten/kota di Maluku Utara termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan proporsi pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk 40 persen terbawah memiliki nilai di atas 17 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 45 Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

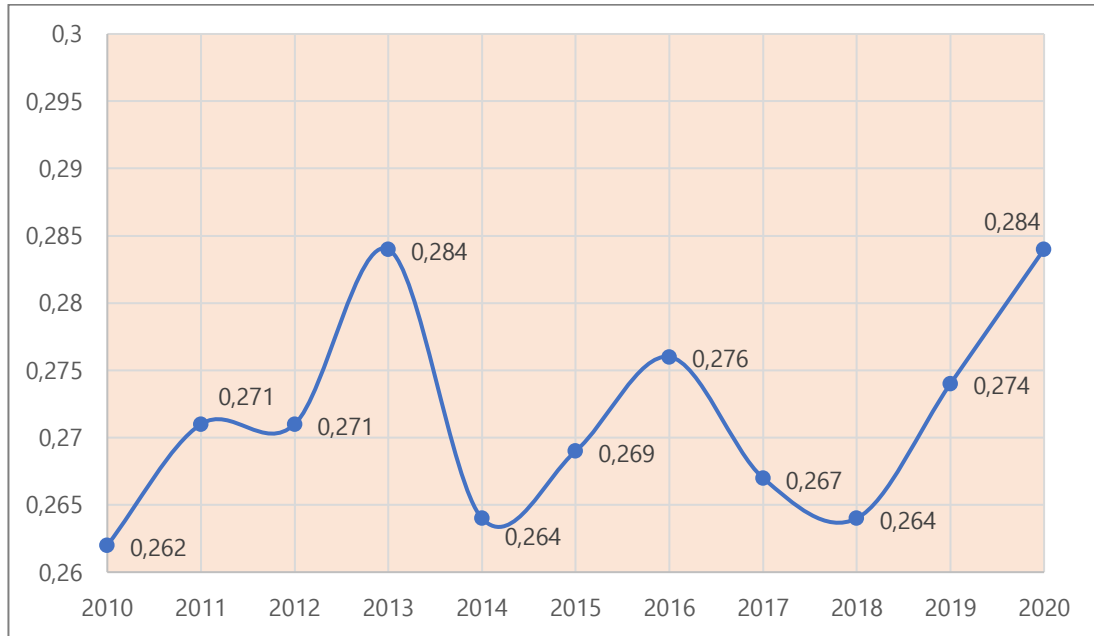
Kabupaten/Kota	Distribusi Pengeluaran (Persen)		
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas
Halmahera Barat	25,22	39,60	35,19
Halmahera Tengah	19,50	36,20	44,30
Kepulauan Sula	22,65	37,52	39,83
Halmahera Selatan	24,62	39,43	35,96
Halmahera Utara	21,96	34,42	43,63
Halmahera Timur	24,07	41,12	34,81
Pulau Morotai	23,81	40,63	35,55
Pulau Taliabu	25,06	39,32	35,62
Ternate	23,51	39,18	37,31
Tidore Kepulauan	21,57	38,16	40,28
Maluku Utara	23,29	38,48	38,22

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2020

2.2.6. INDEKS KETIMPANGAN REGIONAL (INDEKS WILLIAMSON)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. faktor yang mempengaruhi ketimpangan terjadi di provinsi dan kabupaten/kota yang baru diantaranya adalah kesenjangan struktural akibat aktivitas perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor-sektor tertentu (biasanya sektor primer; pertanian tradisional), keterbatasan sumber daya yang berimplikasi pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada indeks pembangunan manusia serta jumlah dan kualitas infrastruktur yang buruk karena tidak ditunjang oleh alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan. Oleh Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu ukuran yang cukup representatif untuk menilai tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson. Indeks Williamson bernilai antara nol sampai dengan satu. Nilai nol mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di provinsi X adalah rendah. Sebaliknya jika indeks mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di provinsi X adalah tinggi. Menggunakan PDRB ADHB, grafik berikut menyajikan perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Maluku Utara tahun 2010-2020.



Gambar 2. 15 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2020

Sumber : diolah dari data, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Dari grafik, indeks ketimpangan wilayah di Maluku Utara berada di bawah 0,5 dengan tren berfluktuasi dalam rentang 0,250 s/d 0,300. Ini mengindikasikan bahwa dalam usianya yang kedua puluh, pembangunan di Provinsi Maluku Utara terlihat masih memerlukan perhatian untuk memastikan pembangunan berjalan secara merata dari sisi kewilayahan. Dalam hal ini, tidak ada daerah yang sangat maju pesat pembangunannya meninggalkan yang lainnya, atau sebaliknya tidak terdapat daerah yang sangat tertinggal dalam pembangunan. Namun dalam tiga tahun terakhir indeks williamson menunjukkan tren penurunan semakin mendekati angka nol mencoba mengulang indeks terendah pada tahun 2010. Tren ini jika terus berlangsung maka dapat memberikan gambaran bahwa pembangunan berjalan secara merata antar satu wilayah dengan yang lainnya. Di luar indeks williamson, telah tergambar jelas pada uraian sebelumnya dimana kesenjangan PDRB per Kapita kabupaten/kota cukup lebar antara yang satu dengan lainnya.

2.2.7. TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

A. GARIS KEMISKINAN

Kategori penduduk miskin ini dilihat dari pengeluaran per kapita per bulan dihitung sesuai dengan pendapatan rumah tangga di bawah Rp 2 juta dan pengeluaran lebih dari Rp 2 juta per bulan. Kenaikan angka kemiskinan ini dari beberapa indikator yang berkenaan dengan pendapatan penduduk, inflasi, daya beli, serta angka pengangguran yang meningkat. Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur terus meningkat tiap tahunnya, salah satu di sebabkan oleh kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp. 494.25 ribu perkapita/bulan nilai ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan garis kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu Rp. 545.24 ribu perkapita/bulan atau tumbuh sebesar 34.34 persen dari tahun 2017. Tabel berikut menyajikan perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Halmahera tahun 2016-2020.

Tabel 2. 46 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan
2016	494.25
2017	509.73
2018	510.9
2019	545.24
2020	569.46

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

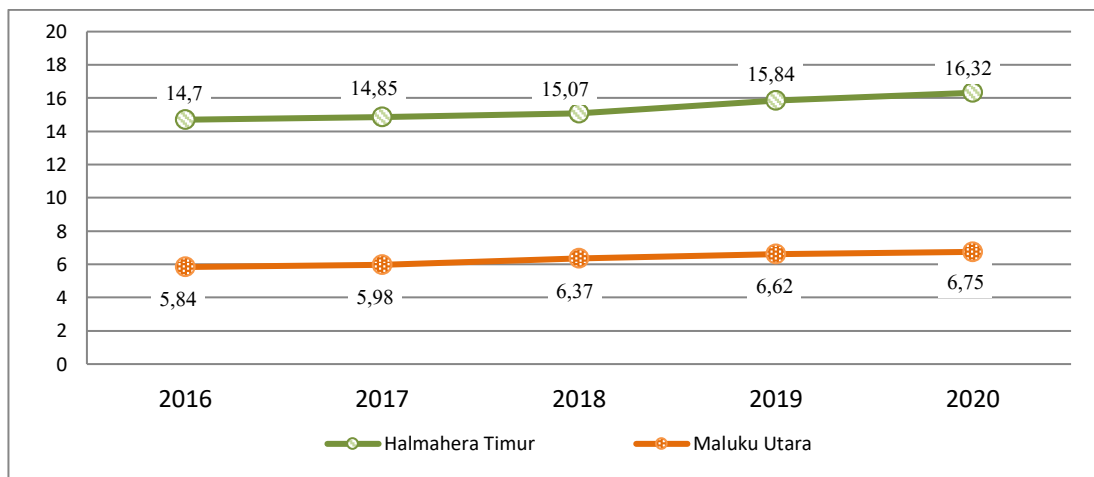
B. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P0)

Tabel 2. 47 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(%) Penduduk Miskin	14,70%	14,85%	15,07%	15,84%	16,32%

Sumber : BPS Provinsi Maluku Halmahera Timur

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Halmahera Timur terus mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 13,48 ribu Jiwa atau 14,70 persen dari total jumlah penduduk Halmahera Timur, di akhir tahun 2020 penduduk miskin Halmahera Timur bertambah menjadi 14,97 ribu jiwa atau 16,32 persen.



Gambar 2. 16 Persentase Penduduk Miskin Halmahera Timur dan Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : diolah dari BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Persentase penduduk miskin Kabupaten Halmahera Timur setiap tahunnya selalu berada di posisi lebih Tinggi diatas dengan Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Timur mengalami peningkatan penduduk miskin tertinggi di tahun 2020, yaitu sebesar 16,32 persen. Sedangkan Provinsi Maluku Utara juga mengalami tren peningkatan penduduk miskin sebesar 6,75 persen di tahun 2020. Laju peningkatan penduduk miskin Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 0,2 persen rata-rata setiap tahunnya.

C. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)

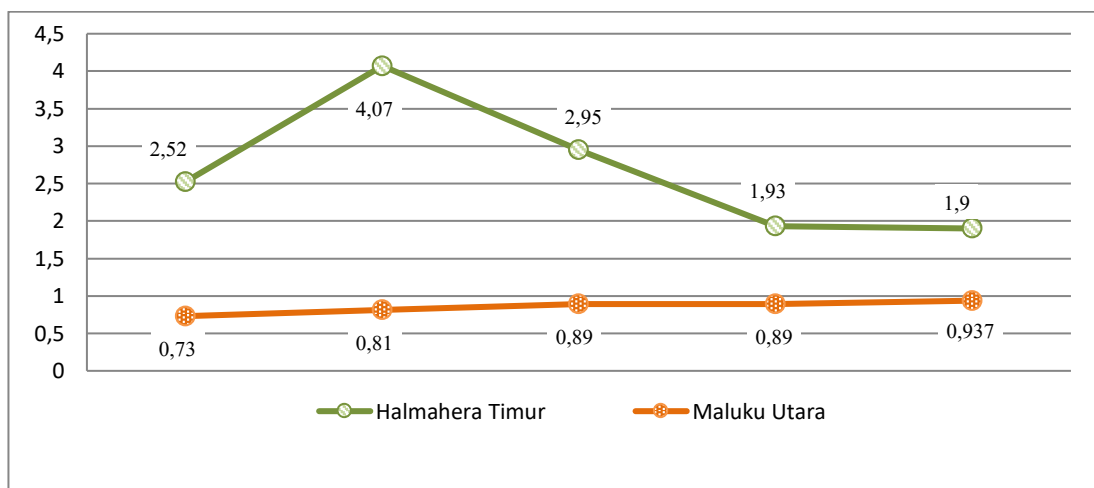
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur mengalami tren fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 2.52 meningkat sebesar 4.07 di tahun 2017. Kemudian mengalami penurunan hingga di akhir tahun 2020 sebesar 1.90. Dari titik tertingginya dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sebesar 4.07.

Tabel 2. 48 Indeks Kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 - 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Timur	2.52	4.07	2.95	1.93	1.90

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

Secara keseluruhan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dalam periode 2016-2020 selalu berada di atas angka P1 Maluku Utara, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 17 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dan Maluku Utara Indonesia Tahun 2016-2020

Sumber : diolah dari BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

D. INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)

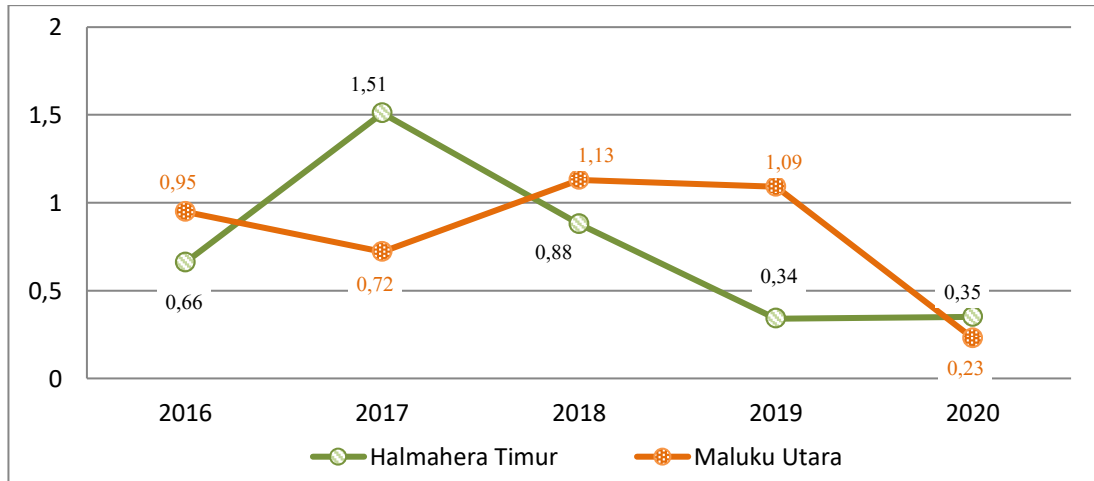
Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,

semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2020 sebesar 0,35 atau naik 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Dari titik tertingginya dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sebesar 1.51. Indeks Keparahkan Kemiskinan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 49 Indeks Keparahkan kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Timur	0.66	1.51	0.88	0.34	0.35

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021



Gambar 2. 18 Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur dan Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

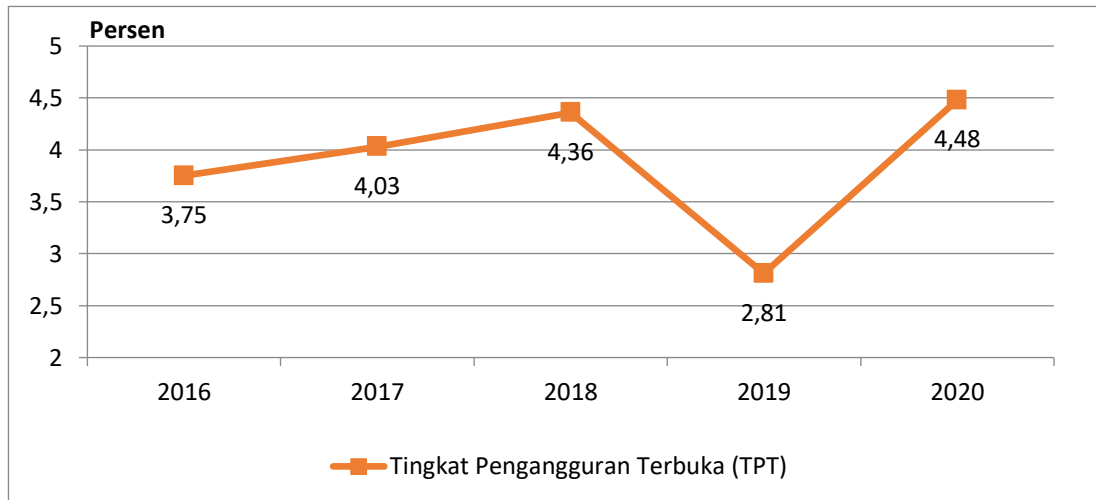
E. INDEKS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan antara kabupaten Halmahera Timur dan Maluku Utara, terindikasi perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2016 kabupaten Halmahera Timur lebih rendah dari Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya pada tahun 2017 Kabupaten Halmahera Timur meningkat lebih tinggi dari Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan lebih tinggi dari Kabupaten Halmahera Timur. Akan tetapi pada tahun 2020 Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan yang signifikan nilainya berada di titik terendah sebesar 0,23 poin, Kabupaten Halmahera Timur yang juga mengalami penurunan terendah sebesar 0,35 poin. Secara keseluruhan sepanjang periode 2016-2020, Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur senantiasa menunjukkan kecenderungan menurun berada di atas indeks keparahan kemiskinan provinsi.

2.2.8. TINGKAT PENGANGGURAN

Pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Untuk mengetahui kondisi pengangguran di suatu daerah, dibutuhkan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Persentase Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Halmahera Timur disajikan pada grafik sebagai berikut.



Gambar 2. 19 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020

Sumber : BPS, Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 - 2021

Dari grafik di atas menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Halmahera Timur mengalami penurunan di tahun 2018, yaitu sebesar 2,81 persen. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dan tertinggi yaitu sebesar 4,48 persen.

A. ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Perkembangan jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja, pengangguran, penduduk yang bukan angkatan kerja Kabupaten Halmahera Timur, berikut rincian aktifitasnya dalam kurun tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50 Perkembangan Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Penduduk Usia Kerja (15+)	56665	62416	64302	69122
Angkatan Kerja	40832	45758	43011	45747
- Bekerja	39186	44119	41083	43365
- Pengangguran	1646	1639	1928	2382
Bukan Angkatan Kerja	15833	16658	21291	23375
- Sekolah	-	4096	5401	-
- Mengurus Rumah Tangga	-	11544	13632	-
- Lainnya	-	1018	2258	-

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara dalam Angka Tahun 2017-2020

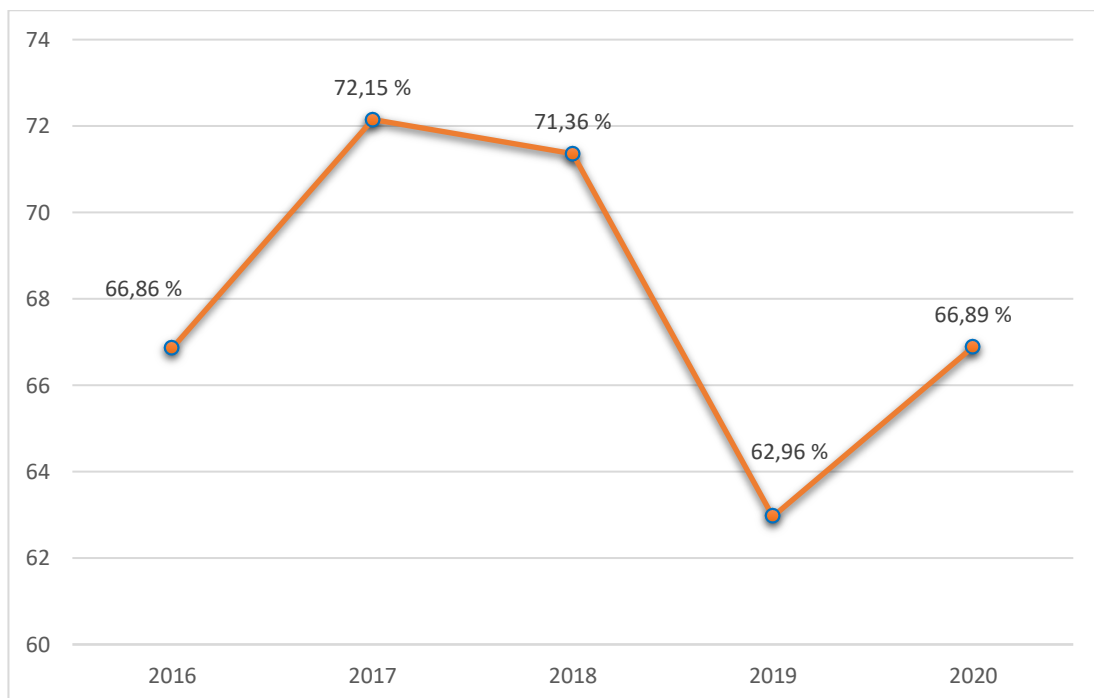
Dari tabel pada tahun diatas jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Halmahera Timur dari tahun 2017 sampai tahun 2020 diperkirakan mengalami pertambahan jumlah sebanyak 12,457 jiwa. Persentase pertumbuhannya, yaitu sebesar 1,64 persen setiap tahunnya.

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Halmahera Timur mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2018 sebanyak 45,758 jiwa, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan di angka 43,011 jiwa (turun 1,57 persen). Dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja Kabupaten Halmahera Timur mengalami peningkatan sebanyak 45,747 jiwa (naik 1,56 persen). Namun hal ini tidak diseimbangi dengan jumlah angka pengangguran penduduk Kabupaten Halmahera Timur yang mencapai 2,382 jiwa, ini merupakan angka pengangguran tertinggi sejak tahun 2017.

B. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator dalam pembangunan suatu daerah, menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena semakin banyak ketersediaan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Timur cenderung mengalami tren fluktuatif, Pertumbuhan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak sejalan dengan tren kenaikan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. TPAK pada tahun 2016 tercatat sebesar 72,15 persen, meningkat 5,29 dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2017 cenderung menurun mencapai 71,36 persen. Sementara TPAK pada tahun 2018 mengalami penurunan signifikan sebesar 62,96 persen (turun 5,29 persen), dimana ini merupakan titik terendah sepanjang tahun 2016-2020. Gambaran selengkapanya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2. 20 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020

Sumber : BPS, Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 - 2019

C. TINGKAT KESEMPATAN KERJA

Terdapat dua indikator dalam mengukur Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu Jumlah penduduk Usia Kerja (15+) dan Angkatan Kerja di Kabupaten Halmahera Timur, namun tidak terdapat keseimbangan dari kedua indikator tersebut. Sebagai ilustrasi, Tingkat kesempatan kerja yang tinggi akan memperbanyak angkatan kerja dan tenaga kerja serta akan mengurangi tingkat pengangguran. Sebaliknya, kesempatan kerja yang rendah maka akan mengakibatkan jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga rendah sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi dan tidak terpenuhinya ketersediaan lapangan pekerjaan. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Halmahera Timur secara periodik tahun 2017-2020 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 51 Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020**

Uraian	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Penduduk Usia Kerja (15+)	56665	62416	64302	69122
Angkatan Kerja	40832	45758	43011	45747
Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	72,06	73,31	66,89	66,18

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara dalam Angka Tahun 2017-2020

Dari data tabel diatas, persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2017 sebesar 72,06 persen, mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 73,31. Kemudian di tahun 2019-2020 persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Halmahera Timur mengalami penurunan, terendah di tahun 2020 sebesar 66,18 persen. Tren penurunan ini di indikasikan bahwa masih tingginya angka tingkat pengangguran penduduk Kabupaten Halmahera Timur di Tahun 2020.

D. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan kebalikan dari Tingkat Kesempatan Kerja, rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kabupaten Halmahera Timur pada 2020 tercatat mencapai 3,45 persen atau naik sebesar 0,45 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagaimana tersaji dalam tabel, TPT tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi di tahun 2015 yang mencapai 6,05 persen dan dalam tiga tahun terakhir tetap terjaga di bawah 6 persen.

**Tabel 2. 52 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020**

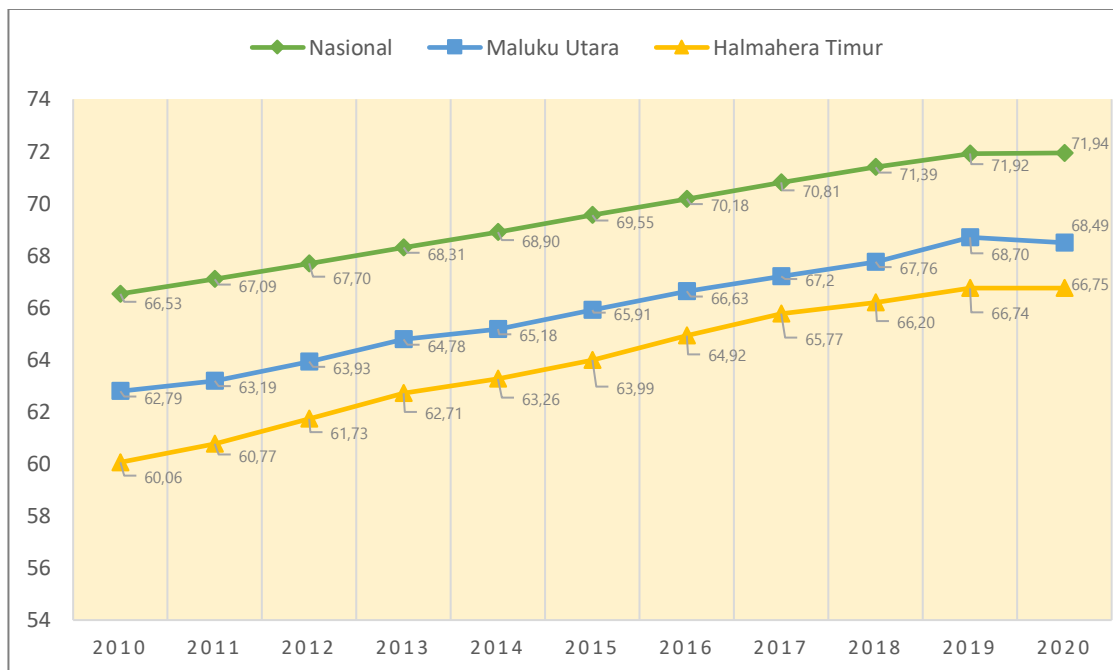
Uraian	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Penduduk Usia Kerja (15+)	56665	62416	64302	69122
Pengangguran	1646	1639	1928	2382
Persentase Tingkat Pengangguran	2,90	2,63	3,00	3,45

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara dalam Angka Tahun 2017-2020

TPT Kabupaten Halmahera Timur pada 2020 tercatat tertinggi mencapai 3,45 persen atau naik sebesar 0,45 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagaimana tersaji dalam tabel, TPT terendah dalam empat tahun terakhir terjadi di tahun 2018 yang mencapai 2,63 persen.

2.2.9. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang dengan memperhatikan tiga aspek mendasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Perkembangan IPM Kabupaten Halmahera Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPM Provinsi Maluku Utara meningkat dari 60,06 pada tahun 2010 menjadi 66,75 pada tahun 2020. Namun demikian, sebagaimana diilustrasikan pada grafik di bawah, IPM Halmahera Timur masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM Provinsi Maluku Utara dan Nasional dalam sebelas tahun terakhir.



Gambar 2. 21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2010-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

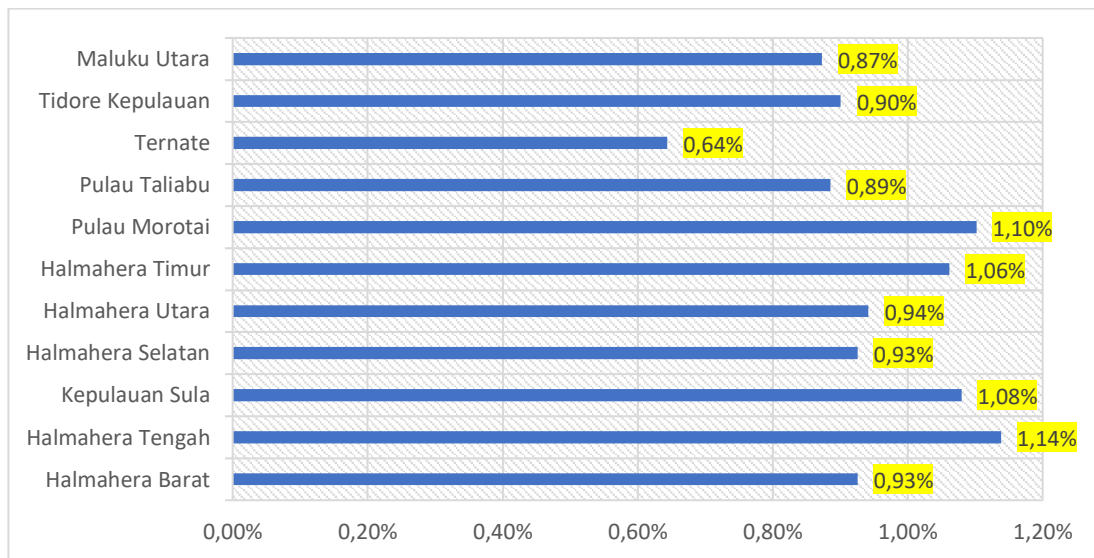
Bila dilihat secara regional Provinsi Maluku Utara, kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2020 yaitu 66,75 lebih rendah dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara 68,49. Hingga tahun 2020, Kota Ternate masih tercatat sebagai wilayah dengan kinerja IPM tertinggi yaitu 79,82 dan satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan IPM pada kategori tinggi (70 – 79). Tertinggi kedua adalah Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 70,53. IPM kedua kota berada di atas IPM Kabupaten halmahera Timur. Gambaran sebaran IPM kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 53 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2020

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	59,56	60,33	60,71	61,47	62,06	62,97	63,83	64,19	64,54	65,34	65,31
Halmahera Tengah	58,42	59,34	59,94	60,89	61,49	62,07	63,05	63,89	64,66	65,55	65,42
Kepulauan Sula	57,06	57,98	58,83	59,77	60,18	60,5	61,25	62,04	62,96	63,64	63,53
Halmahera Selatan	58,22	58,86	59,5	59,92	60,34	61,26	62,17	62,64	63,39	64,11	63,84
Halmahera Utara	61,46	62,31	62,94	63,81	64,18	65,04	66,02	66,52	67,3	67,75	67,50
Halmahera Timur	60,06	60,77	61,73	62,71	63,26	63,99	64,92	65,77	66,2	66,74	66,75
Pulau Morotai	-	56,63	57,16	57,97	58,34	59,27	59,87	60,71	61,39	62,38	62,50
Pulau Taliabu	-	-	-	56,86	57,31	58,26	58,66	59,03	59,67	60,62	60,48
Ternate	74,86	75,52	75,81	76,69	77,15	77,64	77,8	78,48	79,13	80,03	79,82
Tidore Kepulauan	64,48	64,8	65,42	66,25	66,76	67,45	68,37	69,25	69,89	70,83	70,53
Maluku Utara	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18	65,91	66,63	67,2	67,76	68,7	68,49

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Berdasarkan kinerja IPM kabupaten/kota sebagaimana tabel, dapat diperkirakan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja paling progresif dalam peningkatan IPM. Grafik berikut menyajikan perbandingan laju perkembangan IPM kabupaten/kota se- Maluku Utara dalam kurun tahun 2010-2020.

**Gambar 2. 22 Laju Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2020**

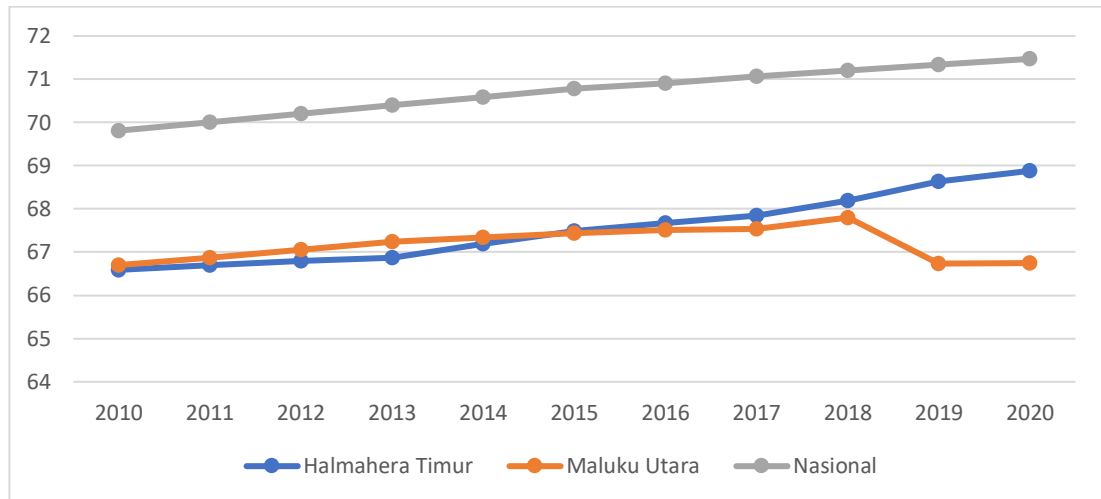
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Dari grafik, terkecuali Kota Ternate dengan laju perkembangan di bawah rata-rata provinsi, sembilan kabupaten/kota yang lain memiliki laju perkembangan IPM di atas rata-rata provinsi. Adapun Halmahera Tengah merupakan kabupaten dengan laju perkembangan tertinggi yaitu 1,14 persen.

A. DIMENSI UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH Kabupaten Halmahera Timur naik dari

66,59 tahun pada 2010 menjadi 68,88 tahun pada 2020. Namun demikian, UHH Kabupaten Halmahera Timur dari tahun 2010-2014 berada dibawah rata-rata Provinsi Maluku Utara, di tahun 2015-2020 rata-rata Kabupaten Halmahera Timur lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Maluku Utara. Sementara jika dibandingkan UHH Nasional, rata-rata Kabupaten Halmahera Timur senantiasa dibawah nasional dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir. Perbandingan UHH Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan rata-rata nasional selengkapnya dapat dilihat pada sebagaimana grafik berikut.



Gambar 2. 23 Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

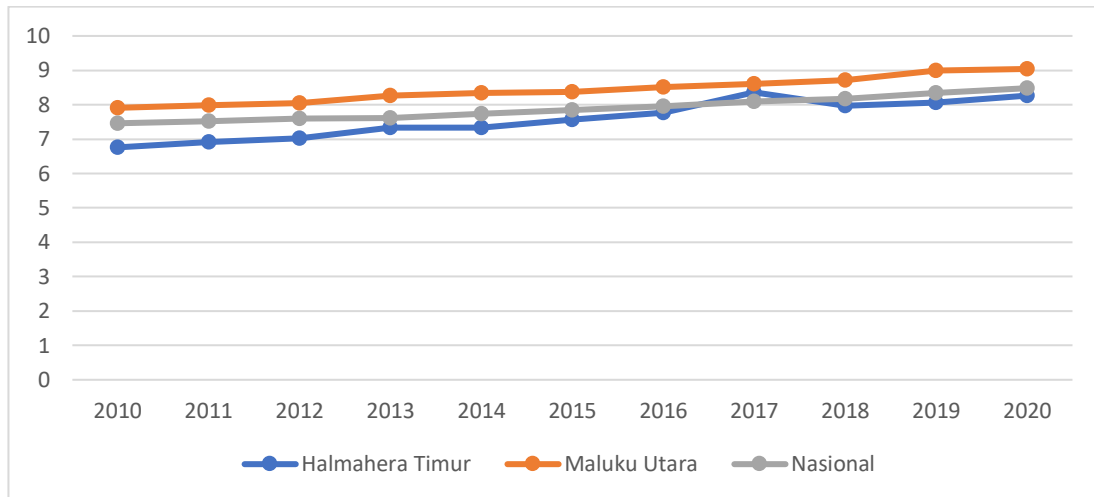
Capaian UHH Kabupaten ini dapat menjadi ukuran untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di Kabupaten Halmahera Timur dalam hal ini harus diikuti dengan meningkatkan upaya pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk pemberantasan kemiskinan.

B. DIMENSI PENGETAHUAN

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Seiring dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun.

RLS Kabupaten Halmahera Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2010 sehingga mencapai angka tertingginya 8,26 tahun di 2020. Tren kenaikan setiap tahun ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Halmahera Timur yang lebih baik. Namun demikian RLS Kabupaten Halmahera Timur masih tetap konsisten berada di atas rata-rata RLS Provinsi Maluku Utara dan secara Nasional dalam sebelas tahun terakhir. Perbandingan RLS Kabupaten

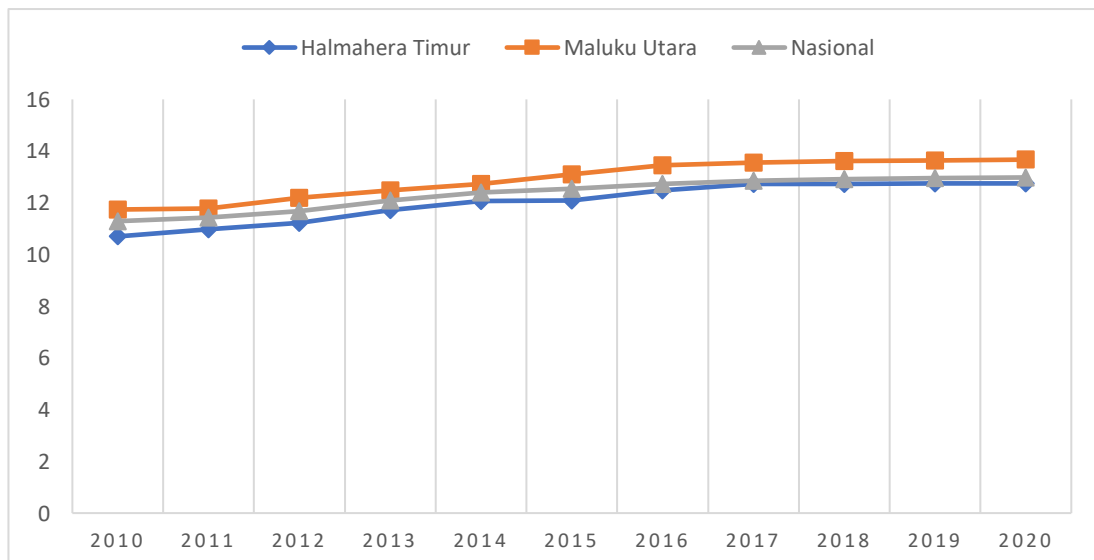
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan rata-rata secara Nasional dalam kurun tahun 2010-2020 selengkapnya disajikan sebagaimana pada grafik berikut.



Gambar 2. 24 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Selain rata-rata lama sekolah, komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam konteks ini, penduduk Halmahera Timur usia tertentu (> 7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma I pada tahun 2020. Pada tiga tahun terakhir angka HLS Halmahera Timur terus meningkat namun dalam kisaran tidak cukup signifikan, yaitu hanya sebesar 0,01 tahun setiap tahunnya. Kenaikan angka HLS cukup signifikan terjadi pada periode 2010-2016 yaitu naik sekitar 1,78 tahun. Pada periode 2017-2020, HLS Halmahera Timur masih berada di bawah angka HLS Provinsi Maluku Utara dan secara Nasional. Gambaran selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.

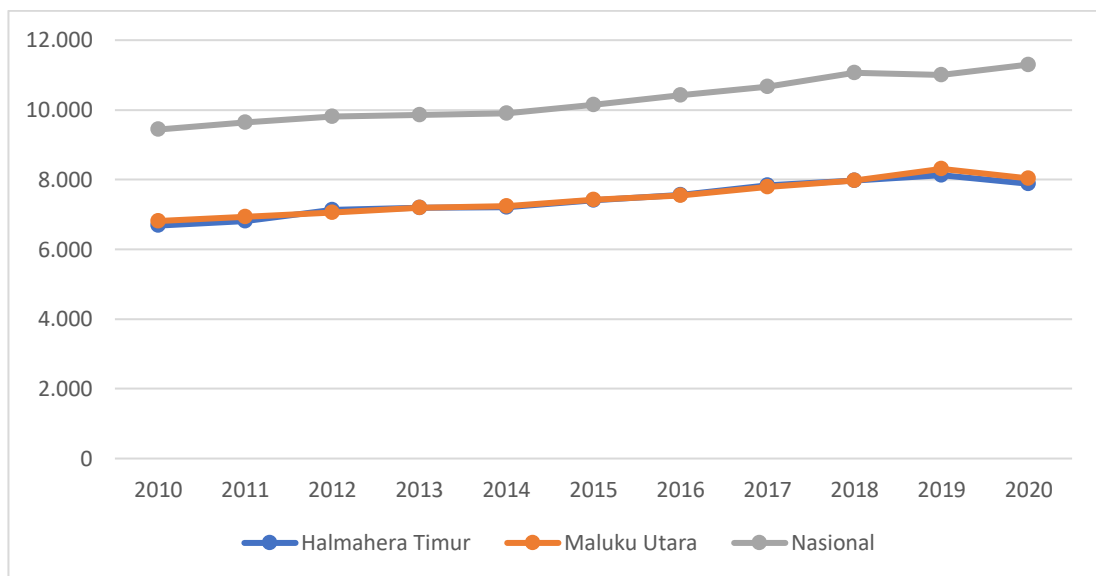


Gambar 2. 25 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

C. DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pada tahun 2020, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Timur mencapai Rp. 7.876 juta/orang/tahun. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Timur mengalami pertumbuhan sebesar 1,03 persen di periode 2016-2020 dibandingkan periode sebelumnya yaitu 2010-2015 sebesar 2,62 persen. Namun dibandingkan secara Provinsi Maluku Utara dan Nasional, Pengeluaran Per Kabupaten Halmahera Timur senantiasa masih berada di bawah rata-rata secara Nasional sepanjang periode 2010-2020. Gambaran selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2. 26 Standar Hidup Layak Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

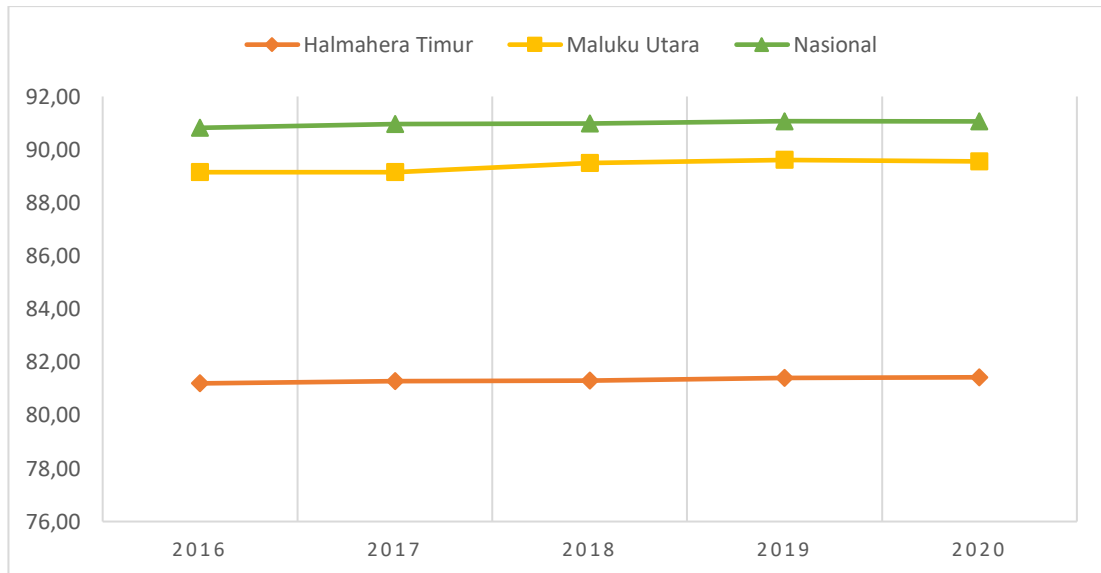
2.2.10. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda.

Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang

sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Perkembangan IPG Kabupaten Halmahera Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPG Kabupaten Halmahera Timur meningkat dari 81,20 pada tahun 2016 menjadi 81,43 pada tahun 2020. Namun demikian, sebagaimana diilustrasikan pada grafik di bawah, IPG Kabupaten Halmahera Timur masih tetap konsisten berada dibawah rata-rata IPG Provinsi Maluku Utara dan Nasional dalam lima tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 2. 27 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Capaian kinerja pada urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Capaian kinerja pembangunan pada urusan pendidikan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

1. PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Angka pendidikan anak usia dini adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak dibandingkan dengan jumlah anak pada rentang usia 4-6 tahun. Dari tabel 2.54 dapat dilihat bahwa, angka pendidikan anak usia dini di Kabupaten Halmahera Timur terus mengalami relatif naik, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Halmahera Timur menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap anak yang dimulai sedini mungkin. Berikut disajikan perkembangan angka pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Halmahera Timur. Persentase jumlah siswa PAUD/TK/RA terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di tahun 2016 sebesar 83,34 persen. Persentasenya terus naik di tahun 2017 dan 2019 berturut-turut sebesar 85,10 persen, 86,94 persen dan 88,49 persen. Sedangkan di tahun 2019 turun menjadi 85,02 persen.

**Tabel 2. 54 Angka Partisipasi Sekolah usia 7 – 12 tahun
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa pada jenjang TK/PAUD	2.121	2.210	2.389	3.737	3.009
2	Jumlah anak 4-6 Tahun	2.545	2.597	2.748	4.223	3.539
3	Persentase Pendidikan Usia Dini TK/PAUD (1:2X100)	83,34%	85,10%	86,94%	88,49%	85,02%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

2. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SD/Sederajat, APK dibawah 100 menunjukkan bahwa tidak banyak anak yang telah melewati usia SD di Kabupaten Halmahera Timur masih bersekolah di tingkat SD/ sederajat. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 55 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa pada jenjang SD/Sederajat	11882	11543	11349	11021	10752
2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.664	12.018	11.978	11.364	10.816
3	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat (1:2X100)	93,83%	96,05%	94,75%	96,98%	99,41%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat, APK juga dibawah dari 100 yang menunjukkan bahwa tidak banyak anak yang telah melewati usia SMP di Kabupaten Halmahera Timur masih bersekolah di tingkat SMP/ sederajat. Lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut.

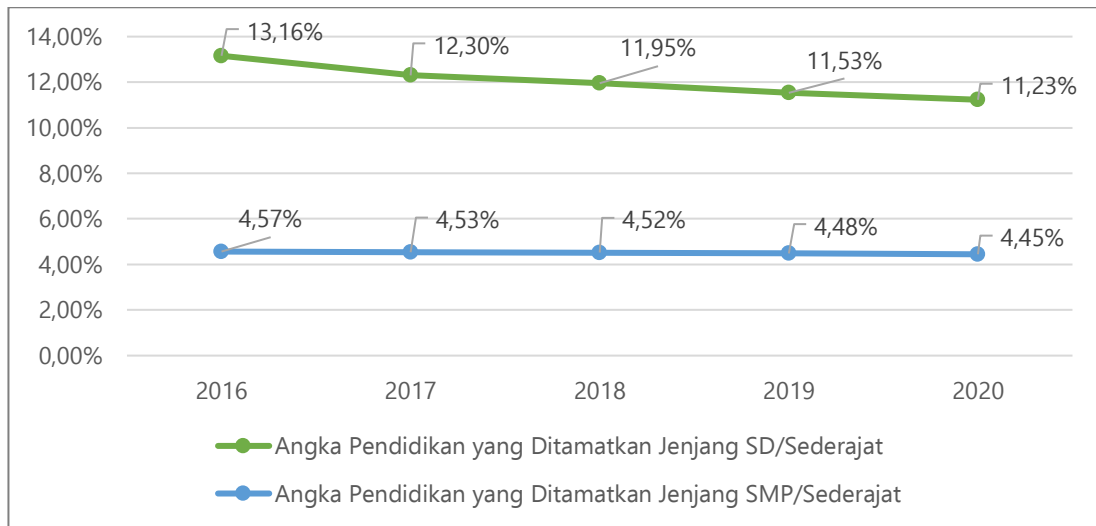
Tabel 2. 56 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa pada jenjang SMP/Sederajat	4.123	4.256	4.294	4.284	4.258
2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	4.332	4.453	4.451	4.386	4.336
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat (1:2X100)	95,18%	95,58%	96,47%	97,67%	98,20%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

3. ANGKA PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu dengan total jumlah penduduk tahun tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2016-2020 cenderung flutuatif perkembangannya. Angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SD/ sederajat tahun 2016 mencapai 13,16 persen, terlihat trend penurunan hingga tahun 2020 dengan angka yang mencapai 11,23 persen. Begitupula pada jenjang SMP/ sederajat terjadi penurunan angka pendidikan yang ditamatkan, pada jenjang pendidikan ini memperlihatkan tren penurunan yang konsisten dengan persentase nilainya diantara 4,57 – 4,45 persen. Pada tahun 2020 mencapai angka 4,45 persen menurun dari lima tahun sebelumnya 2016 mencapai 4,57 persen. Selanjutnya akan disajikan lebih rinci pada gambar berikut.



Gambar 2. 28 Angka Pendidikan yang ditamatkan Pada Jenjang Pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2016-2020

Sumber : diolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, tahun 2021

4. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

APM pada jenjang SD/ sederajat di Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir memperlihatkan tren fluktuatif dalam rentang 81 persen sampai dengan 88 persen atau belum mencapai 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa terdapat anak pada usia SD/ sederajat di Kabupaten Halmahera Timur tidak sedang sekolah pada jenjang ini sesuai dengan usianya. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 57 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/ Sederajat	10.277	10.250	10.248	10.041	9.441
2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.664	12.018	11.978	11.364	10.816
3	Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat (1:2X100)	81,15%	85,29%	85,56%	88,36%	87,29%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

APM pada jenjang SMP/ sederajat di Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir memperlihatkan fluktuatif dalam rentang 69 persen sampai dengan 74 persen atau belum mencapai 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa terdapat anak pada usia SMP/ sederajat di Kabupaten Halmahera Timur tidak sedang sekolah pada jenjang ini sesuai dengan usianya. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 58 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/ Sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ Sederajat	3.028	3.267	3.307	3.234	3.165
2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	4.332	4.453	4.451	4.386	4.336
3	Angka Partisipasi Murni SMP/ Sederajat (1:2X100)	69,90%	73,37%	74,30%	73,73%	72,99%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

5. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu wilayah. APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7-12 tahun (usia jenjang pendidikan SD/ sederajat) di Kabupaten Halmahera Timur meskipun belum mencapai 100 persen, terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Gambaran selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 59 Angka Partisipasi Sekolah usia 7 – 12 tahun Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah siswa usia 7 – 12 tahun	12.119	11.555	11.564	11.032	9.441
2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.664	12.018	11.978	11.364	10.816
3	Angka Partisipasi sekolah SD/MI (1:2X100)	95,70%	96,15%	96,54%	97,08%	87,29%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 APS usia 7-12 tahun mencapai 87,29 persen mengalami penurunan dari empat tahun sebelumnya 2016-2019. Pada tahun 2016 APS usia 7-12 tahun mencapai 95,70 persen meningkat di tahun 2019 menjadi 97,08 persen dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya 0,48 persen.

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 13-15 tahun (usia jenjang pendidikan SD/ sederajat) di Kabupaten Halmahera Timur meskipun belum mencapai 100 persen, terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 60 Angka Partisipasi Sekolah usia 13 – 15 tahun
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

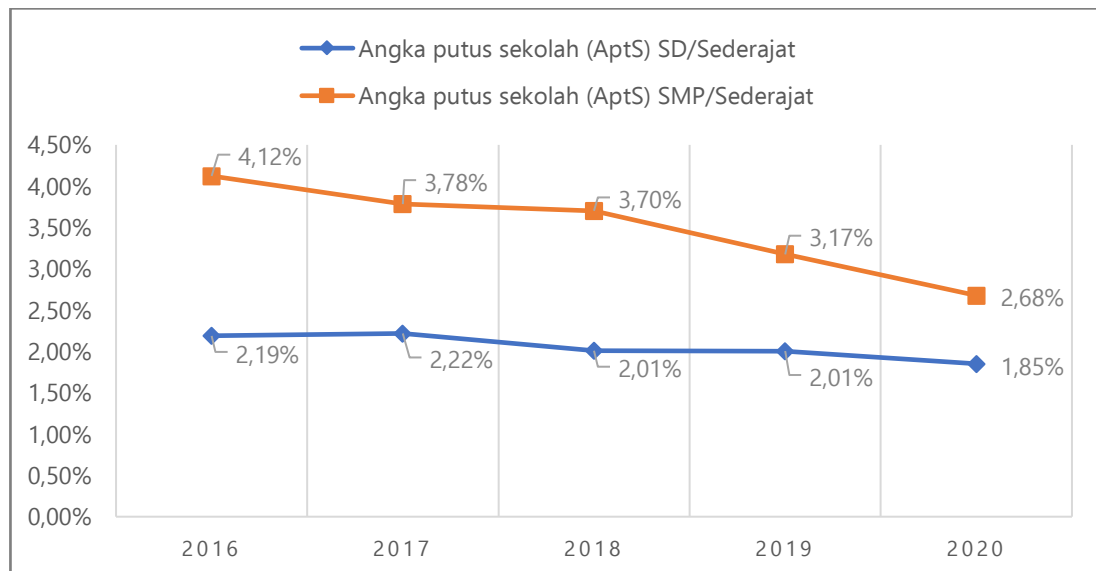
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah siswa usia 13 – 15 tahun	4.123	4.256	4.294	4.284	4.258
2	jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun	4.332	4.453	4.451	4.386	4.336
3	Angka Partisipasi sekolah SMP/MTs (1:2X100)	95,18%	95,58%	96,47%	97,67%	98,20%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dalam pada tahun 2020, APS usia 13-15 tahun Kabupaten Halmahera Timur telah mencapai 98,20 persen, dengan rata-rata peningkatan per tahun sejak 2016 sebesar 0,79 persen.

6. ANGKA PUTUS SEKOLAH

Angka Putus Sekolah (AptS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi AptS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perkembangan angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di berikut.



**Gambar 2. 29 Angka Putus Sekolah Menurut jenjang Pendidikan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

7. ANGKA KELULUSAN

Angka Kelulusan (AL) merupakan persentase jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun sebelumnya. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena seorang siswa dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran. Angka Kelulusan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pengelolaan pendidikan di suatu wilayah. Jika Angka Kelulusan semakin tinggi atau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan semakin berhasil pula sistem pengelolaan pendidikannya.

Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2016-2020 terus bertahan di angka 100 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/Sederajat	1.974	1.789	1.819	1.779	1.903
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/Sederajat	1.974	1.789	1.819	1.779	1.903
3	Angka Kelulusan SD/Sederajat (1:2X100)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Hal yang sama terjadi juga pada Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2016-2020 terus bertahan di angka 100 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

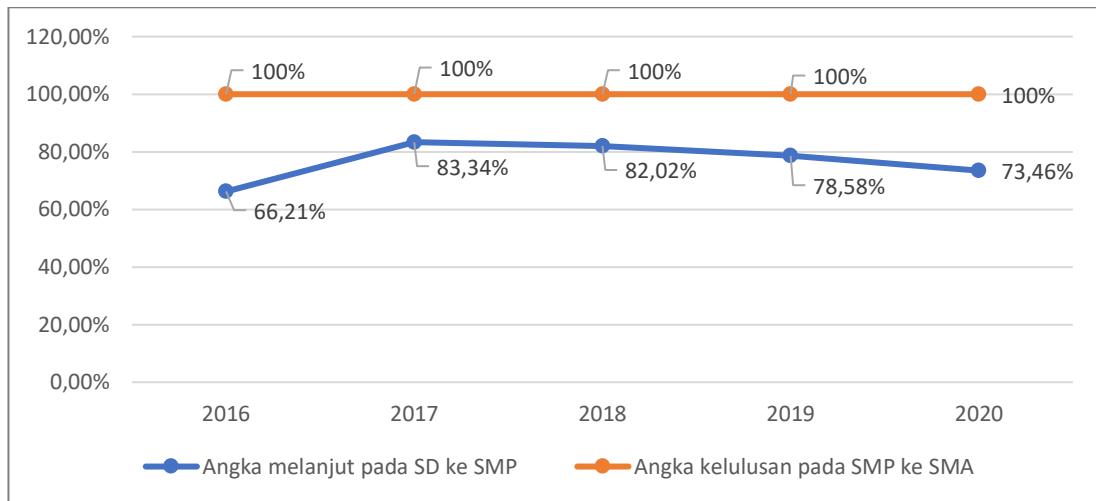
Tabel 2. 62 Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/Sederajat	1.308	1.306	1.294	1.444	1.403
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/Sederajat	1.308	1.306	1.294	1.444	1.403
3	Angka Kelulusan SMP/Sederajat (1:2X100)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

8. ANGKA MELANJUTKAN

Angka Melanjutkan (AM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru pada tingkat 6 (SD Kelas VI) atau 9 (SMP Kelas III), yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi Angka Melanjutkan berarti semakin banyak siswa di suatu wilayah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Grafik berikut menyajikan perkembangan Angka Melanjutkan (SD ke SMP) di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.



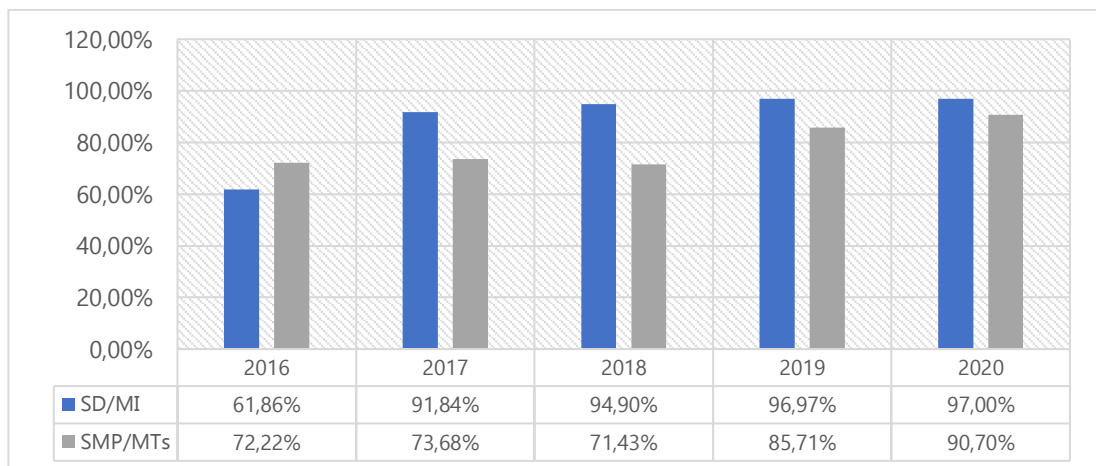
**Gambar 2. 30 Angka melanjut SD Ke SMP dan SMP Ke SMA
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD ke SMP memperlihatkan tren fluktuatif meskipun sempat meningkat secara konsisten pada periode 2016-2017. Namun terjadi penurunan angka melanjut pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2020 angka melanjut mencapai 73,46 persen meningkat dari lima tahun sebelumnya 2016 diangka 66,21 persen. Sedangkan angka melanjut dari SMP ke SMA di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu 2016-2020 konsisten pada angka 100 persen.

9. KONDISI FASILITAS PENDIDIKAN

Sebagai prasarana sekolah, kondisi ruang kelas perlu diperhatikan karena ruang kelas yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif. Sebagaimana tersaji pada grafik di bawah, pada jenjang pendidikan dasar SD, persentase ruang kelas yang rusak (rusak ringan, sedang, berat hingga rusak total) dapat diduga lebih besar dibandingkan dengan kondisi pada jenjang pendidikan SMP.



**Gambar 2. 31 Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Berdasarkan tabel diatas, kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2020 mencapai 97,00 persen, meningkat dari lima tahun sebelumnya pada tahun 2016 mencapai 61,88 pesen. Kemudian untuk kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada

tahun 2016 mencapai 72,22 persen meningkat hingga tahun 2020 mencapai 90,70 persen.

10. RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah yang tersedia pada jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah di suatu wilayah. Berdasarkan definisi tersebut, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs) dan jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) memperlihatkan peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan tahun 2016 sebesar 72,64 persen, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar (usia 7-15 tahun) telah meningkat mencapai 94,56 persen pada Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sekolah SD + SMP	113	136	140	141	143
2	Jumlah penduduk usia (7 s/d 12) tahun + (13 s/d 15) tahun	15.557	16.054	15.827	15.500	15.123
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (1/2 x 10.000)	72,64	84,71	88,46	90,97	94,56

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

11. RASIO GURU / MURID

Rasio guru-siswa didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru-siswa yang terlalu tinggi, akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya rasio guru-siswa yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses belajar mengajar tidak efisien, sebab satu guru mengajar sedikit siswa. Merujuk pada PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya, yaitu: TK/RA/ sederajat 15:1; SD/ sederajat 20:1; MI/ sederajat 15:1; SMP/ sederajat 20:1; MTs/ sederajat 15:1. Tabel berikut menyajikan perkembangan rasio guru/murid menurut jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2. 64 Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Guru SD + SMP	996	1080	1159	1045	1083
2	Jumlah Murid SD + SMP	16005	15799	15643	15305	15010
3	Rasio Guru/Siswa Pendidikan Dasar (1/2 x 10.000)	622,31	683,59	740,91	682,78	721,52
		16:1	15:1	14:1	15:1	14:1

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan selama kurun waktu tahun 2016-2020 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Halmahera Timur per 10.000 untuk jenjang

pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs. Pada tahun 2016, rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Halmahera Timur adalah 622,31. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru sebanyak $622,31 = 622$ atau setiap 1 guru SD/MI melayani (mengajar) $16,02 = 16$ murid jenjang pendidikan dasar. Sedangkan di tahun 2020 rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs adalah 721,52. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak $721,52 = 722$ atau setiap 1 guru SD/MI melayani (mengajar) $13,86 = 14$ murid jenjang pendidikan dasar. Secara keseluruhan rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Timur belum memenuhi standar nasional.

12. RASIO GURU/MURID PER KELAS RATA-RATA SEKOLAH DASAR

Rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2016-2020 memperlihatkan angka perkembangan dengan tren yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 62,23 meningkat menjadi 68,36 pada tahun 2017, lalu meningkat menjadi 74,09 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 68,28 dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 mencapai 72,15. Selengkapnya akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 65 Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru sekolah pendidikan Dasar per kelas	996	1.080	1.159	1.045	1.083
2	Jumlah murid pendidikan dasar	16.005	15.799	15.643	15.305	15.010
3	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar (1:2X1000)	62,23	68,36	74,09	68,28	72,15

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

13. PROPORSI MURID KELAS YANG BERHASIL MENAMATKAN SEKOLAH DASAR

Proporsi murid kelas yang berhasil menyelesaikan sekolah dasar sampai kelas 6 meningkat dari 99,40 persen pada 2016 menjadi 99,58 persen pada 2020. Memang masih terdapat perbedaan antara daerah perkotaan. Meskipun demikian, kesenjangan ini telah semakin sempit dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Proporsi murid Kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar di Kabupaten Halmahera Timur memperlihatkan tren yang konsisten di angka 99 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 66 Proporsi Murid Kelas yang berhasil menamatkan Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya lulusan SD	1.974	1.789	1.819	1.779	1.903
2	Banyak penduduk usia 12 tahun	1.986	1.792	1.824	1.783	1.911
3	Proporsi Murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (1/2 x 100)	99,40%	99,83%	99,73%	99,78%	99,58%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

14. ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK USIA 15-24 TAHUN, PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program permealakan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya. Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2016 – 2020 perkembangannya cukup bervariasi dan konsisten pada nilai antara 98 – 99 persen. Pada tahun 2016 mencapai 98,86 persen, meningkat di tahun 2017 menjadi 99,52 persen. Terjadi penurunan pencapaian angka melek huruf usia 15 – 24 tahun perempuan dan laki-laki pada tahun 2018-2020 dengan tren di angka 99,47 persen, 99,45 persen dan 99,38 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 67 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya Penduduk usia 15-24 tahun melek huruf	14.322	14.704	14.615	14.597	14.610
2	Banyaknya Penduduk usia 15-24 tahun	14.487	14.775	14.693	14.678	14.701
3	Angka melek huruf usia 15-24 thn, perempuan dan laki-laki (1/2 x 100)	98,86%	99,52%	99,47%	99,45%	99,38%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

15. PENDUDUK YANG BERUSIA > 15 TAHUN MELEK HURUF (TIDAK BUTA AKSARA)

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2016-2020 memberikan gambaran yang cukup memuaskan, karena meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 84,97 persen, meningkat dengan signifikan pada tahun 2020 sebesar 93,90 persen. Lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 68 Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja penduduk usia >15 thn yang melek huruf	37.937	44.936	48.893	51.893	54.879
2	Jumlah seluruh penduduk usia >15 thn yang melek huruf	44.647	49.429	52.536	55.526	58.447
3	Penduduk usia >15 thn yang melek huruf (1/2 x 100)	84,97%	90,91%	93,07%	93,46%	93,90%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

16. GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2020, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat sebesar 89,10 persen mengalami peningkatan sebesar 2,22 persen dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya 2016 sebesar 81.63 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kabupaten Halmahera Timur, akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kabupaten Halmahera Timur per jenjang pendidikan dasar selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2. 69 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Di Kabupatem Halmahera Timur, tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	813	913	1.007	916	965
2	Jumlah guru SD/SMP	996	1.080	1.159	1.045	1.083
3	Guru yang berkualifikasi S1/D-IV (1/2 x 100)	81,63%	84,54%	86,89%	87,66%	89,10%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang- undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

1. ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

Angka kematian bayi secara umum merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Angka

Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, AKB di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun tahun 2016-2020 masih menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 AKB mencapai 27 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat 3 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 24 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dengan lima tahun sebelumnya AKB belum membaik, walaupun dari tahun 2016-2018 terlihat tren penurunan AKB mencapai 17 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2016, menurun pada tahun 2017 mencapai 15 per 1.000 kelahiran hidup dan terjadi penurunan yang drastis pada tahun 2018 mencapai 6 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada ilustrasi gambar berikut.

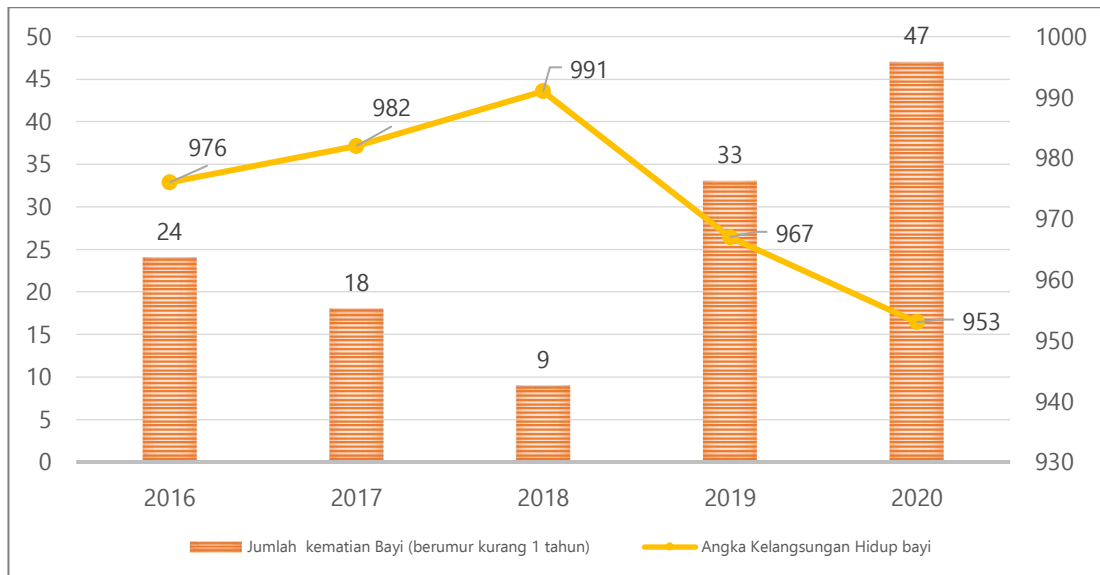


Gambar 2. 32 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

2. ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI

Angka probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan cukup fluktuatif. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir tahun 2019 – 2020 perkembangan menurun dari tiga tahun sebelumnya yakni 2016-2018, kondisi terlihat karena meningkatnya angka kematian dalam kurun waktu dua tahun tersebut. Pada tahun 2016 angka probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun mencapai 976, meningkat pada tahun 2017 mencapai 982, kemudian meningkat hingga tahun 2018 mencapai angka 991. Selanjutnya menurun pada tahun 2019 – 2020 mencapai angka 967 dan 953. Selengkapny sebagai ilustrasi dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 33 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

3. ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP

Angka kematian balita merujuk pada suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun. Kematian yang terjadi pada balita sendiri memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan, dll. gambar berikut menyajikan Angka Kematian Balita (AKABAL) per 100.000 kelahiran hidup.



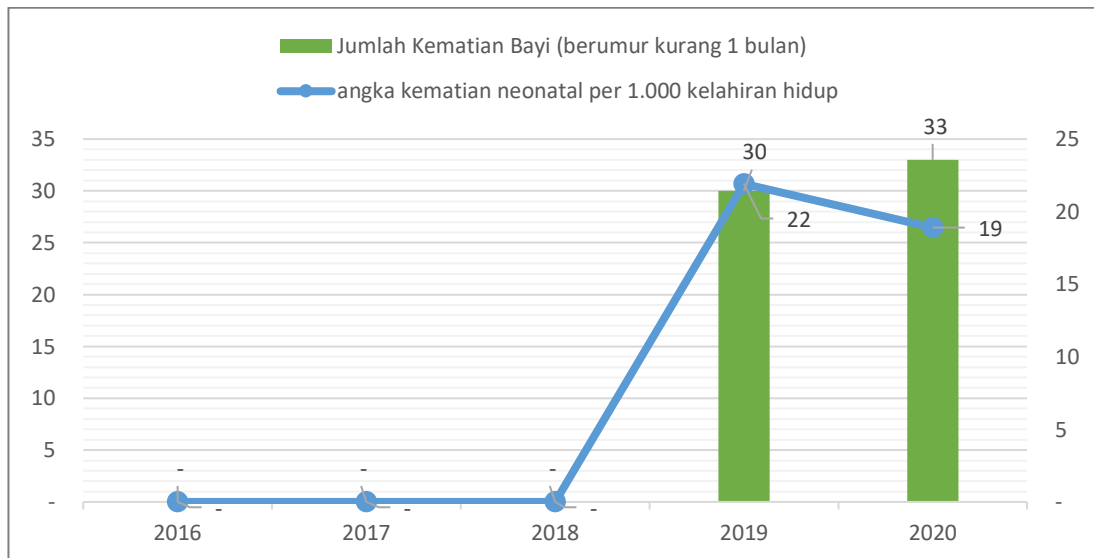
Gambar 2. 34 Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Berdasarkan grafik diatas, kasus kematian balita di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus baru terjadi dalam tiga tahun terakhir. Jumlah kasus kematian Balita masih menunjukkan tren yang fluktuatif di mana pada tahun 2020 mencapai 2 kasus per 1.000 kelahiran hidup atau meningkat sebanyak 1 kasus per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi di 2020 ini lebih tinggi dibandingkan kondisi pada tiga tahun terakhir.

4. ANGKA KEMATIAN NEONATAL PER 1.000 KELAHIRAN BAYI

Penyebab kematian neonatal adalah asfiksia, komplikasi pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), tetanus neonatorum, dan trauma kelahiran, serta akibat kelainan kongenital yang sebenarnya dapat dicegah melalui pemeliharaan ibu selama kehamilan, penolong persalinan yang aman dan bersih, serta penanganan yang adekuat terhadap bayi baru lahir terutama pada bayi yang beresiko tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran bayi hanya terjadi pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2019-2020. Pada tahun 2020 angka kematian Neonatal mencapai 19 kasus per 1.000 kelahiran bayi, angka lebih rendah jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 35 Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

5. ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur masih menunjukkan jumlah yang tinggi, yakni pada 458 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2020. Angka ini tentunya masih jauh dari target *Millenium Development Goals* (MDGs) sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup pada 2020, bahkan jika dibandingkan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pada tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100.000 Kelahiran Hidup. Namun Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Halmahera Timur pada 2020 secara keseluruhan meningkat dibandingkan dengan keadaan pada dua tahun sebelumnya yang mencapai 438 pada 2019 dan 282 pada 2018. Meskipun kurang signifikan, dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 217 per 100.000 kelahiran hidup, maka kondisi di 2020 kurang baik. Kondisi jumlah kasus kematian ibu dan AKI di Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



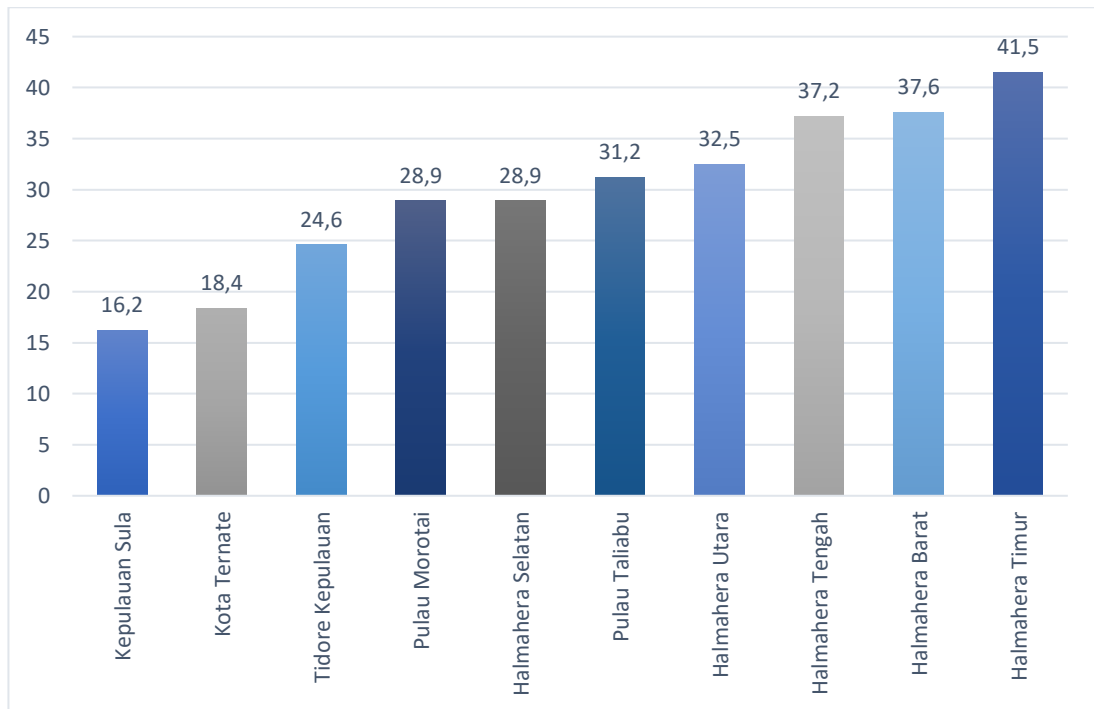
Gambar 2. 36 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

6. PREVALENSI BALITA STUNTING

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan No.1995/Menkes/SK/XII/2010, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan sangat pendek (*severely stunted*). Balita pendek (*stunting*) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Target penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) dalam agenda pembangunan nasional 2014-2019 difokuskan pada anak baduta (dibawah 2 tahun) atau usia 0 – 23 bulan.

Secara keseluruhan, kondisi terkini berdasarkan data per bulan November 2019, prevalensi balita *stunting* di Maluku Utara tentunya masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu maksimal sebesar 20 persen. Berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2019 (data per bulan November), prevalensi balita *stunting* tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Timur yang mencapai 41,5 persen. Total terdapat lima kabupaten dengan prevalensi balita *stunting* di atas rata-rata provinsi. Adapun dua kabupaten/kota di Maluku Utara dengan prevalensi balita *stunting* di bawah 20 persen yang menjadi standar WHO, yaitu Kota Ternate sebesar 18,4 persen dan Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 16,2 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



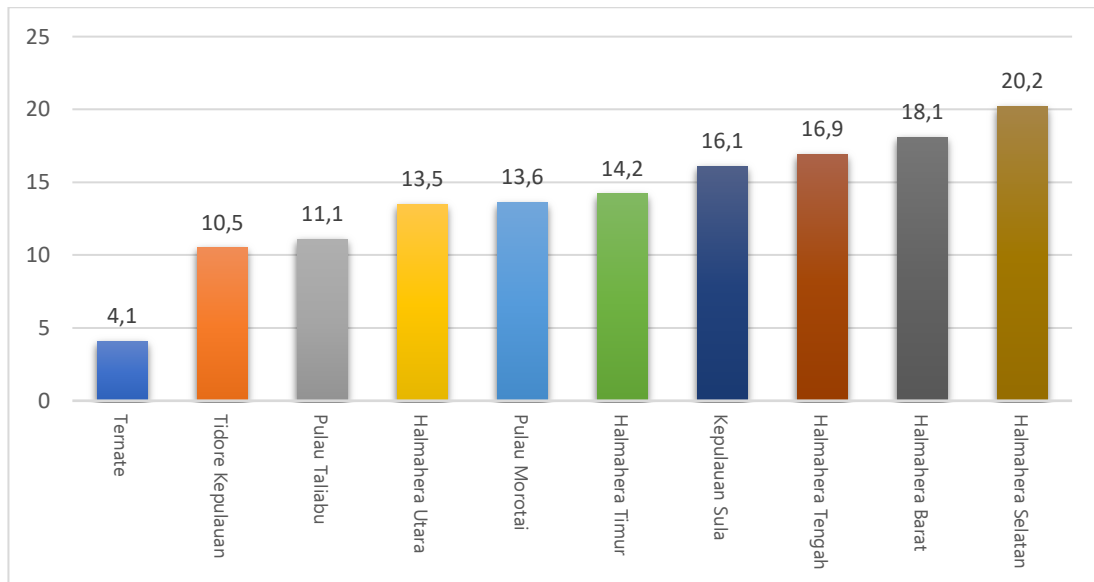
Gambar 2. 37 Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

7. PREVALENSI BALITA WASTING

Selain *stunting*, *Wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. *Wasting* menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. *Wasting* merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa *wasting* adalah salah satu masalah kesehatan utama. Sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit (morbiditas). Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus 5% atau lebih.

Berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2019 (data perbulan November), prevalensi balita *wasting* tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan yang mencapai 20,2 persen. Total terdapat lima kabupaten dengan prevalensi balita *wasting* di atas rata-rata provinsi. Adapun wilayah di Maluku Utara dengan prevalensi balita *wasting* di bawah 5 persen yang menjadi standar WHO, yaitu Kota Ternate sebesar 4,7 persen. Prevalensi balita *wasting* tahun 2019 menurut kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



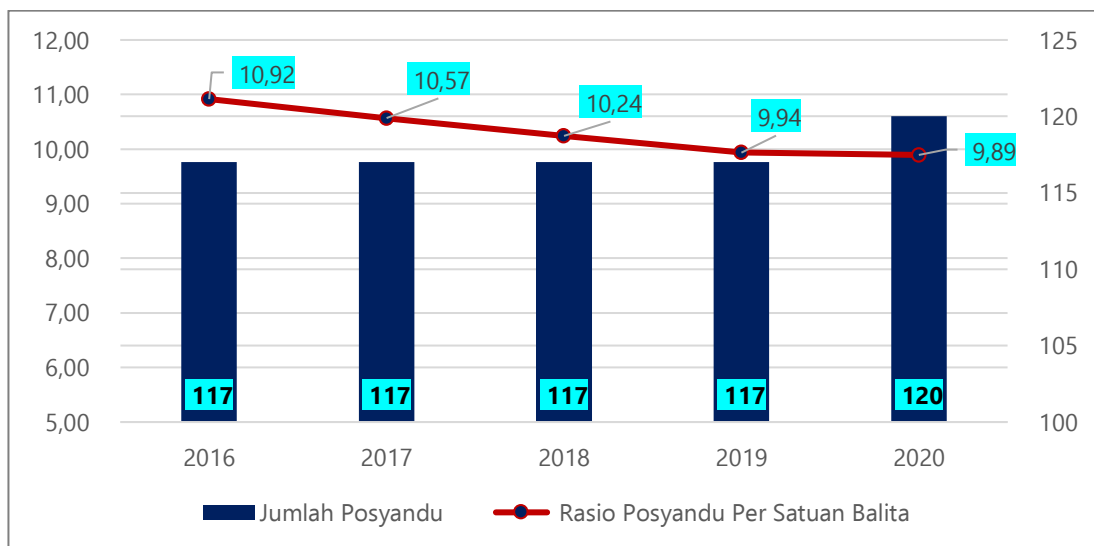
Gambar 2. 38 Prevalensi Balita Wastingg Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

8. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

⇒ RASIO PUSYANDU PER SATUAN BALITA

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, termasuk Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi dan penanggulangan diare. Grafik berikut menyajikan rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020.



Gambar 2. 39 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

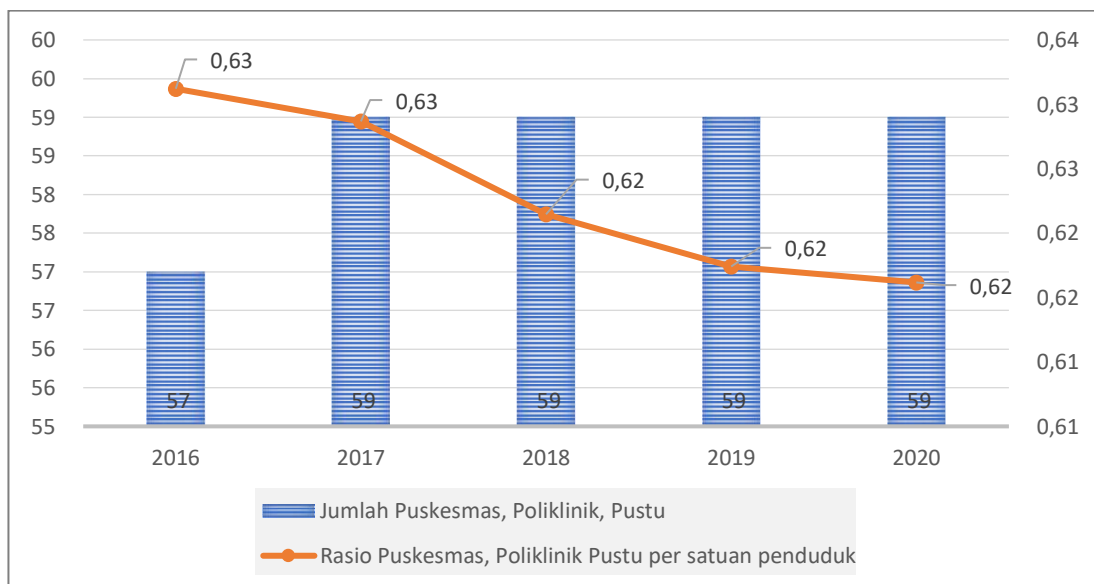
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Dari grafik, sampai dengan Tahun 2020, rasio posyandu terhadap per 1.000 balita di Kabupaten Halmahera Timur telah mencapai 9,89 atau setara dengan 1:9,89. Artinya, dari 1.000 penduduk balita (0-4 tahun) terdapat 9,89,02 = 10 posyandu. Rasio ideal posyandu terhadap jumlah balita menurut Kementerian Kesehatan adalah 1:1.000. Dengan demikian, kecenderungan arah perkembangan cakupan ini senantiasa masih berada dalam tuntutan ideal.

⇒ RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK, PUSTU PER SATUAN PENDUDUK

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas). Pada kondisi tertentu dan bila memungkinkan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap sebagai rujukan antara sebelum dirujuk ke rumah Sakit. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk yaitu 1 puskesmas berbanding 1.000 penduduk. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, bahwa fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas di wilayah kerjanya, yang didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, hingga tahun 2020 telah tersedia sebanyak 16 Puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan, sedangkan pustu sebanyak 43 yang tersebar di 10 kecamatan dan 102 desa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020, maka rasio puskesmas per 1.000 penduduk di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 telah mencapai 0,62. Selengkapnya dapat disajikan pada grafik sebagai berikut.



Gambar 2. 40 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ RASIO RUMAH SAKIT PER SATUAN PENDUDUK

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit (RS) yang tersedia di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 1 RS. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020, maka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 telah mencapai 0,01. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 70 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupatem Halmahera Timur, Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	90.303	93.848	94.937	95.560	95.752
3	Rasio RS per Satuan Penduduk (1:1X1.000)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

9. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan meliputi diantaranya Tenaga Kesehatan, yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kondisi tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

10. RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK

Pada tahun 2020, jumlah dokter di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 36 orang. Ketersediaan jumlah dokter di tahun 2020 meningkat dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya di 2016 yang baru berjumlah 20 orang. Dengan demikian rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2020 1 : 3 artinya 1 orang dokter dalam 1.000 penduduk melayani 3 penduduk atau 1 dokter melayani kurang lebih 3.000 penduduk. Rasio tersebut mencukupi jika merujuk rasio 1 (satu) dokter melayani 1.000 penduduk, namun masih jauh dari standar WHO dimana rasio ideal 1 (satu) dokter melayani 2.500 orang. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah dokter dan rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun tahun 2016-2020.

Tabel 2. 71 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupatem Halmahera Timur, Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	20	22	24	37	36
2	Jumlah Penduduk	90.303	93.848	94.937	95.560	95.752
3	Rasio Dokter persatuan penduduk (1/2 x 1.000)	1:5	1:4	1:4	1:3	1:3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ RASIO TENAGA MEDIS PER SATUAN PENDUDUK

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter, juga dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya seperti Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kemas), Tenaga Gizi, Tenaga Keteknisian Medis (Tekmed) dan Tenaga Fisioterapis (Terapis). Keberadaan tenaga-tenaga kesehatan tersebut sangat penting, karena mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Hingga tahun 2020, jumlah ketujuh tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 869 orang, meningkat sebesar 43,61 persen dari kondisi lima tahun sebelumnya di 2016 yang baru berjumlah 490 orang. Jumlah dan Rasio Tenaga medis per satuan penduduk tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 72 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis	490	649	770	839	869
2	Jumlah Penduduk	90.303	93.848	94.937	95.560	95.752
3	Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk ($1/2 \times 1.000$)	5	7	8	9	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

11. KESEHATAN IBU DAN ANAK

Salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB dan AKABA). Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak mendapat perhatian khusus. Perkembangan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan AKI di Indonesia Saat Ini. Kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan Ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, anak balita serta anak prasekolah. Selanjutnya akan diruaikan lebih rinci.

⇒ CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI

Komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2020 sebanyak 73 kasus yang ditangani, kondisi lebih sedikit dari lima tahun sebelumnya mencapai 317 kasus yang ditangani. Cakupan komplikasi kebidanan dari tahun 2016-2020 secara keseluruhan tertangani dengan penanganan definitif atau 100% tertangani. Cakupan komplikasi kebidanan dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 73 Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	317	5	15	18	73
2	Jumlah Ibu dengan komplikasi Kebidanan	317	5	15	18	73
3	Cakupan Komplikasi Kebidanan ($1/2 \times 100$)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN

Jumlah ibu bersalin di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2020 mencapai 1.784 orang, sedangkan jumlah yang ditolong tenaga kesehatan pada

tahun 2020 mencapai 1.643 orang dengan cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan berkompetensi bebidanan 92,10 persen. Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya di tahun 2016 jumlah ibu bersalin mencapai 2.042 orang, sedangkan Jumlah Ibu bersalin yang di tolong tenaga kesehatan mencapai 1.244 orang dengan cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan berkompetensi bebidanan 60,92 persen. Hal ini menunjukkan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan berkompetensi bebidanan pada tahun 2020 lebih baik dari lima tahun sebelumnya yakni 2016. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan berkompetensi bebidanan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ibu bersalin yang di tolong tenaga kesehatan	1.244	1.233	1.445	1.470	1.643
2.	Jumlah seluruh Ibu bersalin	2.042	2.333	2.292	1.519	1.784
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan berkompetensi bebidanan ($1/2 \times 100$)	60,92%	52,85%	63,05%	96,77%	92,10%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI

Cakupan kunjungan bayi merupakan perbandingan antara Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan Kesehatan Sesuai standar dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup. Cakupan kunjungan bayi dari tahun 2016-2020 perkembangannya cukup fluktuatif. Hingga tahun 2020, Jumlah kunjungan bayi pada fasilitas kesehatan yang memperoleh pelayanan Kesehatan Sesuai standar mencapai 1.659 bayi dengan cakupan mencapai 87,13 persen. Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya tahun 2016 Jumlah kunjungan bayi pada fasilitas kesehatan yang memperoleh pelayanan Kesehatan Sesuai standar mencapai 1.259 bayi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan Kesehatan Sesuai standar	1.259	1.411	1.416	2.467	1.659
2	Jumlah Seluruh bayi lahir hidup	1.850	2.222	2.303	2.503	1.904
3	Cakupan Kunjungan Bayi ($1/2 \times 100$)	68,05%	63,50%	61,49%	98,56%	87,13%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4

Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Dalam konteks ini rendahnya K4 (kunjungan 4 kali) menunjukkan rendahnya kesempatan untuk menjangkau dan menangani risiko tinggi obstetri. Cakupan K4 di Kabupaten Halmahera Timur memperlihatkan arah perkembangan yang meningkat sejak Tahun 2016. Cakupan K4 Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2020 sebesar 76,27 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 20,07 persen poin dari 56,20, namun

sejatinya mengalami peningkatan sebesar 5,66 persen poin dari 70,61 persen di tahun 2016. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

**Tabel 2. 76 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan Antenatal K4	1497	1359	1217	1323	1501
2	Jumlah Sasaran Ibu hamil	2120	2444	2401	2354	1968
3	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 (1/2X 100)	70,61%	55,61%	50,69%	56,20%	76,27%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ CAKUPAN PELAYANAN NIFAS

Jumlah peserta Ibu nifas yang memperoleh 3 x pelayanan nifas sesuai standar dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 mencapai 1.244 ibu nifas meningkat di tahun 2020 mencapai 1.406 ibu nifas. cakupan pelayanan nifas dari tahun 2016-2020 terus memperlihatkan angka peningkatan di tahun 2020 mencapai 73,84 persen atau meningkat 12,92 persen poin jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya tahun 2016 mencapai 60,92 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 77 Cakupan Pelayanan Nifas
Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta Ibu nifas yang memperoleh 3 x pelayanan nifas sesuai standar	1.244	1.269	1.441	1.530	1.406
2	Jumlah Seluruh ibu nifas	2.042	2.333	2.292	2.350	1.904
3	Cakupan Pelayanan Nifas (1/2X 100)	60,92%	54,39%	62,87%	65,11%	73,84%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ CAKUPAN NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DI TANGANI

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani hingga tahun 2020 mencapai 66 kasus, angka ini memperlihatkan angka penurunan dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya tahun 2018 mencapai 112 kasus. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani dalam kurun waktu 2018-2020 secara keseluruhan mencapai angka 100 persen. Kondisi memperlihatkan pelayanan kesehatan ibu dengan perkembangan yang cukup baik. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 78 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani
Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Neonatus dengan komplikasi yang di tangani	-	-	112	47	66
2	Jumlah Seluruh Neonatus dgn Komplikasi yang ada	-	-	112	47	66
3	Cakupan Neonatus dgn Komplikasi yang ditangani (1/2X 100)	-	-	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ CAKUPAN PELAYANAN ANAK BALITA

Cakupan pelayanan anak balita merupakan perbandingan antara Jumlah Anak balita yang memperoleh pelayanan Pemantauan minimal 8 kali dengan jumlah seluruh balita. Cakupan pelayanan anak balita memperlihatkan angka peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 Cakupan pelayanan anak balita mencapai 22,38 persen meningkat 19,23 persen poin dari lima tahun sebelumnya yakni Tahun 2016 dengan cakupan yang mencapai 3,60 persen. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 79 Cakupan Neonatus dgn Komplikasi yang ditangani Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
1	Jumlah Anak balita yang memperoleh pelayanan Pemantauan minimal 8 kali	380	417	485	1.884	2.358
2	Jumlah Seluruh balita	10.548	9.133	3.932	7.854	10.329
3	Cakupan Pelayanan anak balita ($1/2 \times 100$)	3,60%	4,57%	12,33%	23,99%	22,83%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

12. PELAYANAN GIZI MASYARAKAT

Pelayanan gizi masyarakat merupakan suatu kegiatan atau pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. indikator pelayanan gizi dari tahun 2016-2020 di Kabupaten Halmahera Timur akan diuraikan secara rinci.

⇒ CAKUPAN BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2020 mencapai 27 balita, meningkat 17 poin dari lima tahun sebelumnya Tahun 2016 yang mencapai 10 balita. Secara keseluruhan balita gizi buruk yang ditemukan mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Sehingga cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 100 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 80 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	10	11	18	19	27
2	Jumlah seluruh gizi buruk yang ditemukan	10	11	18	19	27
3	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan ($1/2 \times 100$)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ CAKUPAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN KELUARGA MISKIN

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020 memperlihatkan perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2020 mencapai 89,08 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,39 persen. Jika dibandingkan lima sebelumnya Tahun 2016 mencapai 73,33 persen, terjadi peningkatan sebesar 15,27 persen di Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 81 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapatkan MP-ASI	275	205	256	162	1378
2	Jumlah seluruh anak 6-24 bulan keluarga miskin	375	275	329	163	1547
3	Ckupan pemberian MP-ASI Anak uais 6-24 bulan keluarga miskin (1/2 x 100)	73,33%	74,55%	77,81%	99,39%	89,08%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

13. PELAYANAN IMUNISASI

Urain indikator capaian dari pelayanan imunisasi di Kabupaten Halmahera Timur dapat disajikan sebagai berikut.

⇒ CAKUPAN DESA UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun) dan target UCI tahun 2020 yang ditargetkan Kementerian kesehatan adalah 92 persen / desa. Desa UCI di Kabupaten Halmahera Timur pada Tahun 2020 sebanyak 89 desa dari jumlah keseluruhan desa 102, dengan cakupan desa sebesar 87,25 persen. kondisi ini memperlihatkan angka penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 88,24 persen. Walaupun angka ini menurun dari tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan di Tahun 2016 jumlah desa UCI sebanyak 81 desa dari 102 desa dengan cakupan Desa UCI mencapai 79,41 persen. Selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 82 Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Uci	-	81	80	90	89
2	Jumlah seluruh desa	-	102	102	102	102
3	Cakupan desa UCI (1/2x 100)	-	79,41%	78,43%	88,24%	87,25%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

⇒ PERSENTASE ANAK USIA 1 TAHUN YANG DIIMUNISASI CAMPAK

Persentase Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dengan

jumlah anak usia 1 tahun. pada Tahun 2020 sebanyak 3.628 anak Jumlah anak usia 1 tahun sedangkan, jumlah ini jauh lebih sedikit dari empat tahun sebelumnya Tahun 2017 sebanyak 4.314 anak. Selanjutnya untuk persentase jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Pada Tahun 2016 mencapai 25,17 persen, meningkat di Tahun 2018 mencapai 27,47 persen. Kemudian terjadi lagi peningkatan yang cukup signifikan antara Tahun 2019-2020 dengan perkembangan mencapai 38,93 persen dan 39,55 persen. Gambaran secara rinci dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2. 83 Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	-	1.086	1.170	1.184	1.435
2	Jumlah anak usia 1 tahun	-	4.314	4.259	3.041	3.628
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak ($1/2 \times 100$)	-	25,17%	27,47%	38,93%	39,55%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

14. PENGENDALIAN PENYAKIT

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Adapun Angka keberhasilan pengobatan terus menurun dalam lima tahun terakhir. Pada penyakit TB tingkat prevalensi mencapai pada 41 per 100.000 penduduk atau berkurang disbanding dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian DBD, tingkat insidensi mencapai 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya penderita diare yang diatangani mencapai 11 atau meningkat dibanding dari tahun-tahun sebelumnya, Angka kejadian Malaria pada Tahun 2020 mencapai 29 kasus per 100.000 penduduk berkurang dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penyakit HIV AIDS, angka prevalensi pada Tahun 2020 mencapai 0,03 dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 84 Kondisi Penyakit Menular Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

	Jenis Penyakit	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
TB	⇒ Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	-	61	125	93	39
	⇒ Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+)	-	34,659	71,023	52,84	22,159
	⇒ Tingkat prevelensi TBC (per 100.000)	-	65	132	97	41
	⇒ Jumlah pasien TB yang meninggal	-	5	6	8	3
	⇒ Tingkat Kematian TBC (per 100.000)	-	5	6	8	3
	⇒ Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS	-	100	100	100	100
	⇒ Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	-	19,67	17,60	6,45	38,46
DBD	⇒ Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100	100	100

Jenis Penyakit		TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
DIARE	⇒ Penderita diare yang ditangani	-	-	11	8	11
Malaria	⇒ Angka kejadian Malaria (per 100.000)	751	519	203	174	29
	⇒ Tingkat kematian Akibat Malaria	-	-	-	-	-
HIV/AIDS	⇒ Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,04	0,04	0,05	0,07	0,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum (PU) dan permukiman akan mendukung aktifitas sosial masyarakat serta produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur PU juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan daerah. Capaian kinerja pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

1. PENYELENGGARAAN JALAN

Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Tabel berikut menyajikan capaian penyelenggaraan jalan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 85 Capaian Kinerja Penyelenggaraan jalan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	0,43	0,36	0,44	0,57	0,59
2	Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk (Km : Jiwa)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	16,67	14,91	13,16	12,28	12,28
4	Persentase jalan dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	43,30	35,70	43,52	57,09	59,05
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m)	0,88	0,85	0,91	0,70	0,54

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan angka perkembangan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2020 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mencapai angka 0,59 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,20 poin. Jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir memperlihatkan angka peningkatan sebesar 0,16 poin dimana pada Tahun 2016 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik

mencapai 0,43 poin. Selanjutnya untuk rasio panjang jalan dengan penduduk dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 mencapai 0,01 poin.

Untuk Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan angka kemajuan yang cukup baik, pada Tahun 2020 mencapai 12,28 persen berkurang sebesar 4,39 persen dari lima tahun sebelumnya Tahun 2016 yang mencapai 16,67 persen. Kemudian Persentase jalan dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Pada Tahun 2020 Persentase jalan dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) mencapai 59,05 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,96 persen. jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 15,57 persen dari Tahun 2016 yang mencapai 43,30 persen. Sedangkan Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m) hingga Tahun 2020 mencapai 0,54 persen, kondisi memperlihatkan bahwa masih sangat minim jalan di Kabupaten Halmahera Timur yang memiliki trotoar dan drainase, walaupun persentase drainase terhadap jalan pada Tahun 2020 mencapai 39,05 persen. artinya jalan di Kabupaten Halmahera Timur 39,05 persen telah memiliki drainase.

2. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Drainase merupakan salah satu infrastruktur dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. capaian kinerja pembangunan drainase di Kabupaten Halmahera Timur di ukur dengan indikator Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang merupakan perbandingan panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dengan panjang keseluruhan drainase, indikator selanjutnya Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun.

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat yang merupakan perbandingan panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dengan panjang keseluruhan drainase. Persentase drainase dalam kondisi / pembuangan aliran air tidak tersumbat dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup baik, pada Tahun 2020 drainase dalam kondisi / pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 54,59 persen, meningkat dari tahun sebelumnya Tahun 2019 yang mencapai 53,08 persen. Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya memperlihatkan peningkatan sebesar 4,38 persen dimana pada Tahun 2016 mencapai 50,21 persen. gambaran selengkapya dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 86 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang drainase dalam kondisi baik (Km)	92,82	97,08	172,06	198,25	245,25
2	Panjang seluruh drainase (Km)	184,86	192,42	329,17	373,48	449,28
3	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (1/2X100)	50,21%	50,45%	52,27%	53,08%	54,59%

Sumber : Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Indikator selanjutnya adalah persentase terjadi genangan (lebih dari 2 kali setahun). Persentase tersebut didapatkan dari perbandingan antara total luasan daerah yang tergenang dengan luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang dikalikan dengan bilangan 100 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 87 Tidak terjadi genangan >2 kali setahun
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

NO	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas daerah yang tergenang	1176,5	1183	1189,5	1199,25	1202,5
2	Luas daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	1810	1820	1830	1845	1850
3	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	65%	65%	65%	65%	65%

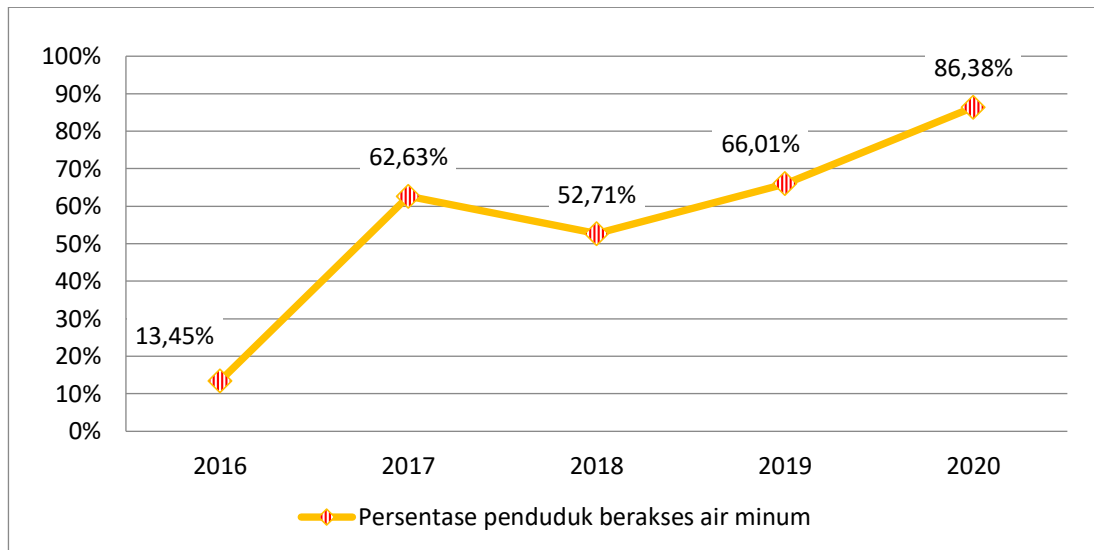
Sumber : Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Terlihat pada tabel, pada perkembangannya dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 luas daerah yang tergenang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sama halnya dengan luas daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun semua itu tidak diimbangi dalam cakupan tidak terjadi genangan (> 2 kali setahun) yang nilai persentasenya hanya mencapai 65 persen setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan jika penanganan terhadap daerah rawan genangan secara keseluruhan belum cukup terkendali. Selain itu, kecenderungan pertumbuhan yang meningkat ini mungkin terjadi akibat kondisi kualitas drainase yang ada (kualitas kurang baik).

3. AIR MINUM DAN SANITASI

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini juga tentunya mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam.

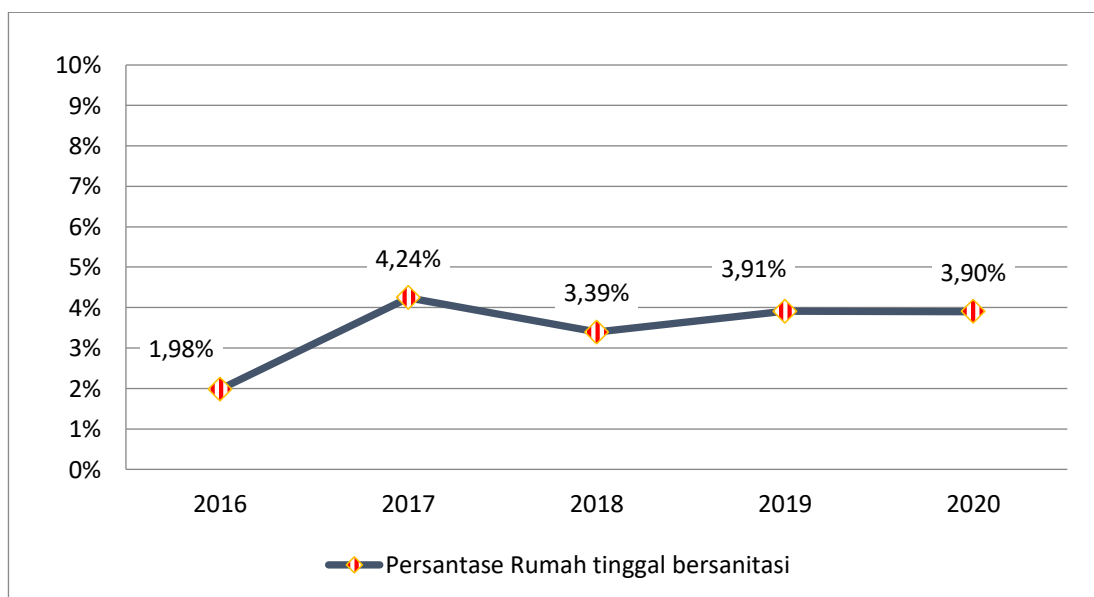
Persentase penduduk berakses air minum merupakan perhitungan jumlah rumah tangga pengguna air minum per jumlah rumah tangga, metode ini dapat digunakan untuk mengetahui berapa jumlah persen masyarakat yang berakses air minum dalam pemenuhan kebutuhannya. Pada Tahun 2016 persentase rumah tangga berakses air minum di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 13,45 persen merupakan nilai persen terendah dalam kurun waktu Tahun 2016-2020. Kemudian pada Tahun 2017 mengalami kenaikan 49,18 persen, sehingga nilainya mencapai 62,63 persen. Namun pada Tahun 2018 cenderung mengalami penurunan mencapai 52,71 persen. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan sampai pada Tahun 2020, yang nilainya tertinggi mencapai 86,38 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2. 41 Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Persentase rumah tinggal bersanitasi, didapat dari perhitungan Jumlah rumah tangga berakses sanitasi per Jumlah rumah tangga di suatu daerah. Perhitungan ini dapat digunakan untuk mengetahui berapa persentase rumah tinggal penduduk yang bersanitasi. Pada tahun 2016 persentase rumah tinggal penduduk yang bersanitasi di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 1,98 persen, atau meningkat mencapai 2,26 persen dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun berikutnya secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan mencapai nilai 3,90 persen di Tahun 2020. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2. 42 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur, 2021

4. IRIGASI KABUPATEN

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Halmahera Timur diterangkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur disebutkan bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah salah satu tujuannya adalah

meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah dengan prioritas program yaitu: 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya, daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur antara :

- Daerah Irigasi Ake Jawi seluas 129 Hektar
- Daerah irigasi Binagara seluas 255 Hektar
- Daerah Irigasi Paruama seluas 431 Hektar

Panjang jaringan irigasi Kabupaten Halmahera Timur yang terbangun hingga Tahun 2020 mencapai 6,59 km, sedangkan panjang irigasi Kabupaten yang masih dalam tahapan rencana pembangunan mencapai 18,23 km. sedangkan luas lahan pertanian yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas 815, maka Rasio Jaringan Irigasi 0,01.

5. PENATAAN RUANG

Dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumberdaya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang, antara lain adalah ketaatan terhadap RTRW serta rasio bangunan ber IMB. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 88 Kinerja Penataan Ruang Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

NO.	Capain Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	-	-	0,002	0,004	0,004

Sumber : ¹Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021,

²Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021

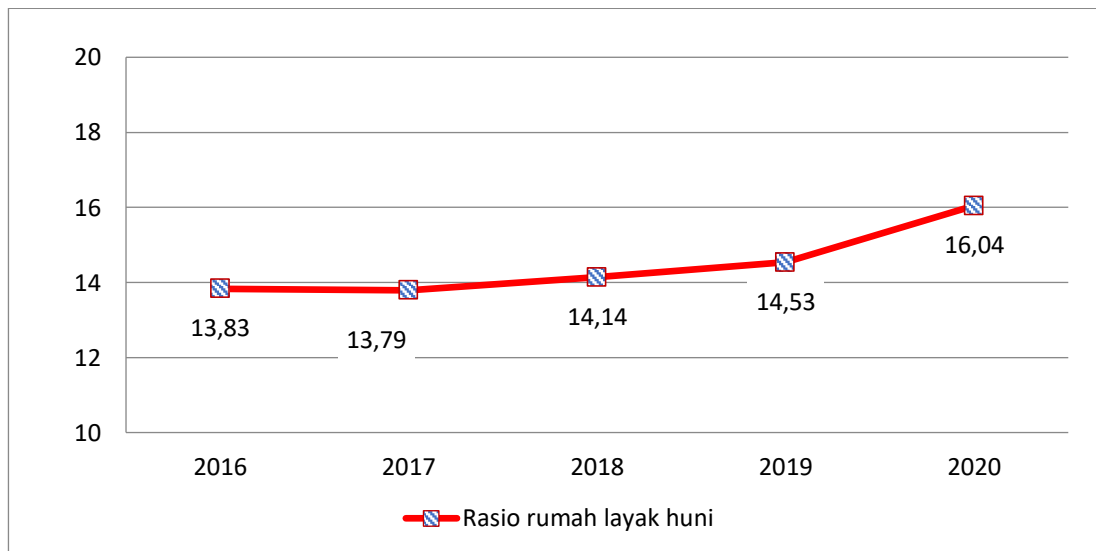
Secara umum, rasio ketaatan terhadap RTRW memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam konteks ini kaidah penataan ruang harus diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang dilakukan dengan seoptimal mungkin mempertahankan ruang yang berfungsi ekologis sebagai komponen penbentuk struktur ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang yang dapat menurunkan kapasitas fungsi ekologis, termasuk untuk meminimalkan kerentanan wilayah terhadap bencana alam. Oleh karenanya, penataan ruang secara menyeluruh dan terpadu dengan model-model advokasi, participatory planning dan perencanaan lintas sektor, perlu terus didorong agar dilakukan secara konsekuen dan konsisten.

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Jaminan kesejahteraan bagi setiap warganya terhadap kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib dipenuhi. Regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya. Oleh karena ini pentingnya peran pemerintah untuk hadir memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat (*adequate shelter for all*). Capaian kinerja atas beberapa indikator pembangunan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

1. RASIO RUMAH LAYAK HUNI

Rasio rumah layak huni merupakan perhitungan dari jumlah rumah layak huni per jumlah penduduk di suatu daerah. Sehingga dapat digambarkan berapa rasio rumah layak huni di Kabupaten Halmahera Timur. Pada Tahun 2017 rasio rumah layak huni di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 13,79 poin, atau menurun 0,04 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 cenderung meningkat sampai pada Tahun 2020 mencapai 16,04 poin. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



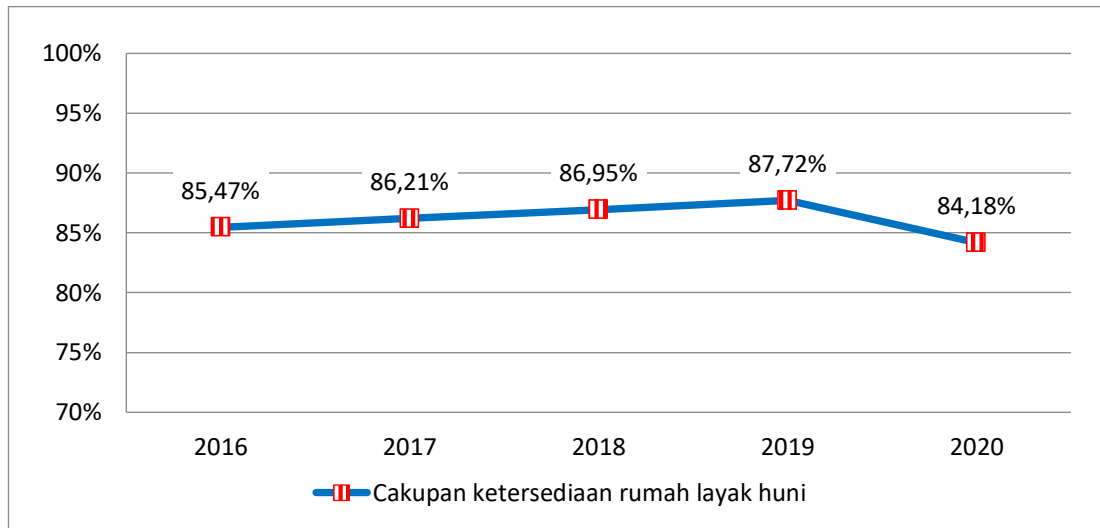
Gambar 2. 43 Rasio Rumah layak Huni Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur, 2021

2. CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI

Ketersedian rumah layak huni dari total jumlah rumah, dapat digambarkan untuk mengetahui berapa jumlah persen masyarakat yang memiliki rumah layak huni di Kabupaten Halmahera Timur. Pada Tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki hunian layak di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 86,47 persen, atau meningkat 0,74 persen poin dari tahun sebelumnya. Kemudian pada Tahun 2018 masyarakat yang memiliki hunian layak cenderung meningkat sampai pada Tahun 2019 mencapai 87,72 persen. Namun pada Tahun 2020 masyarakat yang memiliki rumah layak huni di Kabupaten Halmahera Timur mengalami penurunan mencapai

84,18 persen. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni disajikan selengkapnya pada grafik berikut.

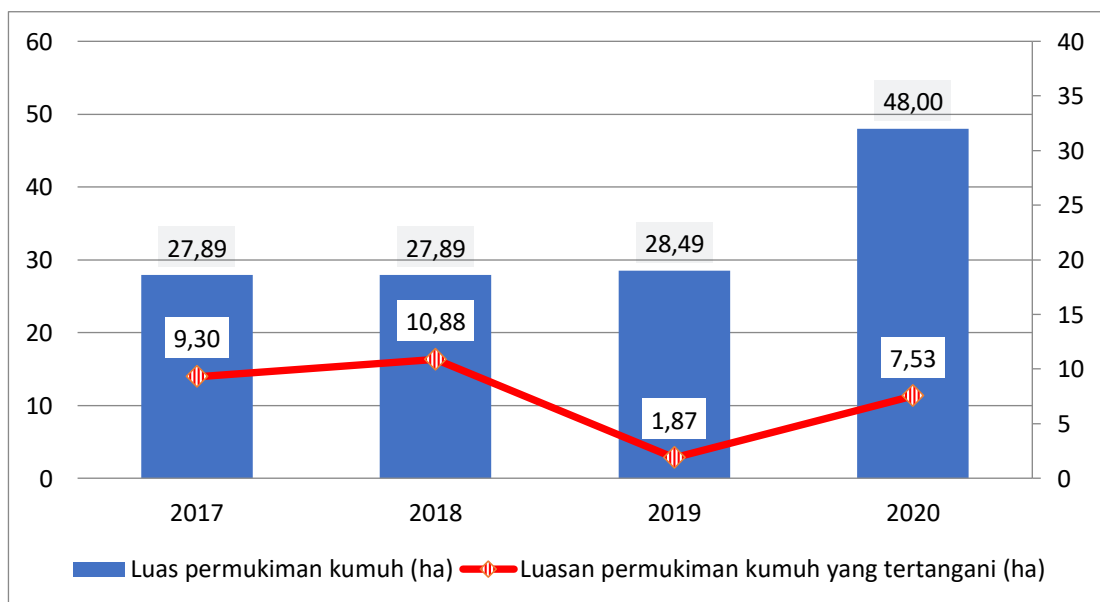


Gambar 2. 44 Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur, 2021

3. PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PERKOTAAN

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh mencakup sejauh mana capaian permukiman kumuh yang tertangani menjadi hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur. Luasan permukiman kumuh setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dengan luas rata-rata 32,03 ha. Peran pemerintah dibutuhkan untuk hadir dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak. Pada Tahun 2017 permukiman kumuh yang tertangani sebesar 10,88 ha, meningkat 1,58 ha dari tahun sebelumnya. Meskipun pada Tahun 2018 mengalami penurunan signifikan mencapai 1,82 ha. Namun pada Tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 7,53 ha luasan permukiman yang tertangani. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

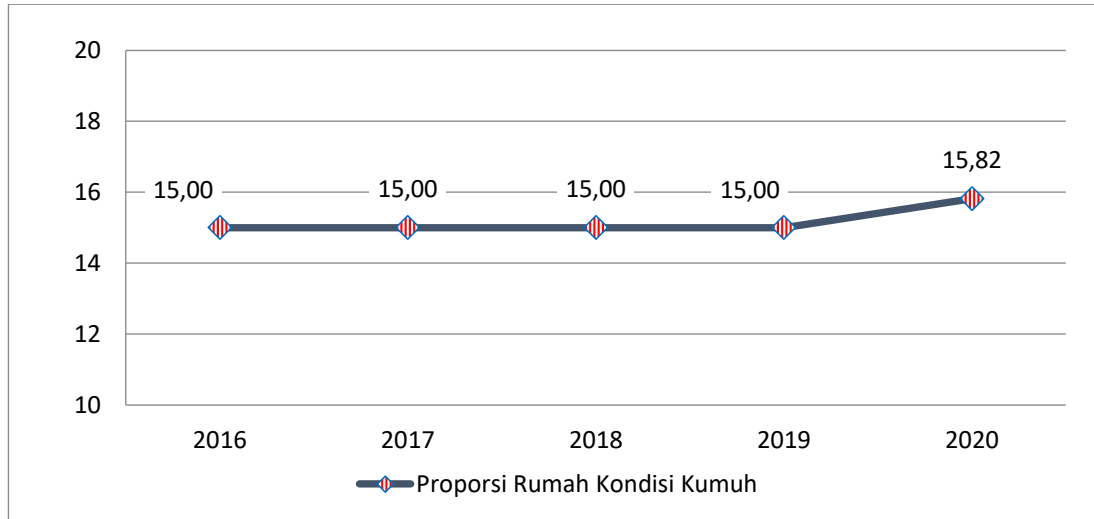


Gambar 2. 45 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur, 2021

4. PROPORSI RUMAH TANGGA KUMUH

Proporsi rumah kondisi kumuh merupakan hasil perhitungan dari jumlah rumah kondisi kumuh per jumlah rumah, sehingga dapat digambarkan berapa perbandingan rumah dalam kondisi kumuh di Kabupaten Halmahera Timur. Proporsi rumah kondisi kumuh dari Tahun 2016 sampai pada Tahun 2019 mengalami tren stabil mencapai angka 15,00 poin. Kemudian pada Tahun 2020 proporsi rumah dalam kondisi kumuh mengalami peningkatan mencapai angka 15,82 poin. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 46 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur, 2021

E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Capaian kinerja dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 89 Kinerja Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 – ketertiban, ketenteraman dan keindahan (persen)	0	0	0	87,5	0
2	Persentase penegakkan perda	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Satpol PP Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2021

Karakteristik wilayah Halmahera Timur yang memiliki potensi bencana besar mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder dan masyarakat untuk melaksanakan upaya pra bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapiagaan serta peringatan dini mengingat bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba. Risiko bencana dapat terjadi karena kurangnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu kesiapsiagaan merupakan tahapan yang strategis untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Terkait dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Tabel berikut menyajikan data jumlah desa/kelurahan berdasarkan kabupaten/kota menurut upaya mitigasi/antisipasi bencana alam Tahun 2020.

Tabel 2. 90 Desa/Kelurahan Menurut Upaya Mitigasi/Antisipasi Bencana Alam Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Sistem Peringatan Dini Tsunami	Perlengkapan Keselamatan	Rambu-rambu & Jalur Evakuasi	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi Sungai, Kanal, Tanggul, dll
Halmahera Barat	9	2	1	12	33
Halmahera Tengah	1	-	-	1	16
Kepulauan Sula	14	2	-	-	12
Halmahera Selatan	16	4	4	19	74
Halmahera Utara	29	2	4	33	23
Halmahera Timur	20	2	1	6	18
Pulau Morotai	8	-	-	7	10
Pulau Taliabu	5	-	2	-	4
Ternate	15	3	1	66	21
Tidore Kepulauan	15	1	-	9	38
Maluku Utara	132	16	13	153	249

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

F. SOSIAL

Bidang sosial difokuskan pada urusan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tersedianya sarana dan prasarana dalam pelayanan sosial merupakan suatu kebutuhan untuk membantu dan mengoptimalkan pemulihannya. Kultur Masyarakat secara kekeluargaan dapat berperan serta dalam memelihara beberapa kelompok PMKS. Akan tetapi peran pemerintah yang memegang kendali utama dalam memfasilitasi kelompok PMKS, yaitu dengan menyediakan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, serta panti rehabilitasi, dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Capaian kinerja pembangunan bidang Sosial Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 91 Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI					
Jumlah PMKS yang tertangani	2	1	1	2	
Jumlah PMKS yang ada	26	26	26	26	
Persentase PMKS yang tertangani	7,7%	3,8%	3,8%	7,7%	
PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL					
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	2	1	1	2	
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	11	11	11	11	
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18%	9%	9%	18%	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Halmahera Timur dengan total ada 26 jiwa sampai pada Tahun 2019. Dengan jumlah rata-rata 1-2 jiwa yang mampu tertangani setiap tahunnya. Tidak jauh berbeda, jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial juga hanya terbantu sebanyak 1-2 jiwa dari total 11 jiwa yang seharusnya menerima bantuan setiap tahunnya.

2.3.2. FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan, yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Capaian kinerja pada urusan-urusan wajib yang tidak termasuk pelayanan dasar ini diuraikan sebagai berikut.

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Tenaga kerja merupakan subyek dalam pembangunan yang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk peningkatan, pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Capaian pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Timur diuraikan sebagai berikut.

1. ANGKA SENGKETA PENGUSAHA-PEKERJA PER TAHUN

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian. Capaian angka sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun di Kabupaten Halmahera Timur, seperti terurai pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 92 Angka sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun 2016-2020
Di Kabupaten Halmahera Timur**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja (Kasus)	20	20	22	19	21
2	Jumlah perusahaan (Unit)	522	627	627	657	657
3	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun	38,31	31,90	35,09	28,92	31,96

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur, 2021

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dikalikan

dengan 1.000. Selama Tahun 2016-2020, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan tren fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 33,24 persen per tahun. Sementara itu jumlah perusahaan di Kabupaten Halmahera Timur semakin meningkat sampai Tahun 2020 diproyeksikan mencapai 657 unit. Pada Tahun 2020, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja mencapai sebesar 21 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim kerja di Kabupaten Halmahera Timur cenderung kondusif mengingat tingkat kasus sengketa menurun dan meningkat sebesar 2 kasus sengketa, serta diikuti oleh jumlah perusahaan yang juga cenderung meningkat setiap tahunnya.

2. KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja yaitu dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini yaitu agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Perlindungan dan keselamatan kerja tersebut merupakan hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Indikator ini akan menghitung persentase perusahaan yang menerapkan K3 dari keseluruhan jumlah perusahaan yang terdaftar dengan melihat jumlah perusahaan yang memiliki P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagaimana dalam Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987.

Selama Tahun 2016-2020 persentase perusahaan yang memiliki P2K3 mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,46 persen. Jumlah perusahaan yang memiliki P2K3 cenderung meningkat pada Tahun 2016-2020, jumlah perusahaan yang terdaftar juga cenderung mengalami peningkatan. Capaian angka Keselamatan dan perlindungan pertahun di Kabupaten Halmahera Timur, seperti terurai pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 93 Keselamatan dan perlindungan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 (Unit)	18	10	10	35	35
2	Jumlah perusahaan (Unit)	522	627	627	657	657
3	Keselamatan dan perlindungan	3,45%	1,59%	1,59%	5,33%	5,33%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur, 2021

3. BESARAN PEKERJA/BURUH YANG MENJADI PESERTA PROGRAM JAMSOSTEK

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja. Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek dan jumlah tenaga kerja mengalami tren fluktuatif. Secara keseluruhan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program pada Tahun 2016-2020 persentase adalah sebesar 100 persen. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 94 Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pekerja/buruh peserta Jamsostek	116	256	156	2	140
2	Jumlah pekerja/buruh	116	256	156	2	140
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur, 2021

4. RASIO JUMLAH LULUSAN S1/S2/S3

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah lulusan S1/S2/S3 pada Tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan sebesar 206 kelulusan dari tahun sebelumnya, sehingga mencapai angka kelulusan sebesar 294 kelulusan. Namun sampai pada Tahun 2020 mengalami penurunan signifikan mencapai angka sebesar 76 kelulusan. Rasio kelulusan S1/S2/S3 secara keseluruhan penduduk Kabupaten Halmahera Timur juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 mencapai angka rasio 31,33 poin, kemudian merosot turun sampai pada Tahun 2020 dengan rasio jumlah kelulusan mencapai angka rasio 7,94 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 95 Rasio Kelulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	88	294	217	136	76
2	Jumlah penduduk	90652	93848	94937	95368	95752
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	9,71	31,33	22,86	14,66	7,94

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur, 2021

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan dua hal yang saling terkait dalam upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Capaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Halmahera Timur diuraikan sebagai berikut.

1. PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi sebagai ASN di Lembaga Pemerintah dan perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 96 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah					
Jumlah ASN Perempuan di Lembaga Pemerintah	1624	1523	1414	1814	1814
Jumlah seluruh ASN di Lembaga Pemerintahan	2721	2783	2714	2829	2829
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur	59,68	54,73	52,10	64,12	64,12
Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD					
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	1	1	1	1	1
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	20	20	20	20	20
Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD	5	5	5	5	5

Sumber: BKPSDA dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Timur, 2021

2. RASIO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya terjadi karena adanya perbedaan status (ketidaksetaraan posisi) antara laki-laki dan perempuan. KDRT juga masih dipandang sebagai masalah ranah pribadi hubungan suami dan istri, bukan merupakan permasalahan sosial yang bisa dicampuri. Kita perlu memahami pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga, ini adalah kunci untuk menghentikan tindak KDRT. Di setiap keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan laki-laki dan perempuan, peran ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini harusnya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Untuk itu, perlu adanya komitmen kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir dalam keluarga. Komitmen tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada kebutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Halmahera Timur selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

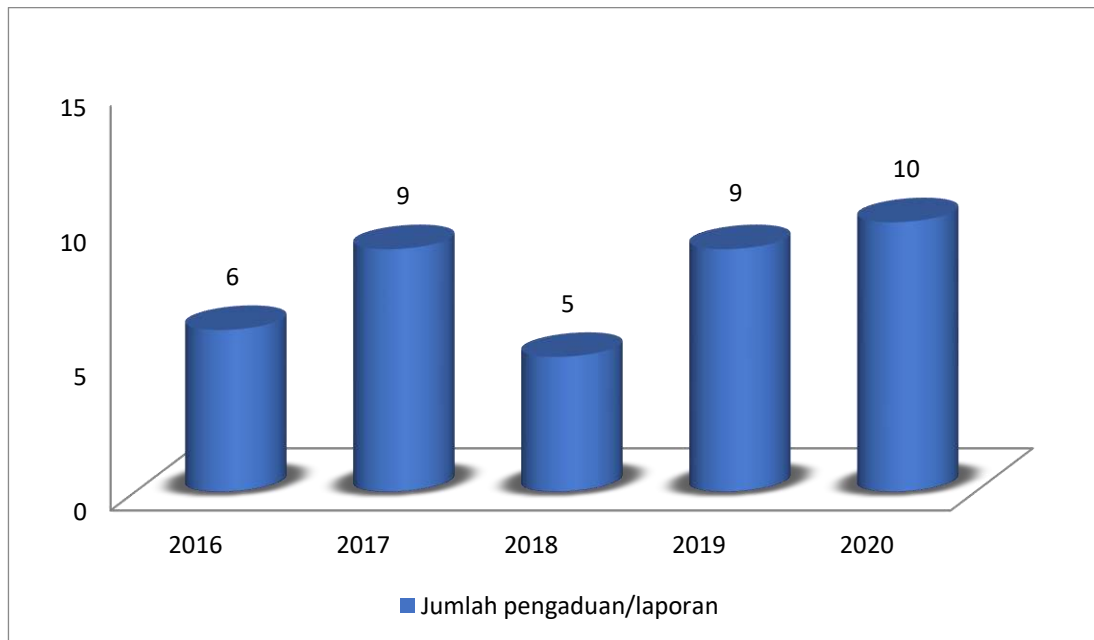
**Tabel 2. 97 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KDRT	2	2	2	1	2
Jumlah rumah tangga	17.536	18.014	18.524	19.001	19.484
Rasio KDRT	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Halmahera Timur, 2021

3. PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) secara khusus memasukkan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada Tahun 2030. Perempuan dan anak dalam hal ini paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Untuk itu, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam SDGs. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Halmahera Timur selengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut.



**Gambar 2. 47 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Halmahera Timur, 2021, diolah

Dari tabel, secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di Kabupaten Halmahera Timur. Jumlah pengaduan/laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur mengalami tren fluktuatif. Pada Tahun 2017 mengalami peningkatan 2 kasus dibanding tahun sebelumnya di Tahun 2016 mencapai 7 kasus terlapor. Kemudian pada Tahun 2018

cenderung mengalami penurunan mencapai 8 kasus terlapor. Namun sampai pada Tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 12 kasus yang merupakan jumlah laporan kasus tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dalam penanganannya, semua laporan atas kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur terlayani dengan baik. Penanganan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak mencakup dalam beberapa indikator: 1) Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu; 2) Penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan Perempuan dan Anak; 3) Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas; 4) Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan; 5) Layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada unit pelayanan terpadu; dan 6) Layanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 98 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu					
Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan					
Penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan Perempuan dan Anak	100	100	100	100	100
Cakupan Penanganan Mendapat Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan					
Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit	100	100	100	100	100
Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan					
Layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan					
Layanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Halmahera Timur, 2021

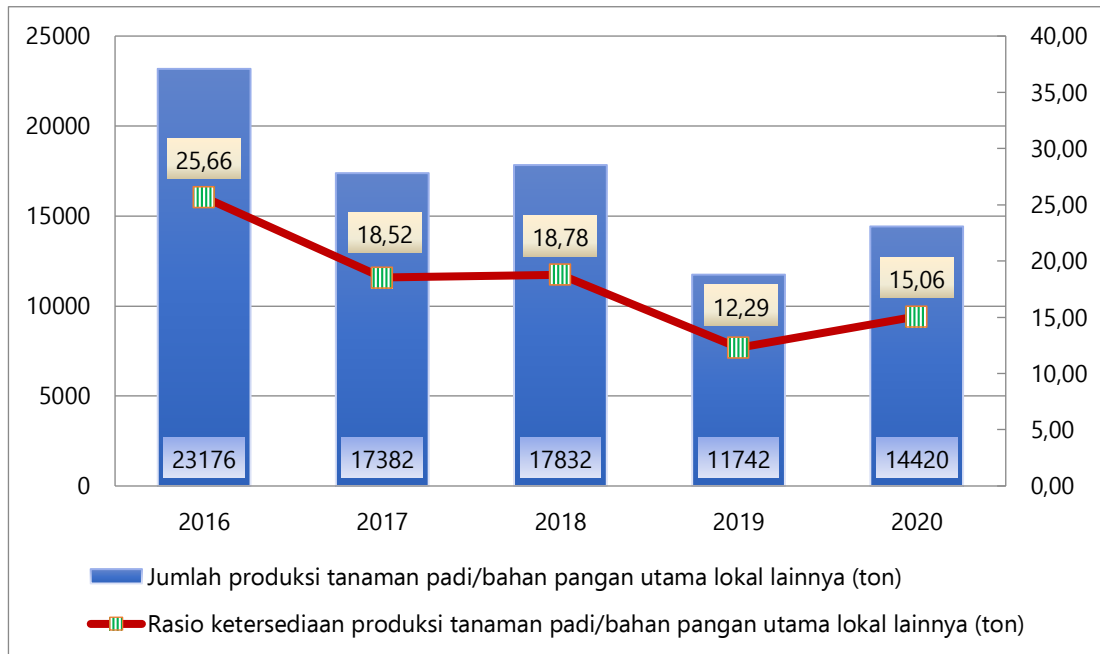
C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Pembangunan ketahanan pangan dalam hal ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dilakukan dengan penganeekaragaman pangan dan pengutamaan

produksi pangan dalam negeri. Capaian pembangunan bidang pangan di Kabupaten Halmahera Timur diuraikan sebagai berikut.

1. KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA

Perkembangan produksi bahan pangan Kabupaten Halmahera Timur tumbuh seiring dengan pertumbuhan ketersediaan (dari sisi produksi dalam daerah). Pada kurun Tahun 2016-2020 total produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) dalam posisi surplus atau mampu memenuhi kebutuhan terhadap rata-rata semua penduduk. Grafik berikut menyajikan rasio ketersediaan padi (ton) di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020.



Gambar 2. 48 Rasio Ketersediaan Padi Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

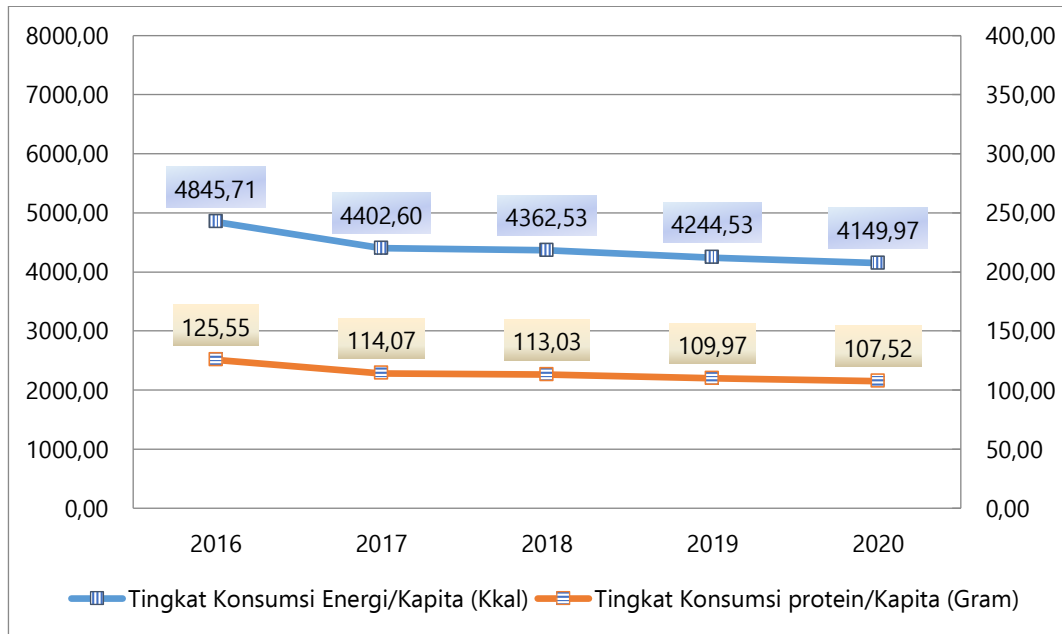
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur, 2021, diolah

Dari grafik diatas, Rasio tingkat ketersediaan terhadap rata-rata semua penduduk untuk konsumsi pangan tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) di Kabupaten Halmahera Timur pada Tahun 2016 mencapai 25,66 ton dari jumlah produksi 23,176 ton. Pada Tahun 2017 jumlah produksi menurun dari capaian tahun sebelumnya sebesar 17,382 ton, dengan rasio tingkat ketersediaan sebesar 18,52 ton. Dalam kurun tahun 2018-2020 memperlihatkan juga kecenderungan penurunan dari jumlah produksi dan rasio ketersediaan konsumsi padi terhadap rata-rata semua penduduk. Pada Tahun 2020 ketersediaan untuk konsumsi pangan padi mencapai 15,06 ton, yang berasal dari jumlah produksi sebanyak 14,420 ton. Secara keseluruhan tingkat ketersediaan pangan tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) di Kabupaten Halmahera Timur masih berada di atas rata-rata konsumsi penduduk yang tercatat sebesar 18,06 ton setiap tahunnya tahun.

2. KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA

Ketersediaan pangan merupakan salah satu agenda utama untuk mewujudkan ketahanan pangan. Terdapat dua indikator pola konsumsi pangan terlihat dari kualitas dan kuantitas konsumsi bahan pangan. Kualitas memperlihatkan komposisi dan perbandingan zat gizi yang terkandung pada bahan pangan. Kuantitas menunjukkan jumlah konsumsi zat gizi bagi kebutuhan tubuh manusia per individu. Sedangkan dari

sisi kualitas, ditinjau dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang terkandung dalam pangan. Keduanya digunakan untuk melihat apakah konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG). Untuk menilai kuantitas konsumsi pangan masyarakat dapat digunakan Parameter Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Jika konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma atau angka kecukupan gizi dan konsumsi pangan beragam, maka zat-zat lain juga akan terpenuhi dari konsumsi pangan. Tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan tingkat konsumsi energi perkapita dan tingkat konsumsi protein perkapita di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020.



Gambar 2. 49 Tingkat Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur, 2021, diolah

Dari grafik diatas, konsumsi energi/kapita di Kabupaten Halmahera Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari hanya sebesar 4845,71 Kkal pada Tahun 2016 menjadi 4149,97 Kkal pada Tahun 2020. Adapun konsumsi protein/kapita juga mengalami penurunan dari sebesar 125,55 gram pada Tahun 2016, kemudian menurun sampai pada Tahun 2020 mencapai 107,52 gram. Secara umum konsumsi energi dan protein perkapita Kabupaten Halmahera Timur masih diatas standar yang disarankan, yaitu untuk konsumsi memiliki batasan 2.200 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Perkembangan dalam pembangunan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan yang membutuhkan ketersediaan lahan. Perkembangan ini menunjukkan suatu gejala meningkatnya potensi-potensi konflik pertanahan yang berbuntut terjadinya sengketa. Banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakat, mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena dianggap bahwa "peristiwa kasus sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu isu strategis". Oleh sebab itu pemerintah merasa perlu untuk memprioritaskan penataannya yang tertuang dalam proyeksi rencana pembangunan. Fenomena sengketa tanah yang muncul ke

permukaan begitu luar biasa. Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat sendiri, bahkan terjadi antara pemerintah dengan pemerintah. Sebagian besar permasalahan ini muncul akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata, maupun perkebunan skala besar. Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Halmahera Timur dari Tahun 2016-2020 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Angka persentase tertinggi terjadi di Tahun 2020 mencapai 15 kasus sengketa. Semua kasus sengketa dapat diselesaikan dengan baik dengan penilaian mencapai angka sebesar 100 persen. Capaian penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Halmahera Timur tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 99 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelesaian Kasus Tanah Negara					
Jumlah kasus yang diselesaikan	5	9	12	7	15
Jumlah kasus yang terdaftar	5	9	12	7	15
Persentase kasus tanah negara	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100. permohonan izin lokasi di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2017 cenderung stagnan tidak ada data, namun di Tahun 2018 dan Tahun 2019 terdapat permohonan izin lokasi sebanyak 2 dan mendapatkan izin. Kemudian pada tahun terakhir, yaitu pada Tahun 2020 mengeluarkan izin lokasi hanya 2 saja dari 9 permohonan yang mengajukan. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 100 Penyelesaian Izin Lokasi Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Lokasi	0	0	2	2	4
2	Permohonan Izin Lokasi	0	0	2	2	9
3	Penyelesaian Izin Lokasi	0	0	100	100	44

Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bijaksana. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur dapat ditunjukkan melalui informasi status mutu air, informasi status mutu udara, informasi status kualitas tutupan lahan.

1. PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Timur digambarkan dengan data penunjang yang di dalamnya mencakup beberapa indikator; 1) Tersusunnya RPPHL Kabupaten; 2) Terintegrasinya RPPHL dalam rencana pembangunan Kabupaten; 3) Terselenggaranya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk K/R/P tingkat daerah; 4) Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup. Terkait dengan tersedianya Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPHL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

dan terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 masih dalam status “tidak ada”. Selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 101 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Capaian Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPHL)			tidak ada		
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan			tidak ada		
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah			tidak ada		
4	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup			tidak ada		

Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021

2. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. IKLH juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/ Pencemaran Air (IKA), Indeks Kualitas/Pencemaran Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL). Perkembangan IKLH dan rinciannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 102 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indeks	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air	88	82	82	82	82
2	Indeks Kualitas Udara	88	82	82	82	82
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64,18	64,18	64,18	64,18	64,18
4	IKLH	78,47	74,87	74,87	74,87	74,87
5	Predikat IKLH	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021

Dari tabel, pada Tahun 2016 IKLH Kabupaten Halmahera Timur adalah 78,47 persen termasuk kategori Baik, Kemudian ditahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 3,60 persen. Sampai pada Tahun 2020 IKLH Kabupaten Halmahera Timur masih dalam angka persentase yang sama mencapai 74,87 persen termasuk kedalam penilaian kategori Baik. Secara keseluruhan penilain IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020 termasuk kedalam predikat (Baik).

3. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan lingkungan bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam mengelola serta memantau lingkungan hidup

sesuai yang tertuang pada dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Parameter yang menjadi Bimwas yaitu izin lingkungan yang ada di perusahaan meliputi pelaporan pelaksanaan UKL-UPL setiap Semester, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, manajemen lalu lintas dan pengelolaan sampah domestik perusahaan. Perkembangan Pembinaan dan Pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun, terhitung dari Tahun 2016-2020 telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan dengan persentase rata-rata mencapai angka 86,67 persen. Gambaran secara rinci disajikan pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel 2. 103 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Capaian Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan (PPLH dan PUU LH)	17	13	18	14	30
2	Total penanggungjawab usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi	0	10	8	13	26
3	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap izin lingkungan (2:1x100)	0,00%	76,92%	44,44%	92,86%	86,67%

Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021

4. PENANGANAN SAMPAH

Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Halmahera Timur setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 1,28 persen pada Tahun 2020, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,3 persen, jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya memperlihatkan perkembangan sebesar 0,8 persen, dimana pada Tahun 2016 sampah yang tertangani sebesar 1,20 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 104 Persentase Sampah yang Tertangani di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Capaian Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	2.087,58	2.313,99	2.342,55	2.372,14	2.804,30
2	Total jumlah sampah (ton)	173.805,30	189.748,90	189.748,90	189.748,90	218.751,80
3	Persentase sampah yang tertangani	1,20%	1,22%	1,23%	1,25%	1,28%

Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Administrasi Kependudukan pada hakekatnya merupakan kegiatan pencatatan biodata penduduk, data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Maka dari itu tata kelola kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan dalam suatu daerah. Pelayanan terbaik mewujudkan kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya memfokuskan pembangunan di sektor ini. Beberapa capaian kinerja pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terurai pada tabel berikut.

Tabel 2. 105 Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan penduduk	0,33	0,60	0,91	0,97	1,02
2.	Rasio bayi berakte kelahiran (anak usia 0- 4tahun)	0,73	1,19	0,99	0,90	0,87
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,08	0,18	0,26	0,29	0,33
4.	Ketersediaan database kependudukan	ada				
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah diterapkan				
6.	Cakupan penerbitan KTP	33%	60%	87%	91%	100%
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	9%	4%	15%	22%	14%

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat lebih mandiri dari segi ekonomi sehingga akan cukup kuat dalam persaingan. Pemberdayaan masyarakat dan desa, tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas, meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan berkembang secara mandiri yang mengandung makna memampukan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Representasi capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 106 Representasi Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	95,10%	95,10%	98,04%	100,00%	100,00%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,39	3,11	4,81	5,33	0,42

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0,31	1,20	0,79	1,05	0,33
4	Persentase LSM aktif	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Persentase LPM Berprestasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Persentase PKK aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Persentase Posyandu aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	113	41,70	40,90	22,10	421
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mengiringi agenda pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kondisi eksisting di Kabupaten Halmahera Timur luas lahan pembangunan masih tercukupi, akan tetapi dibutuhkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana agar lebih difokuskan untuk menciptakan pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disadari bahwa pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah mencapai berbagai keberhasilan. Kehadiran sektor ini diharapkan mampu secara bersinergi untuk mengatasi menurunkan tingkat kelahiran yang dilaksanakan melalui program keluarga berencana, yaitu dengan mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) agar memakai alat kontrasepsi. Jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi akan terus ditingkatkan, disamping upaya penundaan usia perkawinan. Pelaksanaan program KB merupakan usaha yang mempunyai dampak langsung terhadap hasil pencapaian tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam pemecahan masalah kependudukan mempunyai dampak yang berarti dalam menunjang pembangunan di bidang kependudukan. Peran serta pemerintah daerah juga berkontribusi dalam kampung KB dan memberikan pembinaan kelompok remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR). Kolaborasi ini akan semakin menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk mengatasi persoalan kependudukan. Beberapa capaian kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 107 Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,88	2,69	2,79	2,54	2,47
2	Total Fertility Rate (TFR)	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
4	Rasio Akseptor KB	44,1	44,29	47,89	62,44	73,1
5	Rasio Pemakai kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 thn	40,92	40,77	47,46	61,98	72,64
6	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	52,27	36,16	24,72	21	17,26

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,48	21,04	23,85	29,23	32,17
8	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	52,27	36,16	24,72	21	17,26
9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 -19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	54,27	54,27	54,27	54,27	54,27
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	32,27	32,9	34,77	23,53	16,89
11	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri	69,41	69,41	69,41	60,37	60,37
12	Cakupan anggota Bina Kelompok Balita (BKB) ber-KB	88,92	88,79	90,32	82,59	84,24
13	Cakupan anggota Bina Kelompok Balita (BKL) ber-KB	46,81	50	50,52	63,37	63,37
14	Cakupan remaja dalam PIKR/M	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
15	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16

Sumber : Dinas PPKBP3A, Kabupaten Halmahera Timur, 2021

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Transportasi memiliki peranan penting dalam menunjang proses perkembangan interaksi antar wilayah. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya melaksanakan dan meningkatkan pembangunan berbagai infrastruktur perhubungan di daerah. Beberapa capaian kinerja sektor perhubungan di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 108 Kinerja Bidang Urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang Angkutan Umum (mini bus)	49.483	34.295	58.259	59.611	65.520
2	Jumlah uji kir angkutan umum	9	89	167	357	164
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus :						
3	Pelabuhan Laut	7	7	7	8	8
4	Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
5	Jumlah terminal bus Jumlah	8	8	8	9	9
6	Persentase layanan angkutan darat	1,18	1,92	1,3	1,79	1,95
7	Jumlah pemasangan rambu – rambu	100	200	200	200	200
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	112,96	103,92	98,43	90,52	98,18

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum :						
11	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	49.483	34.295	58.259	59.611	65.520
12	jumlah barang yang terangkut angkutan umum	494.830	342.950	582.590	596.110	655.200
13	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	646.272	517.621	770.093	739.188	729.035

Sumber : Dinas Perhubungan, Kabupaten Halmahera Timur, 2021

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Oleh karena itu komunikasi dan informatika merupakan salah satu sumberdaya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah. Persentase penduduk menggunakan telepon seluler dapat menjadi ukuran seberapa kuat penetrasi infrastruktur TIK di suatu wilayah. Terutama bagi Kabupaten Halmahera Timur dimana secara geografis sangat sulit mengandalkan penetrasi jaringan telepon tetap (*fixed line*). Oleh karena itu peran operator telekomunikasi, yaitu dengan hadirnya jaringan telekomunikasi di daerah pedesaan maupun terpencil sangat diperlukan. Cakupan Layanan Telekomunikasi pada Tahun 2020 mencapai 0,93 poin meningkat dari lima tahun sebelumnya Tahun 2016 yang mencapai 0,75 poin. Selanjutnya pada Tahun 2020 persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon mencapai 65,70 persen, angka meningkat secara signifikan dari lima tahun sebelumnya yang mencapai 45,82 persen. sedangkan untuk proporsi rumah tangga dengan akses internet pada Tahun mencapai 0,38. Capaian pembangunan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Halmahera Timur diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 109 Capaian pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,75	0,80	0,81	0,91	0,93
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	45,82	50,87	52,53	60,03	65,70
3	Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet	0,12	0,19	0,23	0,30	0,38

Sumber : ¹Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kabupaten Halmahera Timur, 2021, ²Data Base Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2020

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Koperasi merupakan pilar perekonomian Indonesia. Kehadirannya mampu menjawab dan memberi solusi terhadap usaha pemberdayaan ekonomi rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, hingga menurunkan kemiskinan pada suatu daerah. Koperasi mempunyai kontribusi dalam pengembangan UMKM sebagai sumber ekonomi, khususnya membuka lapangan kerja, maka pembangunan sektor ini akan

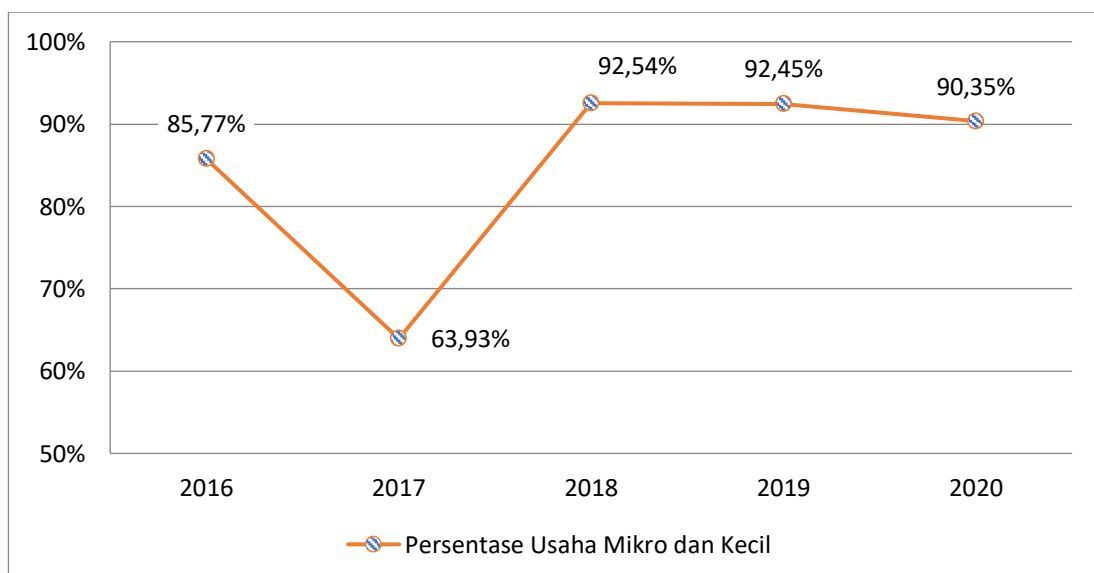
terus melakukan upaya yang dapat mendorong keberlanjutan UMKM, terutama dalam memastikan terwujudnya kemudahan dalam mengakses pembiayaan atau permodalan, meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi, serta keterbatasan kapasitas manajemen dan teknis. Pemberdayaan UMKM dan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu tercapainya : 1) menyelaraskan struktur perekonomian nasional, 2) mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, 3) mengurangi tingkat pengangguran terbuka, 4) menurunkan tingkat kemiskinan, 5) mendinamisasi sektor riil, dan 6) memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Halmahera Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan nilai tertinggi di Tahun 2019-2020 sebesar 57,02 persen. Capaian Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Halmahera Timur diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 110 Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	50	60	61	65	65
2	Jumlah seluruh koperasi	104	108	109	114	114
3	Persentase koperasi aktif ($1 / 2 \times 100$)	48.08	55.56	55.96	57.02	57.02

Sumber :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



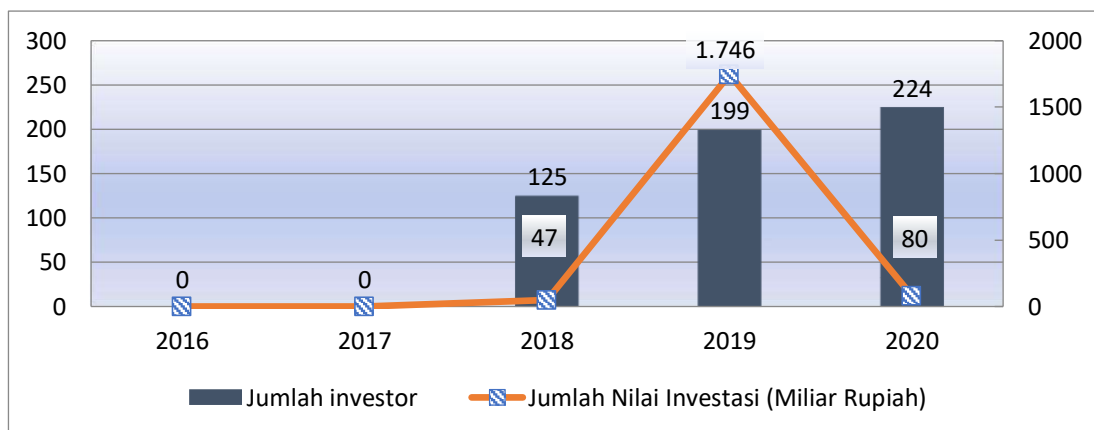
Gambar 2. 50 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Timur, 2021

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, urusan Penanaman Modal yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota mencakup sub urusan: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota); 2) Promosi Penanaman Modal (Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota); 3) Pelayanan Penanaman Modal (Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota); 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 5) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi; 6) Kepemudaan (Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota).

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Halmahera Timur dalam tiga tahun terakhir mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai investasi sebesar 47 miliar rupiah yang berasal dari 125 investor. Pada tahun 2019 nilai investasi mengalami peningkatan signifikan mencapai 1,746 triliun rupiah berasal dari 199 investor. Kemudian pada tahun 2020 jumlah investor mengalami peningkatan mencapai 224 investor, namun nilai investasi mengalami penurunan sebesar 80 miliar rupiah. Capaian kinerja pembangunan bidang Penanaman Modal Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.



**Gambar 2. 51 Penanaman Modal Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, 2021, diolah

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Pemuda dan Olahraga merupakan sektor strategis dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan

kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Capaian pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 111 Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	16	16	16	16
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftar	8	8	8	8
3	Jumlah cabang olahraga yang dibina	3	3	4	4
4	Jumlah atlet Berprestasi	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur 2021

Dari tabel di atas, Kabupaten Halmahera Timur memiliki organisasi pemuda yang aktif sampai pada Tahun 2020, sebesar 16 organisasi pemuda. Keberadaan organisasi pemuda tersebut memiliki potensi dan peluang dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Terdapat cukup cabang olahraga terdaftar dan dibina oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur, dengan harapan tercipta lahirnya pemuda daerah yang menjadi atlet berprestasi di tingkat regional dan internasional.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Statistik merupakan data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Pembangunan statistik akan menghasilkan informasi yang lengkap secara angka dan deskriptif mengenai berbagai hal terkait kegiatan perekonomian, sosial dan kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana serta informasi terkait pemerintahan. Adapun Pengelolaan persandian yang baik tentunya akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di pemerintahan daerah di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi. Dengan demikian Capaian kinerja statistik dan persandian Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 112 Kinerja Pembangunan Statistik dan Persandian Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan
2	Buku Daerah dalam Angka	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan
3	Buku PDRB	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sandi dalam berkomunikasi	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan	Belum Jalan

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur 2021

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa statistik dan persandian pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur belum berjalan secara optimal. Harapan besar kehadiran statistik dan persandian dapat direalisasikan untuk pembangunan daerah. Pembangunan statistik dan persandian menjadi penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan sebagai pedoman arah penentuan kebijakan daerah.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan salah satu aset penting yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Tradisi dan kearifan lokal menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan kebudayaan. Pentingnya pembangunan kebudayaan lokal suatu daerah, memiliki kaitannya dalam meningkatkan ekonomi pariwisata. Pembangunan kebudayaan diantaranya melestarikan dan mengembangkan khasanah budaya daerah untuk menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga, kerajinan yang berbasis lokal, makanan lokal atau hal lainnya. Capaian pembangunan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 113 Kinerja Pembangunan Kebudayaan
di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Kebudayaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1. Banker peninggalan perang dunia II, 2. Kuburan mata kena, 3. Al-quan tua (kulit kayu), 4. Kuburan sultan zainal abidin, dan 5. Meriam.				
2	Cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Museum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur 2021

Dari tabel diatas, Kabupaten Halmahera Timur memiliki Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; 1) Banker peninggalan perang dunia II, 2) Kuburan mata kena, 3) Al-quan tua (kulit kayu), 4) Kuburan sultan zainal abidin, dan 5) Meriam. Keberadaan 5 situs atau benda cagar budaya tersebut merupakan aset kebudayaan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan untuk pembangunan kebudayaan.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pembangunan perpustakaan dimaksudkan untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan masyarakat. Perpustakaan merupakan gerbang menuju pengetahuan, menyediakan kondisi awal bagi perorangan maupun kelompok sosial untuk melakukan kegiatan belajar seumur hidup, pengambilan keputusan mandiri, dan pembangunan budaya. Adapun Pembangunan kearsipan memiliki fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif bangsa dan aset bagi pemerintah yang sangat

bernilai tinggi. Melalui arsip maka dapat tergambarkan perjalanan sejarah bangsa, penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, dari masa ke masa. Oleh karena arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima pemerintah daerah, maka diperlukan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Beberapa capaian kinerja perpustakaan dan kearsipan yang menjadi indikator pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2. 114 Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	0	0	0	0	0
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0	0	0	0	0
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0	0	0	0	0
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	0	0	0	0	0
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0
6	Persentase perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100
7	Jumlah kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	0	0	0

Sumber: Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Timur 2021

2.3.3. FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Urusan Pemerintahan pilihan terdiri dari delapan urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian. Capaian kinerja pembangunan pada urusan-urusan pilihan ini diuraikan sebagai berikut.

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan sangat berpeluang didayagunakan untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengadopsi konsep *blue economy* dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, dengan proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis aman; jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sebesar 80 persen dari potensi maksimum lestarnya. Pembangunan kelautan dan perikanan juga akan terus melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta memperluas akses pendanaan untuk nelayan skala kecil.

Produksi Perikanan Tangkap (Ton) mengalami peningkatan pertumbuhan selama Tahun 2016-2020. Pada cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Halmahera Timur mengalami peningkatan sampai pada Tahun 2020 dengan rata-rata 70-80 persen. Cakupan Kelompok bina nelayan di Kabupaten Halmahera Timur

sampai dengan Tahun 2020 mencapai 83,87 persen kelompok nelayan, dengan total produksi kelompok nelayan mencapai 8,048.67 ton. beberapa capaian kinerja dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 115 Kinerja Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Produksi Perikanan (ton)	6229,93	6292,86	7064,89	7534,03	8664,14
2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	6192,55	6255,1	7022,5	7489,53	8.613
3	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	37,38	37,76	42,39	44,5	51,18
4	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	27	26,82	27,08	27,25	45,75
5	Persentase Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda		25%	34,62%	26,70%	-
6	Jumlah Kelompok Nelayan	10	32	52	67	101
7	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	0	7	10	14	-
8	Jumlah Kelompok Pengolah Ikan	1	8	9	9	-
9	Jumlah Produksi Kontribusi dari Kelompok Nelayan	6.190,43	6.252,92	7.020,39	7,486.90	
10	Nilai Tukar Nelayan		0.92	0.95	0.97	1
11	Jumlah Produksi Kontribusi dari Kelompok Pembudidaya Ikan	39,5	39,94	44,5	47,13	-
12	Jumlah Tangkapan Maksimum Lestari (WPP 715)	631.703 ton/tahun	631.703 ton/tahun	631.703 ton/tahun	631.703 ton/tahun	-
13	Kawasan Lindung Perairan	6.775,09	6.775,09	6.775,09	6.775,09	-
14	Total Luas Perairan Teritorial	7.695,82	7.695,82	7.695,82	7.695,82	-

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur 2021

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kondisi wilayah geografis Kabupaten Halmahera Timur, terdapat beberapa pulau-pulau kecil. Sehingga Kabupaten Halmahera Timur memiliki potensi sebagai pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa capaian kinerja pariwisata yang menjadi indikator pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur, seperti terurai pada Tabel berikut ini.

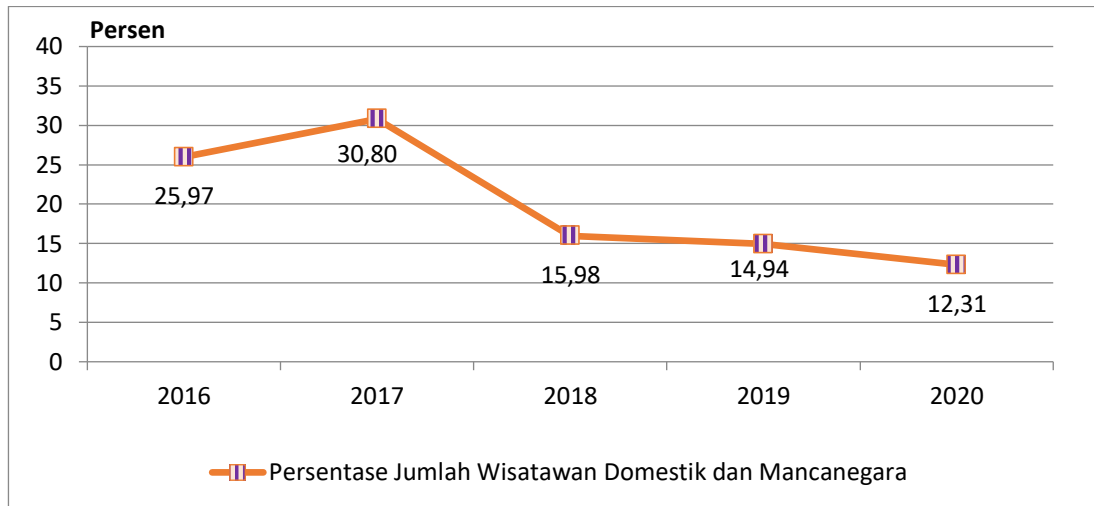
Tabel 2. 116 Persentase Jumlah wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisatawan domestik (orang)	13.000	16.000	8.548	8.018	6.754
2	Kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	1.500	1.200	375	327	119
3	Jumlah wisatawan Domestik dan Mancanegara	14.500	17.200	8.923	8.345	6.873

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur 2021

Dari tabel, Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Kabupaten Halmahera Timur mengalami peningkatan di Tahun 2016 sebanyak 2,700 jiwa (naik 4,82 persen) menjadi 17,200 jiwa. Kemudian mengalami penurunan dari Tahun 2016 sampai pada Tahun 2020 sebanyak 6,873 jiwa (turun 18,49 persen), dengan rata-rata

penurunan sebesar 6,16 persen setiap tahunnya. Grafik berikut menyajikan Persentase Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Halmahera sepanjang periode Tahun 2016-2020.



Gambar 2. 52 Persentase Jumlah wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dinas Pariwisata, Kabupaten Halmahera Timur, 2020

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Peranan dan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) masih dominan. Di samping kontribusi langsung terhadap PDRB yang cukup signifikan, sektor pertanian juga telah menunjukkan ketangguhan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta berikut sistem agribisnisnya sangat besar perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan bahkan tetap menjaga ekosistem lestari melalui pertanian ramah lingkungan. Dengan demikian, merupakan suatu bukti empiris pembangunan ekonomi dengan menggunakan sektor pertanian sebagai penggerak utama akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan pendapatan daerah. Beberapa capaian kinerja pembangunan sektor pertanian yang menjadi indikator pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur, terurai pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 117 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan	371.576,50	395.588,43	429.673,82	451.965,64	474.343,10
2	Jumlah PDRB	2.512.604,25	2.751.599,94	3.206.112,66	3.497.103,04	3.566.027,43
3	Kontribusi Sektor Pertanian	14,79%	14,38%	13,40%	12,92%	13,30%

Sumber : BPS, Kabupaten Halmahera Timur, 2020

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan fluktuatif antara 12-14 persen. Pada Tahun 2020 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur mencapai 13,30 persen meningkat dari tahun sebelumnya 2019 yang mencapai angka 12,92 persen. jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 1,49 persen dari Tahun 2016 yang mencapai angka 14,79 persen.

Berikut akan di uraikan perkembangan produksi subsektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian. Sektor-sektor tersebut antara lain tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2. 118 Perkembangan Produksi Sub-Sektor Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator Kinerja		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanaman Pangan	Jumlah Produksi (Ton)	23.176	17.382	17.832	11.742	14.420
		Jumlah Luas Areal (Ha)	5.794	5.794	5.944	3.914	4.120
2	Hortikultura	Jumlah Produksi (Ton)	5.922	6.670	6.235	5.802	12.994
		Jumlah Luas Areal (Ha)	2.503	3.219	3.112	2.402	8.928
3	Tanaman Perkebunan	Jumlah Produksi (Ton)	9.243	9.138	9.151	11.335	16.175
		Jumlah Luas Areal (Ha)	19.635	19.093	21.497	21.417	25.168
4	Peternakan	Jumlah Produksi (Ton)	247,7	242,4	193,6	267,2	261,4
		Jumlah Populasi (Ekor)	104.055	82.831	81.615	93.465	106.190
5	Jasa Pertanian dan Perburuan	Jasa Pemotongan Hewan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur, 2020

D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Energi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Di Talmahera Timur, terdapat beragam sumber daya energi, baik yang tidak terbarukan maupun yang terbarukan. Pembangunan yang berjalan dengan cepat dan jumlah penduduk yang besar membutuhkan dukungan energi. Walaupun akhir-akhir ini, perekonomian terpuruk yang mengakibatkan terjadinya penurunan kebutuhan energi yang sangat tajam, diperkirakan dalam waktu mendatang, perekonomian di Indonesia akan pulih kembali. Oleh karena itu, pemanfaatan energi untuk mendukung pembangunan nasional, perlu dikelola dengan baik dengan strategi yang tepat. Beberapa capaian kinerja pembangunan sektor energi yang menjadi indikator pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur, terurai pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2. 119 Kinerja Pembangunan Energi
di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Rumah tangga pengguna listrik	82,36	84,92	87,48	90,04	92,60
2	Rasio Ketersediaan daya listrik	0,89	0,85	0,95	0,96	1,00

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2016-2021

Berdasarkan tabel, capaian kinerja pembangunan energi di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup baik, pada Tahun 2020 rasio rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 92,60 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 90,04 persen. Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya memperlihatkan peningkatan sebesar 10,24 persen dari angka pada Tahun 2016 mencapai 82,36 persen.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Perdagangan memiliki peran yang strategis bagi perekonomian daerah. Keberadaannya menjadi kebutuhan bagi daerah yang ingin maju, khususnya dibidang ekonomi. Sektor perdagangan perdagangan besar dan eceran sejak tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 12-13 persen selama Tahun 2016-2020. Capaian pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 120 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (Juta rupiah)

Tahun	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Juta Rupiah)	Total PDRB	(% terhadap total PDRB)
2016	324,782.51	2,512,604.25	12,93%
2017	374,730.22	2,751,599.94	13,62%
2018	423,066.56	3,206,112.66	13,20%
2019	456,648.23	3,497,103.04	13,06%
2020	460,059.87	3,566,027.43	12,90%

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

Dari data tabel diatas, Pada Tahun 2016 sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB berkontribusi sebesar 12,93 persen, kemudian pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,62 persen yang merupakan angka persentase tertinggi selama Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2018 sektor ini cenderung menurun mencapai 13,20 persen, begitu juga di Tahun 2019 menurun sebesar 13,06 persen. Kemudian pada Tahun 2020 masih dalam tren penurunan sebesar 12,90 persen, ini merupakan capaian terendah sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.

Selain kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, nilai ekspor bersih perdagangan juga menjadi salah satu tolak ukur capaian pembangunan perdagangan di Kabupaten Halmahera Timur. Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Dari Tahun 2016-2020 nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan nilai yang negatif. Hal ini terjadi karena ketimpangan nilai ekspor terhadap nilai impor, dimana nilai impor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Halmahera Timur pada Tahun 2016 mencapai -491,19 miliar rupiah, kemudian meningkat mencapai -715,22 miliar rupiah di Tahun 2017. Peningkatan ini terus terjadi setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 meningkat 217,57 miliar rupiah, nilainya mencapai -932,79 miliar rupiah. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 117,53 miliar rupiah, sehingga nilai ekspor bersih mencapai angka triliunan rupiah yaitu nilainya mencapai -1050,32 triliun rupiah. Pada akhir tahun 2020 nilai ekspor bersih mengalami peningkatan sebesar 132 miliar rupiah dari tahun sebelumnya,

sehingga nilainya mencapai -1182,66 triliun rupiah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 121 Ekspor Bersih Perdagangan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Ekspor Bersih (<i>Miliar Rupiah</i>)	-491,19	-715,22	-932,79	-1050,32	-1182,66

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

Indikator kinerja lainnya pada sektor perdagangan yaitu perkembangan Sektor informal yang merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi pengembangan suatu daerah. Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap peningkatan perekonomian.

Kelompok pedagang/usaha informal merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan perdagangan di Kabupaten Halmahera Timur, sektor informal berperan sangat besar bagi perekonomian daerah ini. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal akan mempermudah koordinasi dan pengembangan sektor ini. Capaian kinerja cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 122 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	26	69	71	100	105
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	26	69	71	100	105
3	Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kelompok pedagang dan pengusaha informal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari segi kelompok pedagang yang mendapat bantuan dari pemda dari Tahun 2016-2020, secara keseluruhan menunjukkan angka baik yaitu sudah terfasilitasi semua dengan persentase mencapai 100 persen.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Sektor perindustrian merupakan pilar dalam penggerak perekonomian suatu daerah, kontribusi sektor ini memiliki peran penting dalam pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Persaingan yang sangat tinggi di sektor ini menuntut strategi pembangunan perindustrian yang tetap menjaga daya saing. Salah satu strategi didalamnya adalah mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam yang merupakan langkah-langkah strategis yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035. Capaian pembangunan sektor industri di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 123 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Juta rupiah)

Tahun	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (Juta Rupiah)	Total PDRB	(% terhadap total PDRB)
2016	147,302.61	2,512,604.25	5,86%
2017	148,666.63	2,751,599.94	5,40%
2018	148,456.24	3,206,112.66	4,63%
2019	147,392.49	3,497,103.04	4,21%
2020	129,097.82	3,566,027.43	3,62%

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

Selain kontribusi sektor perindustrian, capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perindustrian yaitu cakupan bina kelompok pengrajin. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir cakupan bina kelompok pengrajin memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2020 jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 105 kelompok dan kelompok yang mendapatkan bantuan binaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mencapai 105 kelompok, maka cakupan bina kelompok pengrajin pada Tahun 2020 mencapai 58,66 persen, meningkat dari tahun sebelumnya Tahun 2019 yang mencapai 55,87 persen. jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya mengalami menurun yang cukup signifikan di angka 16,87 persen, dimana pada Tahun 2018 cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 75,53 persen. sebaliknya jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 4,49 persen dari Tahun 2016 yang mencapai 54,17 persen. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 124 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	26	69	71	100	105
2	Jumlah kelompok pengrajin	48	97	94	179	179
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (1:2x100)	54,17%	71,13%	75,53%	55,87%	58,66%

Sumber : Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan perdesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Timur termasuk ke dalam Kawasan Transmigrasi Prioritas dan Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian yang merupakan lanjutan periode RPJMN sebelumnya yang memerlukan pembinaan. Dari 152 kawasan transmigrasi ditetapkan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi prioritas Kementerian. Sedangkan untuk target sasaran desa prioritas sebanyak 30 kawasan perdesaan prioritas Kementerian. Pembangunan sektor transmigrasi di Kabupaten Halmahera Timur, tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 125 Kinerja Pembangunan Sektor Transmigrasi
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020**

Kabupaten	Kawasan	Dimensi	Indeks	Komposit	IPK Trans	Status
Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian						
Halmahera Timur	Dorosagu Patlean	Ekonomi	33,40	13,09	42,30	Berkembang
		Sosial Budaya	51,43	6,70		
		Lingkungan	41,69	3,22		
		Jejaring Prasarana	49,83	14,10		
		Kelembagaan	44,06	5,18		

Sumber : ¹Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021, ²Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Dari data tabel, kawasan Dorosagu Patlean termasuk kedalam Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian, dengan tujuan terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Perkembangan Dorosagu Patlean sebagai Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian masih dalam status “Berkembang” dengan IPK Trans sebesar 42,30 poin. Lingkup Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian mempunyai sasaran strategis yaitu meningkatkan status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi. Selain itu Kabupaten Halmahera Timur juga termasuk dalam pembangunan kawasan perdesaan prioritas kementerian, dengan tujuan terwujudnya kawasan perdesaan ekonomi terpadu dengan lingkup sasaran strategis yaitu berkembangnya status pembangunan desa, meningkatkan status perkembangan kawasan perdesaan dan menurunkan kemiskinan di perdesaan.

2.3.4. FOKUS UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Fungsi urusan pendukung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Capaian kinerja pada pelayanan fungsi penunjang pemerintahan sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 126 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedia rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur, 2020

2.3.5. FOKUS UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meliputi Perencanaan Pembangunan,

Keuangan dan Aset, Pengawasan Pembangunan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perbatasan. Capaian kinerja pada pelayanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji secara rinci sebagai berikut.

A. PERENCANAAN

Untuk urusan perencanaan, seluruh indikator menunjukkan tingkat capaian yang 100 persen. Hal ini tercermin dari indikator capaian yang tiap tahun selama periode 2014-2018 mencapai 100 persen dari target, seperti indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW. Capaian kinerja pada pelayanan fungsi penunjang perencanaan sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 127 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Indaktor Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, 2020

B. KEUANGAN

Dalam hal urusan Keuangan, Kabupaten Halmahera Timur dari Tahun 2017-2020 mendapatkan predikat WTP empat kali berturut-turut. Selain itu persentase SILPA terhadap APBD dari Tahun 2016-2020 tergolong cukup kecil karena berada di bawah 10 persen. Persentase belanja untuk urusan pendidikan juga masih cukup besar di bawah 10 persen dari Tahun 2016-2020. Kemudian, persentase belanja kesehatan juga masih dibawah 10 persen dari Tahun 2016-2020. Untuk perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung proporsinya masih baik artinya belanja untuk publik masih lebih besar daripada belanja pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 128 Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	Proses
2	Persentase SILPA	4,40%	0,78%	0,49%	1,33%	1,25%
3	Persentase SILPA terhadap APBD	4,40%	0,78%	0,49%	1,33%	1,25%
4	Persentase program yang tidak terlaksana	0%	0%	0%	0%	0%
5	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	7,14%	6,31%	6,29%	7,42%	7,07%
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	9,92%	9,56%	8,67%	8,13%	9,54%
7	Persentase belanja kesehatan (10%)	5,40%	5,44%	6,06%	7,69%	16,02%
8	Perbandingan belanja langsung	48,71%	53,74%	47,10%	51,59%	48,08%
9	Perbandingan belanja tidak langsung	31,34%	27,12%	29,04%	29,61%	26,22%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Timur, 2020

C. KEPEGAWAIAN

Indikator kinerja Fungsi unsur penunjang urusan Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meliputi Jumlah jabatan pimpinan tinggi, Jumlah pemangku jabatan fungsional, Jumlah jabatan administrasi. Capaian kinerja pada pelayanan Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji secara rinci sebagai berikut.

**Tabel 2. 129 Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi	28	28	31	31	29
2	Jumlah pemangku jabatan fungsional	1415	1582	1642	1642	1683
3	Jumlah jabatan administrasi	121	129	133	133	133

Sumber : Badan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Timur, 2020

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Capaian pembangunan urusan penunjang Pendidikan dan pelatihan diantaranya dilihat dari jumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, Pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya telah mencapai 39,34 persen. Capaian kinerja pada pelayanan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan pelatihan sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji secara rinci sebagai berikut.

**Tabel 2. 130 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	19,41%	19,41%	29,38%	38,27%	39,34%
2	Rata-rata lama pegawai mendapat	101 Hari / 887 Jam	101 Hari / 887 Jam	101 Hari / 887 Jam	101 Hari / 887 Jam	101 Hari / 887 Jam

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	pendidikan dan pelatihan PIM II					
	Rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan PIM III	98 Hari / 857 Jam	98 Hari / 857 Jam	98 Hari / 857 Jam	98 Hari / 857 Jam	98 Hari / 857 Jam
	Rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan PIM IV	103 Hari / 893 Jam	103 Hari / 893 Jam	103 Hari / 893 Jam	103 Hari / 893 Jam	103 Hari / 893 Jam
5	Rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan Latihan Dasar CPNS	113 Hari / 1.141 Jam	113 Hari / 1.141 Jam	113 Hari / 1.141 Jam	113 Hari / 1.141 Jam	113 Hari / 1.141 Jam

Sumber : BKPSDA Aparatur Kabupaten Halmahera Timur, 2020

2.3.6. FOKUS UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam urusan pengawasan Inspektorat, persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat cenderung mengalami kenaikan dari Tahun 2016 yang sebesar 60,39 persen menjadi 65,79 persen pada Tahun 2020 atau naik sebesar 5,40 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya untuk temuan BPK dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada Tahun 2016 mencapai 362 temuan meningkat pada Tahun 2020 mencapai 441 temuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 131 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan BPK	362	376	395	424	441
2	Persentase tindak lanjut temuan BPK (persen)	60,39%	62,82%	64,80%	66,69%	65,79%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur, 2020

2.4. ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kondisi aspek daya saing di Kabupaten Halmahera Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Analisis atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani dan produktivitas total daerah.

A. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Halmahera Timur memperlihatkan arah perkembangan yang terus meningkat, sejak Tahun 2016 sebesar Rp. 485.333 per rumah tangga hingga menjadi Rp. 1518.703 per Kapita pada

Tahun 2020. Adapun cakupan pengeluaran konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Halmahera Timur berfluktuatif selama Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016 mencapai Rp 299.863 atau 38,20 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 468.576 atau 50,04 persen setelah pada tahun sebelumnya Rp. 418.699 atau 45,30 persen. Perkembangan pengeluaran per Kapita penduduk Halmahera Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 132 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016		2017		2018		2019		2020	
Konsumsi Makanan	485.333	61,8%	553.825	57,0%	481.952	54,4%	505.183	54,7%	518.703	52,5%
Konsumsi Non Makanan	299.863	38,2%	417.609	43,0%	403.502	45,6%	418.699	45,3%	468.576	47,5%
Rata-Rata Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	785.196	100%	971.434	100%	885.454	100%	923.882	100%	987.279	100%

Sumber : BPS, Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021

B. NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk usaha maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP atau peningkatan NTP suatu periode, maka makin tinggi pula kenaikan kesejahteraan petani pada wilayah tersebut. Sementara itu untuk Nilai Tukar Petani (NTP), Kabupaten Halmahera Timur mengikuti NTP Provinsi Maluku Utara Pada Tahun 2016-2020,

Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara pada periode Tahun 2016-2020, cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2017 NTP mengalami penurunan, tetapi menunjukkan kenaikan pada Tahun 2016, lalu kemudian menurun lagi pada Tahun 2018, dan mengalami penurunan terendahnya dalam lima tahun terakhir sehingga di bawah 100 pada Tahun 2020. Selama tahun 2020 rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku Utara adalah 97,25 atau mengalami penurunan sebesar 2,45 persen dibandingkan rata-rata NTP tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 133 Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks harga yang diterima petani (It)	125,41	127,78	129,14	132,24	103,78
Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	120,66	126,2	130,77	134,81	106,42
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,95	101,25	98,77	98,09	97,52

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Kenaikan NTP Tahun 2020 disumbang oleh kenaikan NTP pada 2 (dua) subsektor pertanian, yaitu NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,29 persen dan NTP Subsektor Perikanan sebesar 1,90 persen.

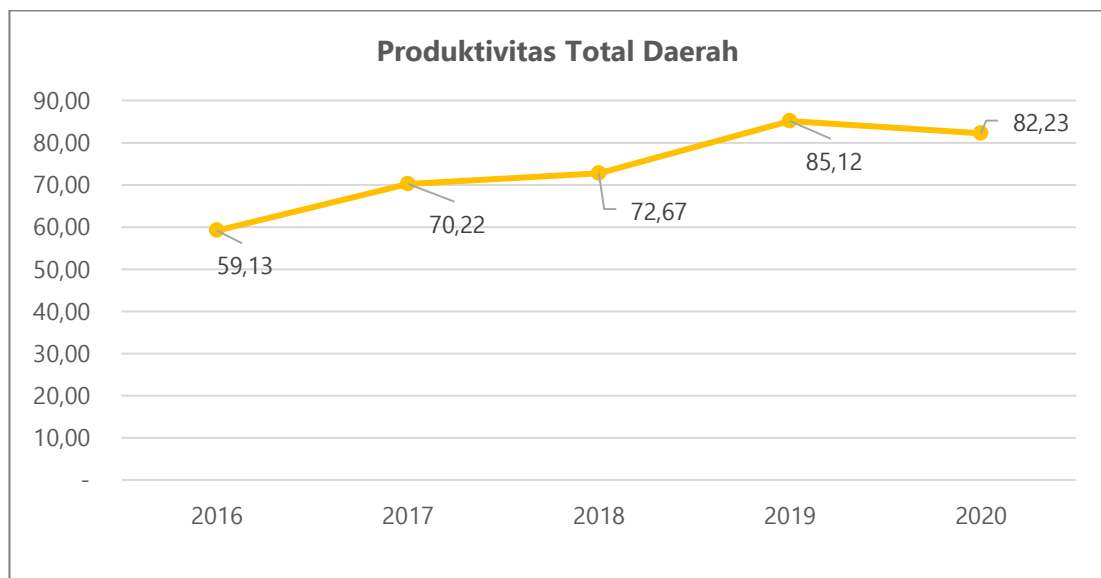
Pada Desember Tahun 2020, Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen dibandingkan dengan NTPR bulan November Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 1,94 persen, lebih besar dari kenaikan

indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,64 persen. Kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) disebabkan oleh kenaikan harga secara rata-rata pada kelompok tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,94 persen (terutama kelapa dan pala). Kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat disebabkan oleh kenaikan indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,69 persen dan kenaikan indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,02 persen.

Sedangkan subsektor perikanan pada Desember Tahun 2020, NTNP mengalami kenaikan sebesar 1,90 persen yang disebabkan karena kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 2,09 persen, lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,19 persen.

C. PRODUKTIFITAS TOTAL DAERAH

Produktivitas total daerah (PTD) merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tingkat produktivitas pekerja di suatu wilayah. Semakin tinggi PTD, semakin tinggi pula produktivitas pekerjaannya. PTD adalah perbandingan PDRB ADHB terhadap jumlah penduduk yang bekerja. PTD berkaitan erat dengan teknologi produksi perusahaan/industri yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi PTD, mengindikasikan bahwa teknologi produksi dari perusahaan/industri yang ada di wilayah tersebut secara umum adalah teknologi padat modal. Grafik berikut menyajikan perkembangan Produktifitas Total Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020 sebagai berikut.



Gambar 2. 53 Produktifitas Total Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Diolah dari, BPS Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2020

Dari grafik, PTD Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2016 mencapai 59,13 juta rupiah per pekerja dan meningkat terus hingga pada Tahun 2020 menjadi 82,23 juta rupiah per pekerja.

2.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-

wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah dan infrastruktur, maka semakin berdaya saing wilayah tersebut.

A. FASILITAS PERBANKAN

Pada Tahun 2020, jumlah kantor bank (cabang pembantu) di Kabupaten Halmahera Timur telah mencapai 6 kantor, belum ada peningkatan dari Tahun 2016. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 134 Perkembangan Jumlah Kantor Bank Menurut Kategori di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Kategori Bank	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bank Pemerintah	4	4	4	4	4
2	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	2	2	2	2	2
Jumlah		6	6	6	6	6

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Secara umum peran perbankan dalam memacu perekonomian daerah dapat secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh tidak langsungnya yaitu melalui kredit yang diberikan terhadap pelaku ekonomi seperti: Kredit Konsumsi, Kredit Produktif yang meliputi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit UMKM yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja serta lebih lanjut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, daya beli, usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

B. FASILITAS AKOMODASI DAN RESTORAN/RUMAH MAKAN

Pada Tahun 2020, jumlah fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan) di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 23 unit. Kondisi di Tahun 2020 ini meningkat cukup signifikan dibandingkan kondisi pada lima tahun sebelumnya. Demikian pula pada fasilitas restoran/rumah makan yang mencapai 54 pada Tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2016 yang baru berjumlah 39. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 135 Perkembangan Jumlah Fasilitas Akomodasi dan Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel/Penginapan	21	21	23	23	23
2	Restoran/Rumah Makan	39	39	49	49	54

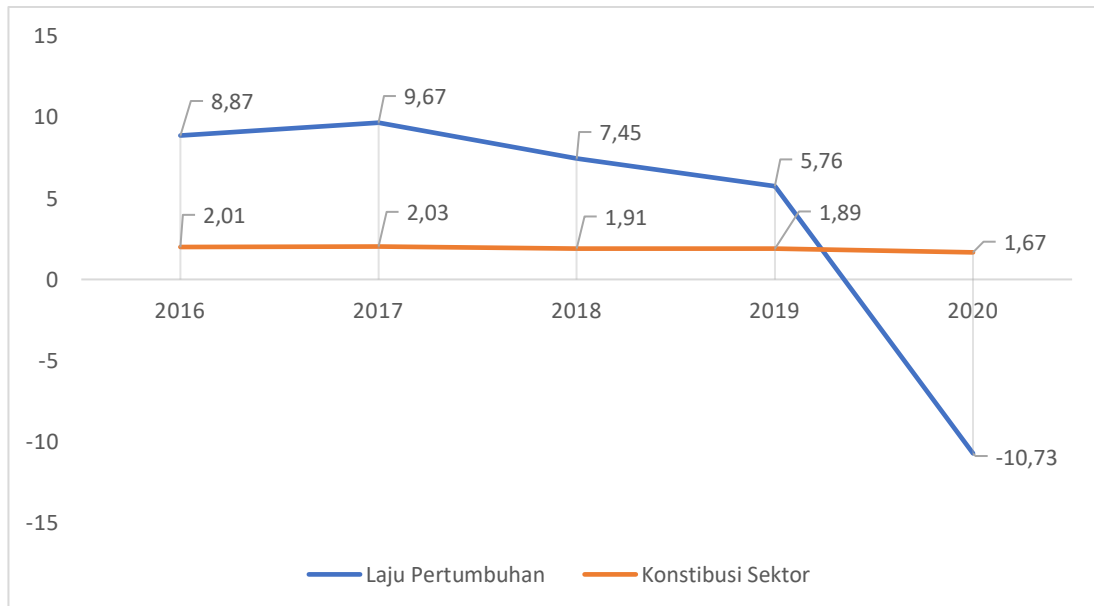
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2021

C. KONEKTIFITAS WILAYAH

Salah satu faktor pendorong kekuatan dan intensitas interaksi antar wilayah adalah kondisi infrastruktur transportasi yang menghubungkan satu wilayah dengan lain disekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah dan kualitas prasarana jalan, baik jalan raya, jalur udara, maupun laut tentunya akan mempercepat laju dan pergerakan distribusi orang, barang dan jasa antar wilayah.

Salah satu pilar penting dalam indeks daya saing global adalah infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi yang mencakup indeks konektivitas jalan raya (*road connectivity index*), kualitas jalan raya (*quality of roads*), densitas rel kereta api (*railroad density*), konektivitas bandara (*airport connectivity*), indeks konektivitas

transportasi laut (*liner shipping connectivity index*), dan efisiensi layanan bandara dan pelabuhan (*efficiency of airport & seaport services*). Secara keseluruhan, akumulasi dari berbagai pilar daya saing transportasi dan pergudangan tersebut dapat tergambarkan melalui kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dalam perekonomian daerah. Dalam konteks ini karakteristik Kabupaten Halmahera yang merupakan wilayah kepulauan, mengharuskan solusi transportasi yang menghubungkan antarpulau dengan kapasitas besar dan biaya transportasi yang relatif murah. Konektivitas transportasi logistik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tuntutan terhadap infrastruktur tidak hanya mengenai kualitas, melainkan juga mengenai kapasitas dan konektivitas. Grafik di halaman berikut menyajikan perkembangan kontribusi sektor transportasi dan logistik terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020.



Gambar 2. 54 Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Logistik Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Diolah dari, BPS Kabupaten Halmahera Timur, Tahun 2020

Pada Kategori Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 5 (lima) yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu Angkutan Laut; Angkutan Darat; Angkutan Udara; Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir Lapangan Usaha Angkutan Udara. Kontribusi kategori ini mencapai 59,65 miliar rupiah atau sekitar 1,67 persen terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur pada Tahun 2020. Moda Lapangan usaha Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar, disusul oleh Angkutan Udara. Angkutan darat masih menjadi moda yang utama di Kabupaten Halmahera Timur karena wilayah kabupaten ini yang luas dan memiliki panjang jalan 821,67 km. Hal ini sejalan dengan kontribusi Subkategori Angkutan Darat yang tertinggi pada kategori ini. Laju pertumbuhan kategori ini relatif meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,21 persen per tahun. Kategori ini mengalami perlambatan pertumbuhan di Tahun 2020, yaitu sebesar 5,73 persen. Salah satu perlambatan pertumbuhan tersebut diduga karena pemberlakuan nol bagasi pesawat udara di awal tahun ini. Kemudian, kebijakan ini menyebabkan jumlah penumpang pesawat udara menurun. Masyarakat lebih memilih moda transportasi darat dengan menyewa mobil atau menggunakan sepeda motor/ mobil milik pribadi yang lebih ekonomis.

D. PASOKAN TENAGA LISTRIK

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Sistem-sistem tenaga listrik di Kabupaten Halmahera Timur saat ini sekitar 52,4 MW, dipasok oleh PLTD tersebar dan PLTS yang terhubung langsung ke sistem distribusi 20 kV. Unit Layanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Maba hingga tahun 2020 Kapasitas Daya yang terpasang mencapai 10.980 KWH, dengan jumlah produksi listrik sebesar 21.785.164 KWH, sedangkan listrik yang terjual hingga Tahun 2020 mencapai 21.787.265 KWH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 136 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Maba Tahun 2020

Unit Layanan Pelanggan	Unit	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWH)	Listrik Terjual (KWH)	Dipakai Sendiri (KWH)	Susut/Hilang (KWH)
PLN MABA	¹ PLN Buli	10.980	21.785.164	21.787.265	142.763	- 48.549
	² PLN Maba					
	³ PLN Bicoli					
	⁴ PLN Subaim					
	⁵ PLN Lolobata					
	⁶ PLN Wasileo					

Sumber : diolah dari BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Berdasarkan RUPTL PT. PLN (Persero) Sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku Utara terdiri dari 6 sistem tenaga listrik dengan beban diatas 1,5 MW yaitu Sistem Ternate-Soa-Siu (Tidore), Tobelo-Malifut, Jailolo-Sofifi-Payahe, Bacan, Sanana dan Daruba. Selain itu juga terdapat 23 unit pusat pembangkit skala yang lebih kecil di lokasi tersebar. Sistem Tobelo-Malifut, Jailolo-Sofifi-Payahe dimana merupakan sistem yang dikembangkan di Pulau Halmahera dengan pasokan pembangkit sekitar 38,8 MW dengan daya mampu 25,6 MW dan beban puncak 19,0 MW.

Untuk rencana pengembangan, berdasarkan RUPTL PT. PLN (Persero) di Pulau Halmahera direncanakan pengembangan 150 kV. Sebagaimana Pulau Halmahera yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dengan program utamanya pengembangan industri pengolahan tambang, yaitu ferro nikel dan industri hilirnya untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Salah satu pengembangannya di Kabupaten Halmahera Timur yaitu PLTMG Maba 10 MV di Tahun 2021.

E. PASOKAN AIR

Sistem pasokan air (*water supply*) yang aman dan terlindungi menjadi salah satu tantangan khas bagi Kabupaten Halmahera Timur. Infrastruktur air minum yang handal mencakup sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang meliputi intake air baku, storage (penampungan pra pengolahan), transmisi ke instalasi pengolahan, pengolahan air (*water treatment*), transmisi ke penampungan (*reservoir*) distribusi dan distribusi ke pelanggan. Air yang disalurkan melalui sistem adalah sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Di Kabupaten

Halmahera Timur sumber air ini diusahakan oleh Pemerintah Daerah melalui SPAM Perkotaan, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan. Secara keseluruhan perkembangan infrastruktur air minum tentunya belum mencakup sebagian besar permintaan, baik untuk kebutuhan sosial maupun ekonomi masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur. Tabel berikut menyajikan perkembangan Layanan SPAM Perkotaan, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan di Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 2. 137 Layanan SPAM Perkotaan, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis SPAM	Nama Mata Air	Debit (liter/detik)	Layanan SPAM	
					Desa	Rumah (Unit)
1	Kota Maba	¹ SPAM Perkotaan	¹ Lolosmani & Lolos Difa	300	4	3.552
		² SPAM Pedesaan	² Sailapoh I & II	5,5	2	501
2	Maba	¹ SPAM Perkotaan	¹ Buli	200	8	2.847
		² SPAM Pedesaan	² Pekaulang	10	1	88
			³ Baburino	10	1	97
3	Maba Selatan	¹ SPAM IKK	¹ Bicoli	10	3	651
		² SPAM Pedesaan	² Gotowasi	10	2	419
			³ Waci	10	2	401
			⁴ Sil	40	1	109
4	Maba Tengah	¹ SPAM IKK	¹ Yawanli	40	2	448
		² SPAM Pedesaan	² Babasaram	1	2	264
			³ Gaifoli Marasipno	5	2	195
			⁴ Miaf	1,5	3	217
			⁵ Maratana Jaya	0,5	1	174
5	Maba Utara	¹ SPAM Pedesaan	¹ Sosolat	1	1	175
			² Lili	1	1	147
			³ Jara - Jara	1	1	266
6	Wasile	¹ SPAM Perkotaan	¹ Ake Sangkole & Lelewi	20,01	7	2.865
		¹ SPAM IKK	¹ Nusa Jaya	40	3	387
			² Bukutio	2	1	75
			³ Fayaul	3	1	119
			⁴ Tanure Loleba	2	2	230
			⁵ Telaga Jaya	2	3	351
			⁶ Pintatu	5	1	181
			⁷ Tomares	2	1	143
			⁸ Tabanalou	300	1	87
			⁹ Ake Jawi	10	3	444
			¹⁰ Waijoi	40	2	263
			¹¹ Yawal	10	1	157
			²¹ Nanas	1	1	112
			¹³ Saramaake	2	1	126
			¹⁴ Wasile	2	1	176
			¹⁵ Minamin	2	1	168
			¹⁶ Saolat	1	1	126
7	Wasile Selatan	¹ SPAM Perkotaan	¹ Dakaino	20	1	365
		² SPAM IKK	² Dodaga	10	1	487
			³ Rawamangung	1	1	299
			⁴ Sido Mulyo	1	1	353
			⁵ Ake Daga	1	1	371
			⁶ Toboino'	1	1	251
			⁷ Tutuling Jaya	1	1	195
			⁷ Woka Jaya	1	1	357
8	Wasile Timur	¹ SPAM IKK	¹ Lolobata	10	2	399
		² SPAM Pedesaan	² Foly	1	1	209
			³ Hatetabako	2	1	165
			⁴ Silalayang	2	2	227
			⁵ Puao	1	1	173
			⁶ Kakaraino	1	1	98
9	Wasile Tengah	² SPAM Pedesaan	¹ Lolobata	10	2	399
			² Foly	1	1	209
			³ Hatetabako	2	1	165
			⁴ Silalayang	2	2	227
			⁵ Puao	1	1	173
			⁶ Kakaraino	1	1	98

No	Kecamatan	Jenis SPAM	Nama Mata Air	Debit (liter/detik)	Layanan SPAM	
					Desa	Rumah (Unit)
10	Wasile Utara	¹ SPAM IKK	¹ Labi - Labi	10	2	237
			² Marimoi	1	1	89
			³ Tatam	1	1	144
		² SPAM Pedesaan	⁴ Bololo	2	1	195
			⁵ Iga	1	1	196
			⁶ Hilaitetor	2	1	113

Sumber : ¹Rispm Kabupaten Halmahera Timur Dinas Perumahan dan Kawasan Kab. Halmahera Timur 2020, ²Data Base Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D Kabupaten Halmahera Timur 2020

Secara keseluruhan perkembangan infrastruktur air minum tentunya belum mencakup sebagian besar permintaan, baik untuk kebutuhan sosial maupun ekonomi masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.

2.4.3. FOKUS IKLIM INVESTASI

Tinjauan atas iklim berinvestasi di Kabupaten Halmahera Timur dilakukan terhadap beberapa aspek terkait yang diuraikan sebagai berikut.

A. ANGKA KRIMINALITAS

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Secara umum rata-rata penyelesaian kasus tindak pidana di Kabupaten Halmahera Timur selama kurun waktu Tahun 2016-2020 adalah sebesar 61,99 persen. Kinerja penyelesaian tindak pidana di wilayah Halmahera Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dari 52,08 persen pada Tahun 2016 menjadi 78,5 persen pada Tahun 2020, tetapi sempat mengalami penurunan di Tahun 2017 yang hanya mencapai 58,34 persen. Demikian pula pada tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan, terus turun dari 75 per 100.000 penduduk pada Tahun 2014 menjadi 67 per 100.000 penduduk pada Tahun 2020.

B. INDEKS DEMOKRASI

Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Meskipun demokrasi bukanlah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan ekonomi tinggi, namun demokrasi akan menciptakan keadaan-keadaan yang dapat menstimulasi hal tersebut dan memicu penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi akan menghasilkan kepastian hukum

yang merupakan salah satu syarat utama bagi tumbuhnya perekonomian secara optimum. Sejalan dengan terciptanya kepastian hukum, demokrasi juga akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Dengan demikian demokrasi akan membentuk suatu keadaan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan Indeks Demokrasi di Maluku Utara dalam kurun Tahun 2015-2019.

Tabel 2. 138 Perkembangan Indeks Demokrasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015– 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kebebasan Sipil	73,53	92,27	90,19	78,94	85,61
2	Hak-hak Politik	61	61,79	65,84	62,39	64,86
3	Peran Lembaga-lembaga Demokrasi	47,25	67,59	54,02	78,92	58,11
4	Indeks Demokrasi	61,25	73,27	70,73	72,1	69,89

Sumber : 1BPS Provinsi Maluku Utara, 2020, 2 RPJMD Provinsi Maluku Utara 2019-2024

Dari tabel, Indeks Demokrasi Maluku Utara cenderung fluktuatif namun membaik pada Tahun 2019, yaitu dengan indeks 69,89. Namun capaian di Tahun 2018 belum dapat mengulangi capaian terbaik dalam lima tahun terakhir, yaitu di Tahun 2016 dengan indeks 73,27. Pada indeks aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik mengalami penurunan di Tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan perlunya perhatian untuk mendorong kebijakan dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan di Maluku Utara agar tercipta suasana kehidupan masyarakat yang aman, damai dan harmonis. Kondisi wilayah yang kondusif sangat diperlukan untuk menarik investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut seberapa banyak penduduk usia produksi di suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Dalam kaitan ini kualitas Sumber Daya Manusia berkenaan dengan mutu Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Dalam kerangka meningkatkan daya saing bagi wilayah maka kualitas pasokan tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja yang tersedia pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Persentase Penduduk Lulusan S1, S2 dan S3 (PL-PT) adalah proporsi penduduk usia 15 ke atas yang tamat sekolah S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel di halaman berikut menyajikan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.

**Tabel 2. 139 Rasio Kelulusan S1/S2/S3
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	1.409	1.615	1.423	1.520	1.599
2	Jumlah penduduk	90.652	93.848	94.937	95.368	95.752
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	1,55	1,72	1,50	1,59	1,67

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Dari tabel, rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Jika Tahun 2016 baru sebesar 1,55 persen, meningkat menjadi 1,67 persen pada tahun 2020. Adapun tabel berikut menyajikan rasio ketergantungan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 140 Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Kelompok umur produktif	55.219	57.285	58.321	59.662	59.822
1	15 - 19	7.564	7.771	7.990	8.174	8.195
2	20 - 24	7.187	7.380	7.585	7.759	7.778
3	25 - 29	8.322	8.547	8.787	8.989	9.012
4	30 - 34	8.219	8.441	8.679	8.879	8.902
5	35 - 39	6.877	7.704	7.265	7.432	7.452
6	40 - 44	5.420	5.568	5.725	5.857	5.874
7	45 - 49	4.103	4.215	4.334	4.434	4.447
8	50 - 54	3.207	3.219	3.390	3.468	3.478
9	55 - 59	2.551	2.621	2.696	2.758	2.766
10	60 - 64	1.769	1.819	1.870	1.913	1.918
B	Kelompok umur non produktif	32.461	33.348	34.297	35.086	35.183
1	0 - 4	11.193	11.498	11.825	12.097	12.129
2	4-9	10.132	10.408	10.705	10.951	10.981
3	10-14	8.855	9.098	9.358	9.573	9.600
4	65 - 69	1.079	1.109	1.140	1.166	1.171
5	70 - 74	583	598	615	629	632
6	75+	619	637	654	669	670
Rasio Ketergantungan		58,79%	58,21%	58,81%	58,81%	58,81%

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2021

Dari tabel, rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Timur pada Tahun 2020 sebesar 58,81 persen atau naik dibandingkan lima tahun sebelumnya. Berdasarkan definisinya, *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0- 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif), dinyatakan dalam persen.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pengelompokan jumlah atau persentase penduduk di tiap kelompok umur, akan dapat diketahui berapa besar penduduk yang

berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Di samping itu, melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun. Berdasarkan rasio ketergantungan 58,81 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 56-57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Besaran rasio ketergantungan menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016-2021

Berdasarkan uraian tentang gambaran umum kondisi daerah, maka hasil analisis terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.141. Seluruh daftar indikator kinerja dalam tabel tersebut bersumber dari Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021. Interpretasi capaian lakukan dengan membandingkan capaian pada Tahun 2020 dengan target yang ditetapkan untuk tahun tersebut oleh RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021.

Tabel 2. 141 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Targer Capayan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan PDRB	2,512,604.25	2,751,599.94	3,206,112.66	3,497,103.04	3,566,027.43	3,566,027.43	=
1.2	Laju inflasi di Kabupaten Halmahera Timur	1,91	1,29	4,12	2,02	1,66	4,04	<
1.3	PDRB per kapita	2,512,604.25	2,751,599.94	3,206,112.66	3,497,103.04	3,566,027.43	3,566,027.43	=
1.4	Pemerataan pendapatan (Indeks Gini)	0.27	0.24	0.25	0.28	0.30	0,265	>
1.5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,276	0,267	0,264	0,274	0,284	0,25	>
1.6	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	14,70%	14,85%	15,07%	15,84%	16,32%	10%	>
Fokus: Kesejahteraan Masyarakat								
1	Persentase melek huruf	98,86%	99,52%	99,47%	99,45%	99,38%	95,33	>
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	7,77	8,36	7,97	8,06	8,26	8,22	>
1.2	Persentase partisipasi kasar	93,83%	96,05%	94,75%	96,98%	99,41%	101,88	<
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SD/Sederajat	13,16%	12,30%	11,95%	11,53%	11,23%	11,23%	=
1.4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Jenjang SMP/Sederajat	4,57%	4,53%	4,52%	4,48%	4,45%	4,45%	=
1.4	<i>Persentase Partisipasi Murni</i>	81,15%	85,29%	85,56%	88,36%	87,29%	87,29%	=
1.5	Jumlah Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	10.277	10.250	10.248	10.041	9.441	9.441	=
1.6	Jumlah Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	3.028	3.267	3.307	3.234	3.165	3.165	=
2	Angka usia harapan hidup	67,67	67,85	68,19	68,64	68,88	68,5 tahun	>
2.1	Persentase balita gizi buruk mendapat perawan	100	100	100	100	100	100	=
2.2	Ketenagakerjaan							
3	Rasio penduduk yang bekerja	38,31	31,90	35,09	28,92	31,96	100%	<
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus: Pelayanan Urusan Wajib								
1	Pendidikan							
1.1	<i>Pendidikan dasar:</i>							
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	95,18%	95,58%	96,47%	97,67%	98,20%	100%	<
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	72,64	84,71	88,46	90,97	94,56	135,49	<
1.1.3	Rasio guru terhadap murid	622,31	683,59	740,91	682,78	721,52	721,52	=

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Targer Capayan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	<i>Fasilitas Pendidikan</i>							
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	62%	92%	95%	97%	97%	82%	>
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	72%	74%	71%	86%	91%	62%	>
1.3	<i>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</i>							
1.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	83,34%	85,10%	86,94%	88,49%	85,02%	75,52	>
1.4	<i>Angka Putus Sekolah:</i>							
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	2,19%	2,22%	2,01%	2,01%	1,85%	1,85%	=
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	4,12%	3,78%	3,70%	3,17%	2,68%	2,68%	=
1.5	<i>Angka Kelulusan:</i>							
1.5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	99%	>
1.5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	98%	>
1.5.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	66,21%	83,34%	82,02%	78,58%	73,46%	98,7	<
1.5.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	100%	100%	98,7	>
1.5.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	82%	85%	87%	88%	89%	84%	>
2	Kesehatan							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	11,09	12,81	29,76	14,90	11,62	12,2	<
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,825	<
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,25	<
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,85	<
2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	5,43	6,92	8,11	8,78	9,08	8,91	>
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,70%	>
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	61,46%	52,85%	63,05%	96,77%	92,10%	85%	>
2.8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	0,00%	79,41%	78,43%	88,24%	87,25%	80,90%	>
2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	0%	34,66%	71,02%	52,84%	22,16%	70%	<
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.11	Cakupan puskesmas	160%	160%	160%	160%	160%	160%	=
2.12	Cakupan pembantu puskesmas	40,20%	40,20%	40,20%	40,20%	40,20%	32%	>
3	Pekerjaan Umum							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	43,3%	35,7%	43,5%	57,1%	59,05%	69,60%	<

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Targer Capayan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Rasio Jaringan Irigasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,83%	49,04%	<
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	1,98%	4,24%	3,39%	3,91%	3,90%	100%	<
3.4	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	18,42%	16,67%	14,91%	14,04%	12,28%	12%	=
3.5	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	43,30%	35,70%	43,52%	57,09%	59,05%	69,60%	<
3.6	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m)	0,88	0,85	0,91	0,70	0,54	9,80%	<
3.7	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	50,21%	50,45%	52,27%	53,08%	54,59%	100%	<
3.8	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	=
4	Perumahan							
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	13,45%	62,63%	52,71%	66,01%	86,38%	55%	>
4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	1,98%	4,24%	3,39%	3,91%	3,90%	12%	<
4.4	Rumah layak huni	13,83%	13,79%	14,14%	14,53%	16,04%	20%	<
5	Penataan Ruang							
5.1	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	-	-	0,20%	0,40%	0,40%	25%	<
5.2	Ketaatan terhadap RTRW	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85%	=
6	Perencanaan Pembangunan							
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
6.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
7	Perhubungan							
7.1	Jumlah uji kir angkutan umum	9	89	167	357	164	164	=
7.2	Angkutan darat	584 unit	659 unit	760 unit	1067 unit	1275 unit	960 unit	>
7.3	Pemasangan Rambu-rambu	100	200	200	200	200	200	=
8	Lingkungan Hidup							
8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,47	74,87	74,87	74,87	74,87	74,87	=
8.2	Persentase penanganan sampah	1,20%	1,22%	1,23%	1,25%	1,28%	1,28%	=

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Targer Capayan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.3	Persentase Penduduk berakses air minum	13,45%	62,63%	52,71%	66,01%	86,38%	81,77%	>
9	Kependudukan dan Catatan Sipil							
9.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,33	0,6	0,91	0,97	1,02	1,02	=
9.2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	0,73	1,19	0,99	0,9	0,87	0,87	=
9.3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
9.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
10.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	59,68%	54,73%	52,10%	64,12%	64,12%	80%	<
10.2	Partisipasi perempuan di lembaga DPR	5%	5%	5%	5%	5%	5%	=
10.3	Rasio KDRT	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	>
11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2	=
11.2	Rasio akseptor KB	44,1	44,29	47,89	62,44	73,1	94,4	<
12	Sosial							
12.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18%	9%	9%	18%	0%	80%	<
13	Ketenagakerjaan							
13.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	38,31%	31,90%	35,09%	28,92%	31,96%	38%	<
13.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,86%	72,15%	71,36%	62,96%	66,89%	87,06	<
13.5	Tingkat pengangguran terbuka	0%	2,90%	2,63%	3,00%	3,45%	0%	<
13.6	Keselamatan dan perlindungan	3,45%	1,59%	1,59%	5,33%	5,33%	3%	>
14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
14.1	Persentase koperasi aktif	48.08%	55.56%	55.96%	57.02%	57.02%	90%	<
14.2	Usaha Mikro dan Kecil	476 unit	840 unit	1314 unit	1420 unit	1536 unit	1263 unit	>
15	Penanaman Modal							
15.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0	0	125	199	224	125	>
15.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	0	0	47.004.369.000	1.745.875.000.000	79.564.000.000	13.559.996.330	>
16	Kepemudaan dan Olah Raga							
16.1	Jumlah organisasi pemuda	0	16	16	16	16	32	<
16.2	Jumlah organisasi olahraga	0	8	8	8	8	20	<
17	Ketentraman dan Ketertiban Umum							
17.1	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk						49,6	
17.2	Penegakan PERDA						100%	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Targer Capayan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.3	Cakupan patroli petugas Satpol PP						50	
17.4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten						100%	
17.5	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten						459	
17.6	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	95%	95%	98%	100%	100%	100%	=
18	Ketahanan Pangan							
18.1	Ketersediaan pangan utama	25,66	18,52	18,78	12,29	15,06	15,06	=
19	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
19.1	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
20	Statistik							
20.1	Buku "kabupaten dalam angka"	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	=
20.2	Buku "PDRB kabupaten"	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	=
21	Kearsipan							
21.1	Pengelolaan arsip secara baku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
22	Komunikasi dan Informatika							
22.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,75	0,8	0,81	0,91	0,93	0,93	=
22.2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	45,82%	50,87%	52,53%	60,03%	65,70%	65,70%	=
22.3	Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet	0,12	0,19	0,23	0,3	0,38	0,38	=
23	Perpustakaan							
23.1	Jumlah perpustakaan	0	0	0	0	0	118	<
	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan							
1	Pertanian							
1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	14,79%	14,38%	13,40%	12,92%	13,30%	13,30%	=
2	Energi dan Sumberdaya Mineral							
2.1	Rasio ketersediaan daya listrik	0,89	0,85	0,95	0,96	1,00	1,00	=
3	Pariwisata							
3.1	Kunjungan wisata	14.500	17.200	8.923	8.345	6.873	3000 orang	>
4	Kelautan dan Perikanan							
4.1	Produksi perikanan	6229,93 ton	6292,86 ton	7064,89 ton	7534,03 ton	8664,14 ton	18.480,6 ton	<
4.2	Konsumsi ikan	27,00%	26,82%	27,08%	27,25%	45,75%	24,00%	>

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Targer Capayan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Cakupan bina kelompok nelayan	14,29%	76,92%	80,00%	72,73%	83,87%	100%	<
5	Perdagangan							
5.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,93%	13,62%	13,20%	13,06%	12,90%	16,65%	<
5.2	Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar Rupiah)	-491,19	-715,22	-932,79	-1050,32	-1182,66	-1182,66	=
5.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Perindustrian							
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5,86%	5,40%	4,63%	4,21%	3,62%	7,20%	<
7.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	54,17%	71,13%	75,53%	55,87%	58,66%	58,66%	=
8	Ketransmigrasian							
8.1	IPK Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30	=
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Fokus Pada Kemampuan Ekonomi							
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	785.196	971.434	885.454	923.882	987.279	1.289.663	<
1.2	Produktivitas total daerah (Juta Rupiah)	59,13	70,22	72,67	85,12	82,23	82,23	=
1.3	Nilai tukar petani	103,95	101,25	98,77	98,09	97,52	109,94	<
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
2.1	Jumlah bank	6	6	6	6	6	14	<
2.2	Jumlah restoran	39	39	49	49	54	35	>
2.3	Jumlah penginapan/ hotel	21	21	23	23	23	25	<
2.4	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	13,45%	62,63%	52,71%	66,01%	86,38%	30,00%	>
2.5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	82,36%	84,92%	87,48%	90,04%	92,60%	70,00%	>
3	Fokus Iklim Berinvestasi							
3.1	Angka kriminalitas	0	0	0	0	0	0,71	
3.2	Indeks Demokrasi	61,25%	73,27%	70,73%	72,10%	69,89%	69,89%	=
4	Fokus Sumberdaya Manusia							
4.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	1,55	1,72	1,5	1,59	1,67	1,67	=
4.2	Rasio ketergantungan	58,79%	58,21%	58,81%	58,81%	58,81%	36,40%	>



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**2021
2025**

BAB 3

**GAMBARAN UMUM
KEUANGAN DAERAH**

BAB 3

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1 berikut

Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Halmahera Timur Tahun 2016-2021

No.	Uraian	REALISASI (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN	906,738,338,507.00	999,597,934,857.00	803,582,550,800.00	914,320,684,719.00	913,919,646,166.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24,517,500,000.00	74,109,217,300.00	72,193,196,800.00	94,839,566,719.00	73,916,934,941.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,982,500,000.00	6,592,500,000.00	6,682,500,000.00	8,305,132,919.00	9,053,420,403.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5,850,000,000.00	890,000,000.00	1,644,785,000.00	1,226,240,000.00	3,766,852,022.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2,621,418,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	5,533,062,716.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13,685,000,000.00	64,005,299,300.00	62,365,911,800.00	83,808,193,800.00	55,563,599,800.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	806,734,897,507.00	785,002,197,557.00	609,485,923,000.00	711,418,531,000.00	667,826,082,225.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	115,505,236,027.00	95,872,464,557.00	28,577,387,000.00	42,747,063,000.00	60,819,828,225.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	479,291,051,000.00	476,515,982,000.00	477,350,304,000.00	486,927,206,000.00	449,275,611,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	211,938,610,480.00	212,613,751,000.00	103,558,232,000.00	181,744,262,000.00	157,730,643,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	75,485,941,000.00	140,486,520,000.00	121,903,431,000.00	108,062,587,000.00	172,176,629,000.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,000,000,000.00				31,277,000,000.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,574,000,000.00	11,800,000,000.00	12,175,000,000.00	10,265,000,000.00	10,940,000,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64,911,941,000.00	128,686,520,000.00	109,728,431,000.00	97,797,587,000.00	129,959,629,000.00
1.3.6	Pendapatan Lainnya					
2	BELANJA	952,134,347,693.00	1,111,246,693,914.00	1,067,674,417,550.00	1,093,572,704,317.00	1,062,132,228,063.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	382,187,399,130.66	383,688,494,854.00	354,396,611,841.00	364,267,410,841.00	411,346,469,157.00
2.1.1	Belanja Pegawai	245,334,754,674.66	229,218,793,748.00	200,332,754,146.00	191,807,373,296.00	203,110,342,163.00
2.1.4	Belanja Hibah	8,120,000,000.00	10,445,000,000.00	5,540,000,000.00	10,405,000,000.00	43,287,875,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial					3,633,600,000.00

No.	Uraian	REALISASI (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	127,732,644,456.00	143,524,701,106.00	147,523,857,695.00	161,055,037,545.00	157,434,224,706.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	3,880,427,288.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	569,946,948,562.34	727,558,199,060.00	713,277,805,709.00	729,305,293,476.00	650,785,758,906.00
2.2.1	Belanja Pegawai	50,131,973,339.00	71,578,484,460.00	70,801,730,130.00	81,031,400,244.00	67,926,133,900.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171,105,875,117.00	205,098,588,920.00	236,249,503,324.00	221,811,641,175.00	240,538,345,546.00
2.2.3	Belanja Modal	348,709,100,106.34	450,881,125,680.00	406,226,572,255.00	426,462,252,057.00	342,321,279,460.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45,396,009,186.00)	(111,648,759,057.00)	(264,091,866,750.00)	(179,252,019,598.00)	(148,212,581,897.00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45,396,009,186.00	111,648,759,057.00	264,091,866,750.00	179,252,019,598.00	148,212,581,897.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	-

A) PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari : (1). Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, (2). Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan (3). Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

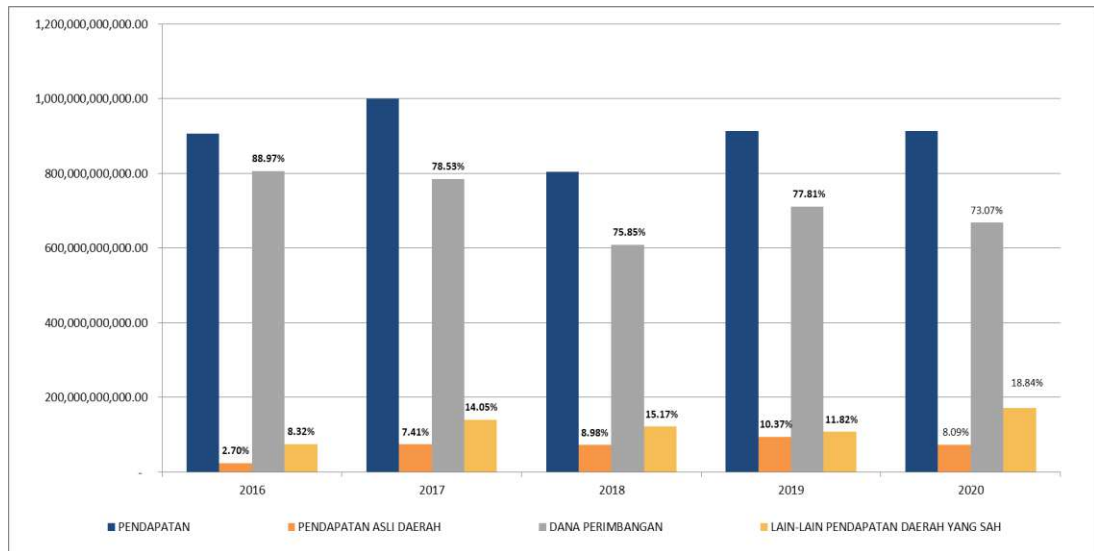
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-Rata
		2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	
1	PENDAPATAN	10.24%	-19.61%	13.78%	-0.04%	1.09%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.27%	-2.59%	31.37%	-22.06%	52.25%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.31%	1.37%	24.28%	9.01%	16.74%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	-84.79%	84.81%	-25.45%	207.19%	45.44%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	367.70%	-2.56%	34.38%	-33.70%	91.46%
1.2	DANA PERIMBANGAN	-2.69%	-22.36%	16.72%	-6.13%	-3.61%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-17.00%	-70.19%	49.58%	42.28%	1.17%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	-0.58%	0.18%	2.01%	-7.73%	-1.53%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0.32%	-51.29%	75.50%	-13.21%	2.83%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	86.11%	-13.23%	-11.35%	59.33%	30.21%
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	111.70%	3.18%	-15.69%	6.58%	26.44%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98.25%	-14.73%	-10.87%	32.89%	26.38%
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

Persentase rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan diasumsikan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100 persen. Diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Timur mengalami tren fluktuatif. Pada periode Tahun 2016/2017 persentase pertumbuhan mencapai 10,24 persen, kemudian menurun hingga minus 19,61 persen pada periode Tahun 2017/2018. Selanjutnya pada periode

Tahun 2018/2019 mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,78 persen, namun pada akhir periode Tahun 2019/2020 kembali menurun hingga mencapai minus 0,04 persen. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah periode Tahun 2016-2020 sebesar 1,09 persen. Dari komponen pendapatan, rata-rata pertumbuhan terbesar bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 52,25 persen, kemudian disusul oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 30,21 persen, sedangkan dana perimbangan rata-rata pertumbuhan menurun hingga minus 3,61 persen.

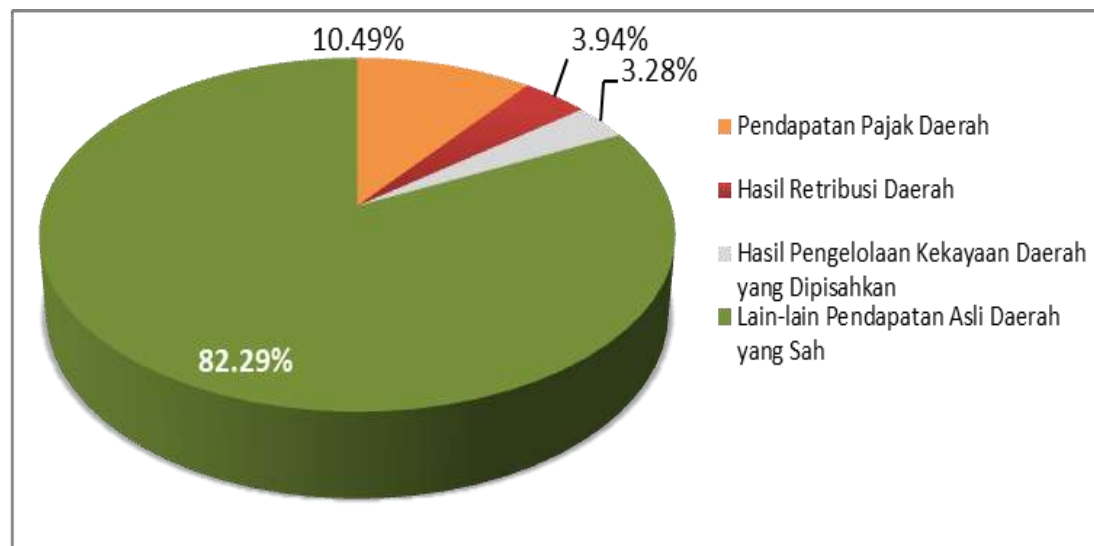


Gambar 3. 1 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

⇒ Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebesar 82,29 persen. Sisanya terdiri dari Pendapatan pajak daerah sebesar 10.49 persen, Hasil retribusi daerah sebesar 3.94 persen dan Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan sebesar 3.28 persen.

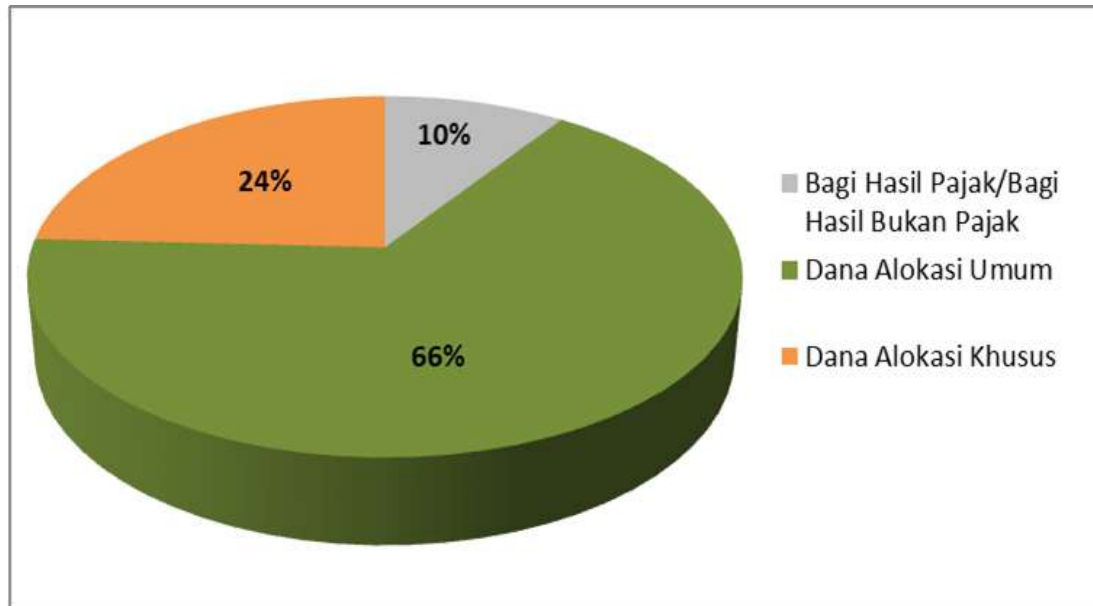


Gambar 3. 2 Rata-rata Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

⇒ Dana Perimbangan

Rata-rata proporsi Dana Perimbangan selama periode Tahun 2016-2020 berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 66 persen dan Dana Alokasi Khusus sebesar 24 persen sedangkan sisanya sebesar 10 persen merupakan Dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

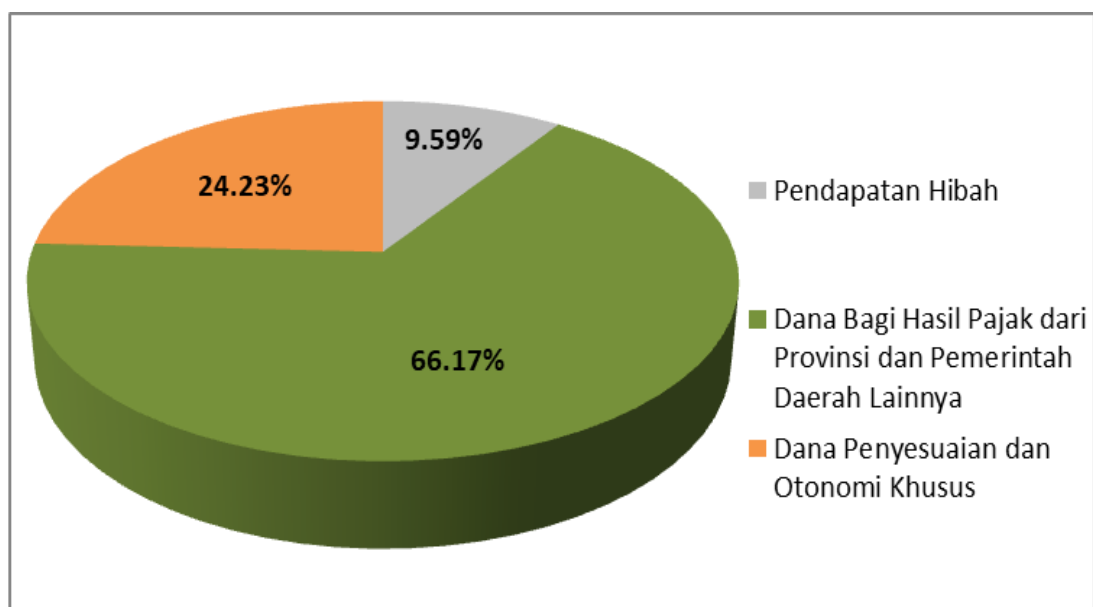


Gambar 3. 3 Rata-rata Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

⇒ Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rata-rata proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah selama periode Tahun 2016-2020 penyumbang terbesar di komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sebesar 66.17 persen, selanjutnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 24.23 persen dan Dana Hibah sebesar 9.59 persen.



Gambar 3. 4 Rata-rata Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

B) BELANJA DAERAH

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- ⇒ Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga
- ⇒ Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

**Tabel 3. 3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

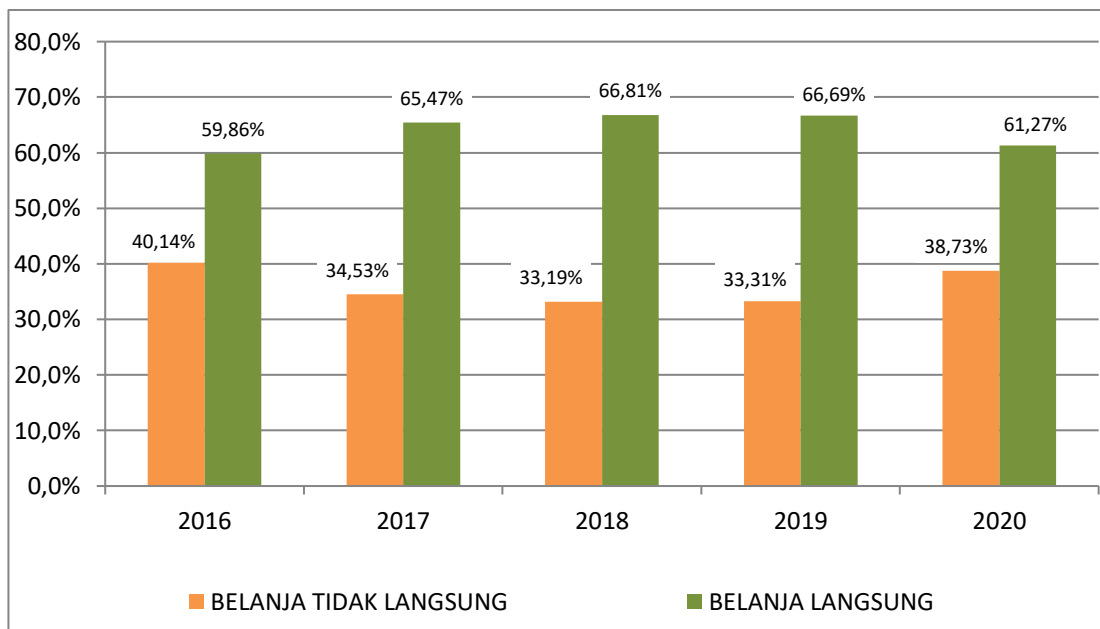
No.	Uraian	Pertumbuhan (%)				
		2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Rata-Rata
2	BELANJA	16.71%	-3.92%	2.43%	-2.88%	3.09%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0.39%	-7.63%	2.79%	12.92%	2.12%
2.1.1	Belanja Pegawai	-6.57%	-12.60%	-4.26%	5.89%	-4.38%
2.1.4	Belanja Hibah	28.63%	-46.96%	87.82%	316.03%	96.38%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	12.36%	2.79%	9.17%	-2.25%	5.52%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-50.00%	100.00%	0.00%	288.04%	84.51%
2.2	BELANJA LANGSUNG	27.65%	-1.96%	2.25%	-10.77%	4.29%
2.2.1	Belanja Pegawai	42.78%	-1.09%	14.45%	-16.17%	9.99%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.87%	15.19%	-6.11%	8.44%	9.35%
2.2.3	Belanja Modal	29.30%	-9.90%	4.98%	-19.73%	1.16%

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

Persentase rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja diasumsikan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100 persen. Diperoleh gambaran bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Halmahera Timur mengalami tren fluktuatif. Pada periode Tahun 2016/2017 persentase

pertumbuhan mencapai 16.71 persen, kemudian menurun hingga minus 3,92 persen pada periode Tahun 2017/2018. Selanjutnya pada periode Tahun 2018/2019 mengalami peningkatan sebesar 2.43 persen, namun pada akhir periode Tahun 2019/2020 kembali menurun hingga mencapai minus 2.88 persen. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan belanja daerah periode Tahun 2016-2020 sebesar 3,09 persen,

Berdasarkan komposisinya, proporsi terbesar belanja daerah Kabupaten Halmahera Timur berasal dari Belanja Langsung dengan rata-rata komposisi dalam kurun Tahun 2014-2018 sebesar 64.14 persen, sementara pada komponen Belanja Tidak Langsung sebesar 35.86 persen. Namun demikian, proporsi Belanja Langsung dalam kurun Tahun 2014-2018 memperlihatkan tren penurunan, yaitu menjadi 49,7 persen pada Tahun 2018 dibandingkan keadaan di Tahun 2014 yang mencapai 62,1 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 5 Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

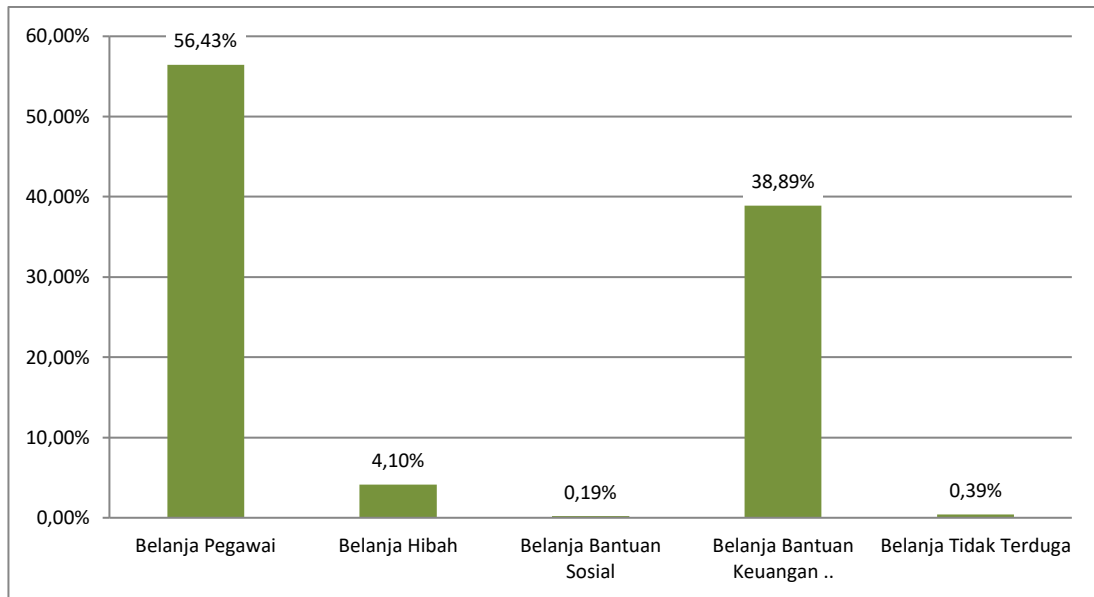
Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

⇒ Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja tidak terduga.

Rata-rata pertumbuhan periode Tahun 2016-2020 Belanja Tidak Langsung sebesar 2.12 persen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada komponen Belanja Hibah sebesar 96.38 persen, untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa rata-rata pertumbuhan sebesar 5.52 persen dan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga sebesar 84.51 persen, sedangkan Belanja Pegawai mengalami rata-rata pertumbuhan negative atau minus 4.38 persen. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 tidak ada alokasi pada komponen Belanja bantuan sosial.

Rata-rata proporsi terbesar dalam Belanja Tidak Langsung berasal dari komponen Belanja Pegawai sebesar 56.43 persen, Belanja Hibah sebesar 4.10 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 38.89 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

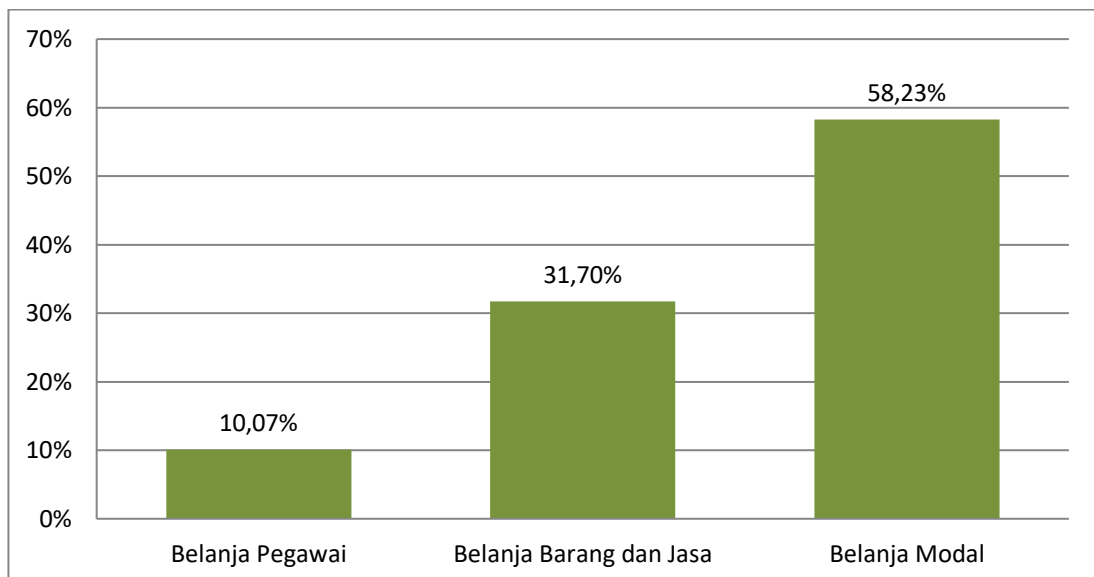


Gambar 3. 6 Rata-rata Proporsi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

⇒ Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Langsung pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Rata-rata proporsi jenis belanja dalam komponen Belanja Langsung sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3. 7 Rata-rata Proporsi Belanja Langsung Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

C) PEMBIAYAAN DAERAH

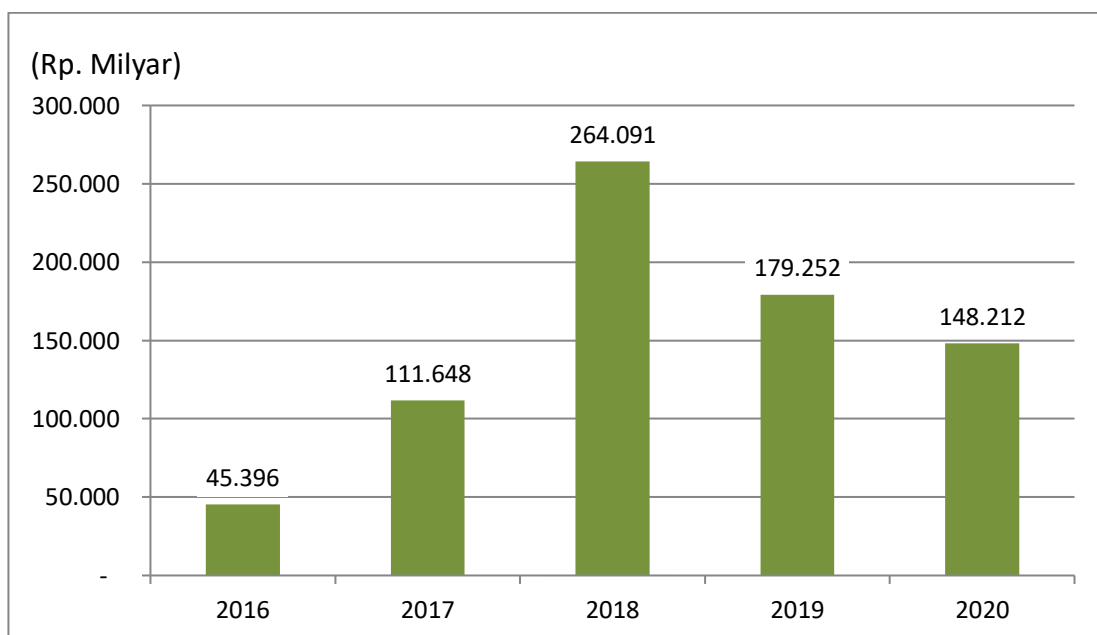
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

⇒ Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu. Selama kurun waktu Tahun 2016-2020, APBD Kabupaten Halmahera Timur mengalami defisit anggaran yang dikarenakan terjadinya desifit bawaan pada Pemerintahan sebelumnya. Pada awal pelaksanaan Tahun RPJMD 2016-2020, APBD Kabupaten Halmahera Timur mengalami Defisit anggaran pada Tahun 2016 mencapai Rp 45,396,009,186.00 kemudian mengalami defisit pada Tahun 2017 sebesar Rp 111,648,759,057.00 Pada Tahun 2018, APBD Kabupaten Halmahera Timur mengalami defisit kembali sebesar Rp 264,091,866,750.00 Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2020 berturut-turut APBD kembali mengalami defisit masing-masing sebesar Rp 179,252,019,598.00 dan Rp 148,212,581,897.00.

Kondisi APBD yang mengalami deficit tersebut berpengaruh dominan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap total penerimaan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mempunyai sisa lebih tahun berjalan yang merupakan surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sisa Lebih yang terdapat pada APBD Kabupaten Halmahera Timur sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Gambaran realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 8 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

3.1.2. NERACA DAERAH

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam hal ini Neraca daerah merupakan gambaran kondisi keuangan Kabupaten Halmahera Timur serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Gambaran neraca Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020 disajikan pada Tabel 3.4.

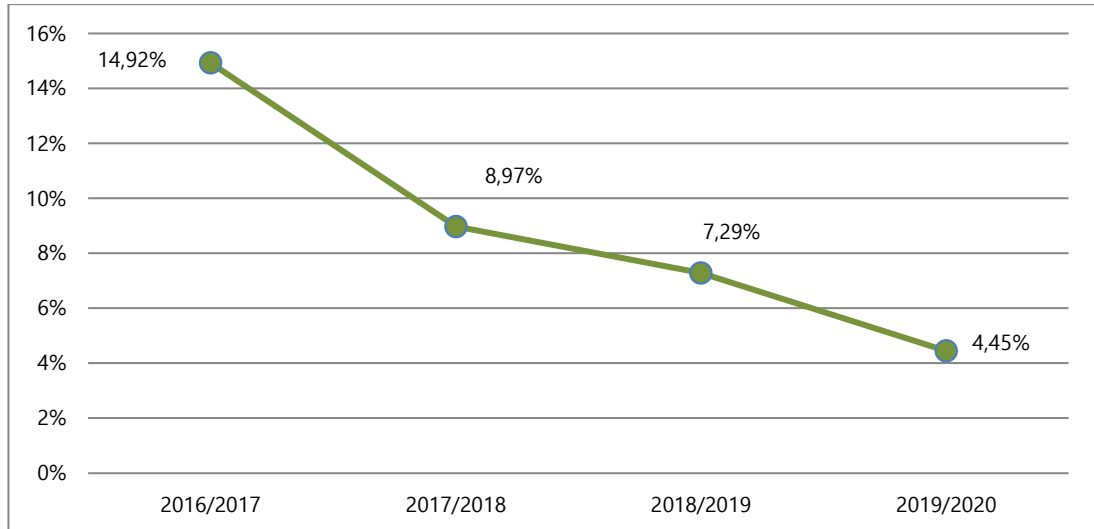
Tabel 3. 4 Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	41,034,945,809.34	8,145,066,967.16	4,500,785,778.48	5,640,814,137.86	12,117,568,602.14
Kas di Bendahara Penerimaan	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	937,822,328.00	391,098,182.00	92,151,261.00	286,462,160.00	364,162,429.00
Kas di BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kas di Bendahara FKTP	15,362,288.00	147,403,536.20	392,413,895.80	158,728,174.28	531,073,787.48
Kas di Bendahara BOS	171,345,139.80	257,852,718.40	539,415,937.20	9,059,703,678.98	754,123,391.82
Kas Lainnya	1,312,995,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setara Kas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	12,245,646,394.14	14,556,677,707.04	11,111,185,285.92	14,465,555,643.52	21,242,892,551.41
Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00	913,705,300.00	237,271,500.00
Penyisihan Piutang	(1,409,549,508.52)	(1,702,127,473.81)	(1,748,480,149.34)	(2,542,405,081.27)	(2,137,676,122.17)
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persediaan	5,436,886,334.00	4,701,197,257.00	3,470,160,205.85	5,418,625,763.24	6,401,139,156.66
JUMLAH ASET LANCAR	59,745,464,126.76	26,497,178,993.99	18,357,632,214.91	33,401,189,776.61	39,510,555,296.34
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	3,098,825,219.66	3,508,120,017.22	3,508,120,017.22	3,508,120,017.22	3,508,120,017.22
Penyisihan Dana Bergulir	(2,290,623,459.00)	(3,179,873,459.50)	(3,179,873,459.50)	(3,179,873,459.50)	(3,179,873,459.50)
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	808,201,760.66	328,246,557.72	328,246,557.72	328,246,557.72	328,246,557.72
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	36,807,758,702.00	33,886,992,611.00	12,363,087,927.65	14,584,774,446.15	17,592,677,205.00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	36,807,758,702.00	33,886,992,611.00	12,363,087,927.65	14,584,774,446.15	17,592,677,205.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	37,615,960,462.66	34,215,239,168.72	12,691,334,485.37	14,913,021,003.87	17,920,923,762.72
ASET TETAP					
Tanah	67,129,650,200.00	126,501,787,250.00	132,766,546,550.00	150,852,680,550.00	164,252,231,650.00
Peralatan dan Mesin	147,523,940,615.97	169,584,777,982.86	182,411,243,329.50	200,025,808,326.65	228,014,459,323.45
Gedung dan Bangunan	598,641,736,486.00	614,209,589,188.00	635,157,840,244.00	694,826,167,328.00	754,527,226,403.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,168,913,321,741.00	1,361,759,900,177.00	1,613,257,121,177.00	1,786,852,262,934.00	1,927,283,444,034.47
Aset Tetap Lainnya	22,369,754,017.00	24,758,226,017.00	19,139,404,267.00	18,041,308,500.00	18,041,308,500.00

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Konstruksi Dalam Pengerjaan	63,254,492,217.00	127,672,946,574.00	146,387,191,796.00	121,781,774,210.00	104,889,550,078.00
Akumulasi Penyusutan	(455,691,636,581.00)	(528,783,912,010.58)	(619,987,831,634.00)	(732,744,534,574.05)	(850,958,341,275.80)
JUMLAH ASET TETAP	1.612.141.258.695,97	1.895.703.315.178,28	2,109,131,515,729.50	2,239,635,467,274.60	2.346.049.878.713,12
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	3,425,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aset Lain-lain	10,022,846,693.00	23,683,976,711.69	17,633,027,004.00	27,111,551,354.85	14,649,677,083.86
JUMLAH ASET LAINNYA	13,447,846,693.00	23,683,976,711.69	17,633,027,004.00	27,111,551,354.85	14,649,677,083.86
JUMLAH ASET	1.722.950.529.978,39	1.980.099.710.052,68	2.157.813.509.433,78	2.315.061.229.409,93	2.418.131.034.856,04
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,359,708,593.00	158,839,688.00	405,590,544.00	582,790,771.20	485,407,640.70
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Beban	12,604,914,550.00	13,982,634,661.00	13,276,943,895.00	14,294,406,356.00	17,298,985,461.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	6,303,503,116.00	9,619,245,601.00	115,103,936,729.00	56,943,411,989.00	54,166,195,614.47
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20,268,126,259.00	23,760,719,950.00	128,786,471,168.00	71,820,609,116.20	71,950,588,716.17
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	20,268,126,259.00	23,760,719,950.00	128,786,471,168.00	71,820,609,116.20	71,950,588,716.17
EKUITAS					
EKUITAS	1.702.682.403.719,39	1.956.338.990.102,68	2.029.027.038.265,78	2.243.240.620.293,73	2.346.180.446.139,87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.722.950.529.978,39	1.980.099.710.052,68	2.157.813.509.433,78	2.315.061.229.409,93	2.418.131.034.856,04

A) ASET

Aset pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur selama periode Tahun 2016- 2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,91 persen, gambaran pertumbuhan aset daerah kabupaten Halmahera timur dalam kurun Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

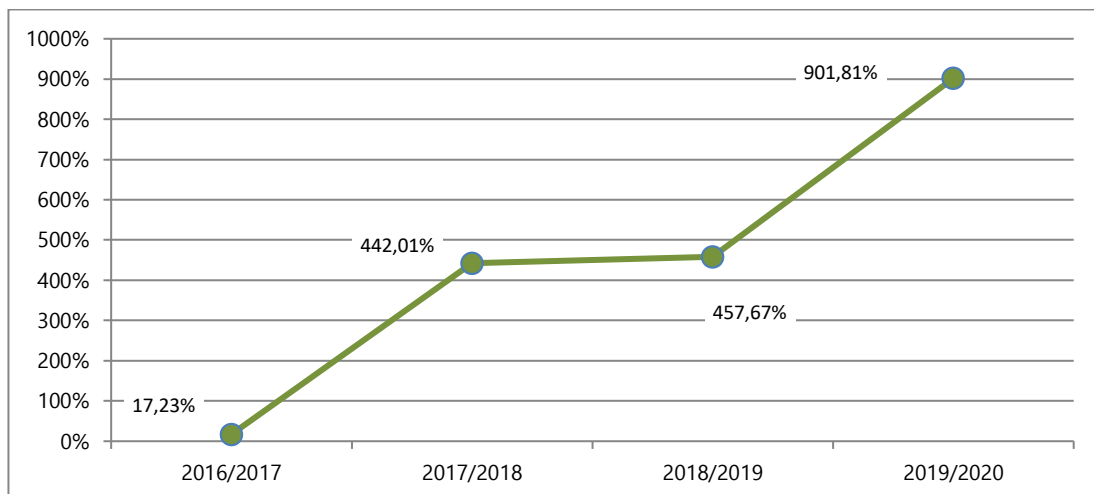


Gambar 3. 9 Pertumbuhan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

B) KEWAJIBAN

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur selama periode Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata 454,68 persen. Kewajiban selama kurun Tahun 2014-2018 hanya meliputi kewajiban jangka pendek, dan tidak memiliki kewajiban jangka panjang, pertumbuhan kewajiban daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

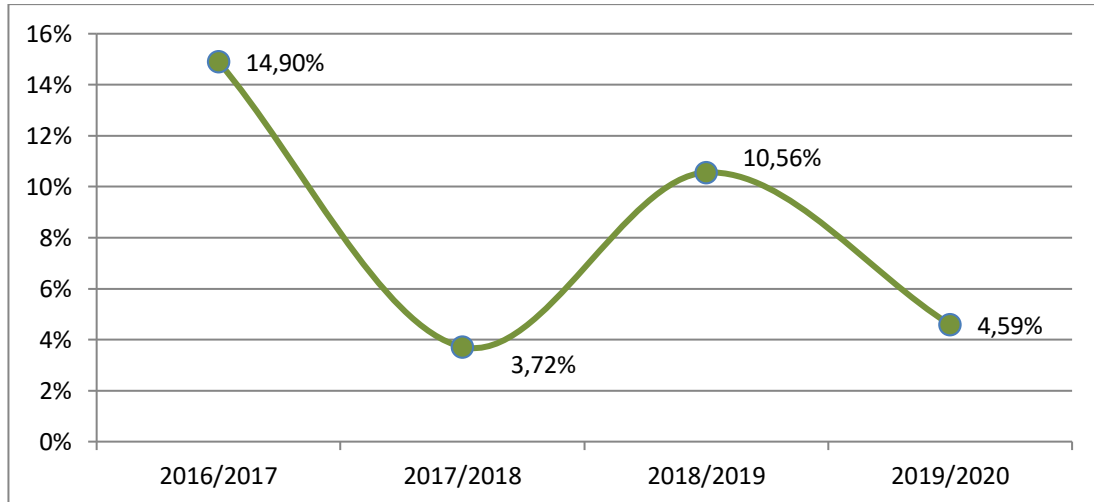


Gambar 3. 10 Pertumbuhan Kewajiban Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

C) EKUITAS DANA

Perkembangan ekuitas Kabupaten Halmahera Timur selama Tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, namun tumbuh positif dengan rata-rata sebesar 23,3 persen. Secara historis, pertumbuhan ekuitas Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3. 11 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

Berdasarkan neraca Kabupaten Halmahera Timur periode Tahun 2016-2020, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Lancar (<i>Current ratio</i>)	2.95	1.12	0.14	0.47	0.55
Rasio Cepat (<i>Quick ratio</i>)	2.68	0.92	0.12	0.39	0.46
Rasio Hutang terhadap Aset (<i>Debt to asset ratio</i>)	0.01	0.01	0.06	0.03	0.03
Rasio Hutang terhadap Modal (<i>Debt to equity ratio</i>)	0.01	0.01	0.06	0.03	0.03

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 sebesar 2.95 namun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 rasio lancar mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 25.8 persen.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick Ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *Quick Ratio* Neraca Keuangan Kabupaten Halmahera Timur setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio Kewajiban terhadap Aset Tahun 2016 dan sebesar 0,01 dan Tahun 2020 sebesar 0,03. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin buruk Rasio Kewajiban terhadap Aset. Jika dilihat dari hasil tersebut

menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur selama Tahun 2016-2020 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah melakukan pinjaman ke kreditor namun tingkat kemampuan membayar tersebut cenderung menurun dengan laju 92.71 persen.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu Tahun 2016-2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana Perimbangan merupakan sumber utama Pendapatan Daerah, dengan tetap berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan objektif, efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- 3) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD
- 4) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 5) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
- 6) Pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani azas umum yaitu :
 - a) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - c) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam bentuk
 - d) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan tugas desentralisasi, didanai dari APBD
 - e) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan Negara
 - f) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.
 - g) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan

- h) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.
- i) Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

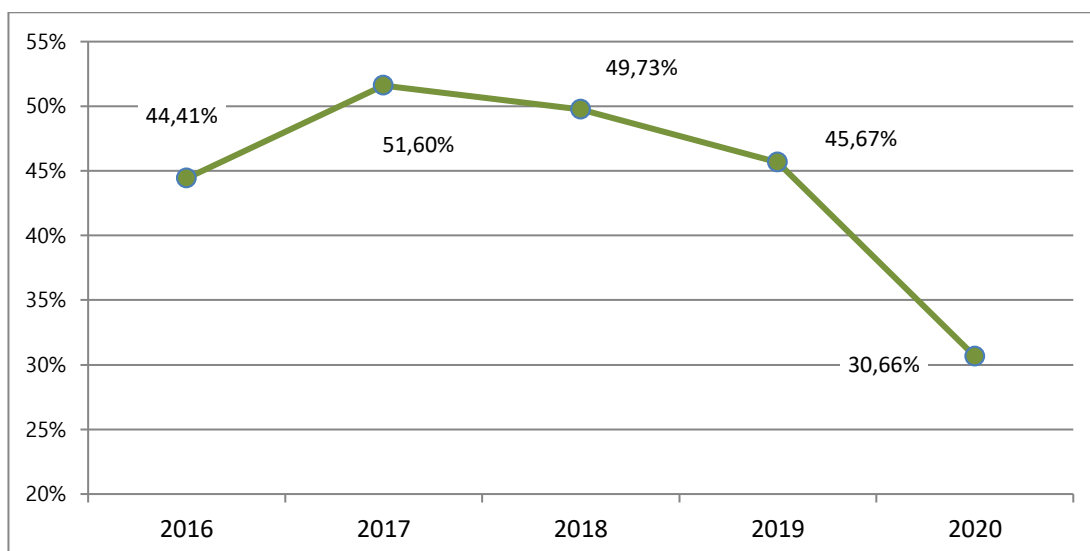
Proporsi penggunaan anggaran guna pemenuhan kebutuhan Aparatur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 3. 6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	475.536.071.805,92	481.296.141.678,00	469.094.771.989,00	464.992.554.242,00	482.763.015.740,00	0,41%
2	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	849.483.364.266,71	873.848.530.004,26	814.431.821.262,20	912.059.650.110,88	801.139.569.454,16	-1,03%
Persentase ($1/2 * 100\%$)		55,98%	55,08%	57,60%	50,98%	60,26%	2,42%

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

Dari tabel, Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung fluktuatif dari Tahun 2016 hingga Tahun 2018 mengalami kenaikan, namun pada Tahun 2019 terjadi penurunan. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2018 merupakan yang terendah dalam kurun waktu Tahun 2016-2020. Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Sebagai gambaran penggunaan belanja untuk pembangunan, Grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi realisasi belanja modal terhadap total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan) dalam kurun Tahun 2016-2020.



Gambar 3. 12 Perkembangan Proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021

3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN

Dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah, yang merupakan pendekatan untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis Pembiayaan daerah Kabupaten Halmahera Timur dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selama kurun waktu Tahun 2016-2020, APBD Kabupaten Halmahera Timur mengalami defisit anggaran yang dikarenakan terjadinya desifit bawaan pada Pemerintahan sebelumnya. Analisis Pembiayaan daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut.

A) ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RIIL

Analisis ini digunakan untuk memberi gambaran masa lalu terkait kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Timur mengalami surplus anggaran, Tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan defisit riil anggaran.

Tabel 3. 7 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	807.541.937.092,37	865.169.488.088,50	809.312.644.933,72	897.496.732.730,96	787.858.048.884,42
<i>Dikurangi Realisasi</i>					
Belanja Daerah	647.005.580.777,00	768.258.581.232,08	676.856.379.621,00	738.762.140.472,00	740.886.193.832,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
Surplus/Defisit Riil	160.536.356.315,37	96.910.906.856,42	132.456.265.312,72	158.734.592.258,96	46.971.855.052,42

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pada kurun waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur cukup kuat untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Gambaran analisis penutup defisit riil Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.8 di halaman berikut.

Tabel 3. 8 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	807.541.937.092,37	865.169.488.088,50	809.312.644.933,72	897.496.732.730,96	787.858.048.884,42
	<i>Dikurangi Realisasi</i>					
2	Belanja Daerah	647.005.580.777,00	768.258.581.232,08	676.856.379.621,00	738.762.140.472,00	740.886.193.832,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
A	Surplus/Defisit riil	160.536.356.315,37	96.910.906.856,42	132.456.265.312,72	158.734.592.258,96	46.971.855.052,42
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
4	SILPA tahun anggaran sebelumnya	45.396.009.186,00	111.648.759.057,00	264.091.866.750,00	179.252.019.598,00	148.212.581.897,00
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
9	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	45.396.009.186,00	111.648.759.057,00	264.091.866.750,00	179.252.019.598,00	148.212.581.897,00
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	205.932.365.501,37	208.559.665.913,42	396.548.132.062,72	337.986.611.856,96	195.184.436.949,42

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

Dari tabel di atas, dapat disusun analisis untuk menggambarkan komposisi penutup defisit riil sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. 9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	45.396.009.186,00	111.648.759.057,00	264.091.866.750,00	179.252.019.598,00	148.212.581.897,00
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan					
4	Penerimaan pinjaman daerah					
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah					
6	Penerimaan piutang daerah					
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	41.941.427.174,34	8.679.041.915,76	5.179.176.328,48	14.562.917.379,92	13.281.520.569,74

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

B) ANALISIS REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Tabel berikut menyajikan gambaran perolehan SiLPA dalam kurun Tahun 2016 hingga Tahun 2020.

Tabel 3. 10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Uraian	2016 Rp. Juta	% dari SiLPA	2017 Rp. Juta	% dari SiLPA	2018 Rp. Juta	% dari SiLPA	2019 Rp. Juta	% dari SiLPA	2020 Rp. Juta	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	41.941.427.174,34		8.679.041.915,76		5.179.176.328,48		14.562.917.379,92		13.281.520.569,74	
Pelampauan penerimaan PAD	659.239.490,37	0,02	-134.428.446.768,50	15,49	-5.516.593.380,08	-1,07	-39.719.333.422,04	-2,73	-19.341.082.592,58	-1,46
Pelampauan Penerimaan Dana	-99.855.640.905,00	-2,38	-113.860.282.587,00	13,12	11.100.323.735,00	2,14	1.271.849.586,00	0,09	-106.585.184.689,00	-8,03
Perimbangan										
Pelampauan Penerimaan Lain- lain	0	0,00		0,00	146.363.778,80	0,03	21.623.531.848,00	1,48	-135.330.000,00	-0,01
Pendapatan Daerah Yang Sah										
Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya		0,00		0,00		-		0,00		0,00
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	12.604.914.550,00	0,30	13.982.634.661,00	1,61	13.276.943.895,00	2,56	14.294.406.356,00	0,98	17.298.985.461,00	1,30
Kegiatan lanjutan		0,00	84.712.300.140,00	9,76	113.234.631.516,00	21,86	160.876.999.209,00	11,05	51095051080	3,85

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

C) ANALISIS SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)**Tabel 3. 11 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo kas neraca daerah	41.034.945.809,34	8.145.066.967,16	4.500.785.778,48	5.640.814.137,86	12.117.568.602,14
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum	20.268.126.259,00	23.760.719.950,00	128.786.471.168,00	71.820.609.116,20	71.950.588.716,17
3	Kegiatan lanjutan					
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	20.766.819.550,34	-15.615.652.982,84	-124.285.685.389,52	-66.179.794.978,34	-59.833.020.114,03

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun

komponen dari pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar dalam melakukan proyeksi, diantaranya:

- 1) Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1,19 persen selama periode Tahun 2021-2025;
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 13,26 persen selama periode Tahun 2021-2025;
- 3) Komponen PAD yang meliputi Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah, diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen Lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,15 persen, hal ini sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap investasi sektor pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur;
- 4) Komponen Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 1,82 persen selama periode Tahun 2021-2025;
- 5) Proyeksi target Lain-lain Pendapatan Yang Sah mengasumsikan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, di mana nilai pada tahun-tahun sebelumnya dianggap masih relevan sebagai perkiraan target;

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2021 berdasarkan angka APBD Tahun 2020. Sedangkan proyeksi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja periode sebelumnya dengan menggunakan angka dasar data realisasi APBD Tahun Anggaran 2018, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 12 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025

KODE	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
5	BELANJA	762.637.060.683,00	898.610.880.488,08	812.872.510.521,00	888.042.761.023,00	789.159.167.464,00
5.01	BELANJA OPERASI	386.433.047.639,00	434.085.900.604,08	440.034.155.951,00	449.937.985.199,00	500.468.938.358,00
5.01.01	Belanja Pegawai	176.851.544.168,00	163.493.032.915,00	170.895.128.706,00	167.897.651.865,00	182.759.729.275,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	203.004.003.471,00	261.947.867.689,08	264.790.027.245,00	274.492.833.334,00	271.741.759.083,00
5.01.05	Belanja Hibah	6.577.500.000,00	8.645.000.000,00	4.349.000.000,00	7.547.500.000,00	42.333.850.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemilukada					
5.01.05	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	3.633.600.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	3.633.600.000,00
5.02	BELANJA MODAL	260.051.283.138,00	334.071.163.628,00	236.822.223.670,00	288.824.155.273,00	237.781.802.474,00
5.02.01	Belanja Modal Tanah	6.340.334.250,00	12.533.950.000,00	8.715.237.300,00	19.491.780.700,00	15.156.907.500,00
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.766.688.088,00	33.133.588.797,00	15.786.818.897,00	21.038.930.173,00	35.742.949.656,00
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.010.723.923,00	40.840.317.207,00	39.517.202.244,00	49.433.313.731,00	57.527.902.230,00
5.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.429.536.877,00	245.537.435.624,00	172.579.465.229,00	198.699.630.669,00	129.354.043.088,00
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	504.000.000,00	2.025.872.000,00	223.500.000,00	160.500.000,00	
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	101.517.000,00	-	-	2.635.453.000,00
5.04	BELANJA TRANSFER	115.152.729.906,00	130.352.299.256,00	136.016.130.900,00	149.280.620.551,00	48.272.973.632,00
	Total Surplus/(Defisit)	44.904.876.409,37	61.398.622.511,34	169.377.646.235,28	114.890.732.699,36	234.179.605.568,84
6	PEMBIAYAAN					
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.941.427.174,34	42.120.434.315,34	49.499.600.845,00	49.499.600.845,00	49.499.600.845,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	41.941.427.174,34	42.120.434.315,34	49.499.600.845,00	49.499.600.845,00	49.499.600.845,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	41.941.427.174,34	42.120.434.315,34	49.499.600.845,00	49.499.600.845,00	49.499.600.845,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	86.846.303.583,71	103.519.056.826,68	218.877.247.080,28	164.390.333.544,36	283.679.206.413,84

3.3.2. PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendapatan	916.659.274.941	960.009.502.999	982.250.156.756	1.002.933.493.722	1.023.616.830.688
2	Pinjaman Dalam Negeri					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-49.499.600.845	-9.633.265.221	8.974.796.757	25.864.897.322	42.754.997.887
	Total Penerimaan	867.159.674.096	950.376.237.778	991.224.953.514	1.028.798.391.045	
	Dikurangi:					
4	Belanja Operasi	513.716.329.204	514.860.672.784	516.119.450.722	517.504.106.454	518.888.762.186
5	Belanja Modal	291.702.543.406	291.702.543.406	291.702.543.406	291.702.543.406	291.702.543.406
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	6.846.303.583,71	103.519.056.826,68	218.877.247.080,28	164.390.333.544,36	174.253.753.557

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran merupakan komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang masuk pada perhitungan pendapatan tahun berkenaan. Pada tabel di atas menunjukkan nilai Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Halmahera Timur positif atau surplus. Kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah mampu mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal. Namun demikian, proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Dalam hal Belanja Daerah, dialokasikan dengan mendasarkan pada prioritas kebutuhan, yang terbagi menjadi Belanja prioritas dan belanja operasional. Belanja prioritas diklasifikasikan lagi dengan mempertimbangkan urgensi menjadi Belanja Prioritas I dan Belanja Prioritas II. Belanja prioritas I merupakan belanja langsung wajib dan mengikat. Prioritas II merupakan belanja prioritas Bupati berdasarkan 22 (dua puluh dua) Janji Kerja yang menjadi program unggulan daerah, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah kewenangan Kabupaten yang bersifat pelayanan dasar. Sedangkan Belanja Prioritas III merupakan belanja urusan pemerintahan sesuai kewenangan provinsi di luar Belanja Prioritas Bupati sesuai kebutuhan. Tabel 3.14 menyajikan Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 3. 14 . Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	892.265.176.193,71	910.082.273.016,68	1.026.699.241.208,28	973.596.983.404,36	992.732.902.951,44
2	Prioritas I	805.418.872.610,00	806.563.216.190,00	807.821.994.128,00	809.206.649.860,00	825.111.499.210,02
3	Prioritas II	60.792.412.508,60	72.463.339.778,68	153.214.072.956,20	115.073.233.481,05	117.334.982.618,99
4	Prioritas III	26.053.891.075,11	31.055.717.048,01	65.663.174.124,08	49.317.100.063,31	50.286.421.122,43

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

3.4. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020-2024

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah digunakan untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi kedalam tiga kelompok prioritas dengan uraian sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program unggulan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur) periode Tahun 2016-2021, yang seiring dengan amanat RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan Prioritas II.



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**2021
2025**

BAB 4

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS**

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Halmahera Timur 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, maka permasalahan pokok pembangunan adalah: (1) IPM Kabupaten Halmahera Timur Masih dibawah rata-rata IPM Provinsi Maluku Utara; (2) masih rendahnya konektifitas terutama di wilayah utara-utara, belum meratanya tingkat aksesibilitas, belum optimalnya penataan lingkungan permukiman air minum dan sanitasi; (3) tren laju pertumbuhan ekonomi masih mengalami perlambatan dan serta masih rendahnya pengeluaran perkapita masyarakat; (4) tingkat pengangguran Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 berada pada 4,48 persen; (5) Pelayanan Pemerintah dan Pelayanan Publik yaitu belum optimalnya penyelenggaraan birokrasi, tata kelolah dan pelayanan public yang efektif, efesien dan akutabel.

Klasifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan urusan pemerintahannya adalah sebagai berikut:

4.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Timur yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar daerah diuraikan sebagai berikut.

A. URUSAN PEMERITAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana akan disajikan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian IPM dalam dimensi pengetahuan :
 - ⇒ Pencapaian IPM dalam dimensi pengetahuan yang meliputi angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, secara konsisten rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan bahkan tumbuh lebih cepat dari rata-rata secara Provinsi dan Nasional.
 - ⇒ Pencapaian IPM dimensi pengetahuan di Kabupaten Halmahera Timur masih jauh dari standar yang diharapkan, dalam hal ini 15 tahun untuk

angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan 18 tahun untuk angka harapan lama sekolah (HLS).

- ⇒ Kesenjangan pencapaian IPM pada dimensi pengetahuan kabupaten Halmahera Timur masih cukup signifikan dengan capaian HLS di bawah rata-rata provinsi. Bahkan jarak antara HLS terendah dan tertinggi cenderung semakin membesar dalam beberapa tahun terakhir.
- ⇒ lambannya peningkatan RLS merupakan efek berantai dari belum optimalnya penanganan penduduk putus sekolah di masa lalu, terutama melalui program-program pendidikan non formal (Paket B/C).

2) Aksesibilitas pelayanan pendidikan :

- ⇒ Peningkatan APS penduduk usia 7-12 tahun belum mencapai 90 persen.
- ⇒ APM pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat masing-masing juga masih berada di bawah angka 80 persen dan 70 persen;
- ⇒ Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang belum mencapai 80 persen;
- ⇒ Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/ SMK yang masih di atas satu persen;

3) Mutu pelayanan pendidikan :

- ⇒ Semakin meningkatnya rasio ketersediaan sekolah belum dibarengi dengan upaya menjaga keseimbangan pada kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.
- ⇒ Persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada satuan pendidikan SMP baru mencapai 90 persen.
- ⇒ Ketersediaan prasarana penunjang pembelajaran seperti perpustakaan dan laboratorium di seluruh jenjang pendidikan masih jauh di bawah rata-rata secara Nasional.
- ⇒ Ketersediaan guru dengan kualifikasi pendidikan sesuai yang disyaratkan (D4/S1 atau lebih) pada jenjang pendidikan dasar masih belum memadai.
- ⇒ Kesenjangan ketersediaan guru dengan kualifikasi pendidikan sesuai disyaratkan juga masih cukup lebar antar wilayah kecamatan.
- ⇒ Rasio guru-murid mendekati standar yang ada untuk seluruh jenjang pendidikan mengindikasikan bahwa pola rekrutmen guru dan keseimbangan distribusi atau penempatan guru belum berjalan secara optimal.
- ⇒ Pengembangan satuan-satuan pendidikan vokasional berbasis klaster untuk menopang pengembangan wilayah belum optimal terutama untuk menciptakan lulusan-lulusan yang terampil dan relevan sesuai kebutuhan industri.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

- 1) Pencapaian IPM dalam dimensi kesehatan yang meliputi Usia Harapan Hidup, secara konsisten mengalami peningkatan namun masih jauh di bawah rata-rata Nasional. Disparitas antar kabupaten/kota juga masih tinggi bahkan semakin melebar dalam delapan tahun terakhir.
- 2) Sejumlah indikator utama menunjukkan pencapaian yang belum optimal antara lain:

- ⇒ Masih belum signifikannya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); semakin masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
 - ⇒ Secara agregat provinsi Angka Kematian Neonatal semakin meningkat jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
 - ⇒ Kondisi paling krusial dalam sektor kesehatan yang dapat berdampak pada kualitas generasi masa depan Halmahera Timur adalah *stunting* pada balita, prevalensi di atas 40 persen;
- 3) Dari sisi fasilitas kesehatan, rasio ketersediaan puskesmas terus meningkat, namun cakupan fasilitas kesehatan yang bermutu sesuai standar belum merata antar wilayah;
 - 4) Dari sisi sumber daya manusia kesehatan, rasio ketersediaan dokter semakin membaik namun masih jauh dari standar idealnya, serta belum meratanya distribusi tenaga kesehatan antar wilayah;
 - 5) Permasalahan lainnya, masih tingginya prevalensi dan kematian akibat penyakit menular; *Universal Child Immunisation (UCI)* belum mencapai target.
 - 6) kelengkapan fasilitas RSUD Maba, kurangnya rumah sakit/puskesmas terapung dalam rangka pelayanan kesehatan antar pulau, angka kecukupan gizi yang rendah,
 - 7) Cakupan anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak belum mencapai target;
 - 8) Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, terdapatnya gizi buruk dan gizi kurang pada balita,
 - 9) Rendahnya cakupan penanganan penyakit malaria, HIV/AIDS, TBC, DBD dan diare;
 - 10) Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4,
 - 11) Rendahnya cakupan pelayanan nifas
 - 12) Rendahnya cakupan pelayanan anak balita, dan
 - 13) Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

- 1) Pada bidang pekerjaan umum yaitu
 - ⇒ Proporsi panjang Jalan kondisi baik mengalami peningkatan 0,59 hingga Tahun 2020 dari total panjang jalan kabupaten 1251,74 km, namun masih terdapat jalan dalam kondisi rusak 358,33 km atau 28,63 persen dan Jalan kabupaten yang masih berjenis permukaan jalan tanah 96,86 km atau 6,43 persen. kemudian Masih terdapat desa/UPT yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Permasalahan lainnya ketersediaan infrastruktur jalan yang belum merata disebabkan oleh masih terdapat satu ruas jalan kolektor yang menghubungkan Kecamatan Maba Utara Dengan Kecamatan Wasile Utara belum dibangun. Selain itu, Ruas-ruas jalan di wilayah utara juga masih banyak yang belum terhubung dengan jembatan serta masih kurangnya infrastruktur jalan tani khususnya di wilayah-wilayah tengah dan utara.

Selanjutnya rendahnya rasio jalan berbanding penduduk, masih banyak jalan yang belum memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air dan masih banyaknya kawasan yang terjadi genangan >2 kali setahun.

⇒ Permasalahan selanjutnya masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak dan aman serta masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses pada air bersih.

⇒ Infrastruktur sumber daya air belum memadai, hal ini disebabkan karena kondisi saluran irigasi dan tampungan air yang kurang memadai, tingginya kerusakan jaringan Irigasi Kawasan Kabupaten, kurangnya Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi, tingginya daya rusak pantai, sungai dan DAS, minimnya penanganan operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi, kurangnya kesadaran terhadap perawatan saluran irigasi.

⇒ Masih rendahnya rumah tinggal bersanitasi

- 2) Bidang Penataan Ruang, Belum tersedia dokumen rinci penataan ruang baik di tingkat Kabupaten, minimnya ketersediaan data dan informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan yang lebih rinci); Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan Ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang,

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih terdapat rumah tidak layak huni,
- 2) Lingkungan permukiman kumuh dan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan,
- 3) Masih banyak rumah tangga yang belum terlayani jaringan air bersih perpipaan,
- 4) Masih terdapat kawasan permukiman yang belum tertata,
- 5) Masih banyak rumah tangga yang belum menggunakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman,
- 6) Minimnya data dan informasi terkait cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, serta
- 7) Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan maupun proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih minimnya rencana aksi terkait dengan pengurangan risiko bencana;
- 2) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota masih belum optimal dengan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih belum sesuai standar;

- 3) Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat masih ada, dan
- 4) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru, masih tingginya potensi konflik sumberdaya alam, dan batas wilayah, serta ancaman tindakan kekerasan antar warga masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, berserikat dan berkeyakinan.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Permasalahan yang dihadapi, antara lain: masih belum optimalnya sistem rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas telantar, anak terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, dan lanjut usia telantar, serta penanganan korban bencana provinsi untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sesuai standar pemenuhan mutu baik pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; masih kurangnya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil; dan cenderung semakin menurunnya efektifitas penanggulangan kemiskinan dimana kesenjangan antar penduduk miskin maupun antar wilayah semakin melebar.

4.1.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Permasalahan urusan ketenagakerjaan yang dapat teridentifikasi berdasarkan data capaian kinerja antara lain :

- 1) Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Halmahera Timur yaitu mencapai 4,48 Persen dan perlunya peningkatan ketrampilan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja.
- 2) Perlunya perhatian terhadap hubungan antara pengusaha dan pekerja terkait sengketa tenagakerja yang mencapai 31,96 persen.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Permasalahan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah :

- 1) Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik fisik maupun emosional
- 2) Masih kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif
- 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik perlu di tingkatkan.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Permasalahan terkait dengan pangan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu.
- 2) Masih perlunya Penyediaan Pangan yang Berbasis Sumber Daya Lokal
- 3) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat di wilayah Halmahera Timur

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Konflik di bidang pertanahan masih sering terjadi di masyarakat
- 2) Masih banyak lahan yang belum tersertifikasi

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan terkait dengan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum Optimalnya pemantauan kualitas lingkungan
- 2) Indeks kualitas air dan udara berada pada predikat baik, akan tetapi perlu di pertahankan guna menjaga stabilitas lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.
- 3) Indeks kualitas tutupan lahan baru mencapai 64,18
- 4) Perlunya peningkatan ketaatan terhadap izin lingkungan (PPLH dan PUU LH)
- 5) Belum optimalnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Permasalahan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- 1) Belum tuntasnya pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pencatatan arus migrasi penduduk dan kematian
- 2) Belum optimalnya penyediaan profil kependudukan berbasis keluarga yang komprehensif lintas sektor, akurat dan mampu telusur sebagai rujukan utama perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih rendahnya peran lembaga kemasyarakatan/LSM dalam mengelola program pembangunan desa
- 2) Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) perlu di tingkatkan

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) dan Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri juga mengalami penurunan setiap tahunnya
- 2) Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi mengalami penurunan setiap tahunnya
- 3) Belum optimalnya anggota Bina Kelompok Balita (BKB) ber-KB
- 4) Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB perlu di tingkatkan

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEHUBUNGAN

Permasalahan terkait dengan Perhubungan antara lain :

- 1) Ketersediaan jaringan jalan belum didukung dengan penyediaan layanan angkutan umum yang memadai;
- 2) Masih terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya meskipun pada wilayah dengan *traffic* rendah;
- 3) Keterbatasan sarana prasarana transportasi wilayah;
- 4) Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan ADPB dalam membayar retribusi;
- 5) Rendahnya tingkat kelayakan armada;
- 6) Terbatasnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan serta banyaknya angkutan ilegal;
- 7) Belum terintegrasinya sistem transportasi wilayah; angkutan umum yang melayani kepulauan dalam provinsi masih terbatas;
- 8) Belum adanya terminal yang memadai di Kota Maba dan Buli sebagai tempat pertukaran moda transportasi;
- 9) Masih kurangnya rute lintas penyeberangan serta sarana prasarana pendukungnya;

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Permasalahan terkait dengan Komunikasi dan Informatika adalah :

- 1) Minimnya penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet.
- 2) Perlu dioptimalkan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi.
- 3) Belum optimalnya Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha.
- 4) Belum adanya Pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Permasalahan terkait dengan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih minim jumlah Koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi.

- 2) Belum adanya Pengembangan industri pangan lokal berbasis UMKM.
- 3) Belum optimalnya Fasilitas Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
- 4) Belum optimalnya upaya dalam penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi.
- 5) Belum optimalnya Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran
- 6) Masih minimnya pemberdayaan kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Permasalahan terkait dengan Penanaman di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Minimnya nilai investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, sampai pada Tahun 2020 nilainya menurun mencapai 80 miliar rupiah.
- 2) Belum maksimalnya upaya dalam peningkatan realisasi nilai investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing.
- 3) Belum optimalnya upaya peningkatan dalam pengembangan iklim penanaman modal (Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah)
- 4) Belum optimalnya upaya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang lebih intensif, walaupun Jumlah investor mengalami pertumbuhan mencapai 224 investor di Tahun 2020.
- 5) Masih mninmnya sarana penunjang, fasilitas perizinan dan penguatan usaha dan investasi.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Rendahnya capaian prestasi olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- 2) Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga
- 3) Belum memadainya sarana dan prasarana dibidang kepemudaan dan olahraga.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Persandian dan statistik di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum optimalnya penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi.
- 2) Kurangnya jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sebagai aset kebudayaan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam pembangunan kebudayaan.
- 2) Masih kurang dipromosikannya aset kebudayaan sebagai salah satu obyek pariwisata yang diandalkan.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan kearsipan antara lain:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
- 2) Minat baca masyarakat masih rendah, dikarenakan masyarakat sekarang cenderung lebih berminat membaca lewat HP/Internet daripada membaca langsung di Perpustakaan Daerah.

4.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pilihan di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap perekonomian daerah dalam lima tahun terakhir relatif masih kecil;
- 2) Produksi Perikanan tangkap dan budidaya masih belum mencapai titik optimalnya;
- 3) Nilai Tukar Nelayan yang merepresentasikan kesejahteraan pelaku usaha perikanan masih berfluktuasi;
- 4) Penyerapan Tenaga Kerja di sektor Kelautan-Perikanan masih terbatas;
- 5) Penyediaan Pasar Ikan yang belum merata dan belum optimalnya pemanfaatan PPI;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, padang lamun dan lain-lain);
- 7) Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan terbatas;
- 8) Kondisi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kurang optimal;
- 9) Masih adanya *illegal fishing dan unreported*;
- 10) Kurangnya kelembagaan pengelola kawasan konservasi perairan di daerah;
- 11) Rendahnya kesadaran masyarakat/publik tentang arti penting dan nilai strategis sumber daya perikanan dan kelautan;
- 12) Belum optimalnya ekspor hasil perikanan dan produk olahan perikanan,
- 13) Belum optimalnya upaya-upaya adaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait ekosistem kelautan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Pariwisata di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Masih sangat rendahnya kontribusi sektor ini pada perekonomian daerah sementara potensi yang dimiliki sangat besar dan Daya saing pariwisata di kawasan juga sangat lemah.
- 2) Menurunnya kunjungan wisatawan setiap tahunnya, baik itu kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara
- 3) Masih banyak potensi ODTW yang belum dikelola menuju skala Regional, Nasional/Internasional
- 4) Belum memadai ketersediaan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata.
- 5) Belum optimalnya promosi pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi.
- 6) Belum adanya biro perjalanan dalam menunjang pertumbuhan pariwisata;
- 7) Keberadaan kelompok komunitas kreatif masih sangat minim dan belum mendapat dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Pertanian di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tidak stabil;
- 2) Minimnya tenaga kerja di sektor pertanian;
- 3) Infrastruktur Irigasi belum memadai;
- 4) Selama 5 (lima) tahun terakhir Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami fluktuasi;
- 5) Akses dan ketersediaan input produksi masih terbatas;
- 6) Infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai;
- 7) Tataniaga produk pertanian belum terkendali dengan baik;
- 8) Tingginya alih fungsi lahan pertanian;
- 9) Rendahnya tingkat pendidikan petani;
- 10) Minat generasi muda terhadap usaha pertanian yang semakin minim.
- 11) Belum merata dan memadainya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- 12) Belum optimalnya pemantapan sistem penyuluhan pertanian.
- 13) Kurangnya upaya dalam penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro di sektor pertanian dan perkebunan.
- 14) Belum optimalnya fasilitasi pupuk dan pestisida.
- 15) Belum optimalnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak.
- 16) Belum maksimalnya upaya dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Adanya ketimpangan nilai ekspor terhadap nilai impor, dimana nilai impor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor.
- 2) Belum maksimalnya pengendalian inflasi daerah, stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.
- 3) Belum optimalnya akses pasar.
- 4) Masih lemahnya pengawasan ekspor-impor antar daerah;
- 5) Belum adanya pusat distribusi lokal;
- 6) Belum terbangunnya sistem informasi pasar dan market intellegen yang efektif;
- 7) Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal.
- 8) Kurangnya pembinaan usaha dan pelaku distribusi perdagangan.
- 9) Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan.
- 10) Infrastruktur pendukung aktifitas perdagangan belum memadai.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang perindustrian di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum optimalnya binaan kelompok pengrajin.
- 2) Kurangnya upaya dalam pemanfaatan teknologi digital dan industri.
- 3) Belum optimalnya industri pengelolaan pada sektor produksi.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
- 5) Minimnya penyerapan tenaga kerja lokal disektor industri;
- 6) Keterbatasan tenaga fungsional dibidang industri dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada pelaku industri;
- 7) Daya saing mutu desain dan produk industri yang belum maksimal;
- 8) Rendahnya kemampuan SDM pelaku industri;
- 9) Belum memadainya sarana penunjang industri.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum maksimalnya capaian status perkembangan Kawasan Transmigrasi dengan nilai IPK trans sebesar 42,30 "Berkembang".
- 2) Minimnya sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi;
- 3) Sertifikasi lahan yang belum terselesaikan;
- 4) Aksesibilitas ke kawasan permukiman yang belum memadai;
- 5) Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait pembinaan sektor ketransmigrasian;
- 6) Masih terdapat luasan areal pencadangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan permukiman transmigrasi;
- 7) Adanya lahan transmigrasi yang telah diokupasi oleh penduduk daerah sekitar kawasan transmigrasi.

4.1.4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan Unsur pendukung urusan Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

A. SEKRETARIAT DAERAH

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pengoordinasian antar perangkat daerah
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah daerah.
- 3) Belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 4) Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Permasalahan yang terkait yaitu: masih rendahnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan belum adanya instrumen terotomatisasi untuk menilai kinerja kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pemerintah daerah.

B. SEKRETARIAT DPRD

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD. Hal ini ditunjukkan oleh persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD sebesar 85%.

4.1.5. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan Unsur Pengawasan urusan Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

A. PERENCANAAN

Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait perencanaan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Minimnya Sumber Daya Aparatur Perencana yang handal, serta belum terisinya formasi jabatan fungsional perencana;
- 2) Belum optimalnya sinkronisasi antara rencana kerja pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang;
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya dengan APBD;
- 4) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- 5) Belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen penganggaran kabupaten/kota;
- 6) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- 7) Belum optimalnya perencanaan yang integratif antar pemangku kepentingan, adanya keterlambatan pengiriman data menyebabkan keterlambatan dalam proses perencanaan.

B. KEUANGAN

Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait keuangan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum terpenuhinya target Persentase belanja pendidikan (20%)
- 2) Belum terpenuhinya target Persentase belanja kesehatan (10%)
- 3) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Timur terhadap APBD masih di bawah 10%
- 4) pencatatan aset belum optimal dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi
- 5) Belum optimalnya Pengelolaan dan penyusunan satandar harga dan standar barang milik daerah milik daerah

C. KEPEGAWAIAN

Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait kepegawaian di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan ASN untuk melaksanakan kewenangan daerah, disebabkan oleh jumlah pensiun, tiap tahun lebih banyak dari jumlah ASN yang diterima, selain itu rasio jumlah pegawai belum masih memperlihatkan kesenjangan jika dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi.
- 2) Belum adanya peta jabatan dan rencana aksi pengembangan kompetensi aparatur yang kokoh sebagai rujukan pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme aparatur;

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah, serta belum terpetakan dengan baik penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan aparatur yang representatif.

E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Permasalahan unsur penunjang urusan pemerintahan terkait Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Halmahera Timur antara lain:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah yang terintegrasi lintas sektoral.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan, baik untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan maupun hilirisasi hasil litbang untuk menunjang pengembangan sektor-sektor unggulan.
- 3) Masih Kurangnya inovasi daerah di perangkat Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.

4.1.6. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan Unsur pendukung urusan Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur yaitu:

- 1) Belum optimalnya penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.
- 2) Masih kurangnya tenaga auditor untuk melayani pengawasan dan pembinaan di seluruh perangkat daerah.

4.2. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena aktual atau hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara berkala. Karakteristik isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan yang dapat di pertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian permasalahan pembangunan di atas, maka dapat teridentifikasi sejumlah isu strategis terkait perencanaan pembangunan Tahun 2020-2024. Isu-isu strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

4.2.1. ISU STRATEGIS INTERNASIONAL

Dalam isu-isu strategis internasional adalah berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir akhir pada Tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1, Tanpa kemiskinan – Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
2. Tujuan 2, Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan 3, Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Tujuan 4, Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Tujuan 5, Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
6. Tujuan 6, Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Tujuan 7, Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Tujuan 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Tujuan 9, Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
10. Tujuan 10, Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
11. Tujuan 11, Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Tujuan 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Tujuan 13, Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14. Tujuan 14, Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15. Tujuan 15, Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16. Tujuan 16, Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17. Tujuan 17, Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.



Gambar 4. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Adapun isu strategis internasional yang lainnya yaitu berkaitan dengan Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA. Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Tantangan global lainnya yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mentransformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN Tahun 2020.

Sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Harapannya, jika AFTA sukses, negara-negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia, seperti Cina.

Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas AFTA ini, nantinya tidak akan ada hambatan tarif, ataupun hambatan non-tarif untuk negara anggota ASEAN. Skema *Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5 persen, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dengan

adanya kebijakan-kebijakan terkait AFTA, tentu akan menyusul tantangan serta peluang yang akan dihadapi negara Indonesia, khususnya di sisi bisnis dan ekonomi.

4.2.2. ISU STRATEGIS NASIONAL

A. Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan dipengaruhi oleh pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian nasional yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

Batasan pembangunan meliputi: 1) Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, merujuk keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diberdayakan sebagai modal utama pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan; dan 2) Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (*leverage*) yang tinggi bagi pembangunan nasional, serta mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV Tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yaitu:

- 1) Kesenjangan;
- 2) Tata kelola pemerintahan yang baik;
- 3) Pembangunan berkelanjutan;
- 4) Ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 5) Modal sosial dan budaya; dan
- 6) Transformasi digital.

Keenam pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Terkait dengan arahan pengembangan wilayah Maluku/Maluku Utara, prioritas pembangunan akan dilakukan pada kerangka koridor pertumbuhan yang meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Selatan; serta koridor pemerataan meliputi Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku/Maluku Utara akan mencakup kegiatan prioritas:

- 1) Pengembangan sektor unggulan;
- 2) Pengembangan kawasan strategis;
- 3) Pengembangan kawasan perkotaan;
- 4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan
- 5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

B. Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan sektor unggulan di wilayah Maluku Utara meliputi:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan meliputi pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan tangkap dan budidaya, dan nikel;
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan
- 3) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Morotai dan WPP 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).

C. Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis meliputi: 1) Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda; 2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai; 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau Morotai, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda; 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; serta 5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.

D. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pengembangan kawasan perkotaan meliputi: 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kota Ternate dan pembangunan Kota Baru Sofifi dan 2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

E. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi meliputi: 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital di 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara; 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan Tahun 2019, selama maksimal 3 Tahun (2020 – 2022), yaitu Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur; 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 6 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku Utara; 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Daruba; 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Morotai; 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai; 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada Tahun 2020 mencakup 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota pada Tahun 2023; dan 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu

Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan Tahun 2024, yaitu 4,38 persen di Provinsi Maluku Utara; dan 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Maluku dan sekitarnya; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan c. Peningkatan konservasi hutan.

F. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020-2024 antara lain:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah;
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Mortai, dan Kabupaten Pulau Taliabu;
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu;
- 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
 - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral;
 - g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - h. Pembentukan bank tanah;
 - i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan;
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:

- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;
- 15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
- a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
 - b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
 - c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
 - d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
 - f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
 - g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
 - j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

4.2.3. ISU STRATEGIS PROVINSI MALUKU UTARA

Isu strategis pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang penting dan mendesak untuk diselesaikan, kebijakan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025, kebijakan dalam RPJM Nasional 2020-2024, serta tujuan-tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun Visi dan Misi serta Janji Kerja Gubernur/ Wakil Gubernur juga menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Dari berbagai perspektif tersebut teridentifikasi 14 isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, yang dikelompokkan ke dalam (6) enam isu utama, yaitu: Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM); Pemerataan infrastruktur dan daya saing wilayah; Kemandirian dan daya saing ekonomi; Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; Harmoni sosial dan kondusifitas wilayah; dan Tata kelola pemerintahan dan kesetaraan. Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut.

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di Maluku Utara lima tahun kedepan semakin tidak mudah. Diperlukan suatu lompatan kuantum (*quantum leap*) kebijakan untuk dapat memenuhi sasaran pembangunan jangka panjang daerah

yang mengamanatkan kualitas SDM berada di atas rata-rata nasional pada Tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara terus meningkat, namun masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan disparitas IPM antar wilayah kabupaten/kota yang semakin melebar. Demikian pula Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan pencapaian IPM dari perspektif keadilan antara laki-laki dan perempuan, juga terus meningkat namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Isu-isu strategis dalam kelompok Isu strategi utama yang pertama ini terdiri dari 5 (lima) isu strategis, yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Tantangan pembangunan kesehatan Maluku Utara kedepan adalah tentang menghasilkan generasi yang sehat agar mampu menjalani kehidupan secara produktif. Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, memberikan keyakinan bahwa masih banyak persalinan di luar fasilitas kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten untuk itu. Masih tingginya prevalensi *stunting* dan *wasting* pada balita akan membebani pembangunan kedepan jika tidak ditangani secara dini. Demikian pula pada angka prevalensi dan insidensi penyakit menular maupun tidak menular, meskipun masih dalam rentang yang dapat dikendalikan, namun kecenderungannya yang terus meningkat memerlukan perhatian yang seksama. Sistem-sistem kesehatan di seluruh wilayah perlu segera diperkuat, baik secara aksesibilitas maupun mutu pelayanan, serta jaminan kesehatan semesta untuk memastikan penduduk miskin/ rentan miskin memperoleh haknya untuk hidup sehat.

Kedua, Peningkatan taraf pendidikan, kesempatan belajar dan apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah. Tantangan pembangunan pendidikan Maluku Utara kedepan tentang menghasilkan SDM yang terdidik dan berkarakter. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari lemahnya dukungan kebijakan masa lalu untuk mengatasi persoalan putus sekolah dan perluasan akses belajar berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah jika tidak ditangani dengan segera akan memberikan persoalan baru di masa depan. Mereka yang putus sekolah akan memasuki pasar kerja sebagai angkatan kerja yang kurang terdidik, pada lapangan kerja kurang produktif dan pendapatan kurang layak, yang tentunya akan mempengaruhi produktifitas daerah yang saat ini juga masih rendah. Tantangan lainnya adalah tentang menyediakan sarana dan prasarana belajar yang berkualitas di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas SDM juga perlu diimbangi dengan penguatan karakter. Pemajuan khasanah kebudayaan daerah hendaknya tidak terbatas pada muatan lokal dalam kurikulum sekolah, melainkan dapat ditransformasikan ke dalam kehidupan keseharian masyarakat, serta dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Ketiga, Peningkatan peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan. Angkatan kerja Maluku Utara didominasi oleh kaum muda usia >15-40 tahun, namun dengan produktifitas yang masih rendah. Mereka menguasai pasar kerja namun pada sektor informal yang tidak memberikan jaminan pendapatan tetap karena status pekerjaan yang kurang produktif. Pembudayaan olahraga selain diharapkan menjadi sarana untuk menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat dan produktif, juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk berprestasi yang memberikan kebanggaan bagi daerah serta jaminan kesejahteraan bagi pelakunya. Namun hingga saat ini harapan tersebut belum tercapai.

Keempat, Peningkatan kualitas perempuan dan anak. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menjadi target yang harus dicapai pada 2030. Hal ini karena perempuan dan anak dalam hal ini paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Namun hingga saat ini masih terjadi tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Maluku Utara.

Kelima, Peningkatan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan. Persoalan paling krusial dalam pembangunan SDM berkualitas di Maluku Utara adalah bukan sekedar menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk. Perbaikan tata kelola kependudukan sangat penting untuk memastikan keakurasian pengambilan kebijakan lintas sektor, demi meningkatkan efektifitas pemberian intervensi bagi para penduduk yang benar-benar membutuhkan.

Arahan RPJMN 2020-2025 memposisikan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu dari tujuh agenda pembangunan nasional. Demikian pula, pembangunan SDM merupakan fokus utama yang meliputi hampir seluruh tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

B. Pemertaraan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah

Isu-isu strategis dalam kelompok Isu strategi utama yang kedua ini terdiri dari 3 (tiga) isu strategis, diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar. Menjamin akses atas air dan sanitasi yang aman dan layak, serta akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua, adalah tujuan dalam SDGs yang harus dicapai pada Tahun 2030. Akses air dan sanitasi yang aman dan layak dan terjangkau di Maluku Utara masih rendah berada di bawah rata-rata secara Nasional. Rasio elektrifikasi terus meningkat tapi belum merata antar wilayah. Mengurangi luas kawasan kumuh juga masih memerlukan perhatian.

Kedua, Peningkatan konektifitas yang mendorong integrasi wilayah. Salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mempercepat transformasi digital. Ini akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Maluku Utara karena masih banyak desa/UPT yang belum terakses

jaringan telekomunikasi seluler yang merupakan harapan utama di tengah kendala geografis daerah. Infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara terus dibangun untuk menghubungkan antar wilayah, dari pusat-pusat pertumbuhan ke desa-desa. Namun masih ada desa/UPT yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang tahun. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang sudah ada juga perlu ditingkatkan, yaitu dengan mengembangkan sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau. Hal ini mengingat kesenjangan daya saing transportasi dan logistik antar daerah yang sangat tinggi.

Ketiga, Pemerataan pengembangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah Maluku Utara lebih rendah dari rata-rata Nasional. Namun di tengah keterbatasan informasi yang disediakan indeks tersebut, tipologi kawasan wilayah menunjukkan bahwa setengah dari sepuluh wilayah pada tahun 2018 dalam status daerah relatif tertinggal. Ini tentunya tantangan yang tidak mudah mengingat masih banyak Desa dengan status desa tertinggal menurut Indeks Pembangunan Desa.

C. Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi

Arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 meminta pencapaian di Tahun 2025, yaitu pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, tingkat pengangguran di bawah 10 persen dan kemiskinan di bawah 10 persen. Ketiga sasaran tersebut telah dicapai. Namun kemandirian dan daya saing ekonomi masih belum terwujud. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mencerminkan transformasi struktural yang mensyaratkan bergesernya sektor sekunder sebagai penopang utama ekonomi daerah melalui tumbuhnya industri pengolahan yang memberikan nilai tambah. Turunnya tingkat pengangguran tidak dibarengi dengan tersedianya kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak. Berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak diimbangi dengan efektifitas penanggulangan kemiskinan untuk menjaga agar kesenjangan antar penduduk miskin tidak semakin melebar. Isu strategis utama yang ketiga ini terdiri dari 3 (tiga) isu strategis, diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan kualitas kemandirian pangan dan kesejahteraan petani/nelayan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, serta memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tantangan kedepan dalam pembangunan pangan Maluku Utara adalah meningkatkan kualitas kemandirian pangan, yaitu bagaimana meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, serta kelautan perikanan yang disertai dengan upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan membuat pangan dapat disimpan untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/nelayan. Hilirisasi hasil tanaman perkebunan yang merupakan tulang punggung utama sebagian masyarakat Maluku Utara juga memerlukan perhatian utama.

Kedua, Peningkatan investasi bernilai tambah yang memperluas kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak. Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan meminta untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang memberikan lapangan pekerjaan yang layak, serta industrialisasi berkelanjutan. Investasi bernilai tambah di Maluku Utara masih di dominasi sektor pengolahan dan pemurnian mineral (*smelterisasi*). Tantangan kedepan adalah bagaimana mendorong hilirisasi yang lebih luas pada sektor pertanian dan perikanan dimana kedua sektor merupakan tulang punggung utama sebagian besar masyarakat Maluku Utara. Sektor pariwisata yang menyimpan begitu banyak potensi masih belum berkontribusi secara optimal bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut merupakan arahan dalam RPJPD.

Ketiga, Peningkatan efektifitas pengentasan kemiskinan dengan memperkuat ekonomi rakyat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Tantangan pengentasan kemiskinan Maluku Utara adalah bagaimana mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan masuk langsung ke jantung kemiskinan, yaitu perbaikan daya beli dengan membangun kemandirian. Agenda-agenda filantropi dengan memberikan bantuan tunai secara langsung tetap diperlukan untuk menjaga disparitas antar penduduk miskin tidak semakin melebar. Upaya-upaya membangun kemandirian ekonomi rakyat merupakan tantangan yang sesungguhnya mengingat struktur perekonomian Maluku Utara didominasi oleh kelompok ini.

D. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Isu ini menjadi sangat strategis mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati; melindungi dan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; serta mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Kerangka ini sejalan dengan arahan RPJPD untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan.

E. Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah

Isu ini menjadi strategis merujuk pada arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 yang mengisyaratkan untuk meningkatkan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat yang tercermin dari semakin menurunnya sikap saling mencurigai, ketegangan dan potensi konflik antar kelompok maupun antar golongan masyarakat, serta meningkatnya kerjasama antar kelompok masyarakat dalam berbagai bentuk yang positif, konstruktif dan berkesinambungan; serta tertanamnya kembali nilai-nilai “**Marimoi Ngone Futuru**” sebagai ciri identitas masyarakat Maluku Utara dalam. Kondisi harmonis dan kondusif diperlukan untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meminta untuk mendorong masyarakat damai.

F. Tata Kelola Pemerintahan dan Kesetaraan

Isu menjadi strategis merujuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum optimal yang berdampak pada masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Kondisi ini tergambar melalui rendahnya skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah, pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas lembaga pemerintahan, transparansi lembaga pemerintah diukur melalui kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan tata kelola ini juga hendaknya mampu menata kembali sistem pengelolaan keuangan daerah, maupun dengan mengakomodasi peran ke-litbang untuk turut menentukan arah dan strategi pembangunan melalui kajian dan litbang (*research based policy*) serta penguatan lembaga sertifikasi pemerintah (LSP).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meminta untuk menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Tantangan reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola juga perlu menyentuh peningkatan kerjasama pembangunan melalui revitalisasi kemitraan, mencakup kemitraan global, kemitraan antara pemerintah dengan swasta, serta kemitraan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil, terutama dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di provinsi Maluku Utara. Disamping itu, penggunaan teknologi dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang sangat penting untuk pencapaian pelaksanaan pembangunan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga perlu menjadi perhatian penting, utamanya untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagaimana arahan RPJPD, bahwa terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi untuk mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemberian kemudahan berinvestasi, keberpihakan pada masyarakat miskin melalui prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas kelembagaan.

4.2.4. ISU STRATEGIS KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Isu strategis pembangunan merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang penting dan mendesak untuk diselesaikan, kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Timur 2005-2025, kebijakan dalam RPJM Nasional 2020-2024, serta tujuan-tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Nasional dan Provinsi Maluku Utara, serta target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, isu strategis Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 dikelompokkan ke dalam (5) lima isu utama, yaitu: 1) Kependudukan dan Sumber Daya manusia, 2) Infrastruktur dan kewilayahaan, 3) Pembangunan Ekonomi, 4) Reformasi Birokrasi dan 5) Pertahanan Keamanan dan Hukum.

1. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Dalam berbagai aspek pembangunan, penduduk memainkan peran yang sangat penting. Selain penyedia tenaga kerja dan tenaga usahawan yang dibutuhkan, penduduk juga berfungsi mengorganisasikan dan menggerakkan berbagai faktor produksi lain dalam proses produksi untuk menghasilkan output pembangunan. Saat ini, penduduk usia produktif di Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebanyak 60.258 jiwa atau 63,47% yang tersebar pada 18 sektor lapangan usaha, yang berkontribusi secara positif terhadap pembangunan daerah. Potensi penduduk tersebut merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya mewujudkan kemajuan daerah, yang dibaringi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter sosial yang positif.

Masyarakat Halmahera Timur memiliki sikap hidup yang berperadaban dan tercermin melalui interaksi sosial dan hubungan kemasyarakatan. Perilaku dan sikap hidup tersebut senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kebersamaan, serta menerima keterbukaan dan kemajuan, sehingga melahirkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Prinsip hidup yang demikian merupakan karakter masyarakat Halmahera Timur yang khas, menjadi suatu modal yang sangat berharga jika terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan peradaban dewasa ini. Disamping itu, modal tersebut merupakan suatu kekuatan besar untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang yang dilandasi nilai-nilai luhur, budaya, agama, sosial politik, hukum serta rasa persatuan dan kesatuan dalam upaya mewujudkan masyarakat Halmahera Timur aman damai dan bersahaja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan mendasar yang bersifat fenomenal baik pada karakteristik penduduknya maupun sumber daya manusianya. Karakteristik demografi kabupaten ini ditandai dengan distribusi penduduk yang masih timpang antar kecamatan, kualitas dan tingkat kehidupan ekonomi penduduk yang masih relatif rendah serta ketidak seimbangan antara angkatan kerja dengan peluang/ kesempatan kerja.

Selain itu, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Capaian Pembangunan pada aspek pendidikan dapat dilihat antara lain pada indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,05 tahun 2016 menjadi 7,39 pada tahun 2020, selanjutnya untuk Harapan Lama Sekolah juga terus meningkat, yaitu masing-masing 7,77 tahun (2016) menjadi 8,26 tahun (2020). Demikian juga APK Pendidikan dasar terus meningkat dari 95,18 tahun 2016 menjadi 98,20 pada tahun 2020, untuk APM Pendidikan capaiannya 13,30 tahun 2016 menjadi 12,60 di tahun 2020.

Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas

pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan.

Perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Di Halmahera Timur, Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2016 sebesar 17 dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 27. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB sudah menunjukkan belum mengalami kemajuan. Demikian juga pada periode yang sama, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 jiwa terus menunjukkan kenaikan, pada tahun 2016 capaiannya sebesar 217 kemudian pada tahun 2029 menjadi 458.

Disamping itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan tingkat prevalensi stunting di Halmahera Timur (41,5%) secara regional berada di posisi paling terkahir. Dengan demikian untuk bidang kesehatan perlu perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur dimulai dari peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan diseluruh wilayah.

2. Infstruktur dan Kewilayahaan

Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah merupakan salah satu syarat mendasar bagi suatu daerah untuk berkembang. Olehnya itu, pembangunan sarana dan prasarana masih terus diprioritaskan. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah selain dimaksudkan untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, disamping itu juga untuk mendukung perkembangan daerah di berbagai sektor.

Tantangan pengembangan wilayah di Halmahera Timur adalah aksesibilitas dan konektifitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi – potensi daerah. hingga saat ini Halmahera Timur diperhadapkan pada berbagai kelemahan khususnya pada wilayah utara-utara yang belum didukung dengan ketersediaan infrastruktur jalan. Wilayah tersebut masih terdapat 21,48 KM jalan yang belum terbangun yakni pada ruas Bololo-Jara jara sepanjang 10,45 KM. Sedangkan untuk Ruas jalan Wayamli-Patlean-Jara Jara serta Ruas jalan Labi Labi-Bololo hingga saat ini masih membutuhkan peningkatan prioritas penanganan.

Kemudian, sektor transportasi laut berupa layan tol laut juga belum dimaksimalkan. Selain wilayah utara-utara, terdapat pula jalan penghubung antara Kabupaten yang belum terhubung yakni Ruas Maba-Sagea sepanjang 11,03 KM yang menghubungkan Ibukota Kabupaten Halmahera Timur dengan Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah.

Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI).

Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum, penyediaan system pengelolaan air limbah (sanitasi). Disisi lain pemenuhan Backlog rumah yang masih terbatas dan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.

Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternative dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.

Tantangan lainnya dalam pengembangan wilayah di Halmahera Timur adalah penyediaan Infrastruktur untuk mendukung pengembangan sectoral berbasis Kawasan-Kawasan Strategi seperti Kawasan Transmigrasi Kota Maba, Kawasan Perkebunan Terpadu Sondo Sondo, Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni Dan Saramaake, Kawasan Perikanan Terpadu Sill Kawasan Perikanan Terpadu Dabo Dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara.

Disamping hal itu, isu pembangunan juga memfokuskan untuk program SDG's yaitu rehabilitasi/pembangunan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan serta pembangunan infrastruktur sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air pertanian dengan tidak melupakan penyediaan ruang terbuka hijau.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur juga harus ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang. Dalam upaya meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan, harus diperhitungkan secara cermat daya dukung lingkungan serta mengoptimalkan pengembangan seluruh potensi wilayah yang tersedia. Sebagai contoh mendorong membangun ruang terbuka hijau, *green building*, restorasi lingkungan dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang didesain untuk menurunkan laju masukan sedimen ke tampungan air dimana pengurangan sedimen pada tampungan air akan memberikan tambahan volume air. Manfaatnya sama dengan pembangunan bendungan atau embung baru, dengan masalah sosial dan biaya yang bisa jauh lebih rendah. Disamping hal tersebut, berdasarkan identifikasi potensi bencana yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan mitigasi bencana sehingga tercipta konsep

bangunan yang memenuhi standar tahan bencana untuk mengurangi kerugian materiil maupun jiwa, misal jika membangun jalan di lahan yang memiliki kemiringan $>45^\circ$ harus direncanakan juga tembok penahan tanah sehingga mengurangi resiko bahaya longsor atau konstruksi rumah tinggal yang berada di bantaran sungai paling tidak dibuat konsep bangunan panggung atau mulai membuat roadmap evakuasi korban bencana pada lokasi-lokasi bencana, sehingga pelaksanaan evakuasi pada saat terjadi bencana dan rehabilitasi pasca bencana menjadi mudah.

3. Perekonomian Daerah

Kabupaten Halmahera Timur memiliki kekayaan sumber-sumber ekonomi yang sangat potensial, baik pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan serta perikanan dan kelautan. Kekayaan potensi sumber daya ekonomi tersebut merupakan salah satu kekuatan (sektor basis) dalam mendukung pertumbuhan sektor riil untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Hingga Tahun 2020, struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Timur bertumpuh pada sektor pertambangan dan galian, pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan. Secara kumulatif dari ketiga sektor tersebut, sektor pertambangan dan galian Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur dengan nilai PDRB 31,74 persen (PDRB Harga Berlaku). Kemudian sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 20,79 persen dan perdagangan memberikan kontribusi terbesar ketiga dengan nilai PDRB sebesar 13,05 persen.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur rata-rata lima tahun terakhir sebesar 6,65 persen. Sektor-sektor ekonomi yang dominan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,84 persen, kemudian disusul oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,7 persen dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,82 persen. Sedangkan sektor-sektor selain ketiga sektor tersebut, secara umum memberikan kontribusi lebih kecil.

Selain kekayaan potensi sumber daya ekonomi yang menjadi kekuatan pendukung pembangunan daerah, Kabupaten Halmahera Timur senantiasa mengoptimalkan berbagai sektor-sektor riil lainnya yang kurang dominan, diantaranya: pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor lainnya. Kondisi tersebut diatas, menggambarkan bahwa ketiga sektor ekonomi yang dimaksud bukan hanya menjadi sektor-sektor ekonomi yang paling dominan dalam pembentukan produksi daerah, tetapi juga menjadi sektor penentu utama laju pembangunan ekonomi daerah.

Keberadaan sektor-sektor yang belum dikelola secara optimal pada dasarnya merupakan sektor-sektor yang potensial. Hanya saja masih dihadapkan dengan berbagai kelemahan, diantaranya: kuantitas dan kualitas SDM yang masih rendah, sarana dan prasarana produksi yang minim, akses pasar yang masih rendah, lahan pertanian dan perkebunan yang rentan terhadap bencana alam, minimnya inovasi hasil produksi serta pertumbuhan dan sebaran sentra industri dan usaha kecil menengah diperdesaan masih rendah. Sektor-sektor potensial tersebut, merupakan

kekuatan sumber daya ekonomi yang mampu mendorong peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaannya dengan konsep pengembangan wilayah berbasis kawasan prioritas.

4. Reformasi Birokrasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah beserta perangkat pendukungnya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan pelayanan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedisiplinan dan ketekunan, kecakapan dan kemampuan profesional aparatur, norma dan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat dan stabilitas daerah yang kondusif, dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal untuk keberhasilan pembangunan.

Saat ini, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebanyak 2.831 orang, dengan dukungan sarana dan prasarana yang telah dimiliki saat ini merupakan suatu kekuatan yang terus dikembangkan guna lebih memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Namun harus diakui bahwa, masih terdapat berbagai kelemahan khususnya pada perangkat sistem, pranata dan kelembagaan dalam menunjang tugas-tugas pemerintahan yang masih belum optimal, seperti kualitas aparatur yang belum sesuai antara latar belakang keilmuan dengan tugas dan fungsi yang diemban. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, mengakibatkan menurunnya kredibilitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah dimata publik. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme, peningkatan sumber daya aparatur melalui melalui diklat kepemimpinan, diklat profesi, Beasiswa pendidikan formal dan lainnya.

Selanjutnya, Perbaikan Penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel untuk menjamin kualitas pelayanan public dimulai dari Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya, Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan, Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) dan Pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Pertahanan Keamanan dan Hukum

Salah satu prasarat utama dalam menjaga, melindungi, memelihara dan menjamin keberlangsungan pembangunan daerah adalah adanya dukungan stabilitas keamanan yang tercipta melalui sistem pertahanan keamanan yang kuat. Disamping itu, penataan fungsi dan sistem hukum yang mendukung penyelenggaraan paradigma yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta meningkatkan penerapan dan penegakan hukum yang memberi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat,

merupakan syarat mutlak yang diperlukan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat hukum, teratur aman dan damai.

Masyarakat Halmahera Timur pada hakekatnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan. Hal tersebut sesungguhnya merupakan kekuatan potensial yang strategis, dalam menjamin terbentuknya sistem pertahanan keamanan yang kuat dan penegakan fungsi hukum sebagai pilar pendukung utama keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang aman dan berkeadilan.

Namun demikian, dibutuhkan dukungan pranata dan sistem kelembagaan pertahanan keamanan dan hukum di Kabupaten Halmahera Timur, dalam ini terlihat jelas dari jumlah dan kualitas aparat keamanan dan hukum yang masih terbatas serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum yang masih relatif rendah.



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**2021
2025**

BAB 5

VISI MISI
TUJUAN DAN SASARAN

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi harus dapat menggambarkan gambaran ideal bagi masyarakat atau daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang bagi semua elemen atau stakeholder dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No.86 Tahun 2017). Visi daerah ini disusun dengan memperhatikan aspek substantif yang berpijak pada isu strategis, maupun aspek teknis berupa susunan kata yang sederhana dan mudah dipahami. Selain berpijak pada aspek substantif dan teknis, visi juga harus selaras dengan visi provinsi sebagai upaya mendukung pembangunan yang terarah. Dalam pembangunan lima tahun mendatang (2021-2025), Kabupaten Halmahera Timur memiliki visi:

“Halmahera Timur Maju dan Sejahtera”

Visi di atas merupakan lanjutan dan penegasan dari visi pembangunan sebagai keberlanjutan dan apresiasi pada pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah obyektif. Memiliki makna berupa harapan untuk terus bergerak progresif menuju kondisi ideal. Disamping itu, Visi ini juga selaras dengan visi Maluku Utara 2020-2024 yaitu Maluku Utara Sejahtera. Visi Maluku Utara Sejahtera memiliki arah yang difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, keseimbangan dan stabilitas pembangunan, pembangunan infrastruktur, kehidupan sosial yang beradab dan berbudaya, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Melihat pertimbangan tersebut, visi pembangunan lima tahun Kabupaten Halmahera Timur mendatang selanjutnya dijabarkan dalam dua kata kunci, yaitu:

1. Maju

Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Halmahera Timur sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah melalui pembangunan berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur yang merata serta terintegrasi dimana pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.

2. Sejahtera

Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah derajat kehidupan sosial

ekonomi masyarakat Halmahera Timur yang semakin membaik ditandai dengan terpenuhinya sandang, pangan dan papan masyarakat secara merata.

Kondisi masyarakat yang sejahtera ditunjukkan oleh terbebasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan serta terwujudnya tatanan kehidupan aman, tentram, sentosa, dan makmur yang dilakukan melalui tahapan maju dan sejahtera. Selain itu, sejahtera juga ditandai dengan meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, hingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan bermakna pula secara sosial dan budaya, yaitu ketika masyarakat memiliki kehormatan sosial yang menjadikannya sebagai modal untuk berpartisipasi aktif, serta budaya yang menjadikan setiap komponen merasa memiliki daerah dan bertanggung jawab atas berjalannya pembangunan daerah. Kondisi tersebut akan menciptakan situasi yang kondusif untuk menjalankan roda pembangunan. Namun untuk mencapainya dibutuhkan syarat berupa tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor privat dan organisasi masyarakat sipil.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan dasar, infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan harmoni sosial di tengah masyarakat Halmahera Timur.

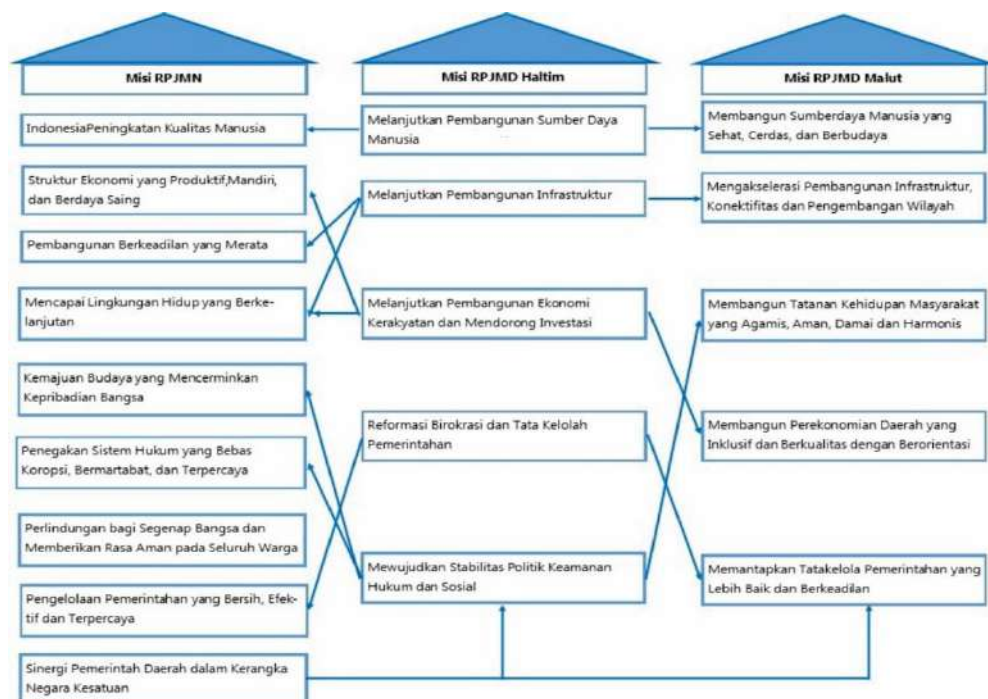
5.2. MISI DAERAH

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi kabupaten 2021-2025 sebagai Kabupaten Halmahera Timur yang maju dan sejahtera diperlukan adanya misi sebagai perwujudan dari penjabaran visi. Adapun misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 adalah:

1. **Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia**, dengan tujuan melanjutkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas yakni Sumber Daya Manusia Halmahera Timur yang agamais, berbudaya, berkarakter, yang dilakukan melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Agar tercipta tingkat pendidikan dan penalaran masyarakat yang cerdas dan kompetitif yang sehat dan tangguh. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan keempat misi lainnya, sehingga masyarakat Halmahera Timur mampu berdiri sejajar dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya.
2. **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur**, Misi ini merupakan penopang bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi bertujuan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah, melalui konsep pengembangan berbasis kawasan-kawasan strategis kabupaten. Peningkatan penyediaan infrastruktur wilayah yang dilakukan, masih diprioritaskan pada pembangunan dan perbaikan prasarana transportasi jalan di seluruh wilayah

Kabupaten Halmahera Timur, untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah.

3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi**, Misi ini merupakan kerangka acuan untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni untuk peningkatan produksi hasil sektor-sektor pertanian, perkebunan serta perikanan dan kelautan, yang dilakukan melalui konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal, serta mendorong peran sektor pariwisata, koperasi, UMKM, industri, perdagangan serta membuka peluang investasi melalui pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif, berbasis partisipasi masyarakat.
4. **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**, Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan melaksanakan amanat otonomi daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang difokuskan pada penataan sistem, aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada profesionalisme aparatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan paradigma pembangunan.
5. **Mewujudkan Stabilitas Politik Keamanan Hukum dan Sosial**, misi ini merupakan payung pelaksanaan keempat misi lainnya. meningkatkan pemahaman dibidang hukum kepada masyarakat guna menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik dengan melalui peningkatan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai melalui pengembangan peran aktif seluruh komponen masyarakat dengan pendekatan agaman, adat dan budaya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.



Gambar 5. 1 Diagram Alir Interelasi Dokumen RPJMD Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara Dan RPJMN

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia

RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 sangat memperhatikan perencanaan pembangunan sumber daya manusia. Manusia merupakan modal utama pembangunan daerah untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Hal ini juga mengacu pada misi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 yakni Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya. Keberhasilan pembangunan dan kualitas hidup sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana pembangunan, oleh karenanya kualitas sumberdaya manusia harus menjadi prioritas penting pembangunan. Penyiapan SDM yang sehat, cerdas, terdidik, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. RPJMN 2020-2024 juga mengamanatkan bahwa Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Pada misi 1 “**Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia**” RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 mencakup dalam beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, RSUD, pariwisata dan kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, dan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia. Dalam upaya mewujudkannya, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaiannya. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran yaitu :

- a. Mewujudnya sumber daya manusia Halmahera Timur yang berkualitas, yakni SDM Halmahera Timur yang agamais, berbudaya, berkarakter, cerdas, kompetitif, sehat dan tangguh, dengan sasaran dari tujuan ini adalah :
 1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Indeks Pendidikan
 2. Meningkatnya pelestarian budaya dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Persentase Budaya yang dilestarikan
 3. Meningkatnya akses dan kualitas Kesehatan dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Indeks Kesehatan
 4. Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Indeks pembangunan olahraga
 5. Meningkatnya Peran dan produktivitas Pemuda dalam Pembangunan dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Indeks Peran dan produktivitas Pemuda
 6. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Tata Kelola Kependudukan dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Laju Pertumbuhan Penduduk
- b. Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial, dengan sasaran dari tujuan ini adalah :
 1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target capaian Misi 1 tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 disajikan secara detail pada tabel 5.1. sebagai berikut.

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2020	Target					Data Akhir RPJMD	
					2021	2022	2023	2024	2025		
MISI 1 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA											
1. Mewujudnya sumber daya manusia Halmahera Timur yang berkualitas, yakni SDM Halmahera Timur yang agamais, berbudaya, berkarakter, cerdas, kompetitif, sehat dan tangguh.	1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	N/A	68,85	69,06	69,28	69,49	69,72	69,95
	1.2	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase Budaya yang dilestarikan	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%
	1.3	Meningkatnya akses dan kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	N/A	70,56	71,74	72,92	74,1	75,28	75,28
	1.4	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks pembangunan olahraga	Indeks	N/A	0,35	0,36	0,37	0,38	0,40	0,40
	1.5	Meningkatnya Peran dan poduktivitas Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Peran dan produktivitas Pemuda	Indeks	N/A	70,5	72	73,5	75	76,5	76,5
	1.6	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Tata Kelolah Kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%
2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial	1.7	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	80,62	81,16	81,7	82,24	82,78	83,32	83,32

2. Misi 2 Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Misi ini merupakan turunan dari Visi yang telah ada khususnya mengenai melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan pemukiman. Selain itu, misi ini juga memperhatikan keselarasan dengan misi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 yakni mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah. Misi ini masih memberikan ruang bagi diimplementasikannya pembangunan (ketersediaan) dan peningkatan (akses dan kualitas) infrastruktur yang menjadi urusan wajib dasar. Pemerataan pembangunan dari sisi akses dan kualitas infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, dan pemukiman yang layak masih menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan. Selain peningkatan yang sudah ada, beberapa titik kritis di Halmahera Timur masih membutuhkan ketersediaan sejumlah infrastruktur tersebut. Fokus pembangunan infrastruktur merupakan terjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Namun, pandemi Covid-19 telah membuat realisasi pembangunan tidak mencapai target dan juga menjadikan hampir seluruh proyek pembangunan tertunda. Selain itu, juga membawa dampak negatif bagi industri pembangunan, salah satunya bisnis konstruksi di Kabupaten Halmahera Timur.

Fokus infrastruktur Kabupaten Halmahera Timur melanjutkan dan memutakhirkan infrastruktur eksisting di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena Infrastruktur dan kondisi ekonomi selalu berjalan berdampingan. Fokus infrastruktur akan mampu melanjutkan proyek pembangunan yang sebelumnya tertunda. Penyelesaian proyek infrastruktur skala regional khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Timur juga dinilai akan menguntungkan di tahun-tahun ke depan, manfaatnya mencakup kemudahan untuk mendistribusikan bahan bangunan, pangan, dan peralatan medis ke daerah Selatan-Selatan maupun Utara-Utara.

Pembangunan infrastruktur harus bisa dimengerti sebagai ruang tempat bertemunya berbagai dimensi dan sektor pembangunan. Fokus peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Halmahera Timur juga dapat menjadi penjamin terealisasinya perencanaan yang sudah dirumuskan. Misi ini akan diturunkan ke dalam rumusan yang mencakup bidang yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informasi, perdagangan perindustrian koperasi dan UKM, penyelesaian perizinan, pertanahan dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana daerah.

Dalam upaya mewujudkan misi 2 **“Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur”** RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaiannya. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah berbasis Kawasan-kawasan strategis kabupaten dengan sasaran dari tujuan ini adalah :
 1. Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2. Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Indeks Ketimpangan Wilayah
3. Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Cakupan Layanan Telekomunikasi
4. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Indkes Konektivitas Wilayah
5. Terpenuhinya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar
- b. Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Suitanable development)
 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Indeks Nilai Lingkungan Hidup

Rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target capaian Misi 2 tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 yang disajikan secara detail pada tabel 5.2.

Tabel 5. 2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 2

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2020	Target					Data Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	
MISI 2 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR										
2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah berbasis Kawasan-kawasan strategis kabupaten	2.1 Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks	0,27	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,21
	2.2 Meningkatnya Layanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.3 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Indkes Konektivitas Wilayah	Indeks	0,75	0,8	0,92	0,94	0,96	0,98	0,98
	2.4 Terpenuhinya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	Indeks	80,32	82,6	84,2	86,2	88,7	90,3	90,3
3 Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Suitanable development)	3.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Nilai Lingkungan Hidup	Indeks	80,02	80,61	80,81	81,02	81,26	82,00	82,00

3. Misi 3 Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi

Pembangunan Ekonomi adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas Pembangunan Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut dilandasi masalah dan tantangan yang dihadapi serta arahan kebijakan pembangunan dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Pembangunan ekonomi Kabupaten Halmahera Timur menghadapi dua tantangan utama yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Pertama, meningkatkan daya saing industri daerah melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di seluruh daerah dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa, jiwa wirausaha, dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat. Proses desentralisasi ekonomi ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi biasanya selalu dikaitkan dengan iklim bisnis yang subur. Namun nyatanya, hal ini juga tidak luput dari peran investasi dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Halmahera Timur. Apabila ingin memprediksi atau menganalisis kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Timur, baik saat ini maupun dimasa mendatang, maka yang perlu diketahui adalah angka pertumbuhan ekonomi terkini, peran investasi, serta upaya yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Upaya menghitung kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Timur ini tidak luput dari tiga komponen penting, yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, serta sektor ekspor-impor, dimana ketiga komponen tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang rendah menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan investasi dan untuk menarik investor masuk ke wilayah Kabupaten Halmahera Timur harus tersedia **data base** tentang produk-produk yang menjadi acuan dalam proses pengembangan melalui studi tentang komoditi unggulan, potensial, andalan dan berkembang.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah Halmahera Timur. Pembangunan ekonomi, secara bertahap dilakukan dengan transformasi dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip dasar mengelola secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (*inovasi*) iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan, mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, serta mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.

Untuk memperkuat daya saing daerah Kabupaten Halmahera Timur, pembangunan daerah diarahkan untuk: (1) Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan di dalam daerah, (2) Mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, (3) Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan pengetahuan, dan (4) Membangun infrastruktur yang maju serta melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur.

Pemilihan pengembangan perwilayahan ini antara lain didasari oleh: (1) Sektor riil belum bergerak dan belum menggambarkan kondisi yang sama di Kabupaten Halmahera Timur, meskipun indikator makro daerah nampak membaik, (2) Dimensi kewilayahan, desentralisasi, pemberdayaan potensi lokal harus menjadi cara berpikir, ideologi dan langkah-langkah pembangunan, dan (3) Kemajuan wilayah yang seimbang dalam jangka panjang akan memperbaiki distribusi penduduk, mengurangi tekanan pada daya dukung lingkungan. Salah satu kebijakan pembangunan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Timur sekaligus mengantisipasi dimulainya era perdagangan bebas adalah kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi prioritas unggulan yang diusahakan dalam wadah aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Misi ini akan diturunkan ke dalam rumusan yang mencakup bidang yaitu pertanian, ekonomi, kelautan dan perikanan, pariwisata dan kebudayaan, perdagangan perindustrian koperasi dan UKM, pemberdayaan masyarakat desa, serta transmigrasi dan tenaga kerja.

Dalam upaya mewujudkan misi 3 **“Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi”** RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaiannya. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan produksi pertanian, perkebunan serta perikanan dan kelautan, dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal, dengan sasaran dari tujuan ini adalah :
 1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
 - ⇒ Pertumbuhan PDRB sektor perikanan
 2. Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Pertumbuhan omzet koperasi
 - ⇒ Pertumbuhan omzet usaha mikro kecil
 - ⇒ Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
 - ⇒ Persentase Pertumbuhan Nilai ekspor

- ⇒ Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan
- ⇒ Pertumbuhan PAD sektor pariwisata
- 3. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- b. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, dengan sasaran dari tujuan ini adalah :
 - 1. Meningkatnya nilai investasi dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Persentase pertumbuhan investasi
 - 2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Tingkat partisipasi angkatan kerja
 - ⇒ Tingkat kesempatan kerja

Rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target capaian Misi 3 tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 yang disajikan secara detail pada tabel 5.3.

Tabel 5. 3. Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2020	Target					Data Akhir RPJMD	
					2021	2022	2023	2024	2025		
MISI 3 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN DAN MENDORONG INVESTASI											
4 Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Halmahera Timur dengan mendorong pertumbuhan Sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan Serta Pariwisata dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal	4.1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	13,30%	13,8	14,3	14,8	15,3	15,8	15,80%
			Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	2,50%
	4.2	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan omzet koperasi	%	N/A	39,05%	0,50%	0,25%	0,25%	0,49%	50,00%
			Pertumbuhan omzet usaha mikro kecil	%	N/A	39,05%	0,50%	0,25%	0,25%	0,49%	50,00%
			Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	11,65%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	14,15%
			Persentase Pertumbuhan Nilai ekspor	%	N/A	25%	30%	35%	40%	45%	45%
			Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan	%	2,00%	1,50%	1,10%	1,20%	1.3 %	1.4%	5,80%
			Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	0,29%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	10,00%
	4.3	Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	N/A	73	75	77	79	81	81
	5 Meningkatkan nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	5.1	Meningkatnya nilai invetsasi	Persentase pertumbuhan investasi	%	55,00%	9,09%	9,09%	9,02%	8,90%	9,32%
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja			Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,06%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	74,24%
			Tingkat kesempatan kerja	%	96,14%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	97,36%

4. Misi 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Misi 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana telah dimatkan RJMN 2020-2024 yakni **Misi 8** (delapan) yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Misi 4 (empat) juga bersesuaian dengan **Misi 5** (lima) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 yang mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak. Dimana pada misi ini fokus pada penyelesaian berbagai permasalahan dan tantangan birokrasi yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Dalam menyusun arah kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan fokus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu langkah strategis dan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam sistem dan struktur birokrasi pemerintahan dengan memperhitungkan perubahan lingkungan kerja dan kecenderungan dinamika sosial ekonomi masyarakat lokal secara universal. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Partisipasi masyarakat sebagai pelaksanaan hak menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam menyediakan pelayanan pemerintah dapat fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang strategis, dengan demikian fokus pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi lebih optimal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam reformasi birokrasi akan berpengaruh pula pada reformasi pelayanan publik. Maka, untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut seperti yang tertera pada UU Nomor 25/2009 bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi sangat penting.

Birokrasi pemerintahan merupakan unsur yang sangat vital dalam menentukan arah untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah menjadi bagian dan upaya untuk memperkuat daerah karena melalui reformasi birokrasi peran pemerintahan untuk menjawab tantangan, karena reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi akan tetapi dapat mengubah pola pikir dan pola budaya birokrasi untuk berbagai peran dalam tata kelola pemerintahan.

Misi 4 ini akan diturunkan ke dalam rumusan yang mencakup bidang yaitu hukum, pengelolaan keuangan dan aset daerah, inspektorat, perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Komunikasi Informatika Persandian dan

Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemuda dan olahraga, Kecamatan dan semua bidang perangkat daerah yang terkait.

Dalam upaya mewujudkan misi 4 **“Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan”** RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaiannya. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran yaitu :

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada good governance, dengan sasaran dari tujuan ini adalah :
 1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Jumlah penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi
 - ⇒ Meningkatnya jumlah SKPD dengan laporan keuangan WTP
 2. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Persentase rekomendasi penelitian dan inovasi daerah
 - ⇒ Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran
 3. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan daerah dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Persentase SDM yang tangguh dan berdaya saing
 4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran:
 - ⇒ meningkatnya kinerja pelayanan publik
 - ⇒ Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan
 5. Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
 - ⇒ Terciptanya partisipasi masyarakat, media cetak dan elektronik dalam pengawasan pembangunan daerah
 6. Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan
 - ⇒ Keterlibatan lembaga adat dalam proses pembangunan di Halmahera Timur
 7. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Cakupan peran serta pemuda dalam pembangunan

Rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target capaian Misi 4 tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 yang disajikan secara detail pada tabel 5.4.

Tabel 5. 4. Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 4

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2020	Target					Data Akhir RPJMD	
					2021	2022	2023	2024	2025		
MISI : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLAH PEMERINTAHAN											
6 Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada good governance	6.1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi	%	66%	70%	75%	80%	90%	100%	100%	
		Meningkatnya jumlah SKPD dengan laporan keuangan WTP	%	25%	35%	45%	55%	70%	85%	85%	
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	6.2 Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan inovasi daerah	%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	
		Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggran	%	41,25%	46,25%	78,75%	92,50%	97,50%	100%	100%	
	6.3 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah	Persentase SDM yang tangguh dan berdaya saing	%	N/A	40%	50%	60%	70%	75%	75%	
			%	N/A	45%	50%	60%	75%	80%	80%	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2020	Target					Data Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	
6.4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase kinerja pelayanan publik	%	NA	21,84%	29,72%	33,11%	36,28%	38,44%	38,44%
		Persentase Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terciptanya partisipasi masyarakat, media cetak dan elektronik dalam pengawasan pembangunan daerah	%	N/A	N/A	50,00%	75%	90%	100%	100%
6.6	Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan	Keterlibatan lembaga adat dalam proses pembangunan di Haltim	%	66,67%	69,00%	71,33%	73,67%	76,00%	78,33%	78,33%
6.7	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Cakupan peran serta pemuda dalam pembangunan	%	60%	33%	35%	38%	40%	43%	43%

5. Misi 5 Mewujudkan Stabilitas Politik Keamanan Hukum dan Sosial

Stabilitas sangat terkait dengan politik, hukum dan keamanan (polhukam), stabilitas politik artinya kontrol, penyeragaman dan pengekangan terhadap hak politik warga masyarakat Kabupaten Halmahera Timur. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, stabil dapat diartikan keadaan yang tenang dan jauh dari berbagai macam gejolak. Sehingga stabilitas (keadaan/kondisi stabil) di bidang politik, hukum dan keamanan tentu sangat dibutuhkan oleh setiap arga masyarakat, bahwa stabilitas keamanan harus dimulai dengan menumbuhkan kembangkan rasa cinta terhadap tanah air, sehingga timbul kesadaran tentang kepedulian dan rasa memiliki. Hal tersebut sejalan dengan arahan RPJMN 2020-2024 bahwa pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Pada Misi 5 (lima) ini juga selaras dengan misi 3 (tiga) RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 yakni "Membangunan tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman Damai dan Harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan diberbagai bidang". Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Halmahera Timur yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal seni dan budaya daerah di arahkan unrtuk memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan rasa aman dan kenyamanan lingkungan sosial. Fokus dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu menguatnya intoleransi, demokrasi yang prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, masih adanya perilaku korupsi, adanya kesenjangan demokrasi pada aspek Kebebasan Sipil, Penegakan hukum yang belum optimal serata Capaian Reformasi Birokrasi di tingkat Kabupaten Halmahera Timur tergolong masih rendah.

Pembangunan bidang Polhukhankam diawali oleh aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Proses tersebut diharapkan menciptakan penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah yang profesional untuk mewujudkan masyarakat Halmahera Timur yang adil dan sejahtera, maka masyarakat perlu mengawasi proses pembangunan sebagai bahan aspirasi pada proses politik berikutnya. Siklus tersebut akan berjalan apabila didukung oleh situasi yang kondusif. Dalam pelaksanaannya dilandasi oleh tata kelola yang baik dan dibingkai dengan koridor hukum yang berlaku serta keamanan daerah yang kondusif.

Partai politik yang menjadi salah satu aktor kunci dalam upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Partai politik belum memiliki konsistensi peran, dan secara internal, partai politik terjebak pada praktik-praktik oligarki sehingga belum mampu menjawab kepentingan rakyat. Ada gejala konsolidasi kekuatan elite politik lama dan munculnya orang kuat lokal yang berpotensi menyebabkan arus balik (*setback*) pada konsolidasi

demokrasi. Peningkatan biaya politik menjadi fenomena yang perlu diwaspadai karena dapat mengancam keterpurukan politik, hukum, kemanan dan sosial. Hal ini terkait dengan transparansi dan akuntabilitas partai politik. Tingginya biaya politik menuntut partai untuk mendapatkan sumber pendanaan yang sering kali bersifat ilegal.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait dengan hal tersebut, pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat pula disebut sebagai kebijakan. Kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia. Kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dapat dimaknai sebagai pelayanan sosial di bidang kesehatan, pelayanan sosial dibidang pendidikan, pelayanan sosial di bidang perumahan, serta layanan sosial personal, serta kesejahteraan sosial (*social welfare policy*).

Pembangunan sosial tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat yang belum dapat ditangani secara tuntas, kesenjangan interpretasi dengan menggunakan pengetahuan budaya suatu masyarakat terhadap kenyataan sosial yang melingkupinya, sehingga masalah sosial dapat dimaknai sebagai perbedaan interpretasi antar kelompok sosial terhadap gejala yang ada dasarnya tidak mampu dipahami secara baik oleh sekelompok sosial masyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dapat dilihat pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Keterbatasan aspek produksi dapat juga menyebabkan kemiskinan, kemiskinan dapat menyebabkan kurang pangan dan gizi yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan fisik dan mental. Sedangkan faktor eksternal termasuk intervensi pemerintah, seperti program dari pemerintah yang pada awalnya bertujuan untuk pemecahan masalah, ternyata menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan/atau menimbulkan suatu jenis masalah yang sebelumnya tidak ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perumusan pembangunan guna menanggulangi berbagai permasalahan tersebut didasarkan atas perumusan tujuan, sasaran dan target yang tepat, efisien dan transparan.

Misi 5 ini akan diturunkan ke dalam rumusan yang mencakup bidang yaitu sekretariat DPRD, kesatuan bangsa politik, satuan polisi pamong praja, sosial, dan penanggulangan bencana daerah. Dalam upaya mewujudkan misi 5 **“Mewujudkan Stabilitas Politik Keamanan Hukum dan Sosial”** RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaiannya. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran yaitu :

- a. Terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik melalui peningkatan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai masyarakat

melalui pendekatan agama, adat dan budaya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan, dengan sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Persentase ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
3. Terwujudnya kerukunan, toleransi dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Persentase penguatan nilai-nilai sosial masyarakat
4. Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator sasaran:
 - ⇒ Persentase kesiapsiagaan terhadap bencana

Rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target capaian Misi 5 tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 yang disajikan secara detail pada tabel 5.5.

Tabel 5. 5. Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran dan Target Capaian Misi 5

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2020	Target					Data Akhir RPJMD	
					2021	2022	2023	2024	2025		
Misi 5 : MEWUJUDKAN STABILITAS POLITIK, KEAMANAN, HUKUM DAN SOSIAL											
7	Terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik melalui peningkatkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai masyarakat melalui pendekatan agama, adat dan budaya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan	7.1 Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	57%	68%	80%	97%	100%	100%
		7.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	%	N/A	93%	93%	93%	93%	93%	93%
		7.3 Terwujudnya kerukunan, toleransi dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat	Persentase penguatan nilai-nilai sosial masyarakat	%	N/A	25%	75%	75%	75%	75%	75%
		7.4 Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban	Nilai	0,826	0,873	0,849	0,896	0,92	0,92	0,92

5.4. KONSISTENSI HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

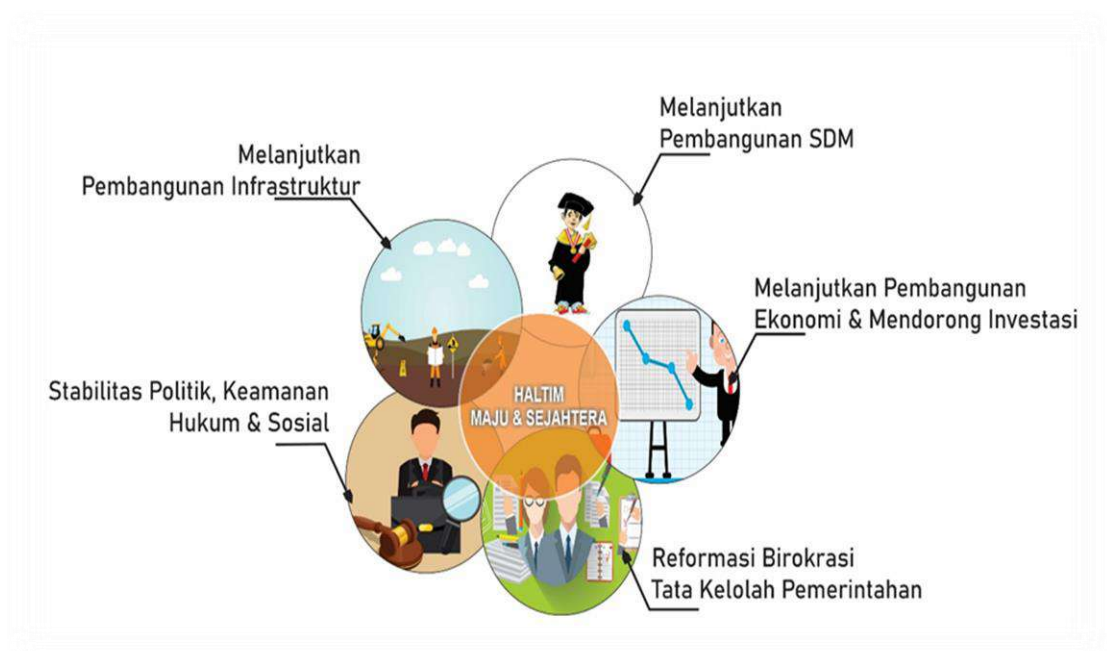
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi syarat yang perlu diperhatikan demi untuk menjamin kesesuaian dari visi hingga sasaran yang nantinya akan dijabarkan kedalam strategi, arah kebijakan hingga ke rencana program. Berangkat dari syarat tersebut, berikut merupakan penjabaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diuraikan dalam matriks berikut:

Tabel 5. 6. Matriks Keterkaitan Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<i>Visi : Halmahera Timur yang Maju dan Sejahtera</i>		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Mewujudnya sumber daya manusia Halmahera Timur yang berkualitas, yakni SDM Halmahera Timur yang agamais, berbudaya, berkarakter, cerdas, kompetitif, sehat dan tangguh	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
		Meningkatnya pelestarian budaya
		Meningkatnya akses dan kualitas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat
		Meningkatnya Peran dan produktivitas Pemuda dalam Pembangunan
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Tata Kelola Kependudukan
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
Misi 2 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang berbasis Kawasan-kawasan strategis kabupaten	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah
		Meningkatnya Layanan Telekomunikasi
		Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah
		Terpenuhinya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau
Misi 3 : Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi	Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Sustainable development)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan produksi pertanian, perkebunan serta perikanan dan kelautan, dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi
		Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah
	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya nilai investasi Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Visi : Halmahera Timur yang Maju dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 4 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada <i>good governance</i>	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
		Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan daerah
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
		Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan Stabilitas Politik Keamanan Hukum dan Sosial	Terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik melalui peningkatan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai masyarakat melalui pendekatan agama, adat dan budaya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan	Terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
		Terwujudnya kerukunan, toleransi dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan terhadap bencana

Konsistensi ini mengilustrasikan saling keterhubungan antara masing-masing misi yang akan dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan lima tahun kedepan untuk mewujudkan **Halmahera Timur yang maju dan sejahtera**.



Gambar 5. 2 Keterkaitan Visi Misi Kabupaten Halmahera Timur



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**2021
2025**

BAB 6

STRATEGI

**ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN 2021 – 2025

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Yang ditetapkan berdasarkan visi-misi kepala daerah dan di selaraskan dengan visi-misi pembangunan jangka menengah daerah. Strategi mengacu pada cara yang dipilih agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Strategi merupakan cerminan dari solusi-solusi terpilih yang secara eksplisit menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan pada waktu yang sama, keduanya juga dapat secara simultan menjawab isu-isu strategis. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan dan dijelaskan, perlu dipertegas melalui Tujuan, Sasaran dan Strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun 2021-2025. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:

6.1.1. STRATEGI UMUM

Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 merupakan manifestasi dari semangat, nilai dan harapan tulus Bupati dan Wakil Bupati guna mewujudkan visi dan misi akan dilakukan 5 (lima) strategi umum, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Halmahera Timur yang agamais, berbudaya, berkarakter, cerdas, kompetitif, sehat dan tangguh
2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah melalui konsep pengembangan berbasis kawasan.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan dan mendorong peluang investasi.
4. Peningkatan Pengembangan Kualitas, Tata Kelola Pemerintah, Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
5. Peningkatan pemahaman dibidang hukum kepada masyarakat guna menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik.

Lebih jauh, penjabaran atas strategi pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu dari tahun 2021 hingga tahun 2025 sebagai berikut :

Strategi 1 : Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Halmahera Timur yang agamais, berbudaya, berkarakter.

Modal sosial dan kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan unsur sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu daerah dalam menghadapi era globalisasi dan era lepas landas. Modal sosial yang besar harus diubah menjadi suatu aset yang

bermanfaat bagi pembangunan daerah. Tindakan cermat dan bijaksana harus dapat diambil dalam membekali dan mempersiapkan modal sosial sehingga benar-benar menjadi aset pembangunan daerah yang produktif dan bermanfaat serta berkualitas untuk pendampingan dalam proses pengembangan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki di daerah tersebut.

Modal sosial dan sumber daya manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem sosialnya dan memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Semakin tinggi kualitas modal sosial dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan pembangunan daerah tersebut. Demikian sebaliknya, semakin rendah kualitas modal sosial dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah maka akan berdampak pada kemunduran pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur membuat strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Halmahera Timur yang agamais, berbudaya, berkarakter yang dilakukan melalui proses pendidikan dan peningkatan keterampilan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Agar tercipta tingkat pendidikan dan penalaran masyarakat yang cerdas dan kompetitif yang sehat dan tangguh, sehingga masyarakat Halmahera Timur mampu berdiri sejajar dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya.

Strategi 2 : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah melalui konsep pengembangan berbasis kawasan.

Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah merupakan salah satu syarat mendasar bagi suatu daerah untuk berkembang. Olehnya itu, pembangunan sarana dan prasarana masih terus diprioritaskan. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah selain dimaksudkan untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, disamping itu juga untuk mendukung perkembangan daerah di berbagai sektor. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten membuat strategi meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah, melalui konsep pengembangan berbasis kawasan-kawasan strategis kabupaten. Peningkatan penyediaan infrastruktur wilayah yang dilakukan, masih diprioritaskan pada pembangunan dan perbaikan prasarana transportasi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur, untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Strategi 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan dan mendorong peluang investasi.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki kekayaan sumber-sumber ekonomi yang sangat potensial, baik pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan serta perikanan dan kelautan. Kekayaan potensi sumber daya ekonomi tersebut merupakan salah satu kekuatan (sektor basis) dalam mendukung pertumbuhan sektor riil untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi baik pada wilayah daratan maupun perairan, khususnya komoditas ikan dan hasil perikanan lainnya, hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan belum dilakukan secara maksimal. Untuk kehutanan dan pertambangan dilakukan secara eksploitatif, sehingga berdampak pada pemusatan kekuatan ekonomi di sektor modern perekonomian.

Kondisi ini menyebabkan timbulnya kesenjangan ekonomi antar antar wilayah, dan antar kelompok dalam masyarakat. Dampak lain yang timbul adalah kerusakan lingkungan dan perlambatan pengembangan aktivitas ekonomi rakyat terutama di sektor tradisional perekonomian.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten membuat strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan dan mendorong peluang investasi dilakukan melalui konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal, serta mendorong peran sektor pariwisata, koperasi, UMKM, industri, perdagangan serta membuka peluang investasi melalui pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif, berbasis partisipasi masyarakat.

Strategi 4 : Peningkatan Pengembangan Kualitas, Tata Kelola Pemerintah, Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah beserta perangkat pendukungnya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan pelayanan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedisiplinan dan ketekunan, kecakapan dan kemampuan profesional aparatur, norma dan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat dan stabilitas daerah yang kondusif, dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal untuk keberhasilan pembangunan.

Keberadaan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Halmahera Timur, dengan dukungan sarana dan prasarana yang telah dimiliki saat ini merupakan suatu kekuatan yang terus dikembangkan guna lebih memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Namun harus diakui bahwa, masih terdapat berbagai kelemahan khususnya pada perangkat sistem, pranata dan kelembagaan dalam menugaskan tugas-tugas pemerintahan yang masih belum optimal, seperti kualitas aparatur yang belum sesuai antara latar belakang keilmuan dengan tugas dan fungsi yang diemban. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, mengakibatkan menurunnya kredibilitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah dimata publik. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten membuat strategi Peningkatan Pengembangan Kualitas, Tata Kelola Pemerintah, Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi melalui Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang difokuskan pada penataan sistem, aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada profesionalisme aparatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan paradigma pembangunan.

Strategi 5 : Peningkatan pemahaman dibidang hukum kepada masyarakat guna menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik.

Salah satu prasarat utama dalam menjaga, melindungi, memelihara dan menjamin keberlangsungan pembangunan daerah adalah adanya dukungan stabilitas keamanan yang tercipta melalui sistem pertahanan keamanan yang kuat. Disamping itu, penataan fungsi dan sistem hukum yang mendukung penyelenggaraan paradigma

yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta meningkatkan penerapan dan penegakan hukum yang memberi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, merupakan syarat mutlak yang diperlukan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat hukum, teratur aman dan damai.

Masyarakat Halmahera Timur pada hakekatnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan. Hal tersebut sesungguhnya merupakan kekuatan potensial yang strategis, dalam menjamin terbentuknya sistem pertahanan keamanan yang kuat dan penegakan fungsi hukum sebagai pilar pendukung utama keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang aman dan berkeadilan.

Namun demikian, dibutuhkan dukungan pranata dan sistem kelembagaan pertahanan keamanan dan hukum di Kabupaten Halmahera Timur, dalam ini terlihat jelas dari jumlah dan kualitas aparat keamanan dan hukum yang masih terbatas serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum yang masih relatif rendah. Berdasarkan hal tersebut, Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten membuat strategi Peningkatan pemahaman dibidang hukum kepada masyarakat guna menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik melalui peningkatan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai melalui pengembangan peran aktif seluruh komponen masyarakat dengan pendekatan agaman, adat dan budaya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.

6.1.2. STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana disampaikan di atas, selain Strategi Umum sebagai pijakan merumuskan Arah Kebijakan tahunan RPJMD, maka juga dirumuskan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang berguna sebagai pijakan pelaksanaan program Perangkat Daerah yang menjelaskan pilihan tindakan/kebijakan untuk memilih program dan kegiatan agar dapat mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan secara detail dalam tabel berikut ini.

Tabel 6. 1 Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Tujuan dan Sasaran

VISI : HALMAHERA TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Mewujudnya sumber daya manusia Halmahera Timur yang berkualitas, yakni SDM Halmahera Timur yang agamais, berbudaya, berkarakter, cerdas, kompetitif, sehat dan tangguh.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah hingga ke pelosok daerah secara berkelanjutan
		Meningkatnya pelestarian budaya	Mengidentifikasi seni dan budaya lokal yang dapat dilestarikan serta Peningkatan ketersediaan data kebudayaan
		Meningkatnya akses dan kualitas Kesehatan	Peningkatan jangkauan akses kesehatan diseluruh wilayah dan khususnya pada masyarakat miskin
		Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Peningkatan akses layanan sarana dan parasarana olahraga

VISI : HALMAHERA TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 2 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR		Meningkatnya Peran dan produktivitas Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan kapasitas pemuda
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Tata Kelolah Kependudukan	Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara universal dan inklusif
		Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah berbasis Kawasan-kawasan strategis kabupaten	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah	Peningkatan pengawasan pemanfaatan dan pengendalian ruang
		Meningkatnya Layanan Telekomunikasi	Peningkatan jangkauan layanan telekomunikasi
		Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan jaringan jalan dan jembatan
		Terpenuhinya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar
		Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Suitable development)	Meningkatkan perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
MISI 3 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN DAN MENDORONG INVESTASI	Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Halmahera Timur dengan mendorong pertumbuhan Sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan Serta Pariwisata dengan	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi	Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor basis
		Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata	Penguatan kapasitas manajerial usaha Koperasi dan UKM Peningkatan akses bantuan permodalan UKM

VISI : HALMAHERA TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal	terhadap pertumbuhan ekonomi Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	Diversifikasi pangan berkelanjutan
	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya nilai invetsasi Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
MISI 4 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLAH PEMERINTAHAN	Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada good governance	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan daerah	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas data, penelitian dan pengembangan
		Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan	Peningkatan pemahaman masyarakat penting peran serta masyarat dalam pembangunan
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas lembaga kepemudaan
Misi 5 : MEWUJUDKAN STABILITAS POLITIK, KEAMANAN, HUKUM DAN SOSIAL	Terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik melalui peningkatan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai masyarakat melalui pendekatan	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Penedakatan simultan antara program pemerintahan daerah dengan penguatan partisipasi masyarakat secara mandiri
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	
		Terwujudnya kerukunan,	Peningkatan akses jaminan kesejahteraan sosial berbasis data

VISI : HALMAHERA TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	agama, adat dan budaya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan	toleransi dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat	elektronik yang valid dan terintegrasi
		Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial

6.2. ARAH KEBIJAKAN

6.2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Mengacu pada strategi pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025. Pada sisi lain, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Timur Tahun juga harus sinergis dan selaras dengan 5 (lima) Sasaran Prioritas nasional tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 6. 1 Pointer Pidato Presiden RI

Selanjutnya, 5 (lima) Sasaran Prioritas di atas menjadi dasar untuk perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Halmahera Timur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2025 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur

Arah Kebijakan				
2021	2022	2023	2024	2025
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan Dasar, peningkatan SDM dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Didukung dengan penguatan nilai – nilai budaya dan keagamaan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan	Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan SDM berkualitas melalui pendekatan inovasi dan pelibatan stakeholders guna mendorong iklim investasi untuk menyongsong era industri	Mengoptimalkan Potensi ekonomi daerah melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan guna mendukung Daya saing yang meritik-beratkan pada sektor-sektor basis melalui peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi	Mewujudkan Visi Pembangunan “Halmahera Timur Maju dan Sejahtera”

Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur di akhir periode perencanaan tahun 2025. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keselarasan Arah Kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antarlevel maupun antara daerah.

6.2.2. ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif dan spasial. Dalam sub bab ini, disajikan deskripsi pendekatan spasial yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur. Dalam konteks mewujudkan keselarasan menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2021-2025, maka strategi dan arah kebijakan kewilayahan ditujukan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan. Adapun rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Halmahera Timur yaitu: ***“Terwujudnya Ruang Kabupaten Halmahera Timur Yang Aman, Nyaman dan Produktif, Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan Dan Perikanan Serta Sumber Daya Lokal Lainnya Yang Berbasis Mitigasi Bencana Dengan Mengedepankan Keterpaduan Pembangunan Pada Berbagai Sektor Dan Keseimbangan Ekologi Menuju Masyarakat Yang Maju Dan Sejahtera”***. Untuk mencapai tujuan penataan ruang tersebut, maka kebijakan dan strategi penataan ruangnya adalah:

A. Kebijakan dan Strategi Perwujudan Struktur Ruang

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhirarki, dengan srategi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan fungsi antara kawasan perkotaan, kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta dengan wilayah sekitarnya;

- b. Mengoptimalkan fungsi kawasan perkotaan yang diarahkan melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan jasa dan distribusi produk-produk perdesaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi fungsi kota;
- c. Mengembangkan kawasan-kawasan perdesaan sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki agar mampu menghasilkan produk sendiri (*one village one product*);
- d. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di wilayah yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.

2. Pengembangan sistem pelayanan perdesaan;

- a. Menjaga keterkaitan antar pusat pelayanan desa dengan pusat pelayanan perkotaan;
- b. Mengembangkan kawasan permukiman perdesaan;
- c. Membentuk permukiman melalui pembangunan rumah khusus; dan
- d. Meningkatkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan

3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur (transportasi telekomunikasi, energi dan sumber daya air) yang merata dan terintegrasi, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Membangun jaringan infrastruktur transportasi darat pada wilayah utara-utara;
- b. Mengembangkan sistem jaringan jalan kolektor primer untuk mengoptimalkan hubungan antara Pusat-pusat Kegiatan Wilayah dengan kawasan-kawasan perdesaan;
- c. Mengoptimalkan sistem jaringan infrastruktur wilayah untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara guna mengintegrasikan Pusat Kegiatan Wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan baru atau PKL;
- d. Mengembangkan sistem transportasi melalui pengembangan terminal angkutan pada kawasan perkotaan, pembangunan terminal barang pada kawasan sentra produksi pertanian.
- e. Mengoptimalkan sistem transportasi laut baik untuk pergerakan orang maupun barang serta untuk melayani kegiatan perikanan berupa pelabuhan pendaratan ikan yang dilengkapi fasilitas sistem rantai dingin.
- f. Mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di daerah kategori blank spot area;
- g. Meningkatkan jaringan energi dan ketenagalistrikan terutama pada wilayah yang belum terlayani baik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
- h. Meningkatkan infrastruktur jaringan sumberdaya air dalam rangka memastikan ketersediaan dan pendistribusian sumber air untuk kegiatan pertanian dan kebutuhan air minum, melalui pembangunan serta rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi pada 7 Daerah Irigasi, serta SPAM pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh fasilitas air minum yang memadai.
- i. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi serta penyehatan lingkungan;
- j. Pengembangan sistem persampahan yang dilakukan melalui penyebaran lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (3R) serta mengoptimalkan layanan pengangkutan dan kegiatan pengolahan akhir sampah di TPA.

4. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Membatasi kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana
- b. Memperbanyak jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana
- c. Membangun prasarana utama mitigasi bencana banjir dan tsunami

B. Kebijakan dan Strategi Perwujudan Pola Ruang

1. Pengembangan Kawasan Lindung, dengan strategi sebagai berikut:

- a. pengawasan dan pemantauan terhadap kawasan lindung dan kawasan konservasi;
- b. Melarang kegiatan budidaya pada kawasan lindung;
- c. Perwujudan kawasan berfungsi lindung sebagaimana rekomendasi dari analisis Satuan Kemampuan Lahan dan Kesesuaian Lahan;
- d. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat dari pengaruh kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- e. Penataan kawasan lindung terutama pada Kawasan Sempadan Sungai (DAS) dan Kawasan Sempadan Pantai;
- f. Mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung; dan
- g. Melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

2. Pengembangan Kawasan Budidaya

- a. Menetapkan kawasan budi daya pada areal yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam utamanya di ruang darat termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. Meningkatkan aksesibilitas ke setiap kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan resiko bencana yang ada;
- c. Pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan, berupa:
 - 1) Mengembangkan potensi komoditas pertanian dan perkebunan unggulan;
 - 2) Mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan;
 - 3) Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan;
 - 4) Mengembangkan produktivitas;
 - 5) Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - 6) Mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan;
 - 7) Mengembangkan kawasan perkebunan terpadu
- d. Mengembangkan kawasan pariwisata, berupa:
 - 1) Mengoptimalkan potensi wisata (aksi dan atraksi);
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung (amenitas);
 - 3) Mengembangkan produk wisata;
 - 4) Meningkatkan efektivitas promosi; dan
 - 5) Meningkatkan sinergi jasa pelayanan pariwisata.
- e. Mengembangkan kawasan industri pertambangan, berupa:

- 1) Mengoptimalkan nilai tamba sektor pertambangan;
- 2) Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung; dan
- 3) Meningkatkan usaha serta teknologi penambangan.
- f. Mengembangkan kawasan perikanan terpadu, berupa:
 - 1) Meningkatkan prasarana dan sarana perikanan;
 - 2) Mengembangkan teknologi perikanan;
 - 3) Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
 - 4) Mengembangkan sistem pusat pelayanan perikanan; dan
 - 5) Mengembangkan komoditas unggulan daerah.
- g. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berupa:
 - 1) Larangan terhadap kegiatan budidaya pada kawasan lindung
 - 2) Pembatasan kegiatan dan bangunan fisik di kawasan rawan bencana yang dilakukan secara selektif berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana
 - 3) Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan terbangun;
 - 4) Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan dan kelestarian pulau-pulau kecil;
 - 5) Penataan penggunaan lahan yang diarahkan pada tertib administrasi pertanahan untuk pemanfaatan ruang yang lebih optimal.

C. Kebijakan dan Strategi Perwujudan Kawasan Strategis

1. Meningkatkan upaya pelestarian pada kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, kelestarian dan keragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan.
2. Membatasi kegiatan budidaya di Kawasan Lindung untuk mencegah kerusakan lingkungan.
3. Pengembangan kawasan-kawasan strategis tematik sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah untuk kepentingan pengembangan ekonomi yang lebih produktif, efisien yang memiliki daya saing:
4. Pemanfaatan sumber daya alam dengan mengedepankan penggunaan teknologi secara optimal;
5. Penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dengan meningkatkatkan serta mempertahankan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan dengan mengoptimalkan fungsi perlindungan serta melestarikan keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem;
6. Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan pusat budaya serta kegiatan pariwisata baik yang berbasis budaya maupun alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus.

6.2.3. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI

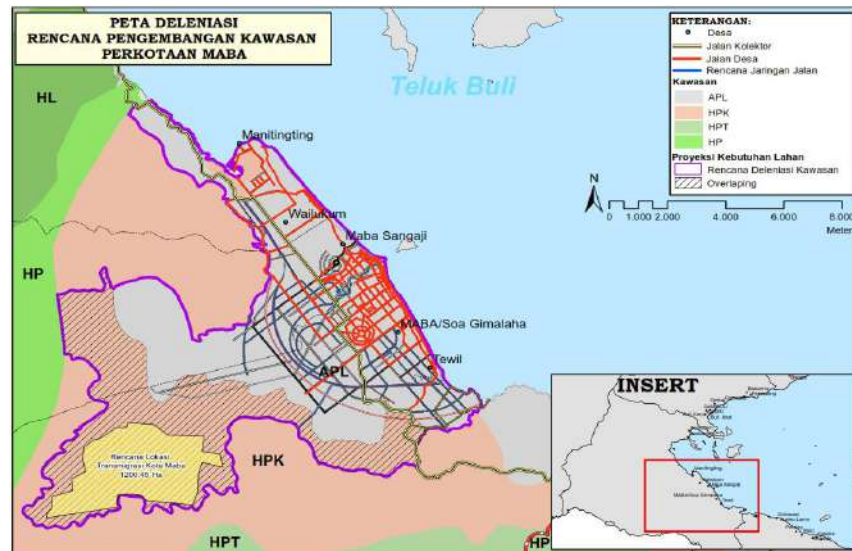
Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya, seperti:

- ⇒ Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kota Maba
- ⇒ Pengembangan Kawasan Sondo-Sondo Sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu
- ⇒ Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni Dan Saramaake Di Kecamatan Wasile Selatan
- ⇒ Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill Di Kecamatan Maba Selatan
- ⇒ Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo Dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara
- ⇒ pengembangan kawasan fayaul-bukutio sebagai kawasan perkotaan baru
- ⇒ Pengembangan Kawasan Perkotaan Maba
- ⇒ Adanya Penetapan Kawasan Industri Smelter Di Buli

Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah ilustrasi konseptual tujuan ini tergambar sebagai berikut :

A. PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA MABA

Wilayah Halmahera Timur merupakan wilayah dengan luasan lahan pertanian tanaman pangan terluas. Upaya pengembangan sektor pertanian ini memberikan tampak terhadap pertumbuhan PDRB. Sumbangsi sektor pertanian terhadap PDRB di setiap tahun mengalami peningkatan. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur selalu berupaya untuk meningkatkan lahan produktif untuk peningkatan jumlah produksi pertanian. Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah daerah yaitu adanya rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Baru di Wilayah Kecamatan Kota Maba. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur terus menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan teknis serta dalam proses penurunan status kawasan. Mengingat kawasan yang direncanakan masih dalam status kawasan Hutan (Hutan Produksi Konversi).



Gambar 6. 2 Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Maba

B. RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN SONDO-SONDO SEBAGAI KAWASAN PERKEBUNAN TERPADU

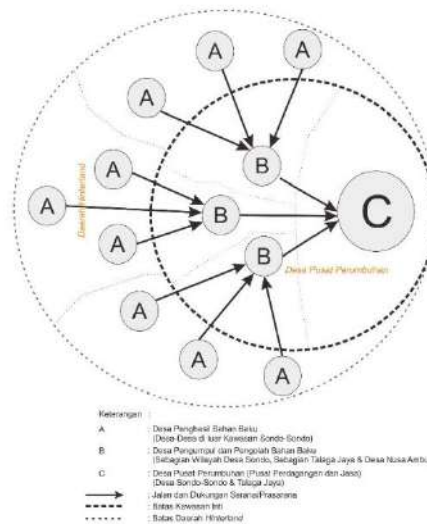
Konsep Pengembangan wilayah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur saat ini, yaitu Konsep Pengembangan berbasis Kawasan. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur saat ini, merencanakan pengembangan beberapa Kawasan Terpadu Baru untuk mendukung kegiatan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kawasan Perkotaan. Salah satu rencana pengembangan Kawasan tersebut yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Sondo-Sondo sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu sebagai upaya pengembangan sektor pertanian sub sektor perkebunan dengan komoditi cengkeh, pala dan kakao.

Konsep pengembangan Kawasan Pedesaan Sondo-Sondo kedepannya diarahkan dengan konsep pola keterkaitan antara Desa Pusat Pertumbuhan dengan Daerah Hinterland dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat distribusi barang dan informasi, pusat pemberdayaan dan penyuluhan agribisnis. Adapun komponen ruang yang direncanakan pada Desa Pusat Pertumbuhan tersebut antara lain: (1) zona perdagangan dan jasa, pusat distribusi barang dan informasi, pusat pemberdayaan dan penyuluhan agribisnis (2) zona pengumpul dan pengolah bahan baku sedangkan untuk zona penghasil bahan baku diarahkan pada daerah hinterland. Dari konsep tersebut, untuk menampung kegiatan – kegiatan diatas diarahkan pada:

1. Zona pusat perdagangan dan jasa, pusat distribusi barang dan informasi, pusat pemberdayaan dan penyuluhan agribisnis diarahkan pada Desa Sondo-Sondo dan Desa Talaga Jaya
2. Zona pengumpul dan pengolah bahan baku diarahkan pada sebagian wilayah Desa Sondo-Sondo, sebagian wilayah Desa Talaga Jaya dan Desa Nusa Ambu

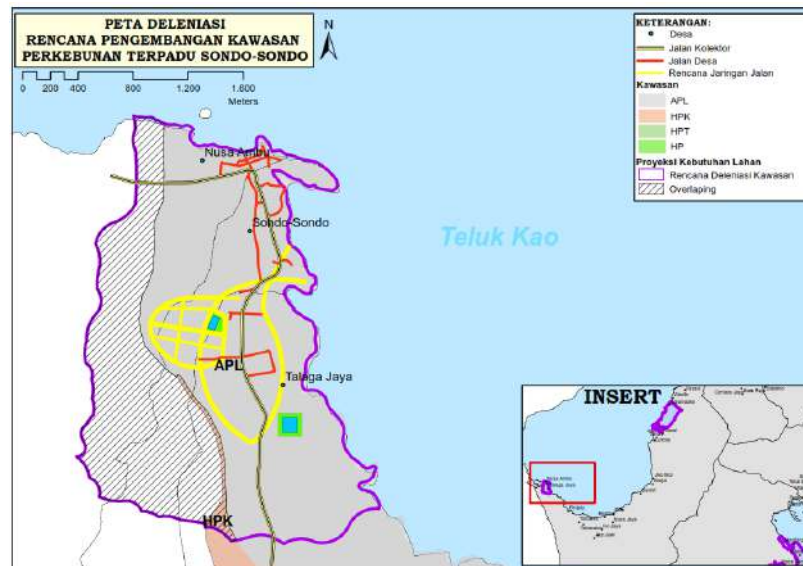
Untuk mewujudkan rencana konsep tersebut diatas, dibutuhkan alokasi ruang pada kawasan tersebut seluas 444,09 Hektar untuk menampung berbagai

kegiatan yang direncanakan. Sedangkan Daerah Hinterland dari kawasan tersebut yaitu desa - desa diluar rencana deliniasi kawasan dan wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada model berikut.



Gambar 6. 3 Model Pengembangan Kawasan Pedesaan Sondo-Sondo

Untuk lebih jelasnya mengenai Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Sondo-Sondo sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. 4 Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan Sondo-Sondo sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu

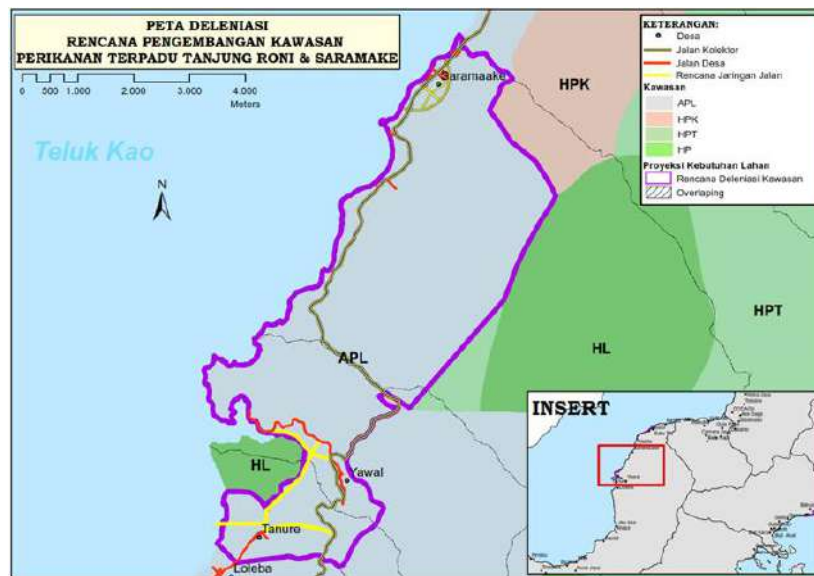
C. RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN TERPADU TANJUNG RONI DAN SARMAAKE DI KEC. WASILE SELATAN

Rencana pengembangan Kawasan terpadu lainnya yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur pada sektor perikanan yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Sarmake Di Kecamatan Wasile Selatan dengan luasan 2.436,60 Hektar. Kawasan tersebut hingga saat ini merupakan Kawasan perikanan tangkap yang sudah berkembang dengan kata lain salah satu Kawasan Perikanan Tangkap

yang memberikan sumbangsi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Halmahera Timur. Produksi perikanan yang unggul pada Kawasan ini yaitu ikan pelagis kecil, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur berupaya untuk mengembangkan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake di Kecamatan Wasile Selatan yang kedepannya berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake dikembangkan dengan menggunakan Konsep Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan tangkap berbasis kawasan. Untuk mewujudkan Rencana Pengembangan Kawasan tersebut diarahkan dengan komponen ruang antara lain (1) Sentra pengelolaan hasil produksi, (2) Sentra pemasaran, (3) Zona jasa perbaikan, (4) Zona ekowisata dan (6) Infrastruktur pendukung.

Untuk mewujudkan rencana pengembangan kawasan tersebut, berdasarkan rencana Deliniasi Kawasan untuk menampung komponen ruang yang direncanakan kedepan, dibutuhkan alokasi ruang dengan luasan 2.436,60 Hektar. Untuk lebih mengenai Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. 5 Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake

D. RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN TERPADU SILL DI KEC. MABA SELATAN

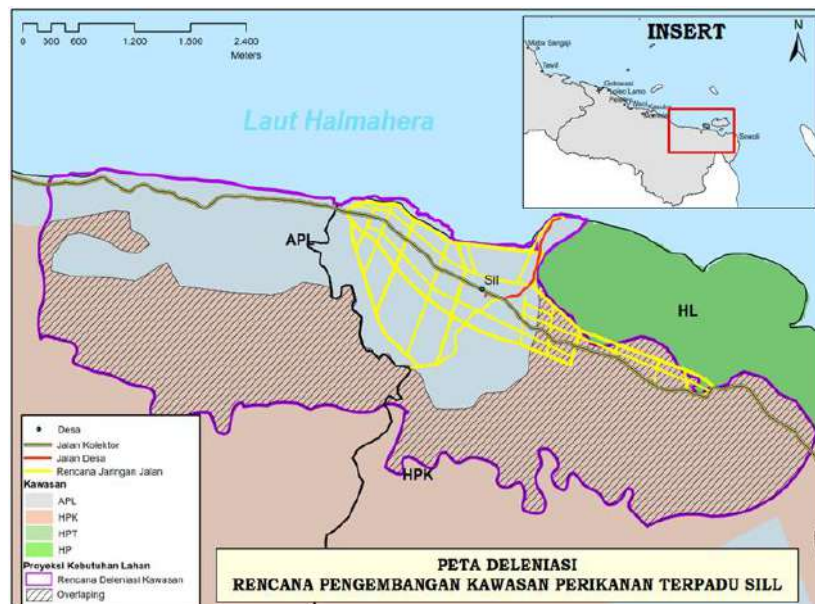
Selanjutnya, kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengembangan wilayah berbasis Kawasan pada sektor perikanan yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba Selatan. Potensi perikanan tangkap pada Kawasan ini antara lain jenis ikan demersal sehingga fokus pengembangan diarahkan pada potensi yang dimiliki. Jumlah produksi perikanan tangkap pada kawasan ini setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDBR Kabupaten Halmahera Timur. Selain kondisi tersebut, kawasan ini memiliki nilai

strategis yang tinggi karena kawasan ini berada pada Wilayah Perbatasan Kabupaten (Perbatasan antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah). Dengan adanya pengembangan kawasan ini, diharapkan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Kabupaten Halmahera Timur, karena berpotensi memperluas areal pemasaran produksi perikanan sampai ke Kabupaten Halmahera Tengah.

Kawasan Perikanan Terpadu Sill dikembangkan dengan menggunakan Konsep Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan tangkap berbasis kawasan. Untuk mewujudkan Rencana Pengembangan Kawasan tersebut diarahkan dengan komponen ruang sebagai berikut.

1. Zona perdagangan dan transportasi perikanan
2. Zona industri pengelolaan hasil produksi
3. Zona bangunan kelautan
4. Zona industri kapal dan jasa perbaikan
5. Zona ekowisata
6. Infrastruktur pendukung

Untuk mewujudkan rencana pengembangan kawasan tersebut, berdasarkan rencana Deliniasi Kawasan untuk menampung komponen ruang yang direncanakan kedepan, dibutuhkan alokasi ruang dengan luasan 1.628,24 Hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



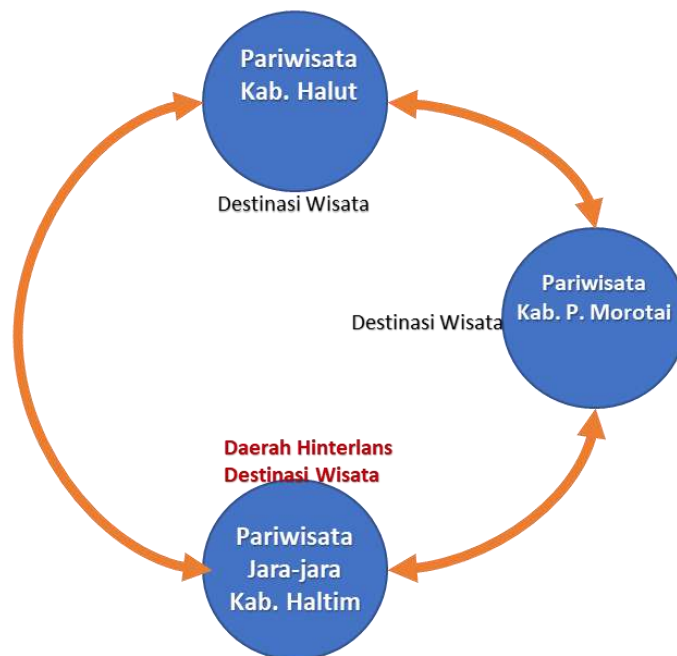
Gambar 6. 6 Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba Selatan

E. RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN TERPADU DABO DAN KAWASAN PARIWISATA JARA-JARA

Kebijakan baru Pemerintah Daerah lainnya terkait pengembangan wilayah berbasis Kawasan yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo yang dipadukan dengan Pengembangan Kawasan Pariwisata Jara-Jara. Keterpaduan dengan Kawasan pariwisata Jara-jara yang diarahkan dengan konsep pengembangan wisata bahari sebagai komplementer dari Kawasan

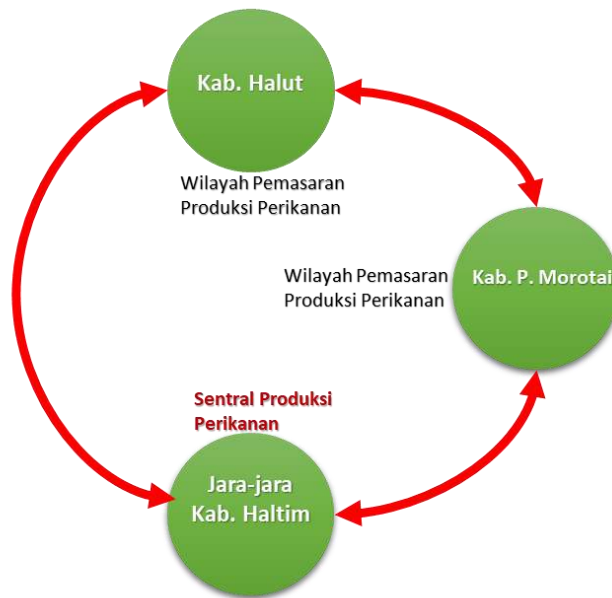
perikanan terpadu. Konsep pengembangan Kawasan yang memadukan dua sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Timur dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi, karena memiliki keterpaduan fungsi yang dapat menunjang satu sama lain. Nilai strategis lainnya yaitu pengembangan Kawasan Perikanan terpadu Dabo dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara ini dapat dipadukan dengan pengembangan sektor perikanan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dan Pengembangan Sektor Perikanan dan sektor pariwisata Kabupaten Pulau Morotai (Segitiga Emas di Provinsi Maluku Utara).

Skenario segitiga emas antara tiga kabupaten dengan keterpaduan pada sektor pariwisata dengan model sebagai berikut.



Gambar 6. 7 Skema Keterpaduan Sektor Pariwisata

Dari skenario diatas, Kawasan Pariwisata Jara-Jara sebagai daerah hinterland untuk destinasi wisata di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai, karena saat ini pariwisata pada dua kabupaten tersebut sudah berkembang cukup pesat. Sedangkan model keterpaduan sektor perikanan antara Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai melalui konsep Kawasan Perikanan Terpadu Dabo yang diposisikan menjadi Sentra Produksi yang difokuskan pada jenis ikan pelagis besar dengan memanfaatkan peluang pasar yang terbentuk di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. 8 Skema Keterpaduan Sektor Perikanan

Keterpaduan ini ditunjang dengan adanya pelabuhan penyeberangan (ASPD) di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan di Kabupaten Halmahera Timur direncanakan pelabuhan penyeberangan (ASPD) dalam satu kesatuan kawasan antara kawasan wisata Jara-Jara dengan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo.

Untuk mewujudkan skenario tersebut, pengembangan kawasan ini direncanakan dengan memadukan model pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pariwisata, dengan asumsi bahwa kedua sektor tersebut saling komplementer. Untuk mewujudkan model tersebut, maka dipadukan beberapa konsep pengembangan antara lain konsep minapolitan dipadukan dengan konsep pengembangan pariwisata yang saling terintegrasi.

Model tersebut didasari dengan adanya ketersediaan sumber daya dari kedua sektor tersebut, dimana dilihat dari keterkaitan ruang, kegiatan dari kedua sektor tersebut memiliki sisi supply dan demand yang saling mendukung. Untuk mematangkan model dan konsep diatas, dibutuhkan strategi pengembangan antara lain *demand side strategi* dan *supply side strategi*. Kedua strategi ini akan memaksimalkan masing-masing komponen baik yang ada pada komponen kawasan perikanan terpadu dan komponen kawasan pariwisata.

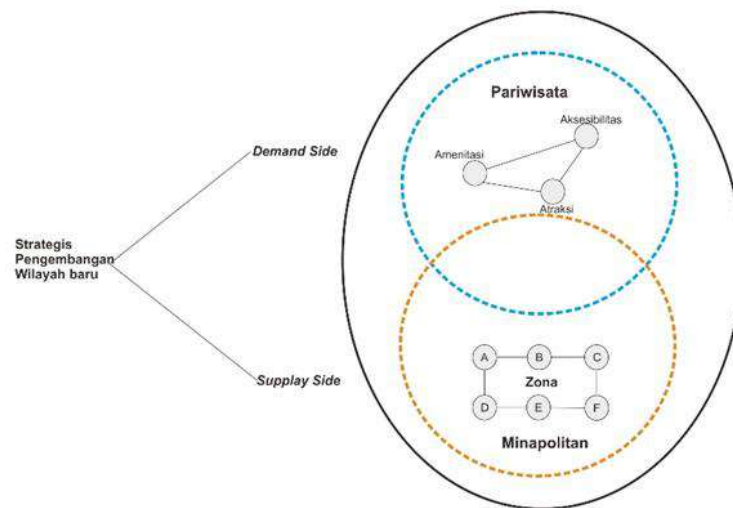
Kawasan Perikanan Terpadu Dabo dikembangkan dengan menggunakan Konsep Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan tangkap berbasis kawasan. Untuk mewujudkan konsep tersebut komponen alokasi ruang yang akan direncanakan sebagai berikut:

1. Zona perdagangan dan transportasi perikanan
2. Zona industri pengelolaan hasil produksi
3. Zona bangunan kelautan
4. Zona industri kapal dan jasa perbaikan
5. Infrastruktur pendukung

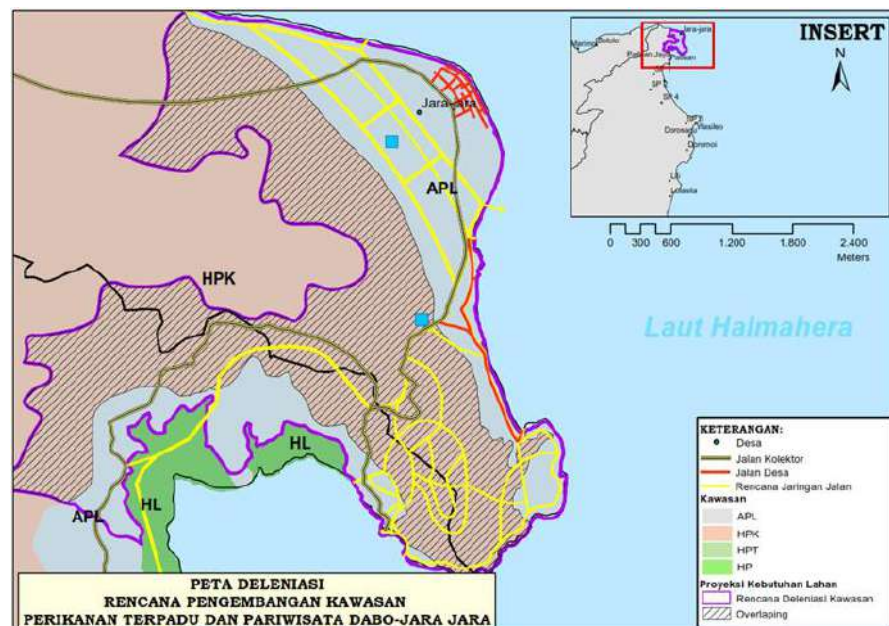
untuk mewujudkan konsep tersebut dibutuhkan tiga komponen pengembangan pariwisata diantaranya atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Adapun alokasi ruang untuk ketiga komponen tersebut antara lain:

1. Antraksi : Antraksi alami seperti Potensi dan Daya Tarik Wisata Bahari sepanjang pesisi pantai Jara-Jara, Desa Jara-Jara dan antraksi buatan seperti wisata minat khusus, wisata budaya.
2. Aksesibilitas : rencana jaringan jalan, prasarana perhubungan darat dan laut.
3. Amenitas : Kawasan Wisata, fasilitas akomodasi, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Untuk mewujudkan rencana pengembangan kawasan tersebut, berdasarkan rencana Deliniasi Kawasan untuk menampung komponen ruang yang direncanakan kedepan, dibutuhkan alokasi ruang dengan luasan 1.517,74 Hektar.



Gambar 6. 9 Model Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara



Gambar 6. 10 Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo dan Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kecamatan Maba Utara

F. PENGEMBANGAN KAWASAN FAYAUL-BUKUTIO SEBAGAI KAWASAN PERKOTAAN BARU

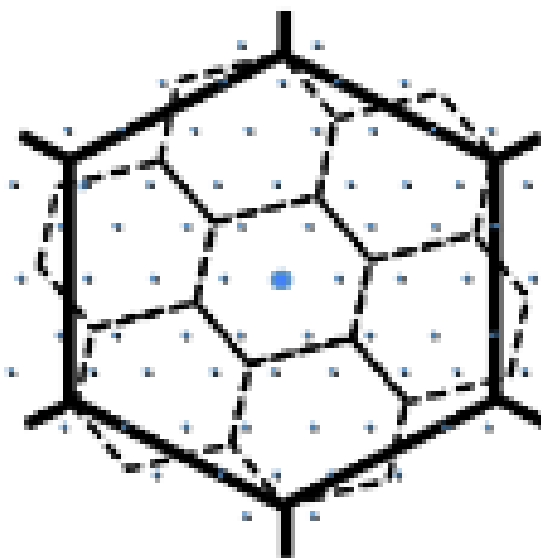
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur terkait pengembangan wilayah berbasis Kawasan untuk pengembangan kawasan perkotaan salah satunya yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Fayaul-Bukutio sebagai kawasan perkotaan baru. Rencana pengembangan Kawasan ini bertujuan untuk membentuk pusat pelayanan lokal baru guna untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep rencana pengembangan kawasan perkotaan ini dikembangkan dengan menggunakan model *Chrristaller* (1933) dimana sistem lokasi pusat yang disimbolkan dengan model $K=7$ (prinsip administratif) yang berfungsi sebagai lokasi pusat administrasi pemerintahan kecamatan, yang dengan sendiri akan terbentuk suatu hirarki. Terbentuknya hirarki-hirarki tersebut nantinya didasarkan atas prinsip bahwa hirarki pusat tidak hanya menyediakan layanan untuk tingkatnya sendiri, karen masing-masing hirarki tersebut memiliki terkaitan dan ketergantungan layan. Untuk merespon terbentuknya hirarki-hirarki tersebut dibutuhkan berbagai skenario untuk keteraturan ruang.

Berdasarkan model diatas, untuk mewujudkan rencana pengembangan kawasan tersebut diarahkan dengan komponen ruang sebagai berikut.

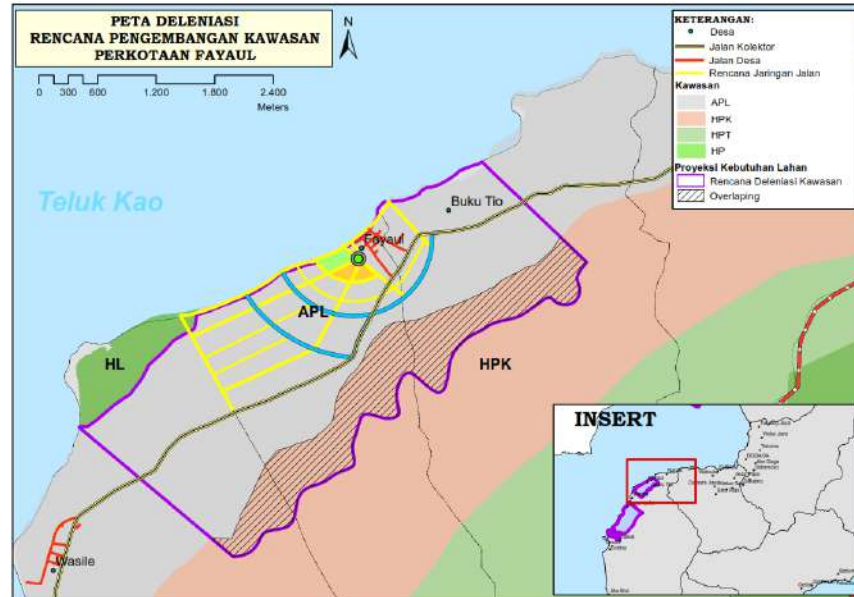
1. Pusat Pemerintahan Kecamatan
2. Pusat Permukiman
3. Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan
4. Pusat Pendidikan Skala Kecamatan
5. Kawasan Perkebunan

Untuk mewujudkan rencana pengembangan kawasan tersebut, berdasarkan rencana Deliniasi Kawasan untuk menampung komponen ruang yang direncanakan kedepan, dibutuhkan alokasi ruang dengan luasan 874,12 Hektar.



Gambar 6. 11 Model *Chrristaller* $K=7$ (Prinsip Administrasi)

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur terhadap Rencana Pengembangan Kawasan Fayaul-Bukutio sebagai Kawasan Perkotaan Baru yaitu keterbatasan lahan. Berdasarkan peta Rencana Deliniasi Kawasan yang direncanakan sebagian areal masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi dengan luasan 214,98 Hektar, sehingga diperlukan upaya penurunan status kawasan. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi Rencana Pengembangan Kawasan perkotaan baru Fayaul-Bukutio dapat dilihat pada gambar berikut.

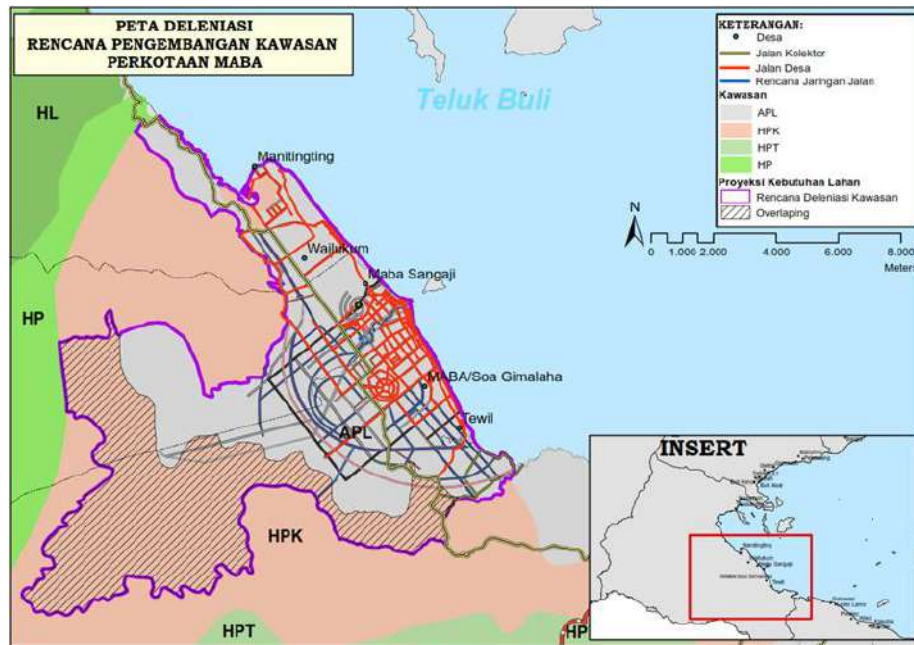


Gambar 6. 12 Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan Fayaul Bukutio sebagai Kawasan Perkotaan Baru di Kecamatan Wasile Selatan

G. RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN MABA

Salah satu kebijakan yang saat ini difokuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Maba (Perluasan Ibukota Kabupaten Halmahera Timur). Perluasan ibukota Kabupaten Halmahera Timur ini bertujuan untuk penambahan aktifitas perkotaan dalam menunjang fungsi utama Kawasan Perkotaan Maba yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Permukiman, Pusat Perdagangan dan Jasa dan Pusat Pendidikan. Selain untuk menunjang fungsi utama tersebut, adanya rencana pengembangan kawasan permukiman baru dan Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan tinggi. Selain itu, tujuan utama perluasan areal Kawasan Perkotaan ini yaitu sebagai upaya antisipatif untuk mengontrol laju pembangunan dengan membentuk struktur jaringan jalan utama sebagai pondasi awal. Sehingga perkembangan kota kedepannya dapat dikendalikan sejak dini dan tidak terjadi *Urban Sprawl*.

Terkait hal tersebut, rencana pengembangan ini terkendala dengan status kawasan, dari peta rencana Deliniasi kawasan tersebut, sebagian areal yang di plot masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi dengan luasan 4.202,76 Hektar, sehingga diperlukan upaya penurunan status kawasan. Untuk lebih jelasnya mengenai Rencana Deliniasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Maba lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. 13 Peta Deliniasi Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Maba

H. ADANYA PENETAPAN KAWASAN SMELTER DI BULI

Dengan adanya Penetapan Kawasan Smelter Buli yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur perlu melakukan pengembangan perkotaan buli dengan meningkatkan fungsi pelayanan kawasan. Fungsi pelayanan yang ditingkatkan antara lain sebagai Kawasan Industri, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pusat Permukiman, Pusat Pendidikan dan Kawasan Perkantoran. Selain itu, Pemerintah Daerah terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung untuk menunjang segala kebutuhan operasional Kawasan Smelter Buli nantinya.



Gambar 6. 14 Peta Deliniasi Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Buli

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2021-2025

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan berdasarkan Jajinji Politik Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur periode 2021-2025 yang merupakan manifestasi yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Halmahera Timur.

22 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur 2021-2025 yang merupakan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Kabupaten Halmahera Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021-2025 yaitu **“Halmahera Timur Maju dan Sejahtera”** tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. 22 Program Prioritas tersebut sebagaimana berikut:

1. Bantuan penyelesaian pembangunan rumah ibadah Masjid dan Gereja, dan bantuan Al-Quran, Al-kitab, organ/piano, dan sound sistem, serta peningkatan tunjangan (intensif) imam dan pendeta beserta perangkat disalurkan dengan sistem non tunai (ditransfer ke rekening).
2. Pengembangan wajib baca dan khatam Al-Quran bagi anak muslim sebelum taman SD, dan kegiatan anak sekolah minggu di Gereja, termasuk pemberian intensif pengasuh dan pengajar disalurkan dengan sistem non tunai (ditransfer ke rekening).
3. Memperkuat dan memfasilitasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan mengembangkan lembaga-lembaga adat, seni dan budaya.
4. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa (kepada desa beserta perangkat dan BPD), serta penyaluran tunjangan (intensif kepala desa beserta perangkat dan BPD), setiap bulan dengan non tunai (transfer rekening).
5. Melanjutkan program peningkatan kualitas pelayanan pendidikan gratis *playgroup*, TK, SD/SMA, SMP/MTs.
6. Bantuan beasiswa pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program **Bidik Misi** untuk siswa-siswi berprestasi bagi masyarakat **kurang mampu** dari jenjang studi S1 dan S2.
7. Melanjutkan program peningkatan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan.
8. Peningkatan kesejahteraan pegawai ASN, guru, dan tenaga medis/para medis melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP), serta peningkatan honor guru dan tenaga medis disalurkan dengan sistem non tunai.
9. Memfasilitasi pendirian dan pembangunan Politeknik (Perguruan Tinggi), serta pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), dan Balai Latihan Kerja (BLK).
10. Melanjutkan percepatan peningkatan status jalan lingkar Halmahera Timur untuk konektivitas antar wilayah kecamatan

11. Melanjutkan peningkatan sarana dan prasarana wilayah (jalan dan jembatan) dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dan di pusat Pemerintahan Kabupaten, termasuk pada wilayah perbatasan yang menjadi Pintu Masuk ke Kabupaten Halmahera Timur.
12. Mendorong tersedianya tataruang lintas Kabupaten kota kepada pemerintah (tata ruang bersama) kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangannya sebagai alat penyelesaian persoalan-persoalan kawasan.
13. Penataan kawasan perdesaan dan perkotaan ibu kota kecamatan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pada 10 (sepuluh) Ibu Kota Kecamatan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi.
14. Mendorong investasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan untuk penciptaan lapangan kerja baru, dan mewajibkan setiap perusahaan yang berinvestasi untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Halmahera Timur.
15. Melanjutkan peningkatan pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi yang terintegrasi (Kawasan perikanan, pertanian, pariwisata dan lainnya).
16. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani, nelayan, peternak dan pedagang; seperti BUMDES, Koperasi, Kelompok Usaha, Usaha Perorangan, melalui pendampingan dan pelatihan manajemen pengelolaan usaha, bantuan modal usaha dan peralatan, termasuk memfasilitasi akses pasar.
17. Pengembangan industri pengelolaan kelapa dan produk turunan kelapa secara terpadu.
18. Mengembangkan kerjasama antar petani dan pengusaha kopra, pala, cengkeh dengan industri (pabrik) dalam pemasaran/penjualan agar harga menjadi memadai dan stabil.
19. Penataan tata niaga gabah (padi) dan pengembangan produk beras pada kawasan transmigrasi.
20. Pemberdayaan nelayan, perkebunan dan peternak melalui pelatihan, bantuan modal usaha dan peralatan, termasuk memfasilitasi akses pasar, dan pembuatan kartu asuransi.
21. Mengembangkan kerjasama antara pedagang besar dan kecil dengan industri (pabrik) yang memproduksi kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok, untuk menjamin ketersediaan barang dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
22. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan untuk menciptakan stabilitas keamanan kondusif dan damai, serta kesadaran hukum.

Selanjutnya 22 Program Prioritas akan diintegrasikan ke dalam nomenkratur program organisasi perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 6. 3 Integrasi 22 Program Prioritas ke dalam Program Organisasi Perangkat Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR OPD	OPD
1	Melanjutkan program peningkatan kualitas pelayanan pendidikan gratis play group, TK SDMA, SMP, MTs.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Bantuan penyelesaian pembangunan rumah ibadah masjid dan gereja, dan bantuan AL-Quran AL- kitab orgen piano, dan sound sistem serta peningkatan tunjangan (insentif) imam dan pendeta beserta perangkat dilakukan dengan sistem non tunai (transfer ke rekening).	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Pengembangan wajib baca dan khatam AL-Quran bagi anak muslim sebelum tamat SD, dan kegiatan anak sekolah minggu di Gereja, termasuk pemberian insentif pengasuh dan pengajar disalurkan dengan sistem non tunai (ditransfer ke rekening).	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	Memperkuat dan memfasilitas Forum Komunikasi Umat beragama (FKUB), dan mengembangkan lembaga – lembaga adat, seni dan budaya.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10 Kecamatan
4	Melanjutkan program peningkatan kualitas pelayanan pendidikan gratis play group, TK SDMA, SMP, MTs.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
5	Bantuan biasiswa pengembangan Sumber daya manusia melalui program Bidak Misi untuk siswa-siswa berprestasi bagi masyarakat kurang mampu dari jenjang studi S1 dan S2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
6	Melanjutkan program peningkatan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Memfasilitasi pendirian dan pembangunan polteknik (Perguruan Tinggi), serta pusat pendidikan dan perhatian (Pendidikan), dan balai latihan kerja (BLK).	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	Percepatan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui peningkatan status jalan lingkar Halmahera Timur, pembangunan dan peningkatan jalan jembatan terutama di wilayah utara-utara, pusat pemerintahan, dan wilayah perbatasan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, terutama Sanitasi layak dan Air Minum di 10 Kecamatan (melalui pembentukan PDAM)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

No.	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR OPD	OPD
10	Mendorong tersedianya tataruang lintas Kabupaten kota kepada pemerintah (tata ruang bersama) kepada pemerintah Propinsi Maluku Utara sesuai kewenangannya sebagai alat meyelesaikan persoalan - persoalan kawasan.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11	Penataan kawasan perdesaan dan perkotaan ibu kota kecamatan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pada 10 (sepuluh) ibu kota kecamatan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi.	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
12	Mendorong investasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan pertambangan (salah satunya melalui pembentukan BUMD) untuk penciptaan lapangan kerja baru dan mewajibkan setiap perusahaan yang berinvestasi untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Halmahera Timur.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Melanjutkan peningkatan pembangunan kawasan strategis Ekonomi yang santregresi (kawasan perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan lainnya)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
14	Pengembangan industri pengelolaan kelapa dan produk turunan kelapa secara terpadu.	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM
15	Mengembangkan kerja sama antar petani dan pengusaha kopra, pala, cengkeh dengan industri (pabrik) dalam pemasaran penjualan agar harga menjadi memadai dan stabil.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
16	Penataan tata gabah, (padi) dan perkembangan produk beras pada kawasan transmigrasi.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
17	Pemberdayaan nelayan, perkebunan dan peternak melalui pelatihan, bantuan modal usaha dan pelatihan termasuk memfasilitasi akses pasar, dan pembuatan kartu asuransi.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM
18	Mengembangkan kerja sama antara pedagang besar dan kecil dengan industri yang memproduksi kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok, untuk	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM

No.	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR OPD	OPD
	menjamin ketersediaan barang dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.		
19	Peringkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (kepada desa beserta perangkat dan BPD), serta penyaluran tunjangan (intentif kepada desa beserta perangkat dan BPD), setiap bulan dengan non tunai (tranfer rekening).	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
20	Peningkatan kesejahteraan pegawai ASN guru, dan tenaga medis para medis melalui pemberian tambahan pengasilan pegawai ASN (TPP), serta peringkatan honor guru dan tenaga medis disalurkan dengan sistim non tunai.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPKAD
21	Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani, nelayan, dan pedagang seperti BUMDES, Koprasi, Kelompok, Usaha Usaha perorangan melalui pendampingan dan pelatihan manajemen pengelolaan usaha, bantuan modal usaha dan peralatan, termasuk memfasilitasi akses pasar.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM
22.	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan TNI POLRI, dan kejaksaan untuk menciptakan keamanan kondisi dan damai, serta kesadaran hukum.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10 Kecamatan

Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Halmahera Timur

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
MISI 1 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA																
Mewujudnya sumber daya manusia Halmahera Timur yang berkualitas, yakni SDM Halmahera Timur yang agamais, berbudaya, berkarakter, cerdas, kompetitif, sehat dan tangguh																
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	N/A	68,85	50.120.945.000,00	69,06	49.248.526.100,00	69,28	48.365.155.578,00	69,49	47.500.452.466,44	69,72	49.343.270.565,10	69,72	244.578.349.709,54	
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD teragreditasi	%	96%	98,01%	10555222080	99%	10.344.117.638,40	100%	10.137.235.285,63	100%	9.934.490.579,92	100%	10331870203	100%	51.302.935.787,07	Dinas Pendidikan
	Persentase SMP teragreditasi	%	74%	75,55%	13255250420	85%	12.990.145.411,60	90%	12.730.342.503,37	95%	12.475.735.653,30	100%	12.974.765.079,43	100%	64.426.239.067,70	Dinas Pendidikan
	Persentase PAUD teragreditasi	%	48%	50%	10.555.222.080,00	60%	10.344.117.638,40	65%	10.137.235.285,63	70%	9.934.490.579,92	75%	10.331.870.203,12	75%	51.302.935.787,07	Dinas Pendidikan
	Cakupan Sekolah Non Formal/ kesetaraan	%	48%	50%	13.255.250.420,00	60%	12.990.145.411,60	70%	12.730.342.503,37	75%	12.475.735.653,30	80%	12.974.765.079,43	80%	64.426.239.067,70	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini	%	N/A	40%	1.000.000.000,00	50%	1.030.000.000,00	55%	1.050.000.000,00	60%	1.070.000.000,00	65%	1.090.000.000,00	65%	5.240.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	%	N/A	65%	500.000.000,00	70%	520.000.000,00	72%	530.000.000,00	75%	540.000.000,00	80%	550.000.000,00	80%	2.640.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Rasio Guru tersertifikasi	%	N/A	30%	1.000.000.000,00	35%	1.030.000.000,00	40%	1.050.000.000,00	42%	1.070.000.000,00	45%	1.090.000.000,00	45%	5.240.000.000,00	Dinas Pendidikan
Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase Budaya yang dilestarikan	%	10%	10%	0	10%	2.090.000.000,00	10%	2.137.000.000,00	10%	2.186.350.000,00	50%	2.238.167.500,00	50%	8.651.517.500,00	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian budaya dan cagar budaya	%	N/A	N/A	0	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	1.600.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	cakupan Pembinaan dan pelestarian sejarah untuk	%	N/A	N/A	0	30%	900.000.000,00	40%	930.000.000,00	50%	961.500.000,00	55%	994.575.000,00	55%	3.786.075.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	mendukung pengembangan kegiatan wisata															
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pembinaan lembaga kesenian dan budaya	%	N/A	N/A	0	30%	340.000.00 0,00	35%	357.000.00 0,00	55%	374.850.00 0,00	60%	393.592.500 ,00	70%	1.465.442.500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian tradisional	Persentase komunitas atau sanggar yang difasilitasi	%	N/A	N/A	0	N/A	450.000.00 0,00	N/A	450.000.00 0,00	N/A	450.000.00 0,00	N/A	450.000.000 ,00	N/A	1.800.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya akses dan kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Nilai	N/A	70,56	174.906.10 7.230,00	71,74	305.691.17 5.992,00	72,92	361.711.27 7.192,00	74,1	428.176.95 2.180,00	75,28	476.444.82 5.907,00	75,28	1.746.930.338.506,00	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar diFasyankes	%	30%	37,68%	47.845.000. 000,00	49,67%	84.925.000. 000,00	65,38%	117.159.50 0.000,00	83,13%	171.907.82 5.000,00	90%	200.285.213 .750,00	100%	622.122.538.750,00	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas yang terakreditasi dan reakreditasi	%	75%	80%	1.015.210.0 00,00	85%	1.000.000.0 00,00	89%	950.000.00 0,00	92%	850.000.00 0,00	95%	800.000.000 ,00	95%	4.615.210.000,00	Dinas Kesehatan
	Penurunan angka Persentase <i>Stunting</i> pada Balita	%	85%	90%	162.000.000 ,00	92%	194.400.00 0,00	94%	233.280.00 0,00	97%	303.264.00 0,00	100%	394.243.200 ,00	100%	1.287.187.200,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan balita gizi buruk dan <i>Wasting</i> yang tertangani	%	100%	100%	1.177.210.0 00,00	100%	1.194.400.0 00,00	100%	1.183.280.0 00,00	100%	1.153.264.0 00,00	100%	1.194.243.2 00,00	100%	5.902.397.200,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan layanan UKP dan UKM	%	100%	100%	2.354.420.0 00,00	100%	2.388.800.0 00,00	100%	2.366.560.0 00,00	100%	2.306.528.0 00,00	100%	2.388.486.4 00,00	100%	11.804.794.400,00	Dinas Kesehatan
	Persentase Ketersediaan data dan informasi kesehatan	%	50%	55%	1.300.000.0 00,00	65%	1.430.000.0 00,00	75%	1.573.000.0 00,00	85%	1.730.300.0 00,00	90%	2.595.450.0 00,00	90%	8.628.750.000,00	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar	%	75%	78%	71.000.022. 335,00	80%	126.616.08 1.996,00	83%	137.451.50 1.996,00	89%	140.040.81 0.000,00	95%	144.928.890 .000,00	95%	620.037.306.327,00	RSUD
	Cakupan layanan RSUD	%	100%	100%	7.893.119.5 55,00	100%	10.316.081. 996,00	100%	12.271.501. 996,00	100%	13.960.810. 000,00	100%	15.928.890. 000,00	100%	60.370.403.552,00	RSUD
	Peningkatan Mutu	%	45%	50%	399.000.000 ,00	60%	2.489.000.0 00,00	70%	2.737.900.0 00,00	80%	3.011.690.0 00,00	90%	3.312.859.0 00,00	90%	11.950.449.000,00	RSUD

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana RSUD Maba sesuai dengan standar	%	N/A	65%	31.328.607.190,00	75%	57.000.000.000,00	85%	62.000.000.000,00	95%	62.450.000.000,00	100%	63.000.000.000,00	100%	275.778.607.190,00	RSUD
	Ketersediaan sistem manajemen informasi RS	Jumlah	N/A	N/A	0	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	4.000.000.000,00	RSUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Tenaga Medis dan paramedis	Jumlah	N/A	N/A	0	10	4.800.000.000,00	13	8.400.000.000,00	16	12.000.000.000,00	19	15.600.000.000,00	19	40.800.000.000,00	Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan Sesuai Standar	%	N/A	20%	255.000.000,00	40%	306.000.000,00	60%	367.200.000,00	80%	440.640.000,00	100%	528.768.000,00	100%	1.897.608.000,00	Dinas Kesehatan
	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan RS	%	N/A	N/A	0	25%	525.000.000,00	50%	540.000.000,00	75%	550.000.000,00	9500%	625.000.000,00	99%	2.240.000.000,00	RSUD
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Pelayanan perbekalan kesehatan, obat dan BMHP	%	100%	100%	7.041.598.150,00	100%	7.770.000.000,00	75%	8.935.500.000,00	95%	10.722.600.000,00	100%	16.083.900.000,00	100%	50.553.598.150,00	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan Alkes	%	25%	30%	1.734.920.000,00	40%	1.908.412.000,00	50%	2.099.253.200,00	65%	2.414.141.180,00	80%	2.776.262.357,00	80%	10.932.988.737,00	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	%	70%	75%	680.000.000,00	80%	748.000.000,00	85%	822.800.000,00	90%	905.080.000,00	95%	1.357.620.000,00	95%	4.513.500.000,00	Dinas Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan makanan dan depot air minum yang memenuhi syarat	%	70%	75%	250.000.000,00	80%	375.000.000,00	85%	562.500.000,00	90%	843.750.000,00	95%	1.265.625.000,00	95%	3.296.875.000,00	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga sehat	%	65%	70%	470.000.000,00	75%	705.000.000,00	80%	1.057.500.000,00	85%	1.586.250.000,00	95%	2.379.375.000,00	95%	6.198.125.000,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks pembangunan olahraga	Nilai	N/A	0,35	3.780.599.079,00	0,36	15.500.000.000,00	0,37	13.471.428.571,00	0,38	19.232.142.857,00	0,4	11.607.142.857,00	0,4	63.591.313.364,00	
Program Pengembangan Kapasitas	Peningkatan Kemitraan dan sumber daya	Jumlah	N/A	5	150.000.000,00	8	1.000.000.000,00	12	1.571.428.571,00	14	1.857.142.857,00	16	1.957.142.857,00	16	6.535.714.285,00	Dinas pemuda dan Olahraga

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Daya Saing Keolahragaan	kesehatan Masyarakat															
	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana olahraga	Kecamatan	1	1	757.599.079 ,00	2	6.000.000.0 00,00	3	8.200.000.0 00,00	3	8.200.000.0 00,00	1	4.000.000.0 00,00	10	27.157.599.079,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Cakupan Pembinaan atlet muda	%	N/A	20%	100.000.000 ,00	10%	500.000.00 0,00	15%	750.000.00 0,00	40%	1.000.000.0 00,00	5%	150.000.000 ,00	90%	2.500.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Persentase Atlet Berprestasi (daerah/nasional/inte rnasional) terhadap pembinaan atlet muda	%	N/A	3,6%	0	18,1%	0	21,5%	0	26,1%	0	30,6%	0	100%	0	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Cakupan Pelatih yang bersertifikat	%	N/A	14%	123.000.000 ,00	23%	250.000.00 0,00	23%	275.000.00 0,00	33%	500.000.00 0,00	7%	150.000.000 ,00	100%	1.298.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR)	Unit	1	2	2.500.000.0 00,00	3	7.500.000.0 00,00	1	2.500.000.0 00,00	3	7.500.000.0 00,00	2	5.000.000.0 00,00	11	25.000.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Cakupan Tenaga Olahraga yang bersertifikat	Orang	N/A	30	150.000.000 ,00	40	250.000.00 0,00	20	175.000.00 0,00	30	175.000.00 0,00	50	350.000.000 ,00	170	1.100.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Meningkatnya Peran dan produktivitas Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Peran dan produktivitas Pemuda	Nilai	N/A	70,5	1.245.454. 230,00	72	5.536.000. 000,00	73,5	6.751.000. 000,00	75	8.175.000. 000,00	76,5	6.695.000. 000,00	76,5	28.402.454.230,00	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berprestasi	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentasi Organisasi Pemuda yang aktif	%	N/A	10%	605.454.230 ,00	12%	3.420.000.0 00,00	13%	4.200.000.0 00,00	15%	4.550.000.0 00,00	17%	4.210.000.0 00,00	67%	16.985.454.230,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Persentase Wirausaha Muda	%	N/A	N/A	0	20%	500.000.00 0,00	20%	600.000.00 0,00	40%	1.200.000.0 00,00	20%	700.000.000 ,00	100%	3.000.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Persentase Pemuda yang memiliki ketrampilan dan keahlian	%	N/A	5,4%	600.000.000 ,00	24,6%	696.000.00 0,00	30%	876.000.00 0,00	30%	900.000.00 0,00	10%	660.000.000 ,00	100%	3.732.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kolaborasi organisasi kepemudaan	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	%	N/A	N/A	0	15%	150.000.000,00	25%	250.000.000,00	35%	350.000.000,00	25%	250.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Jumlah Pramuka yang berprestasi	Orang	N/A	16	40.000.000,00	30	150.000.000,00	35	175.000.000,00	40	200.000.000,00	45	225.000.000,00	166	790.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Cakupan Sarana dan prasarana kepramukaan	%	N/A	N/A	0	22%	620.000.000,00	22%	650.000.000,00	33%	975.000.000,00	22%	650.000.000,00	100%	2.895.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Tata Kelolah Kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2%	2%	6.828.389.800,00	2%	7.240.836.994,00	2%	7.373.725.157,42	2%	7.668.843.618,26	2%	7.980.313.280,24	2%	17.890.081.747,54	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	%	80%	85%	4.589.803.800,00	90%	4.727.497.914,00	95%	4.869.322.851,42	100%	5.015.402.536,96	100%	5.165.864.613,07	100%	24.367.891.715,45	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4	130.000.000,00	4	140.400.000,00	3	151.632.000,00	3	163.762.560,00	2	176.863.564,80	2	762.658.124,80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	%	90%	96%	414.382.800,00	97%	435.101.940,00	98%	456.857.037,00	99%	479.699.888,85	100%	503.684.883,29	100%	2.289.726.549,14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran sipil yang diterbitkan	%	90%	94%	1.222.674.000,00	95%	1.283.807.700,00	96%	1.347.998.085,00	97%	1.415.397.989,25	100%	1.486.167.888,71	100%	6.756.045.662,96	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah PD yang telah ber PKS pemanfaatan data kependudukan	%	13%	40%	92.079.600,00	100%	147.327.360,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100%	239.406.960,00	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	%	90%	90%	379.449.600,00	95%	398.422.080,00	100%	418.343.184,00	100%	439.260.343,20	100%	461.223.360,36	100%	2.096.698.567,56	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	Dokumen	N/A	N/A	0	1	57.780.000,00	1	66.447.000,00	1	76.414.050,00	1	87.876.157,50	1	288.517.207,50	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	Persentase layanan jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	%	N/A	N/A	0	40%	50.500.000,00	60%	63.125.000,00	80%	78.906.250,00	100%	98.632.812,50	100%	291.164.062,50	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial																
Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	80,62	81,16	275.000.000,00	81,7	766.650.000,00	82,24	854.181.900,00	82,78	953.230.823,40	83,32	1.065.403.864,79	83,32	3.914.466.588,19	
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Desa Layak Anak	%	N/A	N/A	0	20%	172.500.000,00	35%	198.375.000,00	45%	228.131.250,00	55%	262.350.938,00	55%	861.357.188,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Terfasilitasinya kegiatan forum anak (jumlah forum)	Forum	1	N/A	0	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00	1	132.250.000,00	1	152.087.500,00	5	499.337.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak (orang)	%	N/A	10%	125.000.000,00	20%	143.750.000,00	30%	165.312.500,00	40%	190.109.375,00	50%	218.625.781,25	50%	842.797.656,25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perempuan dan Anak Korban kekerasan termasuk TPPO dan perempuan dalam kondisi khusus yang dilayani sesuai standar	%	N/A	N/A	0	10%	195.000.000,00	10%	214.500.000,00	10%	235.950.000,00	10%	259.545.000,00	50%	904.995.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban KDRT yang melapor tertangani	%	67,89%	3,60%	150.000.000,00	3,60%	155.400.000,00	3,60%	160.994.400,00	3,60%	166.790.198,40	3,60%	172.794.645,54	85,89%	805.979.243,94	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
MISI 2 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR																
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang berbasis kawasan-kawasan strategis Kabupaten																
Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	100%	100%	670.970.633,00	100%	3.064.400.000,00	100%	2.422.288.000,00	100%	1.640.333.760,00	100%	883.540.435,00	100%	8.681.532.828,00	
Program Penatagunaan Tanah	Cakupan Informasi Nilai Zona Tanah	%	N/A	N/A	0	50%	1.000.000.000,00	80%	800.000.000,00	100%	300.000.000,00	N/A	0	100%	2.100.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Cakupan Pengelolaan Izin Lokasi	%	40%	50%	0	60%	170.000.000,00	70%	173.400.000,00	80%	176.868.000,00	90%	180.405.360,00	90%	700.673.360,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	10%	10%	570.970.633,00	40%	1.142.400.000,00	70%	1.144.848.000,00	90%	807.344.960,00	100%	469.891.859,00	100%	4.135.455.452,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Kasus Sengketa Tanah	%	80%	80%	100.000.000,00	80%	102.000.000,00	90%	104.040.000,00	90%	106.120.800,00	100%	108.243.216,00	100%	520.404.016,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	%	10%	10%	0	10%	650.000.000,00	10%	200.000.000,00	10%	250.000.000,00	10%	125.000.000,00	50%	1.225.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Nilai	0,27	0,26	1.119.568.000,00	0,25	1.550.000.000,00	0,24	1.950.000.000,00	0,22	1.950.000.000,00	0,21	1.950.000.000,00	0,21	8.519.568.000,00	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR)	PERDA	1	1	1.119.568.000,00	1	300.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	5	3.969.568.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Pengembangan Kawasan Strategis Tematik (Kabupaten)	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	N/A	1.950.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kawasan	1	1	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	1.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Patlean	Nilai	42,3	42,3	0	42,8	200.000.000,00	43,2	200.000.000,00	43,9	200.000.000,00	44,4	200.000.000,00	44,4	800.000.000,00	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
Program Perencanaan Kawasan transmigrasi	Penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi	Kawasan	1	1	0	1	800.000.000,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	800.000.000,00	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Layanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	92%	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	0	100%	0	100%	0	100%	2.000.000.000,00	
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah Desa Terlayani Jaringan Telekomunikasi	Desa	95	95	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	0	100	0	100	0	100	2.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Indkes Konektivitas Wilayah	Nilai	0,75	0,80	57.755.000.000,00	0,92	150.075.909.091,00	0,94	128.953.595.977,00	0,96	145.316.758.248,00	0,98	114.537.414.073,00	0,98	596.638.677.389,00	

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Jumlah Penumpang Melalui Pelabuhan/Dermaga	Orang	2970	2970	100.000.000 ,00	3267	110.000.00 0,00	3594	121.000.00 0,00	3953	133.100.00 0,00	4348	15.000.000, 00	18132	479.100.000,00	Dinas Perhubungan
	Peningkatan Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga	Ton	5500	5500	100.000.000 ,00	6050	110.000.00 0,00	6655	121.000.00 0,00	7321	133.100.00 0,00	8053	15.000.000, 00	33579	479.100.000,00	Dinas Perhubungan
	Peningkatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang di Operasikan dan dipelihara	Unit	1	1	200.000.000 ,00	1	230.909.09 1,00	1	266.595.97 7,00	1	338.558.24 8,00	1	372.414.073 ,00	1	1.408.477.389,00	Dinas Perhubungan
	Peningkatan Jumlah Pelabuhan Pengumpnan Lokal yang dibangun / Tambatan Perahu	Unit	43	2	3.000.000.0 00,00	1	2.000.000.0 00,00	2	3.000.000.0 00,00	2	2.000.000.0 00,00	2	2.000.000.0 00,00	4	12.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Layanan LLAJ	%	10%	10%	10.125.000. 000,00	15%	11.725.000. 000,00	20%	12.475.000. 000,00	25%	13.225.000. 000,00	30%	13.975.000. 000,00	100%	61.525.000.000,00	Dinas Perhubungan
	Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	Unit	1400	1400	280.000.000 ,00	1500	300.000.00 0,00	1600	320.000.00 0,00	1700	340.000.00 0,00	1800	360.000.000 ,00	8000	1.600.000.000,00	Dinas Perhubungan
	Rasio konektivitas	Nilai	0,8	0,2	200.000.000 ,00	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	1	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	Persentase ijin penyelenggaraan dan prasarana parkir	%	20%	20%	750.000.000 ,00	20%	750.000.00 0,00	20%	750.000.00 0,00	20%	750.000.00 0,00	20%	750.000.000 ,00	100%	3.750.000.000,00	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Km	179,34	35,57	43.000.000. 000,00	51,50	134.850.00 0.000,00	94,50	111.900.00 0.000,00	143,61	128.397.00 0.000,00	181,11	97.050.000. 000,00	360,45	515.197.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Terpenuhinya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	Nilai	80,32	82,60	176.404.83 7.604,00	84,20	101.069.00 0.664,33	86,20	136.969.38 3.693,42	88,70	164.127.10 5.606,50	90,30	196.280.17 3.485,77	90,30	774.850.501.054,02	
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	8%	8%	5.000.000.0 00,00	13,50%	8.437.500.0 00,00	19%	11.562.500. 000,00	25%	15.312.500. 000,00	31%	19.375.000. 000,00	31%	59.687.500.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Nilai	22	22	200.000.000 ,00	25	250.000.00 0,00	30	300.000.00 0,00	35	360.000.00 0,00	40	400.000.000 ,00	50	1.510.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	4,02%	4,02%	7.500.000.0 00,00	7,72%	14.800.000. 000,00	18,72%	21.088.082. 901,55	30,72%	23.005.181. 347,15	45,42%	28.181.347. 150,26	45,42%	94.574.611.398,96	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung terhadap rumah tangga	%	19,34%	19,34%	5.670.919.7 33,00	28,17%	32.000.000. 000,00	41,37%	47.836.919. 592,30	56,98%	56.570.781. 426,95	75%	65.304.643. 261,61	75%	207.383.264.013,86	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Rumah Tangga Yang terlayani akses Air Minum Melalui Layanan PDAM	%	N/A	100,00%	300.000.000 ,00	100,00%	1.000.000.0 00,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100%	1.300.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik pada kawasan permukiman	%	22,50%	22,50%	1.581.000.0 00,00	23,11%	1.623.862.6 66,67	23,81%	1.672.866.5 88,24	24,33%	1.709.446.9 80,39	25%	1.756.392.0 81,57	25%	8.343.568.316,86	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kabupaten/Kota (IKK Outcome)	%	14,98%	14,98%	55.488.623. 371,00	15,73%	8.312.195.7 81,00	16,98%	8.416.098.2 28,00	18,48%	8.542.339.7 02,00	20%	8.672.183.2 65,00	20%	89.431.440.347,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Primer dan Sekunder	%	60,77%	60,77%	51.743.246. 450,00	65,77%	6.469.700.0 00,00	76%	14.253.480. 000,00	86%	23.036.725. 600,00	100%	33.409.516. 344,00	100%	128.912.668.394,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Cakupan jalan dan jembatan pada	%	75%	75%	20.000.000. 000,00	82%	18.666.666, 67	90%	21.333.333, 33	96%	16.000.000, 00	100%	10.933.333, 33	100%	20.066.933.333,33	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	kawasan permukiman dalam kondisi baik															
Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	Ha	228.805,61	228.805,61	1.144.028.050,00	228.811,11	1.144.055.500,00	228.816,61	1.144.083.050,00	228.822,11	1.144.110.500,00	228.827,61	1.144.138.050,00	228.827,61	5.720.415.250,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan Rumah LayakHuni bagi MBR	Unit	281	281	21.075.000.000,00	350	26.250.000.000,00	400	30.000.000.000,00	450	33.750.000.000,00	500	37.500.000.000,00	1981	148.575.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Cakupan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	%	8%	N/A	0	8%	200.000.000,00	10%	250.000.000,00	11%	275.000.000,00	12%	300.000.000,00	41%	1.025.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	Unit	5	5	6.000.000.000,00	2	0	2	0	2	0	2	0	13	6.000.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh	Ha	27,89	27,89	502.020.000,00	22,39	403.020.000,00	16,89	304.020.000,00	11,39	205.020.000,00	5,89	106.020.000,00	5,89	1.520.100.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	10	10	200.000.000,00	8	160.000.000,00	6	120.000.000,00	10	200.000.000,00	6	120.000.000,00	40	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang/Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Suitanable development)																
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Nilai Lingkungan Hidup	Nilai	80,02	80,61	4.007.000.000,00	80,81	8.884.312.000,00	81,02	5.762.342.000,00	81,26	5.686.964.600,00	82	5.629.341.444,00	82	30.269.960.044,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	%	15%	15%	300.000.000,00	20%	306.000.000,00	30%	312.120.000,00	40%	318.000.000,00	50%	324.000.000,00	50%	1.560.120.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)																
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	%	90%	90%	100.000.000,00	90%	102.000.000,00	90%	104.000.000,00	90%	106.000.000,00	90%	108.243.216,00	90%	520.243.216,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luasan RTH yang terpelihara	%	50%	50%	420.000.000,00	60%	1.970.000.000,00	70%	420.000.000,00	80%	420.000.000,00	90%	420.000.000,00	90%	3.650.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengangkutan Sampah	Kecamatan	2	1	2.337.000.000,00	1	5.161.700.000,00	2	3.823.130.000,00	3	3.979.892.600,00	3	3.904.016.228,00	3	19.205.738.828,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	90%	90%	75.000.000,00	90%	110.112.000,00	90%	110.112.000,00	90%	111.612.000,00	90%	113.142.000,00	90%	519.978.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kenaikan Nilai IKLH	%	80,02%	80,61%	475.000.000,00	80,81%	484.500.000,00	81,02%	492.980.000,00	81,26%	501.460.000,00	82%	509.940.000,00	82%	2.463.880.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan kelompok sadar lingkungan	Kelompok /Lembaga	N/A	N/A	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	200.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang disuluh	Orang	N/A	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	500.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Dokumen	N/A	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	350.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	5	1.650.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
MISI 3 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN DAN MENDORONG INVESTASI																	
Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Halmahera Timur dengan mendorong pertumbuhan Sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan Serta Pariwisata dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal																	
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	13%	14%	35.622.497.120,00	14%	36.863.170.000,00	15%	36.705.670.000,00	15%	36.730.670.000,00	16%	36.730.670.000,00	16%	182.652.677.120,00		
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan bencana pertanian dapat ditanggulangi dan terkendalikan	%	30%	30%	9.136.000.000,00	30%	9.636.000.000,00	30%	9.636.000.000,00	30%	9.636.000.000,00	30%	9.636.000.000,00	30%	47.680.000.000,00	Dinas Pertanian	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dapat dikendalikan	%	30%	30%	28.665.000,00	45%	50.000.000,00	45%	50.000.000,00	45%	75.000.000,00	45%	75.000.000,00	45%	278.665.000,00	Dinas Pertanian	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase ketersediaan prasarana pertanian	%	25%	30%	11.648.192.000,00	45%	13.395.530.000,00	45%	13.395.530.000,00	45%	13.395.530.000,00	45%	13.395.530.000,00	45%	65.230.312.000,00	Dinas Pertanian	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemberian izin usaha pertanian dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur	%	N/A	N/A	0	30%	100.000.000,00	30%	100.000.000,00	30%	100.000.000,00	30%	100.000.000,00	30%	400.000.000,00	Dinas Pertanian	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian	%	25%	30%	14.709.640.000,00	35,50%	13.066.640.000,00	41,00%	13.216.640.000,00	46,50%	13.216.640.000,00	52,00%	13.216.640.000,00	52%	67.426.200.000,00	Dinas Pertanian	
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan SDM penyuluh dan kelompok tani	%	15%	20%	100.000.120,00	40%	615.000.000,00	54%	307.500.000,00	60%	307.500.000,00	65%	307.500.000,00	65%	1.637.500.120,00	Dinas Pertanian	
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	0,70%	0,50%	15.530.000.000,00	0,50%	17.999.500.000,00	0,50%	20.699.425.000,00	0,50%	23.804.338.250,00	0,50%	27.374.989.563,00	2,50%	105.408.252.813,00		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	%	N/A	5%	11.360.000.000,00	5%	13.064.000.000,00	5%	15.023.600.000,00	5%	17.277.140.000,00	5%	19.868.711.000,00	5%	76.593.451.000,00	Dinas Kelautan Perikanan	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	%	N/A	10%	1.740.000.000,00	10%	2.091.000.000,00	10%	2.404.650.000,00	10%	2.765.347.000,00	10%	3.180.149.625,00	10%	12.181.146.625,00	Dinas Kelautan Perikanan	

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	kg/ kapita	N/A	39,71	2.430.000.000,00	40,9	2.844.500.000,00	42,12	3.271.175.000,00	43,39	3.761.851.250,00	44,69	4.326.128.938,00	44,69	16.633.655.188,00	Dinas Kelautan Perikanan
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan omzet koperasi	%	N/A	N/A	0	N/A	275.000.000,00	N/A	275.000.000,00	N/A	275.000.000,00	N/A	275.000.000,00	N/A	1.100.000.000,00	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Presentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola kopersi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi	%	26,09%	N/A	0	36,52%	200.000.000,00	46,95%	200.000.000,00	57,38%	200.000.000,00	67,81%	200.000.000,00	67,81%	800.000.000,00	Disperindagkop dan UKM
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	%	52,17%	N/A	0	55,65%	75.000.000,00	59%	75.000.000,00	62,61%	75.000.000,00	66,09%	75.000.000,00	66,09%	300.000.000,00	Disperindagkop dan UKM
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan omzet usaha mikro kecil	%	N/A	39,05%	100.000.000,00	0,50%	2.600.000.000,00	0,25%	2.600.000.000,00	0,25%	3.100.000.000,00	0,49%	3.600.000.000,00	50,00%	12.000.000.000,00	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	Jumlah	50	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	200	500.000.000,00	Disperindagkop dan UKM
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan peningkatan sarana	%	N/A	N/A	0	30%	2.500.000.000,00	30%	2.500.000.000,00	30%	3.000.000.000,00	30%	3.500.000.000,00	30%	11.500.000.000,00	Disperindagkop dan UKM

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	distribusi perdagangan															
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	11,65%	0,50%	0	0,50%	300.000.000,00	0,50%	300.000.000,00	0,50%	300.000.000,00	0,50%	300.000.000,00	14,15%	1.200.000.000,00	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	N/A	N/A	0	30%	200.000.000,00	30%	200.000.000,00	30%	200.000.000,00	30%	200.000.000,00	30%	800.000.000,00	Disperindagkop dan UKM
Program Standarisasi Dan perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar	%	N/A	N/A	0	25%	100.000.000,00	25%	100.000.000,00	25%	100.000.000,00	25%	100.000.000,00	25%	400.000.000,00	Disperindagkop dan UKM
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Nilai ekspor	Rp.	N/A	N/A	0	N/A	100.000.000,00	N/A	100.000.000,00	N/A	100.000.000,00	N/A	100.000.000,00	N/A	400.000.000,00	
Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan jumlah ekspor	%	N/A	N/A	0	25%	100.000.000,00	25%	100.000.000,00	25%	100.000.000,00	25%	100.000.000,00	25%	400.000.000,00	Disperindagkop dan UKM
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan	%	2%	1,5%	80.820.000,00	1,1%	500.000.000,00	1,2%	300.000.000,00	1.3 %	300.000.000,00	1.4%	300.000.000,00	1,4%	1.480.820.000,00	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan zona Potensi Industri Daerah	%	N/A	N/A	80.820.000,00	25%	300.000.000,00	25%	300.000.000,00	25%	300.000.000,00	25%	300.000.000,00	25%	1.280.820.000,00	Disperindagkop dan UKM

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	0,29%	1,90%	0	1,90%	18.860.000.000,00	1,90%	18.271.500.000,00	1,90%	18.598.575.000,00	1,90%	18.942.003.750,00	10%	74.672.078.750,00	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan pariwisata	%	N/A	N/A	0	2%	4.450.000.000,00	3%	4.672.500.000,00	3%	4.906.125.000,00	4%	5.151.431.250,00	4%	19.180.056.250,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pembinaan Usaha Jasa pariwisata serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM	%	N/A	N/A	0	10%	1.780.000.000,00	15%	1.869.000.000,00	20%	1.962.450.000,00	20%	2.060.572.500,00	25%	7.672.022.500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penyiapan daya tarik destinasi (objek wisata)	%	30%	30%	0	35%	12.630.000.000,00	40%	11.730.000.000,00	45%	11.730.000.000,00	70%	11.730.000.000,00	70%	47.820.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	N/A	N/A	95.000.000,00	N/A	1.740.000.000,00	N/A	1.740.000.000,00	N/A	1.390.000.000,00	N/A	1.390.000.000,00	N/A	6.355.000.000,00	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Desa rawan pangan	Desa	45	52	95.000.000,00	47	590.000.000,00	42	590.000.000,00	37	590.000.000,00	30	590.000.000,00	30	2.455.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Bahan Pangan yang dinyatakan aman	%	20%	0%	0	40%	100.000.000,00	60%	100.000.000,00	80%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan infrastruktur cadangan pangan	%	33%	0%	0	50%	700.000.000,00	67%	700.000.000,00	83%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	2.100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan Informasi neraca bahan pangan	%	N/A	N/A	0	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	1.400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja																
Meningkatnya nilai invetsasi	Persentase pertumbuhan investasi	%	N/A	N/A	1.014.460.520,00	N/A	1.205.400.000,00	N/A	1.474.440.000,00	N/A	1.596.884.000,00	N/A	1.734.572.400,00	N/A	7.025.756.920,00	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jenis layanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan secara online	%	N/A	N/A	344.615.520,00	N/A	551.000.000,00	N/A	606.100.000,00	N/A	666.710.000,00	N/A	733.381.000,00	N/A	2.901.806.520,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan system informasi terintegrasi	%	N/A	N/A	329.244.000,00	N/A	365.000.000,00	N/A	400.000.000,00	N/A	400.000.000,00	N/A	400.000.000,00	N/A	1.894.244.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Rp.	N/A	N/A	172.140.000,00	N/A	189.400.000,00	N/A	208.340.000,00	N/A	229.174.000,00	N/A	252.091.400,00	N/A	1.051.145.400,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	100.000.000,00	N/A	260.000.000,00	N/A	301.000.000,00	N/A	349.100.000,00	N/A	1.010.100.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal	%	N/A	N/A	168.461.000,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	168.461.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72%	0,44%	100.000.000,00	0,44%	350.000.000,00	0,44%	350.000.000,00	0,44%	350.000.000,00	0,44%	350.000.000,00	74%	1.500.000.000,00	
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola sesuai SOP	%	N/A	10,81%	100.000.000,00	27,03%	0	48,65%	0	72,97%	0	100,00%	0	100,00%	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	%	N/A	16,67%	0	16,67%	350.000.000,00	44,44%	350.000.000,00	72,22%	350.000.000,00	100,00%	350.000.000,00	100,00%	1.400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat kesempatan kerja	%	96%	0,24%	100.000.000,00	0,24%	600.000.000,00	0,24%	0	0,24%	0	0,24%	0	97%	700.000.000,00	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan ketersediaan data tenaga kerja dan pencari kerja	%	N/A	N/A	100.000.000,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen induk tenaga kerja	Dokumen	N/A	N/A	0	1	600.000.000,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 4 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN																
Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada good governance																
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi	%	66%	70%	1.153.471.000,00	75%	1.484.200.000,00	80%	1.632.500.000,00	90%	1.795.700.000,00	100%	1.975.000.000,00	100%	8.040.871.000,00	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	65,79%	70%	985.955.000,00	75%	1.300.000.000,00	80%	1.430.000.000,00	90%	1.573.000.000,00	100%	1.730.000.000,00	100%	7.018.955.000,00	Inspektorat
	Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	100%	100%	167.516.000,00	100%	184.200.000,00	100%	202.500.000,00	100%	222.700.000,00	100%	245.000.000,00	100%	1.021.916.000,00	Inspektorat
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya jumlah SKPD dengan laporan keuangan WTP	%	25%	35%	4.008.678.080,00	45%	4.744.916.818,00	55%	5.229.278.499,00	70%	5.752.206.349,00	85%	6.328.976.985,00	85%	26.064.056.731,00	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perrentase perumusan dan fasilitasi pengawasan	%	100%	100%	33.225.000,00	100%	86.500.000,00	100%	95.000.000,00	100%	104.500.000,00	100%	115.000.000,00	100%	434.225.000,00	Inspektorat
	Persentase PD yang Dilakukan pendampingan	%	100%	100%	178.565.000	100%	491.800.000,00	100%	541.000.000,00	100%	595.000.000,00	100%	655.100.000,00	100%	2.461.465.000,00	Inspektorat
Program Pengelolaan Barang Milik daerah	Persentase aset yang telah diproses sertifikasi/terdata	%	90%	92%	1.796.924.380,00	94%	1.976.616.818,00	96%	2.174.278.499,00	98%	2.391.706.349,00	100%	2.630.876.985,00	100%	10.970.403.031,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase penerapan sistem online terhadap Pajak dan retribusi daerah	%	55%	60%	1.999.963.700,00	65%	2.190.000.000,00	70%	2.419.000.000,00	75%	2.661.000.000,00	80%	2.928.000.000,00	80%	12.197.963.700,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	167.553.712.511,00	WTP	184.309.000.000,00	WTP	202.739.000.000,00	WTP	223.013.000.000,00	WTP	245.315.000.000,00	WTP	1.022.929.712.511,00	
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran dan Ketepatan penyusunan Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan	%	100%	100%	167.553.712.511,00	100%	184.309.000.000,00	100%	202.739.000.000,00	100%	223.013.000.000,00	100%	245.315.000.000,00	100%	1.022.929.712.511,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan inovasi daerah	%	35%	40%	1.000.000.000,00	45%	1.400.000.000,00	50%	800.000.000,00	55%	800.000.000,00	60%	800.000.000,00	60%	4.800.000.000,00	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	1.000.000.000,00	100%	1.400.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	4.800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	%	41%	46%	7.988.992.050,00	79%	8.307.500.000,00	93%	8.639.755.000,00	98%	8.986.200.000,00	100%	9.347.560.000,00	100%	43.270.007.050,00	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah diatas 75%	%	90%	90,02%	1.766.846.550,00	90,05%	1.855.100.000,00	95,08%	1.947.855.000,00	95,11%	2.045.200.000,00	95,14%	2.147.460.000,00	95,14%	9.762.461.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian Dan	Persentase data indikator RPJMD	%	100%	100%	5.758.845.500,00	100%	5.989.100.000,00	100%	6.228.600.000,00	100%	6.477.700.000,00	100%	6.736.800.000,00	100%	31.191.045.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Evaluasi Pembangunan Daerah	yang dapat disediakan															Pengembangan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian kebijakan umum anggaran dengan target kinerja OPD	%	100%	100%	463.300.000,00	100%	463.300.000,00	100%	463.300.000,00	100%	463.300.000,00	100%	463.300.000,00	100%	2.316.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan daerah	Persentase SDM yang tangguh dan berdaya saing	%	N/A	40%	3.141.445.830,00	50%	4.496.600.000,00	60%	4.496.600.000,00	70%	4.496.600.000,00	75%	4.496.600.000,00	75%	21.127.845.830,00	
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai yang berkinerja baik	%	N/A	40%	3.141.445.830,00	50%	4.496.600.000,00	60%	4.496.600.000,00	70%	4.496.600.000,00	75%	4.496.600.000,00	75%	21.127.845.830,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	%	N/A	22%	349.352.207.890,00	30%	402.577.709.942,80	33%	419.202.566.284,21	36%	436.445.848.153,42	38%	452.763.669.766,96	38%	2.060.342.002.037,39	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunang	%	100%	100%	339.181.647.390,00	100%	390.715.167.792,80	100%	406.902.421.001,96	100%	423.249.852.941,94	100%	439.703.721.627,31	100%	1.999.752.810.754,00	Seluruh OPD
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah produk Hukum	Produk Hukum	N/A	90	800.000.000,00	100	880.000.000,00	120	968.000.000,00	140	1.064.800.000,00	150	1.171.280.000,00	600	4.884.080.000,00	Sekretariat Daerah
	Jumlah Kasus yang terselesaikan	Kasus	N/A	50	500.000.000,00	60	500.000.000,00	70	500.000.000,00	80	500.000.000,00	90	500.000.000,00	90	2.500.000.000,00	Sekretariat Daerah
	Jumlah Kecamatan Tersosialisasi Informasi Hukum	Kecamatan	N/A	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	1	25.000.000,00	N/A	-	10	175.000.000,00	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	NA	100%	7.648.810.000,00	100%	7.763.542.150,00	100%	7.879.995.282,25	100%	7.998.195.211,48	100%	8.118.168.139,66	100%	39.408.710.783,39	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase penegasan batas wilayah Desa dan Kecamatan	%	N/A	N/A	0	20%	200.000.000,00	45%	250.000.000,00	75%	325.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	1.125.000.000,00	Sekretariat Daerah

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelayanan pemerintahan umum	%	100%	100%	796.999.600 ,00	100%	1.100.000.0 00,00	100%	1.200.000.0 00,00	100%	1.200.000.0 00,00	100%	1.350.000.0 00,00	100%	5.646.999.600,00	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian	%	N/A	N/A	0	100%	150.000.00 0,00	100%	150.000.00 0,00	100%	150.000.00 0,00	100%	150.000.000 ,00	100%	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pembentukan BUMD	%	NA	NA	0	100%	750.000.00 0,00	100%	850.000.00 0,00	100%	1.000.000.0 00,00	100%	500.000.000 ,00	100%	3.100.000.000,00	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Arsip	Persentase mengelola arsip daerah	%	N/A	100%	174.985.900 ,00	100%	98.000.000, 00	100%	32.150.000, 00	100%	382.000.00 0,00	100%	500.500.000 ,00	100%	1.187.635.900,00	Sekretariat Daerah
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan SD dan SMP yang dibina sesuai dengan standar	%	N/A	10,18%	199.765.000 ,00	29,09%	371.000.00 0,00	50,50%	420.000.00 0,00	78,59%	551.000.00 0,00	100,00%	420.000.000 ,00	100,00%	1.961.765.000,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan	%	N/A	100%	12.129.720 .460,00	100%	13.645.400 .000,00	100%	14.107.900 .000,00	100%	14.773.900 .000,00	100%	14.480.400 .000,00	100%	69.137.320.460,00	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100%	100%	12.129.720. 460,00	100%	13.645.400. 000,00	100%	14.107.900. 000,00	100%	14.773.900. 000,00	100%	14.480.400. 000,00	100%	69.137.320.460,00	Sekretariat DPRD
Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	%	100%	100%	1.764.680. 100,00	100%	2.348.000. 000,00	100%	2.353.000. 000,00	100%	2.478.000. 000,00	100%	2.483.000. 000,00	100%	11.426.680.100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	30%	34%	51.170.000, 00	39%	55.000.000, 00	43%	55.000.000, 00	48%	55.000.000, 00	52%	55.000.000, 00	52%	271.170.000,00	Kecamatan Kota Maba

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Desa dan Kelurahan																	
Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	18%	21%	41.930.000, 00	24,80%	45.000.000, 00	30%	45.000.000, 00	37%	45.000.000, 00	40%	45.000.000, 00	39,90%	221.930.000,00	Kecamatan Kota Maba	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	62.002.000, 00	100%	65.000.000, 00	100%	65.000.000, 00	100%	65.000.000, 00	100%	65.000.000, 00	100%	322.002.000,00	Kecamatan Kota Maba	
Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	N/A	0	100%	35.000.000, 00	100%	35.000.000, 00	100%	75.000.000, 00	100%	75.000.000, 00	100%	220.000.000,00	Kecamatan Kota Maba	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	23%	N/A	0	27%	26.000.000, 00	32%	26.000.000, 00	36%	26.000.000, 00	41%	26.000.000, 00	41%	104.000.000,00	Kecamatan Maba	
Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	18,50%	22%	18.705.000, 00	21,90%	25.000.000, 00	25%	25.000.000, 00	29%	25.000.000, 00	32%	25.000.000, 00	32,10%	118.705.000,00	Kecamatan Maba	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	0	100%	55.000.000, 00	100%	55.000.000, 00	100%	55.000.000, 00	100%	55.000.000, 00	100%	220.000.000,00	Kecamatan Maba	
Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	N/A	0	100%	35.000.000, 00	100%	35.000.000, 00	100%	75.000.000, 00	100%	75.000.000, 00	100%	220.000.000,00	Kecamatan Maba	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masarakat	%	21%	N/A	0	25%	25.000.000, 00	30%	25.000.000, 00	34%	25.000.000, 00	39%	25.000.000, 00	39%	100.000.000,00	Kecamatan Maba Selatan	

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	20,00%	N/A	0	23,40%	25.000.000,00	26,80%	25.000.000,00	30,20%	25.000.000,00	33,60%	25.000.000,00	33,60%	100.000.000,00	Kecamatan Maba Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	98.923.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	498.923.000,00	Kecamatan Maba Selatan
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	100%	24.207.500,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	244.207.500,00	Kecamatan Maba Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	23%	27%	24.996.000,00	32%	25.000.000,00	36%	25.000.000,00	41%	25.000.000,00	45%	25.000.000,00	45%	124.996.000,00	Kecamatan Maba Tengah
Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	17%	N/A	0	20,40%	25.000.000,00	23,80%	25.000.000,00	27,20%	25.000.000,00	30,60%	25.000.000,00	30,60%	100.000.000,00	Kecamatan Maba Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	89.945.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	489.945.000,00	Kecamatan Maba Tengah
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	100%	74.982.600,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	374.982.600,00	Kecamatan Maba Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	24%	28%	47.230.000,00	33%	55.000.000,00	37%	55.000.000,00	42%	55.000.000,00	46%	55.000.000,00	46%	267.230.000,00	Kecamatan Maba Utara
Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase Desa yang terbina dengan baik	%	18,00%	N/A	0	21,40%	25.000.000,00	24,80%	25.000.000,00	28,20%	25.000.000,00	31,60%	25.000.000,00	31,60%	100.000.000,00	Kecamatan Maba Utara

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
pemerintahan Desa	dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	74.940.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	374.940.000,00	Kecamatan Maba Utara
Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	375.000.000,00	Kecamatan Maba Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masarakat	%	20%	N/A	0	24%	27.000.000,00	29%	27.000.000,00	33%	27.000.000,00	38%	27.000.000,00	38%	108.000.000,00	Kecamatan Wasile
Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	17,50%	N/A	0	20,90%	25.000.000,00	24,30%	25.000.000,00	27,70%	25.000.000,00	31,10%	25.000.000,00	31,10%	100.000.000,00	Kecamatan Wasile
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	99.987.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	499.987.000,00	Kecamatan Wasile
Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	100%	74.990.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	374.990.000,00	Kecamatan Wasile
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	21%	25%	28.135.000,00	30%	30.000.000,00	34%	30.000.000,00	39%	30.000.000,00	43%	30.000.000,00	43%	148.135.000,00	Kecamatan Wasile Selatan
Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen	%	18,50%	N/A	0	21,90%	25.000.000,00	25,30%	25.000.000,00	28,70%	25.000.000,00	32,10%	25.000.000,00	32,10%	100.000.000,00	Kecamatan Wasile Selatan

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	74.975.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	374.975.000,00	Kecamatan Wasile Selatan
Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	100%	74.995.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	374.995.000,00	Kecamatan Wasile Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	21,50%	26%	24.070.000,00	30%	25.000.000,00	35%	25.000.000,00	39%	25.000.000,00	44%	25.000.000,00	44%	124.070.000,00	Kecamatan Wasile Tengah
Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun Dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	19,70%	N/A	0	23,10%	25.000.000,00	26,50%	25.000.000,00	29,90%	25.000.000,00	33,30%	25.000.000,00	33,30%	100.000.000,00	Kecamatan Wasile Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	74.710.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	374.710.000,00	Kecamatan Wasile Tengah
Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	100%	74.990.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	374.990.000,00	Kecamatan Wasile Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	20,80%	25%	24.995.000,00	30%	30.000.000,00	34%	30.000.000,00	38%	30.000.000,00	43%	30.000.000,00	43%	144.995.000,00	Kecamatan Wasile Timur
Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan	%	20,30%	N/A	0	23,70%	25.000.000,00	27,10%	25.000.000,00	30,50%	25.000.000,00	33,90%	25.000.000,00	33,90%	100.000.000,00	Kecamatan Wasile Timur

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	penganggaran dan pelaporan tepat waktu															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	106.712.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	506.712.000,00	Kecamatan Wasile Timur
Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	100%	74.900.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	374.900.000,00	Kecamatan Wasile Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masarakat	%	32%	36%	347.190.000,00	41%	350.000.000,00	45%	350.000.000,00	50%	350.000.000,00	54%	350.000.000,00	54%	1.747.190.000,00	Kecamatan Wasile Utara
Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	19,50%	N/A	0	22,90%	25.000.000,00	26,30%	25.000.000,00	29,70%	25.000.000,00	33,10%	25.000.000,00	33,10%	100.000.000,00	Kecamatan Wasile Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	0	100%	55.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	250.000.000,00	Kecamatan Wasile Utara
Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselelnggaranya urusan pemerintahan umum	%	100%	N/A	0	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	300.000.000,00	Kecamatan Wasile Utara
Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan	Terciptanya partisipasi masyarakat, media cetak dan elektronik dalam pengawasan pembangunan daerah	%	N/A	N/A	63.803.450,00	50,00%	2.100.000.000,00	75%	1.600.000.000,00	90%	1.850.000.000,00	100%	1.850.000.000,00	100%	7.463.803.450,00	
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik	%	N/A	15%	63.803.450,00	50%	2.100.000.000,00	75%	1.600.000.000,00	90%	1.850.000.000,00	100%	1.850.000.000,00	100%	7.463.803.450,00	Dinas Komunikasi, Informatika,

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Persandian dan Statistik
Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan	Keterlibatan lembaga adat dalam proses pembangunan di Haltim	%	67%	69%	1.113.803.450,00	71%	3.300.000.000,00	74%	2.800.000.000,00	76%	3.050.000.000,00	78%	3.050.000.000,00	78%	13.313.803.450,00	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adminitrasi Pemerintahan Desa	%	100%	100%	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	5.250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penataan Desa	Jumlah Desa Mandiri	%	75%	78,80%	0	82,60%	150.000.000,00	86,40%	150.000.000,00	90,20%	150.000.000,00	94,00%	150.000.000,00	94,00%	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase fasilitas kerjasama dengan masyarakat	%	25%	28,20%	0	31,40%	55.000.000,00	34,60%	55.000.000,00	37,80%	55.000.000,00	41,00%	55.000.000,00	41,00%	220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Cakupan peran serta pemuda dalam pembangunan	%	60%	33%	91.860.000,00	35%	4.210.000.000,00	38%	4.860.000.000,00	40%	4.760.000.000,00	43%	4.860.000.000,00	43%	18.781.860.000,00	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	%	60%	65%	91.860.000,00	70%	3.850.000.000,00	75%	4.500.000.000,00	80%	4.400.000.000,00	85%	4.500.000.000,00	85%	17.341.860.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah gugus depan yang terbina/ terakreditasi	%	N/A	100%	0	100%	360.000.000,00	100%	360.000.000,00	100%	360.000.000,00	100%	360.000.000,00	100%	1.440.000.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
MISI 5 : MEWUJUDKAN STABILITAS POLITIK, KEAMANAN, HUKUM DAN SOSIAL																
Terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik melalui peningkatkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai masyarakat melalui pendekatan agama, adat dan budaya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan																
Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	N/A	57%	875.000.000,00	68%	1.675.000.000,00	80%	1.750.000.000,00	97%	1.830.000.000,00	100%	1.590.000.000,00	100%	7.720.000.000,00	

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	N/A	N/A	0	30%	350.000.000,00	61%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	0	100%	1.050.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pesentase cakupan peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum	%	N/A	70%	750.000.000,00	75%	750.000.000,00	80%	750.000.000,00	90%	750.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	3.750.000.000,00	Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan fasilitas dan kualitas kewaspadaan diri terhadap penanganan konflik sosial	%	100%	100%	125.000.000,00	100%	575.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	730.000.000,00	100%	840.000.000,00	100%	2.920.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	%	N/A	93%	522.792.300,00	93%	761.971.530,00	93%	813.668.683,00	93%	702.035.551,30	93%	752.239.106,43	93%	3.552.707.170,73	
Program Perlindungan Dan Jaminan sosial	Persentase partisipasi masyarakat sebagai subjekpembangunan	%	N/A	100%	151.792.300,00	100%	166.971.530,00	100%	183.668.683,00	100%	202.035.551,30	100%	222.239.106,43	100%	926.707.170,73	Dinas Sosial
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam berdemokrasi	%	N/A	80%	323.000.000,00	80%	370.000.000,00	80%	380.000.000,00	80%	400.000.000,00	80%	420.000.000,00	80%	1.893.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	100%	100%	48.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	733.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya kerukunan, toleransi dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat	Persentase penguatan kualitas sosial masyarakat	%	N/A	25%	2.180.064.750,00	75%	3.562.747.175,00	75%	3.849.521.892,50	75%	4.182.974.081,75	75%	4.550.771.489,93	75%	18.326.079.389,18	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan dan penguatan Idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100%	N/A	0	100%	250.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	355.000.000,00	100%	1.185.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat guna pemantapan nilai-nilai budaya	%	N/A	25%	149.996.000,00	25%	645.000.000,00	25%	645.000.000,00	25%	645.000.000,00	25%	645.000.000,00	25%	2.729.996.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase berkembangnya solidaritas, kerjasama dan kemitraan antar kelompok masyarakat	%	100%	N/A	0	100%	434.671.550,00	100%	478.138.705,00	100%	525.952.575,00	100%	578.547.833,05	100%	2.017.310.663,55	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial	%	100%	100%	2.030.068.750,00	100%	2.233.075.625,00	100%	2.456.383.187,50	100%	2.702.021.506,25	100%	2.972.223.656,88	100%	12.393.772.725,63	Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban	Nilai	N/A	0,826	13.914.499.300,00	0,873	55.180.436.364,00	0,849	55.042.709.091,00	0,896	62.112.193.182,00	0,92	67.839.585.341,00	0,92	254.089.423.278,00	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kesiapan pencegahan bencana kebakaran	%	100%	100%	325.800.000,00	100%	325.800.000,00	100%	325.800.000,00	100%	325.800.000,00	100%	325.800.000,00	100%	1.629.000.000,00	Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja

Misi/ Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	%	10%	10%	284.405.300 ,00	35%	12.536.000. 000,00	45%	7.619.000.0 00,00	60%	7.769.575.0 00,00	80%	7.772.876.2 50,00	80%	35.981.856.550,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanganan Bencana	Persentase peningkatan sarana dan prasarana dalam penanganan bencana	%	3,2 %	3,2 %	13.304.294. 000,00	9,7%	42.318.636. 364,00	13%	47.097.909. 091,00	14%	54.016.818. 182,00	39%	59.740.909. 091,00	39%	216.478.566.728,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**2021
2025**

BAB 7

**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (PD). Target indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat daerah (PD) merupakan ukuran pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan cara memebandingkan target indinkator pada akhir periode perencanaan yang akan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Urusan atau program yang bersifat strategis menjadi perhatian dalam pendanaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan yang sistematis, pengendalian, dan evaluasi yang terintegrasi untuk mengukur konsistensi dan sinergi antara perencanaan dan penganggaran dalam durasi waktu pelaksanaan RPJMD ini.

Kerangka pendanaan merupakan menivestasi dari Indikasi rencana program sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025, yang secara sistematis dilaksanakan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Penjabaran program Perangkat Daerah (PD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan berdasarkanKapasitas riil keuangan daerah yakni sebesar Rp 6.846.303.583,71 pada tahun 2021, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar Rp 164.390.333.544,36. Besaran kapasitas riil fiskal ditentukan oleh besarnya total pendapatan dikurangi oleh belanja rutin, wajib dan mengikat di tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil fiskal menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil fiskal.

Tabel 7. 1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendapatan	916.659.274.941	960.009.502.999	982.250.156.756	1.002.933.493.722	1.023.616.830.688
2	Pinjaman Dalam Negeri					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-49.499.600.845	-9.633.265.221	8.974.796.757	25.864.897.322	42.754.997.887
	Total Penerimaan	867.159.674.096	950.376.237.778	991.224.953.514	1.028.798.391.045	
	Dikurangi:					
4	Belanja Operasi	513.716.329.204	514.860.672.784	516.119.450.722	517.504.106.454	518.888.762.186
5	Belanja Modal	291.702.543.406	291.702.543.406	291.702.543.406	291.702.543.406	291.702.543.406
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	6.846.303.583,71	103.519.056.826,68	218.877.247.080,28	164.390.333.544,36	174.253.753.557

Keterangan : Angka dalam Miliar

Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2021, diolah

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode pelaksanaan pembangunan jangka menengah, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka dirumuskan program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Dalam penjabaran rencana pembangunan jangka menengah ini, termuat secara sistematis program-program prioritas yang disarikan berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur periode 2021-2025. Adapun dalam penjabarannya tetap berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana strategis berdasarkan kondisi factual, sehingga dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Halmahera Timur 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam tabel di atas. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan perumusan hasil verifikasi terhadap program, indikator kinerja, kelompok sasaran yang ditunjang target pendanaan indikatif dari setiap rancangan program. Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif ini mampu menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD dan berapa perkiraan kebutuhan pendanaannya guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan bidang urusan. Penyajian secara detil gambaran program RPJMD beserta indikasi alokasi anggaran dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 sebagai berikut.

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD	
					2021		2022		2023		2024		2025						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					409.694.21 0.994,00		564.484.85 7.825,33		624.798.81 6.129,92		736.962.02 3.067,99		791.168.006. 895,22		3.127.107.91 4.917,46			
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					50.120.945. 000,00		49.248.526. 100,00		48.365.155. 578,00		47.500.452. 466,44		49.343.270.5 65,10		244.578.349. 709,54		
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD teragreditasi	%	96%	98,01%	10.555.222.0 80,00	99%	10.344.117.6 38,40	100%	10.137.235.2 85,63	100%	9.934.490.57 9,92	100%	10.331.870.20 3,12	100%	51.302.935.78 7,07	Dinas Pendidikan
				Persentase SMP teragreditasi	%	74%	75,55%	13.255.250.4 20,00	85%	12.990.145.4 11,60	90%	12.730.342.5 03,37	95%	12.475.735.6 53,30	100%	12.974.765.07 9,43	100%	64.426.239.06 7,70	Dinas Pendidikan
				Persentase PAUD teragreditasi	%	48%	50%	10.555.222.0 80,00	60%	10.344.117.6 38,40	65%	10.137.235.2 85,63	70%	9.934.490.57 9,92	75%	10.331.870.20 3,12	75%	51.302.935.78 7,07	Dinas Pendidikan
				Cakupan Sekolah Non Formal/ kesetaraan	%	48%	50%	13.255.250.4 20,00	60%	12.990.145.4 11,60	70%	12.730.342.5 03,37	75%	12.475.735.6 53,30	80%	12.974.765.07 9,43	80%	64.426.239.06 7,70	Dinas Pendidikan
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaa n Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini	%	38%	40%	1.000.000.00 0,00	50%	1.030.000.00 0,00	55%	1.050.000.00 0,00	60%	1.070.000.00 0,00	65%	1.090.000.000, 00	65%	5.240.000.000, 00	Dinas Pendidikan
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukup an pendidik dan tenaga kependidika n	%	63%	65%	500.000.000, 00	70%	520.000.000, 00	72%	530.000.000, 00	75%	540.000.000, 00	80%	550.000.000,0 0	80%	2.640.000.000, 00	Dinas Pendidikan
				Rasio Guru tersertifikasi	%	28%	30%	1.000.000.00 0,00	35%	1.030.000.00 0,00	40%	1.050.000.00 0,00	42%	1.070.000.00 0,00	45%	1.090.000.000, 00	45%	5.240.000.000, 00	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					174.906.10 7.230,00		305.691.17 5.992,00		361.711.27 7.192,00		428.176.95 2.180,00		476.444.825. 907,00		1.746.930.33 8.506,00	
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar di Fasyankes	%	30%	37,68%	47.845.000.000,00	49,67%	84.925.000.000,00	65,38%	117.159.500.000,00	83,13%	171.907.825.000,00	90%	200.285.213.750,00	100%	622.122.538.750,00	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang terakreditasi dan reakreditasi	%	75%	80%	1.015.210.000,00	85%	1.000.000.000,00	89%	950.000.000,00	92%	850.000.000,00	95%	800.000.000,00	95%	4.615.210.000,00	Dinas Kesehatan
		Penurunan angka Persentase <i>Stunting</i> pada Balita	%	85%	90%	162.000.000,00	92%	194.400.000,00	94%	233.280.000,00	97%	303.264.000,00	100%	394.243.200,00	100%	1.287.187.200,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan balita gizi buruk dan <i>Wasting</i> yang tertangani	%	100%	100%	1.177.210.000,00	100%	1.194.400.000,00	100%	1.183.280.000,00	100%	1.153.264.000,00	100%	1.194.243.200,00	100%	5.902.397.200,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan layanan UKP dan UKM	%	100%	100%	2.354.420.000,00	100%	2.388.800.000,00	100%	2.366.560.000,00	100%	2.306.528.000,00	100%	2.388.486.400,00	100%	11.804.794.400,00	Dinas Kesehatan
		Persentase Ketersediaan data dan informasi kesehatan	%	50%	55%	1.300.000.000,00	65%	1.430.000.000,00	75%	1.573.000.000,00	85%	1.730.300.000,00	90%	2.595.450.000,00	90%	8.628.750.000,00	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	75%	78%	71.000.022.335,00	80%	126.616.081.996,00	83%	137.451.501.996,00	89%	140.040.810.000,00	95%	144.928.890.000,00	95%	620.037.306.327,00	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD		
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		RSUD sesuai standar																	
		Cakupan layanan RSUD	%	100%	100%	7.893.119.555,00	100%	10.316.081.996,00	100%	12.271.501.996,00	100%	13.960.810.000,00	100%	15.928.890.000,00	100%	60.370.403.552,00	RSUD		
		Peningkatan Mutu	%	45%	50%	399.000.000,00	60%	2.489.000.000,00	70%	2.737.900.000,00	80%	3.011.690.000,00	90%	3.312.859.000,00	90%	11.950.449.000,00	RSUD		
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana RSUD Maba sesuai dengan standar	%	N/A	65%	31.328.607.190,00	75%	57.000.000.000,00	85%	62.000.000.000,00	95%	62.450.000.000,00	100%	63.000.000.000,00	100%	275.778.607.190,00	RSUD		
		Ketersediaan sistem manajemen informasi RS	Jumlah	N/A	N/A	0	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	4.000.000.000,00	RSUD		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Tenaga Medis dan paramedis	Jumlah	N/A	N/A	0	10	4.800.000.000,00	13	8.400.000.000,00	16	12.000.000.000,00	19	15.600.000.000,00	19	40.800.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan Sesuai Standar	%	0%	20%	255.000.000,00	40%	306.000.000,00	60%	367.200.000,00	80%	440.640.000,00	100%	528.768.000,00	100%	1.897.608.000,00	Dinas Kesehatan		
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan RS	%	0%	0%	0	25%	525.000.000,00	50%	540.000.000,00	75%	550.000.000,00	9500%	625.000.000,00	99%	2.240.000.000,00	RSUD		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Pelayanan perbekalan kesehatan, obat dan BMHP	%	100%	100%	7.041.598.150,00	100%	7.770.000.000,00	75%	8.935.500.000,00	95%	10.722.600.000,00	100%	16.083.900.000,00	100%	50.553.598.150,00	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD		
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase ketersediaan Alkes	%	25%	30%	1.734.920.000,00	40%	1.908.412.000,00	50%	2.099.253.200,00	65%	2.414.141.180,00	80%	2.776.262.357,00	80%	10.932.988.737,00	Dinas Kesehatan		
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	%	70%	75%	680.000.000,00	80%	748.000.000,00	85%	822.800.000,00	90%	905.080.000,00	95%	1.357.620.000,00	95%	4.513.500.000,00	Dinas Kesehatan		
		Persentase tempat pengelolaan makanan dan depot air minum yang memenuhi syarat	%	70%	75%	250.000.000,00	80%	375.000.000,00	85%	562.500.000,00	90%	843.750.000,00	95%	1.265.625.000,00	95%	3.296.875.000,00	Dinas Kesehatan		
		Persentase rumah tangga sehat	%	65%	70%	470.000.000,00	75%	705.000.000,00	80%	1.057.500.000,00	85%	1.586.250.000,00	95%	2.379.375.000,00	95%	6.198.125.000,00	Dinas Kesehatan		
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				191.803.357.554,00		208.221.925.114,33		218.671.280.643,42		258.649.975.056,50		255.780.015.435,77		1.133.126.553.804,02			
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kabupaten/	%	14,98%	14,98%	55.488.623.371,00	15,73%	8.312.195.781,00	16,98%	8.416.098.228,00	18,48%	8.542.339.702,00	20%	8.672.183.265,00	20%	89.431.440.347,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD
							2021		2022		2023		2024		2025				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Kota (IKK Outcome)															
				Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Primer dan Sekunder	%	60,77%	60,77%	51.743.246.4 50,00	65,77%	6.469.700.00 0,00	76%	14.253.480.0 00,00	86%	23.036.725.6 00,00	100%	33.409.516.34 4,00	100%	128.912.668.3 94,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatka n akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung terhadap rumah tangga	%	19,34%	19,34%	5.670.919.73 3,00	28,17%	32.000.000.0 00,00	41,37%	47.836.919.5 92,30	56,98%	56.570.781.4 26,95	75%	65.304.643.26 1,61	75%	207.383.264.0 13,86	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Persentase Rumah Tangga Yang terlayani akses Air Minum Melalui Layanan PDAM	%	N/A	100,00%	300.000.000,0 0	100,00%	1.000.000.000, 00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100%	1.300.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang	%	4,02%	4,02%	7.500.000.00 0,00	7,72%	14.800.000.0 00,00	18,72%	21.088.082.9 01,55	30,72%	23.005.181.3 47,15	45,42%	28.181.347.15 0,26	45,42%	94.574.611.39 8,96	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		memperole h layanan pengolahan air limbah domestik																
1 03 06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik pada kawasan permukima n	%	22,50%	22,50%	1.581.000.00 0,00	23,11%	1.623.862.66 6,67	23,81%	1.672.866.58 8,24	24,33%	1.709.446.98 0,39	25%	1.756.392.081, 57	25%	8.343.568.316, 86	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1 03 07	Program Pengembangan Permukiman	Cakupan jalan dan jembatan pada kawasan permukima n dalam kondisi baik	%	75%	75%	20.000.000.0 00,00	82%	18.666.666,6 7	90%	21.333.333,3 3	96%	16.000.000,0 0	100%	10.933.333,33	100%	20.066.933.33 3,33	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Nilai	22	22	200.000.000, 00	25	250.000.000, 00	30	300.000.000, 00	35	360.000.000, 00	40	400.000.000,0 0	50	1.510.000.000, 00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1 03 09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	8%	8%	5.000.000.00 0,00	13,50%	8.437.500.00 0,00	19%	11.562.500.0 00,00	25%	15.312.500.0 00,00	31%	19.375.000.00 0,00	31%	59.687.500.00 0,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapa n Jalan	Km	179,34	35,57	43.000.000.0 00,00	51,50	134.850.000. 000,00	94,50	111.900.000. 000,00	143,61	128.397.000. 000,00	181,11	97.050.000.00 0,00	360,45	515.197.000.0 00,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/te knisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	10	10	200.000.000, 00	8	160.000.000, 00	6	120.000.000, 00	10	200.000.000, 00	6	120.000.000,0 0	40	800.000.000,0 0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang/Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR)	PERDA	1	1	1.119.568.000,00	1	300.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	5	3.969.568.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Pengembangan Kawasan Strategis Tematik (Kabupaten)	Dokumen	N/A	N/A	0	0	0	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	N/A	1.950.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.646.048.050,00	1.747.075.500,00	1.698.103.050,00	1.624.130.500,00	1.550.158.050,00	14.265.515.250,00							
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	Unit	281	281	21.075.000,00	350	26.250.000,00	400	30.000.000,00	450	33.750.000,00	500	37.500.000,00	1981	148.575.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	Ha	228.805,61	228.805,61	1.144.028,05	228.811,11	1.144.055,55	228.816,61	1.144.083,05	228.822,11	1.144.110,55	228.827,61	1.144.138,05	228.827,61	5.720.415,25	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1 04 04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh	Ha	27,89	27,89	502.020,00	22,39	403.020,00	16,89	304.020,00	11,39	205.020,00	5,89	106.020,00	5,89	1.520.100,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas	Unit	5	5	6.000.000,00	2	0	2	0	2	0	2	0	13	6.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Umum) (IKK Outcome)																
1 04 06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Cakupan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	%	8%	N/A	0	8%	200.000.000, 00	10%	250.000.000, 00	11%	275.000.000, 00	12%	300.000.000,0 0	41%	1.025.000.000, 00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					1.360.205.3 00,00		13.611.800. 000,00		8.694.800.0 00,00		8.845.375.0 00,00		8.848.676.25 0,00		41.360.856.5 50,00		
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase cakupan peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum	%	N/A	70%	750.000.000, 00	75%	750.000.000, 00	80%	750.000.000, 00	90%	750.000.000, 00	100%	750.000.000,0 0	100%	3.750.000.000, 00	Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja	
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan Mitigasi dan Pengurangi n Resiko Bencana	%	10%	10%	284.405.300, 00	35%	12.536.000.0 00,00	45%	7.619.000.00 0,00	60%	7.769.575.00 0,00	80%	7.772.876.250, 00	80%	35.981.856.55 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kesiapan pencegahan bencana kebakaran	%	100%	100%	325.800.000, 00	100%	325.800.000, 00	100%	325.800.000, 00	100%	325.800.000, 00	100%	325.800.000,0 0	100%	1.629.000.000, 00	Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15.486.155.050,00		45.153.355.069,00		50.216.099.666,50		57.446.827.815,05		63.513.919.687,36		231.816.357.287,91		
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase berkembangnya solidaritas, kerjasama dan kemitraan antar kelompok masyarakat	%	100%	N/A	0	100%	434.671.550,00	100%	478.138.705,00	100%	525.952.575,50	100%	578.547.833,05	100%	2.017.310.663,55	Dinas Sosial	
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial	%	100%	100%	2.030.068.750,00	100%	2.233.075.625,00	100%	2.456.383.187,50	100%	2.702.021.506,25	100%	2.972.223.656,88	100%	12.393.772.725,63	Dinas Sosial	
1 06 05	Program Perlindungan Dan Jaminan sosial	Persentase partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan	%	N/A	100%	151.792.300,00	100%	166.971.530,00	100%	183.668.683,00	100%	202.035.551,30	100%	222.239.106,43	100%	926.707.170,73	Dinas Sosial	
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase peningkatan sarana dan prasarana dalam penanganan bencana	%	3,2 %	3,2 %	13.304.294.000,00	9,7%	42.318.636.364,00	13%	47.097.909.091,00	14%	54.016.818.182,00	39%	59.740.909.091,00	39%	216.478.566.728,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					34.956.563.079,00		71.897.508.085,00		67.765.001.605,42		74.324.507.906,66		65.685.895.854,03		314.831.447.163,11		
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					200.000.000,00		950.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		2.200.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD
					2021		2022		2023		2024		2025						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen induk tenaga kerja	Dok	N/A	N/A	0	1	600.000.000,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2 07 03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikas i kompetensi	%	N/A	16,67%	0	16,67%	350.000.000,00	44,44%	350.000.000,00	72,22%	350.000.000,00	100,00 %	350.000.000,00	100,00 %	1.400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan ketersedian data tenaga kerja dan pencari kerja	%	N/A	N/A	100.000.000,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		Persentase tenaga kerja yang di tempatkan	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola sesuai SOP	%	N/A	10,81%	100.000.000,00	27,03%	0	48,65%	0	72,97%	0	100,00 %	0	100,00 %	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					370.000.000,00		1.456.650.000,00		1.544.181.900,00		1.643.230.823,40		1.755.403.864,79		6.769.466.588,19			
2 08 02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Meningkatn ya pemahaman masyarakat tentang perlunya perlindunga n terhadap perempuan dan anak (org)	%	N/A	10%	125.000.000,00	20%	143.750.000,00	30%	165.312.500,00	40%	190.109.375,00	50%	218.625.781,25	50%	842.797.656,25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban KDRT yang melapor tertangani	%	67,89%	3,60%	150.000.000, 00	3,60%	155.400.000, 00	3,60%	160.994.400, 00	3,60%	166.790.198, 40	3,60%	172.794.645,5 4	85,89%	805.979.243,9 4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2 08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perangkat daerah yang menyediaka n data gender dan anak	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2 08 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Desa rawan pangan	Desa	45	52	95.000.000,0 0	47	590.000.000, 00	42	590.000.000, 00	37	590.000.000, 00	30	590.000.000,0 0	30	2.455.000.000, 00	Dinas Ketahanan Pangan	
2 08 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Bahan Pangan yang dinyatakan aman	%	20%	0%	0	40%	100.000.000, 00	60%	100.000.000, 00	80%	100.000.000, 00	100%	100.000.000,0 0	100%	400.000.000,0 0	Dinas Ketahanan Pangan	
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Desa Layak Anak	%	N/A	N/A	0	20%	172.500.000, 00	35%	198.375.000, 00	45%	228.131.250, 00	55%	262.350.938,0 0	55%	861.357.188,0 0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Terfasilitasin ya kegiatan forum anak (jml forum)	Forum	1	N/A	0	1	100.000.000, 00	1	115.000.000, 00	1	132.250.000, 00	1	152.087.500,0 0	5	499.337.500,0 0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD	
					2021		2022		2023		2024		2025							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perempuan dan Anak Korban kekerasan termasuk TPPO dan perempuan dalam kondisi khusus yang dilayani sesuai standar	%	N/A	N/A	0	10%	195.000.000, 00	10%	214.500.000, 00	10%	235.950.000, 00	10%	259.545.000,0 0	50%	904.995.000,0 0	Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								1.050.000.0 00,00		1.050.000.0 00,00		700.000.00 0,00		700.000.000, 00		3.500.000.00 0,00	
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaa n infrastruktur cadangan pangan	%	33%	N/A	0	50%	700.000.000, 00	67%	700.000.000, 00	83%	350.000.000, 00	100%	350.000.000,0 0	100%	2.100.000.000, 00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan Informasi neraca bahan pangan	%	N/A	N/A	0	100%	350.000.000, 00	100%	350.000.000, 00	100%	350.000.000, 00	100%	350.000.000,0 0	100%	1.400.000.000, 00	Dinas Ketahanan Pangan	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								3.064.400.0 00,00		2.422.288.0 00,00		1.640.333.7 60,00		883.540.435, 00		8.681.532.82 8,00	
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Cakupan Pengelolaan Izin Lokasi	%	40%	50%	0	60%	170.000.000, 00	70%	173.400.000, 00	80%	176.868.000, 00	90%	180.405.360,0 0	90%	700.673.360,0 0	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD
					2021		2022		2023		2024		2025						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 10 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Kasus Sengketa Tanah	%	80%	80%	100.000.000,00	80%	102.000.000,00	90%	104.040.000,00	90%	106.120.800,00	100%	108.243.216,00	100%	520.404.016,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan an fasilitas umum	%	10%	10%	570.970.633,00	40%	1.142.400.000,00	70%	1.144.848.000,00	90%	807.344.960,00	100%	469.891.859,00	100%	4.135.455.452,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 10 06	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	%	10%	10%	0	10%	650.000.000,00	10%	200.000.000,00	10%	250.000.000,00	10%	125.000.000,00	50%	1.225.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan Informasi Nilai Zona Tanah	%	N/A	N/A	0	50%	1.000.000.000,00	80%	800.000.000,00	100%	300.000.000,00	N/A	0	100%	2.100.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					4.307.000.000,00		8.884.312.000,00		5.762.342.000,00		5.686.964.600,00		5.629.341.444,00		30.269.960.044,00			
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah ketersediaa n dokumen perencanaan lingkungan	Dokumen	N/A	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	350.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	5	1.650.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kenaikan Nilai IKLH	%	80,02%	80,61%	475.000.000,00	80,81%	484.500.000,00	81,02%	492.980.000,00	81,26%	501.460.000,00	82%	509.940.000,00	82%	2.463.880.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luasan RTH yang terpelihara	%	50%	50%	420.000.000,00	60%	1.970.000.000,00	70%	420.000.000,00	80%	420.000.000,00	90%	420.000.000,00	90%	3.650.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD
					2021		2022		2023		2024		2025						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	90%	90%	75.000.000,00	90%	110.112.000,00	90%	110.112.000,00	90%	111.612.000,00	90%	113.142.000,00	90%	519.978.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 11 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	%	15%	15%	300.000.000,00	20%	306.000.000,00	30%	312.120.000,00	40%	318.000.000,00	50%	324.000.000,00	50%	1.560.120.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang disuluh	Orang	N/A	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	500.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan kelompok sadar lingkungan	Kelompok/Lembaga	N/A	N/A	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	200.000.000,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	%	90%	90%	100.000.000,00	90%	102.000.000,00	90%	104.000.000,00	90%	106.000.000,00	90%	108.243.216,00	90%	520.243.216,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengangkutan Sampah	Kecamatan	2	1	2.337.000.000,00	1	5.161.700.000,00	2	3.823.130.000,00	3	3.979.892.600,00	3	3.904.016.228,00	3	19.205.738.828,00	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2.108.586.000,00		2.372.939.080,00		2.352.770.306,00		2.489.678.521,30		2.637.585.102,37		11.961.559.009,67		
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran sipil yang diterbitkan	%	90%	94%	1.222.674.000,00	95%	1.283.807.700,00	96%	1.347.998.085,00	97%	1.415.397.989,25	100%	1.486.167.888,71	100%	6.756.045.662,96	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	%	90%	96%	414.382.800,00	97%	435.101.940,00	98%	456.857.037,00	99%	479.699.888,85	100%	503.684.883,29	100%	2.289.726.549,14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah PD yang telah ber PKS pemanfaatan data kependudukan	%	13%	40%	92.079.600,00	100%	147.327.360,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100%	239.406.960,00	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
		Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	%	90%	90%	379.449.600,00	95%	398.422.080,00	100%	418.343.184,00	100%	439.260.343,20	100%	461.223.360,36	100%	2.096.698.567,56	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	Dokumen	N/A	N/A	0	1	57.780.000,00	1	66.447.000,00	1	76.414.050,00	1	87.876.157,50	1	288.517.207,50	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase layanan jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	%	N/A	N/A	0	40%	50.500.000,00	60%	63.125.000,00	80%	78.906.250,00	100%	98.632.812,50	100%	291.164.062,50	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.199.996.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		8.799.996.000,00	
2 13 02	Program Penataan Desa	Jumlah Desa Mandiri	%	75%	78,80%		82,60%	150.000.000,00	86,40%	150.000.000,00	90,20%	150.000.000,00	94,00%	150.000.000,00	94,00%	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase fasilitas kerjasama dengan masyarakat	%	25%	28,20%		31,40%	55.000.000,00	34,60%	55.000.000,00	37,80%	55.000.000,00	41,00%	55.000.000,00	41,00%	220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adminitrasi Pemerintah an Desa	%	100%	100%	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	5.250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum	%	N/A	25%	149.996.000,00	25%	645.000.000,00	25%	645.000.000,00	25%	645.000.000,00	25%	645.000.000,00	25%	2.729.996.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Adat guna pemantapan nilai-nilai budaya															
214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA					4.719.803.800,00		4.867.897.914,00		5.020.954.851,42		5.179.165.096,96		5.342.728.177,87		25.130.549.840,25	
21402	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	4	4	130.000.000,00	4	140.400.000,00	3	151.632.000,00	3	163.762.560,00	2	176.863.564,80	2	762.658.124,80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
21403	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	%	80%	85%	4.589.803.800,00	90%	4.727.497.914,00	95%	4.869.322.851,42	100%	5.015.402.536,96	100%	5.165.864.613,07	100%	24.367.891.715,45	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					14.755.000.000,00		15.225.909.091,00		17.053.595.977,00		16.919.758.248,00		17.487.414.073,00		81.441.677.389,00	
21502	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Layanan LLAJ	%	10%	10%	10.125.000.000,00	15%	11.725.000.000,00	20%	12.475.000.000,00	25%	13.225.000.000,00	30%	13.975.000.000,00	100%	61.525.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanak an uji berkala	Unit	1400	1400	280.000.000,00	1500	300.000.000,00	1600	320.000.000,00	1700	340.000.000,00	1800	360.000.000,00	8000	1.600.000.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD		
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Rasio konektivitas	Nilai	0,8	0,2	200.000.000,00	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	1	200.000.000,00	Dinas Perhubungan		
		Persentase ijin penyelenggaraan dan prasarana parkir	%	20%	20%	750.000.000,00	20%	750.000.000,00	20%	750.000.000,00	20%	750.000.000,00	20%	750.000.000,00	100%	3.750.000.000,00	Dinas Perhubungan		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Jumlah Penumpang Melalui Pelabuhan/ Dermaga	Orang	2970	2970	100.000.000,00	3267	110.000.000,00	3594	121.000.000,00	3953	133.100.000,00	4348	15.000.000,00	18132	479.100.000,00	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Jumlah Arus Barang Melalui Pelabuhan/ Dermaga	Ton	5500	5500	100.000.000,00	6050	110.000.000,00	6655	121.000.000,00	7321	133.100.000,00	8053	15.000.000,00	33579	479.100.000,00	Dinas Perhubungan		
		Peningkatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang di Operasikan dan dipelihara	Unit	1	1	200.000.000,00	1	230.909.091,00	1	266.595.977,00	1	338.558.248,00	1	372.414.073,00	1	1.408.477.389,00	Dinas Perhubungan		
		Peningkatan Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun / Tambatan Perahu	Unit	43	2	3.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	2	3.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	4	12.000.000.000,00	Dinas Perhubungan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.063.803.450,00		3.100.000.000,00		1.600.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		9.463.803.450,00		
2 16 02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah Desa Terlayani Jaringan Telekomunikasi	Desa	95	95	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	0	100	0	100	0	100	2.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik	%	N/A	15%	63.803.450,00	50%	2.100.000.000,00	75%	1.600.000.000,00	90%	1.850.000.000,00	100%	1.850.000.000,00	100%	7.463.803.450,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					100.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		1.600.000.000,00		
2 17 03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	%	52,17%	N/A	0	55,65%	75.000.000,00	59%	75.000.000,00	62,61%	75.000.000,00	66,09%	75.000.000,00	66,09%	300.000.000,00	Disperindagkop dan UKM	
2 17 05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi	%	26,09%	N/A	0	36,52%	200.000.000,00	46,95%	200.000.000,00	57,38%	200.000.000,00	67,81%	200.000.000,00	67,81%	800.000.000,00	Disperindagkop dan UKM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2 17 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	Jumlah	50,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	200,00	500.000.000,00	Disperindagkop dan UKM	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					1.014.460.520,00		1.205.400.000,00		1.474.440.000,00		1.596.884.000,00		1.734.572.400,00		7.025.756.920,00		
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Rp	N/A	N/A	172.140.000,00	N/A	189.400.000,00	N/A	208.340.000,00	N/A	229.174.000,00	N/A	252.091.400,00	N/A	1.051.145.400,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	100.000.000,00	N/A	260.000.000,00	N/A	301.000.000,00	N/A	349.100.000,00	N/A	1.010.100.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jenis layanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan secara online	%	N/A	N/A	344.615.520,00	N/A	551.000.000,00	N/A	606.100.000,00	N/A	666.710.000,00	N/A	733.381.000,00	N/A	2.901.806.520,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal	%	N/A	N/A	168.461.000,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	168.461.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	
2 18 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan sistem informasi terintegrasi	%	N/A	N/A	329.244.000,00	N/A	365.000.000,00	N/A	400.000.000,00	N/A	400.000.000,00	N/A	400.000.000,00	N/A	1.894.244.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.117.913.3 09,00		24.886.000. 000,00		24.722.428. 571,00		31.807.142. 857,00		22.802.142.8 57,00		109.335.627. 594,00		
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasi lan rendah yang berprestasi	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	N/A	10%	605.454.230, 00	12%	3.420.000.00 0,00	13%	4.200.000.00 0,00	15%	4.550.000.00 0,00	17%	4.210.000.000, 00	67%	16.985.454.23 0,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Persentase Wirusaha Muda	%	N/A	N/A	0	20%	500.000.000, 00	20%	600.000.000, 00	40%	1.200.000.00 0,00	20%	700.000.000,0 0	100%	3.000.000.000, 00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Persentase Pemuda yang memiliki ktrampilan dan keahlian	%	N/A	5,4%	600.000.000, 00	24,6%	696.000.000, 00	30%	876.000.000, 00	30%	900.000.000, 00	10%	660.000.000,0 0	100%	3.732.000.000, 00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Persentase kolaborasi organisasi kepemudaa n	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kemitraan dan sumber daya kesehatan Masvarakat	Jumlah	N/A	5	150.000.000, 00	8	1.000.000.00 0,00	12	1.571.428.57 1,00	14	1.857.142.85 7,00	16	1.957.142.857, 00	16	6.535.714.285, 00	Dinas pemuda dan Olahraga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
21904	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana olahraga	Kecamatan	1	1	757.599.079,00	2	6.000.000.000,00	3	8.200.000.000,00	3	8.200.000.000,00	1	4.000.000.000,00	10	27.157.599.079,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Cakupan Pembinaan atlet muda	%	N/A	20%	100.000.000,00	10%	500.000.000,00	15%	750.000.000,00	40%	1.000.000.000,00	5%	150.000.000,00	90%	2.500.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Persentase Atlet Berprestasi (daerah/nasional/ internasional) terhadap pembinaan atlet muda	%	N/A	3,6%	0	18,1%	0	21,5%	0	26,1%	0	30,6%	0	100%	0	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Cakupan Pelatih yang bersertifikat	%	N/A	14%	123.000.000,00	23%	250.000.000,00	23%	275.000.000,00	33%	500.000.000,00	7%	150.000.000,00	100%	1.298.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR)	Unit	1	2	2.500.000.000,00	3	7.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	3	7.500.000.000,00	2	5.000.000.000,00	11	25.000.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Cakupan Tenaga Olahraga yang bersertifikat	Orang	N/A	30	150.000.000,00	40	250.000.000,00	20	175.000.000,00	30	175.000.000,00	50	350.000.000,00	170	1.100.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	%	60%	65%	91.860.000,00	70%	3.850.000.000,00	75%	4.500.000.000,00	80%	4.400.000.000,00	85%	4.500.000.000,00	85%	17.341.860.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	
		Cakupan Pembinaan Kepramukaan	%	N/A	0%	0	15%	150.000.000,00	25%	250.000.000,00	35%	350.000.000,00	25%	250.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Pramuka yang berprestasi	Orang	N/A	16	40.000.000,00	30	150.000.000,00	35	175.000.000,00	40	200.000.000,00	45	225.000.000,00	166	790.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Cakupan Sarana dan prasarana kepramukaan	%	N/A	N/A	0	22%	620.000.000,00	22%	650.000.000,00	33%	975.000.000,00	22%	650.000.000,00	100%	2.895.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah gugus depan yang terbina/terakreditasi	%	N/A	100%		100%	360.000.000,00	100%	360.000.000,00	100%	360.000.000,00	100%	360.000.000,00	100%	1.440.000.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.090.000.000,00		2.137.000.000,00		2.186.350.000,00		2.238.167.500,00		8.651.517.500,00	
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pembinaan lembaga kesenian dan budaya	%	N/A	N/A	0	30%	340.000.000,00	35%	357.000.000,00	55%	374.850.000,00	60%	393.592.500,00	70%	1.465.442.500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 03	Program Pengembangan Kesenian tradisional	Persentase komunitas atau sanggar yang difasilitasi	%	N/A	N/A	0	N/A	450.000.000,00	N/A	450.000.000,00	N/A	450.000.000,00	N/A	450.000.000,00	N/A	1.800.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	cakupan Pembinaan dan pelestarian sejarah untuk mendukung pengembangan kegiatan wisata	%	N/A	N/A	0	30%	900.000.000,00	40%	930.000.000,00	50%	961.500.000,00	55%	994.575.000,00	55%	3.786.075.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2 22 05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian budaya dan cagar budaya	%	N/A	N/A	0	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	1.600.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
					371.000.000,00													
2 23 02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan SD dan SMP yang dibangun sesuai dengan standar	%	N/A	10,18%	199.765.000,00	29,09%	371.000.000,00	50,50%	420.000.000,00	78,59%	551.000.000,00	100%	420.000.000,00	100%	1.961.765.000,00	Sekretariat Daerah	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
					98.000.000,00													
2 24 02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase mengelola arsip daerah	%	N/A	100%	174.985.900,00	100%	98.000.000,00	100%	32150000	100%	382.000.000,00	100%	500.500.000,00	100%	1.187.635.900,00	Sekretariat Daerah	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
					51.233.317.120,00		78.172.670.000,00		79.326.595.000,00				87.697.663.313,00		366.613.828.683,00			
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN																	
					15.530.000.000,00		17.999.500.000,00		20.699.425.000,00		23.804.338.250,00		27.374.989.563,00		105.408.252.813,00			
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	%	N/A	5%	11.360.000.000,00	5%	13.064.000.000,00	5%	15.023.600.000,00	5%	17.277.140.000,00	5%	19.868.711.000,00	5%	76.593.451.000,00	Dinas Kelautan Perikanan	
		Persentase produksi perikanan tangkap	%	N/A	10%	1.740.000.000,00	10%	2.091.000.000,00	10%	2.404.650.000,00	10%	2.765.347.000,00	10%	3.180.149.625,00	10%	12.181.146.625,00	Dinas Kelautan Perikanan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3 25 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatn ya angka konsumsi ikan	kg/ kapita	N/A	39,71	2.430.000.00 0,00	40,9	2.844.500.00 0,00	42,12	3.271.175.00 0,00	43,39	3.761.851.25 0,00	44,69	4.326.128.938, 00	44,69	16.633.655.18 8,00	Dinas Kelautan Perikanan	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
						-		14.410.000. 000,00		13.599.000. 000,00		13.692.450. 000,00		13.790.572.5 00,00		55.492.022.5 00,00		
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penyiapan daya tarik destinasi (objek wisata)	%	30%	30%	0	35%	12.630.000.0 00,00	40%	11.730.000.0 00,00	45%	11.730.000.0 00,00	70%	11.730.000.00 0,00	70%	47.820.000.00 0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pembinaan Usaha Jasa pariwisata serta pengemban gan kapasitas kelembagaa n dan SDM	%	N/A	N/A	0	10%	1.780.000.00 0,00	15%	1.869.000.00 0,00	20%	1.962.450.00 0,00	20%	2.060.572.500, 00	25%	7.672.022.500, 00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
						35.622.497. 120,00		36.863.170. 000,00		36.705.670. 000,00		36.730.670. 000,00		36.730.670.0 00,00		182.652.677. 120,00		
3 27 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaa n sarana pertanian	%	25%	30%	14.709.640.0 00,00	35,50%	13.066.640.0 00,00	41,00%	13.216.640.0 00,00	46,50%	13.216.640.0 00,00	52,00%	13.216.640.00 0,00	52%	67.426.200.00 0,00	Dinas Pertanian	
3 27 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaa n prasarana pertanian	%	25%	30%	11.648.192.0 00,00	45%	13.395.530.0 00,00	45%	13.395.530.0 00,00	45%	13.395.530.0 00,00	45%	13.395.530.00 0,00	45%	65.230.312.00 0,00	Dinas Pertanian	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD
					2021		2022		2023		2024		2025						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dapat dikendalikan	%	30%	30%	28.665.000,00	45%	50.000.000,00	45%	50.000.000,00	45%	75.000.000,00	45%	75.000.000,00	45%	278.665.000,00	Dinas Pertanian		
3 27 05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan bencana pertanian dapat ditanggulangi dan terkendalikan	%	30%	30%	9.136.000.000,00	30%	9.636.000.000,00	30%	9.636.000.000,00	30%	9.636.000.000,00	30%	9.636.000.000,00	30%	47.680.000.000,00	Dinas Pertanian		
3 27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemberian izin usaha pertanian dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur	%	N/A	N/A	0	30%	100.000.000,00	30%	100.000.000,00	30%	100.000.000,00	30%	100.000.000,00	30%	400.000.000,00	Dinas Pertanian		
3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan SDM penyuluh dan kelompok tani	%	15%	20%	100.000.120,00	40%	615.000.000,00	54%	307.500.000,00	60%	307.500.000,00	65%	307.500.000,00	65%	1.637.500.120,00	Dinas Pertanian		
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		3.400.000.000,00		3.900.000.000,00					
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan peningkatan sarana distribusi perdagangan	%	N/A	N/A	0	30%	2.500.000.000,00	30%	2.500.000.000,00	30%	3.000.000.000,00	30%	3.500.000.000,00	30%	11.500.000.000,00	Disperindagkop dan UKM		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													OPD	
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3 30 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	N/A	N/A	0	30%	200.000.000, 00	30%	200.000.000, 00	30%	200.000.000, 00	30%	200.000.000,0 0	30%	800.000.000,0 0	Disperindagkop dan UKM		
3 30 05	Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan jumlah ekspor	%	N/A	N/A	0	25%	100.000.000, 00	25%	100.000.000, 00	25%	100.000.000, 00	25%	100.000.000,0 0	25%	400.000.000,0 0	Disperindagkop dan UKM		
3 30 06	Program Standarisasi Dan perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkap annya) yang sesuai standar	%	N/A	N/A	0	25%	100.000.000, 00	25%	100.000.000, 00	25%	100.000.000, 00	25%	100.000.000,0 0	25%	400.000.000,0 0	Disperindagkop dan UKM		
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							80.820.000, 00		4.750.000.0 00,00		4.972.500.0 00,00		5.206.125.0 00,00		5.451.431.25 0,00		20.460.876.2 50,00	
3 31 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan zona Potensi Industri Daerah	%	N/A	N/A	80.820.000,0 0	25%	300.000.000, 00	25%	300.000.000, 00	25%	300.000.000, 00	25%	300.000.000,0 0	25%	1.280.820.000, 00	Disperindagkop dan UKM		
3 31 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuha n kunjungan wisatawan	%	N/A	N/A	0	2%	4.450.000.00 0,00	3%	4.672.500.00 0,00	3%	4.906.125.00 0,00	4%	5.151.431.250, 00	4%	19.180.056.25 0,00	Disperindagkop dan UKM		
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGTRANSMIGRASI							-		1.250.000.0 00,00		450.000.00 0,00		450.000.00 0,00		450.000.000, 00		2.600.000.00 0,00	
3 32 02	Program Perencanaan Kawasan transmigrasi	Penetapan Rencana Kawasan Transmigra si	Kawasa n	1	1	0	1	800.000.000, 00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	800.000.000,0 0	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3 32 03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pembangun an Kawasan Transmigrasi	Kawasa n	1	1	0	1	250.000.000, 00	1	250.000.000, 00	1	250.000.000, 00	1	250.000.000,0 0	1	1.000.000.000, 00	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	
3 32 04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkemban gan Kawasan Transmigrasi Patlean	Nilai	42,3	42,3	0	42,8	200.000.000, 00	43,2	200.000.000, 00	43,9	200.000.000, 00	44,4	200.000.000,0 0	44,4	800.000.000,0 0	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
						46.184.970. 980,00		52.129.742. 150,00		53.921.695. 282,25		56.259.695. 211,48		55.230.648.1 39,66		263.726.751. 763,39		
4 01		SEKRETARIAT DAERAH																
						34.055.250. 520,00		38.484.342. 150,00		39.813.795. 282,25		41.485.795. 211,48		40.750.248.1 39,66		194.589.431. 303,39		
4 01 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah produk Hukum	Produk Hukum	N/A	90	800.000.000, 00	100	880.000.000, 00	120	968.000.000, 00	140	1.064.800.00 0,00	150	1.171.280.000, 00	600	4.884.080.000, 00	Sekretariat Daerah	
		Jumlah Kasus yang terselesaika n	Kasus	N/A	50%	500.000.000, 00	60	500.000.000, 00	70	500.000.000, 00	80	500.000.000, 00	90	500.000.000,0 0	90	2.500.000.000, 00	Sekretariat Daerah	
		Jumlah Kecamatan Tersosialisas i Informasi Hukum	Kec	N/A	3	50.000.000,0 0	3	50.000.000,0 0	3	50.000.000,0 0	1	25.000.000,0 0	N/A	0	10	175.000.000,0 0	Sekretariat Daerah	
		Persentase Kebijakan Kesejahtera an Rakyat	%	NA	100	7.648.810.00 0,00	100	7.763.542.15 0,00	100	7.879.995.28 2,25	100	7.998.195.21 1,48	100	8.118.168.139, 66	100	39.408.710.78 3,39	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase pelayanan pemerintahan umum	%	100%	100%	796.999.600,00	100%	1.100.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.350.000.000,00	100%	5.646.999.600,00	Sekretariat Daerah
4 01 03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian	%	NA	NA	0	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pembentukan BUMD	%	NA	NA	0	100%	750.000.000,00	100%	850.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	3.100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4 02	SEKRETARIAT DPRD					12.129.720.460,00		13.645.400.000,00		14.107.900.000,00		14.773.900.000,00		14.480.400.000,00		69.137.320.460,00	
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100%	100%	12.129.720.460,00	100%	13.645.400.000,00	100%	14.107.900.000,00	100%	14.773.900.000,00	100%	14.480.400.000,00	100%	69.137.320.460,00	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					351.034.750.982,00		387.188.716.818,00		424.257.633.499,00		465.686.506.349,00		511.183.036.985,00		2.139.350.644.633,00	
5 01	PERENCANAAN					7.525.692.050,00		7.844.200.000,00		8.176.455.000,00		8.522.900.000,00		8.884.260.000,00		40.953.507.050,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	%	100%	100%	5.758.845.50 0,00	100%	5.989.100.00 0,00	100%	6.228.600.00 0,00	100%	6.477.700.00 0,00	100%	6.736.800.000, 00	100%	31.191.045.50 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah diatas 75%	%	90%	90,02%	1.766.846.55 0,00	90,05%	1.855.100.00 0,00	95,08%	1.947.855.00 0,00	95,11%	2.045.200.00 0,00	95,14%	2.147.460.000, 00	95,14%	9.762.461.550, 00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 02	KEUANGAN					339.367.61 3.102,00		373.247.91 6.818,00		410.534.57 8.499,00		451.542.00 6.349,00		496.652.176. 985,00		2.071.344.29 1.753,00		
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian kebijakan umum anggaran dengan target kinerja OPD	%	100%	100%	463.300.000, 00	100%	463.300.000, 00	100%	463.300.000, 00	100%	463.300.000, 00	100%	463.300.000,0 0	100%	2.316.500.000, 00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik daerah	Persentase aset yang telah diproses sertifikasi /terdata	%	90%	92%	1.796.924.38 0,00	94%	1.976.616.81 8,00	96%	2.174.278.49 9,00	98%	2.391.706.34 9,00	100%	2.630.876.985, 00	100%	10.970.403.03 1,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase penerapan sistem online terhadap Pajak dan retribusi daerah	%	55%	60%	1.999.963.70 0,00	65%	2.190.000.00 0,00	70%	2.419.000.00 0,00	75%	2.661.000.00 0,00	80%	2.928.000.000, 00	80%	12.197.963.70 0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	167.553.712. 511,00	WTP	184.309.000. 000,00	WTP	202.739.000. 000,00	WTP	223.013.000. 000,00	WTP	245.315.000.0 00,00	WTP	1.022.929.712. 511,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran dan Ketepatan penyusunan Dokumen Pertanggun g jawaban Keuangan	%	100%	100%	167.553.712. 511,00	100%	184.309.000. 000,00	100%	202.739.000. 000,00	100%	223.013.000. 000,00	100%	245.315.000.0 00,00	100%	1.022.929.712. 511,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 03	KEPEGAWAIAN					3.141.445.8 30,00		4.496.600.0 00,00		4.496.600.0 00,00		4.496.600.0 00,00		4.496.600.00 0,00		21.127.845.8 30,00	
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai yang berkinerja baik	%	NA	40%	3.141.445.83 0,00	50%	4.496.600.00 0,00	60%	4.496.600.00 0,00	70%	4.496.600.00 0,00	75%	4.496.600.000, 00	75%	21.127.845.83 0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai	%	NA	45%	0	50%	0	60%	0	75%	0	80%	0	80%	0	Badan Kepegawaian Dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD	
					2021		2022		2023		2024		2025						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		yang disiplin																Pengembangan Sumber Daya Aparatur	
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
						1.000.000.000,00	1.400.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		4.800.000.000,00				
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	1.000.000.000,00	100%	1.400.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	4.800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	06	PENGELOLAAN PERBATASAN																	
							200.000.000,00		250.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		1.125.000.000,00				
5	06	02	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase penegasan batas wilayah Desa dan Kecamatan	%	0%	0%	0	20%	200.000.000,00	45%	250.000.000,00	75%	325.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	1.125.000.000,00	Sekretariat Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
						1.365.261.000,00	2.062.500.000,00		2.268.500.000,00		2.495.200.000,00		2.745.100.000,00		10.936.561.000,00				
6	01	INSPEKTORAT DAERAH																	
						1.365.261.000,00	2.062.500.000,00		2.268.500.000,00		2.495.200.000,00		2.745.100.000,00		10.936.561.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendas i pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanj uti Perangkat Daerah	%	65,79%	70%	985.955.000, 00	75%	1.300.000.00 0,00	80%	1.430.000.00 0,00	90%	1.573.000.00 0,00	100%	1.730.000.000, 00	100%	7.018.955.000, 00	Inspektorat
		Persentase rekomendas i pengawasan tujuan tertentu yang di tindakanjuti Perangkat Daerah	%	100%	100%	167.516.000, 00	100%	184.200.000, 00	100%	202.500.000, 00	100%	222.700.000, 00	100%	245.000.000,0 0	100%	1.021.916.000, 00	Inspektorat
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perumusan dan fasilitasi pengawasan	%	100%	100%	33.225.000,0 0	100%	86.500.000,0 0	100%	95.000.000,0 0	100%	104.500.000, 00	100%	115.000.000,0 0	100%	434.225.000,0 0	Inspektorat
		Persentase PD yang dilakukan pendampin gan	%	100%	100%	178.565.000	100%	491.800.000, 00	100%	541.000.000, 00	100%	595.000.000, 00	100%	655.100.000,0 0	100%	2.461.465.000, 00	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.764.680.1 00,00		2.348.000.0 00,00		2.353.000.0 00,00		2.478.000.0 00,00		2.483.000.00 0,00		11.426.680.1 00,00
7 01	KECAMATAN						1.764.680.1 00,00		2.348.000.0 00,00		2.353.000.0 00,00		2.478.000.0 00,00		2.483.000.00 0,00		11.426.680.1 00,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100%	100%	62.002.000,0 0	100%	65.000.000,0 0	100%	65.000.000,0 0	100%	65.000.000,0 0	100%	65.000.000,00	100%	322.002.000,0 0	Kecamatan Kota Maba
			%	100%	NA	0	100%	55.000.000,0 0	100%	55.000.000,0 0	100%	55.000.000,0 0	100%	55.000.000,00	100%	220.000.000,0 0	Kecamatan Maba
			%	100%	100%	98.923.000,0 0	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,0 0	100%	498.923.000,0 0	Kecamatan Maba Selatan
			%	100%	100%	89.945.000,0 0	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,0 0	100%	489.945.000,0 0	Kecamatan Maba Tengah
			%	100%	100%	74.940.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	374.940.000,0 0	Kecamatan Maba Utara
			%	100%	100%	99.987.000,0 0	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,0 0	100%	499.987.000,0 0	Kecamatan Wasile
			%	100%	100%	74.975.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	374.975.000,0 0	Kecamatan Wasile Selatan
			%	100%	100%	74.710.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	374.710.000,0 0	Kecamatan Wasile Tengah
			%	100%	100%	106.712.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,0 0	100%	506.712.000,0 0	Kecamatan Wasile Timur
			%	100%	NA	0	100%	55.000.000,0 0	100%	60.000.000,0 0	100%	65.000.000,0 0	100%	70.000.000,00	100%	250.000.000,0 0	Kecamatan Wasile Utara
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdaya an Masyarakat	%	30%	34%	51.170.000,0 0	39%	55.000.000,0 0	43%	55.000.000,0 0	48%	55.000.000,0 0	52%	55.000.000,00	52%	271.170.000,0 0	Kecamatan Kota Maba
			%	23%	NA	0	27%	26.000.000,0 0	32%	26.000.000,0 0	36%	26.000.000,0 0	41%	26.000.000,00	41%	104.000.000,0 0	Kecamatan Maba
			%	21%	NA	0	25%	25.000.000,0 0	30%	25.000.000,0 0	34%	25.000.000,0 0	39%	25.000.000,00	39%	100.000.000,0 0	Kecamatan Maba Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD	
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
70105	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselenggar anya urusan pemerintah an umum	%	23%	27%	24.996.000,0 0	32%	25.000.000,0 0	36%	25.000.000,0 0	41%	25.000.000,0 0	45%	25.000.000,00	45%	124.996.000,0 0	Kecamatan Maba Tengah
			%	24%	28%	47.230.000,0 0	33%	55.000.000,0 0	37%	55.000.000,0 0	42%	55.000.000,0 0	46%	55.000.000,00	46%	267.230.000,0 0	Kecamatan Maba Utara
			%	20%	N/A	0	24%	27.000.000,0 0	29%	27.000.000,0 0	33%	27.000.000,0 0	38%	27.000.000,00	38%	108.000.000,0 0	Kecamatan Wasile
			%	21%	25%	28.135.000,0 0	30%	30.000.000,0 0	34%	30.000.000,0 0	39%	30.000.000,0 0	43%	30.000.000,00	43%	148.135.000,0 0	Kecamatan Wasile Selatan
			%	21,50%	26%	24.070.000,0 0	30%	25.000.000,0 0	35%	25.000.000,0 0	39%	25.000.000,0 0	44%	25.000.000,00	44%	124.070.000,0 0	Kecamatan Wasile Tengah
			%	20,80%	25%	24.995.000,0 0	30%	30.000.000,0 0	34%	30.000.000,0 0	38%	30.000.000,0 0	43%	30.000.000,00	43%	144.995.000,0 0	Kecamatan Wasile Timur
			%	32%	36%	347.190.000, 00	41%	350.000.000, 00	45%	350.000.000, 00	50%	350.000.000, 00	54%	350.000.000,0 0	54%	1.747.190.000, 00	Kecamatan Wasile Utara
70105	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase terselenggar anya urusan pemerintah an umum	%	100%	N/A	0	100%	35.000.000,0 0	100%	35.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	220.000.000,0 0	Kecamatan Kota Maba
			%	100%	N/A	0	100%	35.000.000,0 0	100%	35.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	220.000.000,0 0	Kecamatan Maba
			%	100%	100%	24.207.500,0 0	100%	35.000.000,0 0	100%	35.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	244.207.500,0 0	Kecamatan Maba Selatan
			%	100%	100%	74.982.600,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	374.982.600,0 0	Kecamatan Maba Tengah
			%	100%	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	375.000.000,0 0	Kecamatan Maba Utara
			%	100%	100%	74.990.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	374.990.000,0 0	Kecamatan Wasile

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD		
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				100%	100%	74.995.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	374.995.000,0 0	Kecamatan Wasile Selatan		
			%	100%	100%	74.990.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	374.990.000,0 0	Kecamatan Wasile Tengah		
			%	100%	100%	74.900.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	374.900.000,0 0	Kecamatan Wasile Timur		
			%	100%	N/A	0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,0 0	100%	75.000.000,00	100%	300.000.000,0 0	Kecamatan Wasile Utara		
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaa n penganggar an dan pelaporan tepat waktu	%	18%	21%	41.930.000,0 0	24,80%	45.000.000,0 0	30%	45.000.000,0 0	37%	45.000.000,0 0	40%	45.000.000,00	39,90%	221.930.000,0 0	Kecamatan Kota Maba
%	18,50%	22%	18.705.000,0 0		21,90%	25.000.000,0 0	25%	25.000.000,0 0	29%	25.000.000,0 0	32%	25.000.000,00	32,10%	118.705.000,0 0	Kecamatan Maba				
%	20,00%	N/A	0		23,40%	25.000.000,0 0	26,80%	25.000.000,0 0	30,20%	25.000.000,0 0	33,60%	25.000.000,00	33,60%	100.000.000,0 0	Kecamatan Maba Selatan				
%	17%	N/A	0		20,40%	25.000.000,0 0	23,80%	25.000.000,0 0	27,20%	25.000.000,0 0	30,60%	25.000.000,00	30,60%	100.000.000,0 0	Kecamatan Maba Tengah				
%	18,00%	N/A	0		21,40%	25.000.000,0 0	24,80%	25.000.000,0 0	28,20%	25.000.000,0 0	31,60%	25.000.000,00	31,60%	100.000.000,0 0	Kecamatan Maba Utara				
%	17,50%	N/A	0		20,90%	25.000.000,0 0	24,30%	25.000.000,0 0	27,70%	25.000.000,0 0	31,10%	25.000.000,00	31,10%	100.000.000,0 0	Kecamatan Wasile				
%	18,50%	N/A	0		21,90%	25.000.000,0 0	25,30%	25.000.000,0 0	28,70%	25.000.000,0 0	32,10%	25.000.000,00	32,10%	100.000.000,0 0	Kecamatan Wasile Selatan				
%	19,70%	N/A	0		23,10%	25.000.000,0 0	26,50%	25.000.000,0 0	29,90%	25.000.000,0 0	33,30%	25.000.000,00	33,30%	100.000.000,0 0	Kecamatan Wasile Tengah				
%	20,30%	N/A	0		23,70%	25.000.000,0 0	27,10%	25.000.000,0 0	30,50%	25.000.000,0 0	33,90%	25.000.000,00	33,90%	100.000.000,0 0	Kecamatan Wasile Timur				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD	
					2021		2022		2023		2024		2025						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			%	19,50%	N/A	0	22,90%	25.000.000,0 0	26,30%	25.000.000,0 0	29,70%	25.000.000,0 0	33,10%	25.000.000,00	33,10%	100.000.000,0 0	Kecamatan Wasile Utara		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					496.000.00 0,00		1.770.000.0 00,00		1.900.000.0 00,00		1.890.000.0 00,00		1.725.000.00 0,00		7.781.000.00 0,00			
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				496.000.00 0,00		1.770.000.0 00,00		1.900.000.0 00,00		1.890.000.0 00,00		1.725.000.00 0,00		7.781.000.00 0,00			
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan dan penguatan Idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100%	N/A	0	100%	250.000.000, 00	100%	270.000.000, 00	100%	310.000.000, 00	100%	355.000.000,0 0	100%	1.185.000.000, 00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam berdemokra si	%	N/A	80%	323.000.000, 00	80%	370.000.000, 00	80%	380.000.000, 00	80%	400.000.000, 00	80%	420.000.000,0 0	80%	1.893.000.000, 00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdaya an dan pengawasan organisasi kemasyarak atan	%	N/A	N/A	0	30%	350.000.000, 00	61%	350.000.000, 00	100%	350.000.000, 00	N/A	0	100%	1.050.000.000, 00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan Dan Pengemban gan Ketahanan	%	100%	100%	48.000.000,0 0	100%	225.000.000, 00	100%	250.000.000, 00	100%	100.000.000, 00	100%	110.000.000,0 0	100%	733.000.000,0 0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD		
								2021		2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya																
				Persentase peningkatan fasilitas dan kualitas kewaspadaan diri terhadap penanganan konflik sosial	%	100%	100%	125.000.000,00	100%	575.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	730.000.000,00	100%	840.000.000,00	100%	2.920.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunang	%	100%	100%	339.181.647.390,00	100%	390.715.167.792,80	100%	406.902.421.001,96	100%	423.249.852.941,94	100%	439.703.721.627,31	100%	1.999.752.810.754,00	Seluruh OPD	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

RPJMD

**2021
2025**

BAB 8

**KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur periode 2021-2025 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini adalah indikator tujuan RPJMD yang menggambarkan dampak final/ akhir (final impact) dari pembangunan sebagai agregasi dari hasil (outcome) multi-urusan pemerintahan daerah. Gambaran lengkap ukuran keberhasilan pembangunan Kabupaten Halmahera Timur periode 2021 – 2025, dapat dilihat pada tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Halmahera Timur dan tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Halmahera Timur

Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Indikator					Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,57	5,60%	5,85%	6,10%	6,35%	6,60%	6,60%
Indeks Gini	0,30	0,26	0,22	0,18	0,14	0,10	0,1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,48	5,15	5,82	6,49	7,16	7,83	7,83
Persentase Penduduk Miskin	16,32%	16,01%	15,70%	15,39%	15,08%	14,77%	14,77%
Indeks Pembangunan Manusia	66,75	66,95	67,15	67,35	67,85	68,05	68,05
Indeks Harmoni Sosial	N/A	71,69	74,39	77,09	79,79	82,49	82,49
Indeks Infrastruktur	80,32	82,6	84,2	86,2	88,7	90,3	90,3
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	80,02	80,61	80,81	81,02	81,26	82	82
Indeks Reformasi Birokrasi	69,89	70,2	70,51	70,82	71,13	71,44	71,75
Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban	N/A	0,826	0,873	0,849	0,896	0,92	0,92

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Indikator					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	RPJMD
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,57	5,60%	5,85%	6,10%	6,35%	6,60%	6,60%
2	Indeks Gini	0,30	0,26	0,22	0,18	0,14	0,10	0,1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,48	5,15	5,82	6,49	7,16	7,83	7,83
4	Persentase Penduduk Miskin	16,32%	16,01%	15,70%	15,39%	15,08%	14,77%	14,77%
5	Indeks Pembangunan Manusia	66,75	66,95	67,15	67,35	67,85	68,05	68,05
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	80,02	80,61	80,81	81,02	81,26	82	82
7	Indeks Reformasi Birokrasi	69,89	70,2	70,51	70,82	71,13	71,44	71,75
8	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban	N/A	0,826	0,873	0,849	0,896	0,92	0,92
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Harmoni Sosial	N/A	71,69	74,39	77,09	79,79	82,49	82,49
2	Indeks Infrastruktur	80,32	82,6	84,2	86,2	88,7	90,3	90,3
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Pendidikan	N/A	68,85	69,06	69,28	69,49	69,72	69,95
2	Persentase Budaya yang dilestarikan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%
3	Indeks Kesehatan	N/A	70,56	71,74	72,92	74,1	75,28	75,28
4	Indeks pembangunan olahraga	N/A	0,35	0,36	0,37	0,38	0,40	0,40
5	Indeks Peran dan poduktivitas Pemuda	N/A	70,5	72	73,5	75	76,5	76,5
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,62	81,16	81,7	82,24	82,78	83,32	83,32
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100	100	100	100	100	100	100
9	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,27	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,21
10	Cakupan Layanan Telekomunikasi	92	100	100	100	100	100	100
11	Indkes Konektivitas Wilayah	0,75	0,8	0,92	0,94	0,96	0,98	0,98
12	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	80,32	82,6	84,2	86,2	88,7	90,3	90,3
14	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	13,30%	13,8	14,3	14,8	15,3	15,8	15,80%
15	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	2,50%
16	Pertumbuhan omzet koperasi	N/A	39,05%	0,50%	0,25%	0,25%	0,49%	50,00%
17	Pertumbuhan omzet usaha mikro kecil	N/A	39,05%	0,50%	0,25%	0,25%	0,49%	50,00%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Awal	Target Indikator					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	RPJMD
18	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	11,65%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	14,15%
19	Persentase Pertumbuhan Nilai ekspor	N/A	25%	30%	35%	40%	45%	45%
20	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan	2,00%	1,50%	1,10%	1,20%	1,3 %	1,4%	5,80%
21	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	0,29%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	10,00%
22	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	73	75	77	79	81	81
23	Persentase pertumbuhan investasi	55,00%	9,09%	9,09%	9,02%	8,90%	9,32%	100,00%
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,06%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	74,24%
25	Tingkat kesempatan kerja	96,14%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	97,36%
26	Jumlah penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi	66%	70%	75%	80%	90%	100%	100%
27	Meningkatnya jumlah SKPD dengan laporan keuangan WTP	25%	35%	45%	55%	70%	85%	85%
28	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Persentase rekomendasi penelitian dan inovasi daerah	35%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
30	Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	41,25%	46,25%	78,75%	92,50%	97,50%	100%	100%
31	Persentase SDM yang tangguh dan berdaya saing	NA	40%	50%	60%	70%	75%	75%
33	Persentase kinerja pelayanan publik	NA	21,84%	29,72%	33,11%	36,28%	38,44%	38,44%
34	Persentase Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Terciptanya partisipasi masyarakat, media cetak dan elektronik dalam pengawasan pembangunan daerah	50%	50%	50,00%	75%	90%	100%	100%
37	Keterlibatan lembaga adat dalam proses pembangunan di Halim	66,67%	69,00%	71,33%	73,67%	76,00%	78,33%	78,33%
38	Cakupan peran serta pemuda dalam pembangunan	60%	33%	35%	38%	40%	43%	43%
39	Persentase ketentraman dan ketertiban masyarakat	N/A	57%	68%	80%	97%	100%	100%
40	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	N/A	93%	93%	93%	93%	93%	93%
41	Persentase penguatan nilai-nilai sosial masyarakat	N/A	25%	75%	75%	75%	75%	75%
42	Persentase kesiapsiagaan terhadap bencana	37%	45%	53%	58%	73%	73%	73%



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

RENCANA
PEMBANGUAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

RPJMD

2021
2025

BAB 9
PENUTUP

BAB 9

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Halmahera Timur yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. RPJMD telah mengacu pada pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Halmahera Timur pada Tahun 2020, perlu disusun RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021 akan didasarkan pada RPJPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019- 2024, RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan tahun 2025. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Halmahera Timur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 kepada masyarakat;
- b. Bupati Halmahera Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025.

9.3. PEDOMAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan :

- a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
- c. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

BUPATI HALMAHERA TIMUR

TTD

Drs. Hi. UBAID YAKUB, MPA.